



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



PENGUKURAN
PRODUKTIVITAS
DAN DAYA SAING

TENAGA KERJA INDONESIA

TAHUN
2021

DIREKTORAT BINA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



PENGUKURAN
PRODUKTIVITAS
DAN DAYA SAING

TENAGA KERJA TAHUN INDONESIA 2021

DIREKTORAT BINA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.

KATA PENGANTAR

Produktivitas merupakan kunci kemajuan dan daya saing suatu negara. Jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan modal, produktivitas tenaga kerja memiliki peran yang paling besar dalam menghasilkan *output* yang berkualitas. Proses untuk menghasilkan *output* baik dalam bentuk barang ataupun jasa yang dilakukan dengan produktif, yaitu dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas, kualitas, dan ramah lingkungan, akan meningkatkan keuntungan perusahaan/organisasi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini memuat capaian produktivitas yang dicapai Indonesia dari sisi nasional, regional, dan sektoral. Buku ini juga menyajikan informasi tentang bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain, bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi dan persaingan digital sebagai dampak dari era revolusi industri 4.0, serta peluang dan tantangan perlu ditindaklanjuti.

Selain revolusi industri 4.0 dan bonus demografi, tenaga kerja Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, kerjasama yang baik dari seluruh unsur, baik pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan.

Kami menyampaikan terima kasih untuk semua pihak yang membantu tersusunnya buku ini. Semoga upaya yang telah kita bangun bersama membawa berkah manfaat untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang produktif, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat.

Jakarta, Desember 2021

Direktur

Bina Peningkatan Produktivitas



Dr. Ghazmahadi, S.T., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I URGENSI PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING TENAGA KERJA ..	1
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja sebagai Tujuan Pembangunan	1
Pentingnya Mengukur Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	2
Tantangan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Era Revolusi Industri 4.0	3
BAB II PRODUKTIVITAS INDONESIA DI TATARAN GLOBAL DAN KINERJA EKONOMI MENUJU PEMULIHAN	7
Produktivitas Indonesia di ASEAN dan Negara-Negara APO	8
Kinerja Ekonomi Menuju Pemulihan	12
Peluang dan Tantangan	15
BAB III KONDISI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS	25
Bonus Demografi Indonesia	26
Keadaan Angkatan Kerja Indonesia	29
Kualitas Tenaga Kerja di Indonesia	33
Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia	35
Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia pada sektor Publik	40
BAB IV PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA REGIONAL DAN SEKTORAL ..	45
Produktivitas Tenaga Kerja Regional	45
Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi	45
Ketimpangan Produktivitas Tenaga Kerja Antarprovinsi	51
Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Upah Tenaga Kerja	53
Produktivitas Jam Kerja Provinsi	54
Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja	56
Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	58
Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral	64
Capaian Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral	65

Produktivitas Jam Kerja Sektoral	71
Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Sektoral	73
BAB V DAYA SAING TENAGA KERJA DAN KAITANNYA DENGAN PRODUKTIVITAS	81
Daya Saing Tenaga Kerja	81
Daya Saing dan Produktivitas	87
BAB VI KESIMPULAN	97
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	107
CATATAN TEKNIS	265

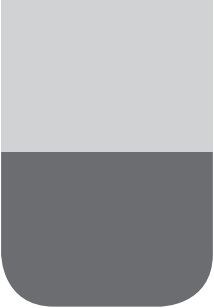
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Produktivitas Tenaga Kerja di Beberapa Negara Asia, 2019-2020 (Ribu USD per tenaga kerja per tahun)	8
Gambar 2.2	Produktivitas Jam Kerja di Beberapa Negara di Asia, 2020 (USD per jam per tenaga kerja)	9
Gambar 2.3	Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia 2013-2020 (persen)	10
Gambar 2.4	Pertumbuhan Produktivitas Jam Kerja Indonesia 2013-2020 (persen)	11
Gambar 2.5	Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja dan Produktivitas Jam Kerja di Beberapa Negara Asia Periode 2019-2020 (persen)	11
Gambar 2.6	Pertumbuhan Total Factor Productivity (TFP) di Beberapa Negara Asia 2018-2019 (persen)	12
Gambar 2.7	Skor Kinerja Indonesia pada prioritas transformasi ekonomi, pada tahun 2020 (skala 0–100)	14
Gambar 2.8	Persentase Tenaga Kerja dengan Pendidikan SMA ke Atas, 2013-2020	15
Gambar 2.9	Perkembangan Jumlah Lulusan SMK dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2014-2020	16
Gambar 2.10	UMP 2020 Provinsi-provinsi di Indonesia (Juta Rupiah)	17
Gambar 2.11	Realisasi Penanaman Modal (Triliun Rupiah), 2015-2020	18
Gambar 2.12	Jumlah PMDN dan PMA Tahun 2019-2020 di Indonesia (Rp Triliun)	19
Gambar 2.13	Jumlah Investasi (Jawa dan Luar Jawa) Tahun 2019-2020 di Indonesia (Rp Triliun)	19
Gambar 2.14	Jumlah BLK menurut Provinsi, 2020	22
Gambar 3.1	Piramida Penduduk Indonesia (dalam Ribu), 2020	26
Gambar 3.2	Piramida Penduduk Indonesia, 1990 -2020	27
Gambar 3.3	Dependency Ratio Indonesia, 1990-2020	28
Gambar 3.4	Jumlah Angkatan Kerja , Tenaga Kerja dan Pengangguran (Orang), 2018-2020	30

Gambar 3.5	Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif (15-64 tahun) dan di Luar Usia Produktif (lebih dari 65 tahun) (juta orang), 2018-2020	31
Gambar 3.6	Angkatan kerja di Indonesia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), 2019 dan 2020	32
Gambar 3.7	Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (orang), 2018-2020	32
Gambar 3.8	Tingkat Kesempatan Kerja (Persen), 2018-2020	33
Gambar 3.9	Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen), 2019-2020	34
Gambar 3.10	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/ Informal dan Jenis Kelamin, 2019-2020	35
Gambar 3.11	Produktivitas Tenaga Kerja (juta rupiah per tenaga kerja per tahun) dan Persentase Tenaga Kerja dengan Pendidikan SMA ke Atas, 2018-2020	36
Gambar 3.12	Produktivitas Jam Kerja (rupiah per jam), 2018-2020	37
Gambar 3.13	Rata-rata Jam Kerja per Minggu, 2018-2020	38
Gambar 3.14	Persentase Tenaga Kerja Menurut Kategori Kerja, 2018 – 2020	38
Gambar 3.15	Produktivitas Tenaga Kerja dan Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja (Juta Rupiah Per Tenaga Kerja Per Tahun) 2018-2020	39
Gambar 3.16	Produktivitas Tenaga Kerja, Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Sektor Publik (Juta Rupiah Per Tenaga Kerja Per tahun) dan Produktivitas Jam Kerja (Rupiah Per Jam), 2018-2020	41
Gambar 4.1	Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Provinsi (juta rupiah per tenaga kerja per tahun), 2018-2020	46
Gambar 4.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (triliun rupiah), 2018-2020	47
Gambar 4.3	Kontribusi PDRB Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha di Provinsi DKI Jakarta (persen), 2020	48
Gambar 4.4	Kontribusi PDRB Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Timur (persen), 2020	49
Gambar 4.5	Kontribusi PDRB Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2020	49
Gambar 4.6	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Provinsi (juta orang), 2020	51
Gambar 4.7	Selisih Antara Provinsi dengan Capaian Produktivitas Tenaga Kerja Tertinggi dengan Terendah (juta rupiah per tenaga kerja per tahun), 2011-2020	52
Gambar 4.8	Peta Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Provinsi (juta rupiah per tenaga kerja per tahun), 2020	52

Gambar 4.9	Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Upah Tenaga Kerja, 2019 dan 2020	54
Gambar 4.10	Produktivitas Jam Kerja Menurut Provinsi (rupiah per jam per tenaga kerja), 2018-2020	55
Gambar 4.11	Peta Produktivitas Jam Kerja Menurut Provinsi (rupiah per jam per tenaga kerja), 2020	56
Gambar 4.12	Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Provinsi (juta rupiah per tenaga kerja), 2020	57
Gambar 4.13	Peta Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Provinsi (juta rupiah per tenaga kerja per tahun), 2020	58
Gambar 4.14	Peta Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota (juta rupiah per tenaga kerja per tahun), 2020	59
Gambar 4.15	Peta Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2020	61
Gambar 4.16	Peta Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota (rupiah per jam per tenaga kerja, 2020	62
Gambar 4.17	Tiga Kabupaten/Kota dengan Efisiensi Tertinggi (juta rupiah per tenaga kerja per tahun), 2020	63
Gambar 4.18	Rata-rata Jam Kerja Selama Seminggu di Kabupaten Teluk Bintuni, Kutai Barat, dan Bengkalis (jam per minggu), 2019-2020	64
Gambar 4.19	Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha (juta rupiah per tenaga kerja per tahun), 2018-2020	66
Gambar 4.20	Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha (persen), 2019-2020	68
Gambar 4.21	Pertumbuhan PDB dan Tenaga Kerja Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha (persen), 2020	69
Gambar 4.22	Kontribusi PDB dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), 2020	70
Gambar 4.23	Produktivitas Jam Kerja dan Pertumbuhannya Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha, 2019-2020	72
Gambar 4.24	Rata-rata Jam Kerja Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha (jam per minggu), 2019-2020	74
Gambar 4.25	Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha (juta rupiah per tenaga kerja per tahun), 2018-2020	75

Gambar 4.26	Pertumbuhan Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha (persen), 2020	76
Gambar 4.27	Produktivitas Tenaga Kerja dan Ekuivalen Tenaga Kerja Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha (juta rupiah per tenaga kerja per tahun), 2020	77
Gambar 5.1.	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2018 - Agustus 2020	82
Gambar 5.2.	Indeks Daya Saing Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2020	83
Gambar 5.3.	Perbandingan Capaian Indeks Daya Saing Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Papua menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020	86
Gambar 5.4.	Persentase Tenaga Kerja Provinsi Papua menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2020	87
Gambar 5.5.	Scatter Plot Indeks Daya Saing Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020	89
Gambar 5.6.	Analisis Kuadran Indeks Daya Saing Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020	90
Gambar 5.7.	Persentase Pekerja Formal Menurut Provinsi Tahun 2019 dan 2020	92



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Capaian Indeks Daya Saing Tenaga Kerja dan Dimensi Penyusunnya menurut Provinsi Tahun 2020	84
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	109
Lampiran 2.	Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	110
Lampiran 3.	Produktivitas Jam Kerja Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	111
Lampiran 4.	Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	112
Lampiran 5.	Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	113
Lampiran 6.	Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	114
Lampiran 7.	Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	115
Lampiran 8.	Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	116
Lampiran 9.	Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Konstruksi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	117
Lampiran 10.	Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	118
Lampiran 11.	Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengangkutan dan Pergudangan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	119

Lampiran 12. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	120
Lampiran 13. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	121
Lampiran 14. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	122
Lampiran 15. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Real Estat Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	123
Lampiran 16. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	124
Lampiran 17. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	125
Lampiran 18. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pendidikan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	126
Lampiran 19. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	127
Lampiran 20. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Jasa Lainnya Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	128
Lampiran 21. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	129
Lampiran 22. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	130

Lampiran 23. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	131
Lampiran 24. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	132
Lampiran 25. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	133
Lampiran 26. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Konstruksi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	134
Lampiran 27. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	135
Lampiran 28. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengangkutan dan Pergudangan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	136
Lampiran 29. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	137
Lampiran 30. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	138
Lampiran 31. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	139
Lampiran 32. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Real Estat Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	140
Lampiran 33. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	141

Lampiran 34. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	142
Lampiran 35. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pendidikan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	143
Lampiran 36. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	144
Lampiran 37. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Jasa Lainnya Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	145
Lampiran 38. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	146
Lampiran 39. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	147
Lampiran 40. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	148
Lampiran 41. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	149
Lampiran 42. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	150
Lampiran 43. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Konstruksi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	151
Lampiran 44. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	152

Lampiran 45. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengangkutan dan Pergudangan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	153
Lampiran 46. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	154
Lampiran 47. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	155
Lampiran 48. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	156
Lampiran 49. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Real Estat Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	157
Lampiran 50. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	158
Lampiran 51. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	159
Lampiran 52. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pendidikan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	160
Lampiran 53. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	161
Lampiran 54. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Jasa Lainnya Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	162
Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	163
Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)	197
Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)	231



I

URGENSI PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING TENAGA KERJA

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja sebagai Tujuan Pembangunan

Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari berbagai indikator global seperti *Human Capital Index* (HCI) yang disusun *World Bank*. HCI Indonesia tahun 2020 baru berada di angka 0,54 dan masih tertinggal dari Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Singapura yang sudah berada di atas angka 0,60 (*World Bank*, 2021). Peringkat *Human Development Index* (HDI) Indonesia juga masih rendah. Pada tahun 2020, HDI Indonesia berada di peringkat 107 dengan angka yang berada di bawah rata-rata dunia (*UNDP*, 2021).

Daya saing dan kualitas SDM menjadi isu penting dalam pembangunan Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, salah satu agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 adalah “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Dalam bidang ketenagakerjaan, SDM yang diharapkan adalah pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi tersebut mendukung terciptanya produktivitas tenaga kerja yang tinggi.

Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja juga merupakan bagian dari agenda pembangunan global sebagaimana tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 8 yaitu “meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua”. Produktivitas tenaga kerja dalam tujuan SDGs menjadi sebuah ukuran yang dapat menggambarkan pertumbuhan *output* dari aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja. Dengan tercantumnya isu produktivitas dan daya saing dalam agenda pembangunan baik global maupun nasional, capaian keduanya perlu diukur dan dievaluasi untuk perbaikan ke depan.

Pentingnya Mengukur Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja

Produktivitas memiliki arti yang beragam. Berdasarkan Kamus Baku Bahasa Indonesia, produktivitas berarti kemampuan untuk menghasilkan sesuatu; daya produksi; keproduktifan (KBBI, 2021). *Organisation for Economic Co-Operation and Development* atau OECD (2001) mendefinisikan produktivitas sebagai rasio *output* produk atau jasa untuk setiap *input* atau faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi. Produktivitas ditujukan untuk melihat efisiensi produksi, dengan membandingkan *output* dan *input* yang digunakan untuk memproduksi *output*. *Input* dapat berupa sumber material atau bahan baku, tenaga kerja, barang modal, serta sumber daya pikiran manusia. Dengan demikian, pengukuran produktivitas dapat dikembangkan untuk masing-masing *input* secara terpisah atau seluruh *input* secara bersama-sama. Pengukuran produktivitas masing-masing *input* sering disebut dengan produktivitas parsial yang biasanya diukur dengan menghitung rasio *output* terhadap *input* secara langsung.

Salah satu ukuran produktivitas parsial adalah produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dapat diukur dengan berbagai cara tergantung bagaimana mendefinisikan *output* dan tenaga kerja itu sendiri (APO, 2020). *Asian Productivity Organization* (APO) mengukur produktivitas tenaga kerja dengan membagi Produk Domestik Bruto (PDB) dengan tenaga kerja. Pengukuran ini juga digunakan oleh BPS dalam publikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Demikian juga halnya dalam buku ini.

Capaian produktivitas tenaga kerja dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dalam perencanaan, sehingga kebijakan ekonomi dapat disusun dengan lebih terarah. Misalnya, jika produktivitasnya rendah, maka pemerintah dan para pemangku kepentingan bisa membuat perencanaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Demikian halnya dengan pengukuran daya saing. Jika memiliki daya saing yang rendah dapat ditelusuri aspek apa yang menjadi penyebab utamanya. Selanjutnya, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, pemerintah akan terbantu dalam menyusun rencana strategis di semua level kebijakan.

Pengukuran produktivitas tenaga kerja dan daya saing juga diperlukan di tataran regional, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana daya saing tenaga kerja antarwilayah. Misalnya, dengan diketahuinya tingkat produktivitas tenaga kerja di tingkat kabupaten,

pemerintah kabupaten dapat mengevaluasi kebijakan terkait ketenagakerjaan. Demikian halnya dengan informasi tingkat daya saing, dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk memperbaiki aspek ketenagakerjaan yang perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, pengukuran produktivitas sektoral juga diperlukan untuk memilah usaha padat modal dan padat tenaga kerja serta mendeteksi sektor-sektor yang potensial untuk ditingkatkan kinerjanya. Misalnya bagi sektor yang memiliki produktivitas yang rendah maka diperlukan peningkatan kapabilitas dan kompetensi tenaga kerja agar dapat diperoleh *output* dengan optimal. Informasi ini akan berguna bagi K/L/D/I dan para pemangku kepentingan lain yang terkait dalam merumuskan kebijakan peningkatan produktivitas.

Publikasi ini memuat informasi mengenai perkembangan ekonomi dan tenaga kerja secara makro dan menyediakan beberapa indikator seperti produktivitas tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja per jam, Ekuivalen Tenaga Kerja Penuh (ETK), menurut lapangan usaha dan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, publikasi ini juga memberikan informasi terkait dengan daya saing yang dipilah menurut provinsi dan dimensinya. Informasi yang tersaji diharapkan dapat bermanfaat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah.

Tantangan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Era Revolusi Industri 4.0

Sejak beberapa tahun terakhir ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan ekonomi. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), dan pengembangan *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan.

Agar dapat beradaptasi dengan revolusi industri 4.0, diperlukan beberapa kondisi. SDM yang dibutuhkan haruslah memiliki literasi digital. Infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi juga harus tersedia secara cukup dan merata, sehingga dapat diakses dengan mudah.

Tenaga kerja di Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk dapat beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Berdasarkan data SAKERNAS Agustus 2020, tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah yaitu sekitar 37 persen. Jika dilihat lebih dalam ke tingkat regional, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah juga masih menjadi isu yang menghambat kesetaraan capaian pembangunan SDM.

Dalam lingkup bisnis, capaian pembangunan iptek dan inovasi juga belum optimal. Mayoritas usaha dan pekerja berada di aktivitas informal yang menggunakan teknologi sederhana dengan akses terhadap TIK yang masih minim. Hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan bahwa pekerja yang menggunakan TIK seperti komputer, HP, internet dalam bekerja masih minim. Pekerja formal yang menggunakan internet baru sekitar 77 persen, sedangkan pekerja informal hanya sekitar 57 persen (BPS, 2020). Hasil Sensus Ekonomi Lanjutan 2017 juga menunjukkan bahwa di tingkat usaha hal tersebut tidak jauh berbeda, UMK non pertanian yang menggunakan komputer berjumlah sekitar 6 persen dan yang menggunakan internet 10 persen (BPS, 2019).

Tantangan lainnya adalah ketimpangan akses infrastruktur digital. Belum semua wilayah didukung dengan infrastruktur TIK. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase jumlah desa yang terjangkau sinyal internet. Berdasarkan data Potensi Desa (PODES) 2018, masih ada sekitar 14 ribu desa atau sekitar 8 persen dari total seluruh desa yang belum terjangkau sinyal internet dan masih terdapat hampir 10 ribu desa atau 11 persen yang sinyal internetnya masih lemah (BPS, 2019).

Tantangan-tantangan tersebut diharapkan dapat teratasi sehingga Indonesia mampu memanfaatkan keuntungan dari revolusi industri 4.0 untuk peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja seperti yang diharapkan. Gambaran lebih detail tentang kualitas tenaga kerja dan daya saing tenaga kerja akan dibahas pada bab selanjutnya.



PRODUKTIVITAS INDONESIA DI TATARAN GLOBAL DAN KINERJA EKONOMI MENUJU PEMULIHAN

Produktivitas menunjukkan jumlah *output* per unit *input*. Dalam indikator ILOSTAT, *output* diukur sebagai produk domestik bruto (PDB) untuk ekonomi agregat yang dinyatakan dalam paritas daya beli (PPP) untuk memperhitungkan perbedaan harga di negara-negara. PDB mewakili nilai moneter dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama periode waktu tertentu. Tenaga kerja terdiri dari semua orang dalam usia kerja selama periode tertentu, seperti satu minggu atau satu hari, termasuk dalam kategori berikut: a) pekerjaan yang dibayar atau b) wirausaha. OECD mendefinisikan produktivitas tenaga kerja sebagai *output* per unit *input* tenaga kerja. Menurut eurostat produktivitas tenaga kerja mengukur jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh setiap penduduk bekerja atau *output* per *input* tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu diukur dengan produk domestik bruto (PDB), yang dinyatakan dalam paritas daya beli (PPP), baik relatif terhadap jumlah orang yang bekerja atau jumlah jam kerja.

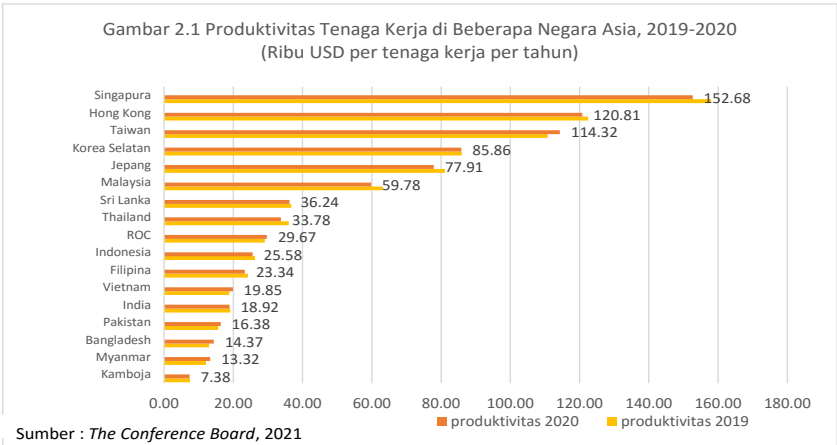
Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara drastis mempengaruhi ekonomi global. Diperkirakan hal itu akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar daripada Pandemi COVID-19 sebelumnya karena kegiatan ekonomi melambat atau ditanggguhkan, memicu resesi parah selama beberapa bulan dan tahun-tahun mendatang. Pemulihan penuh jelas tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.

Produktivitas tenaga kerja, jam kerja, maupun ekuivalen tenaga kerja Indonesia apakah masih mampu bersaing dengan negara lain. Bab ini menjelaskan posisi produktivitas Indonesia di antara negara-negara Asia dan lebih khususnya pada negara-negara ASEAN. Informasi capaian produktivitas negara-negara ASEAN yang akan diulas bersumber dari *The Conference Board*. Informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi, utamanya terkait kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas Indonesia selama ini. Informasi tersebut juga dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan yang tepat dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja ke depannya.

Selain melihat gambaran produktivitas Indonesia di tataran global, juga melihat kinerja Indonesia pada transformasi ekonomi tahun 2020. *World Economic Forum* (WEF) mempublikasikan buku tahunan *Global Competitiveness Report* (GCR), pada 16 Desember 2020 yang bertema “*How Countries are Performing on the Road to recovery*”. *Global Competitiveness Report* sejak edisi pertamanya bertujuan untuk mendorong para pembuat kebijakan melampaui pertumbuhan jangka pendek dan bertujuan untuk kemakmuran jangka panjang. *Global Competitiveness Report* edisi 2019 menunjukkan bagaimana tren penurunan dalam aspek fundamental produktivitas telah ditutupi oleh kebijakan moneter akomodatif yang sudah berlangsung lama tetapi tetap menjadi hambatan untuk memperkuat pembangunan ekonomi. Momen yang tidak biasa ini membutuhkan inovasi dan perubahan kebijakan yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 2020 peringkat *Global Competitiveness Index* (GCI) yang sudah lama ada telah dihentikan sementara.

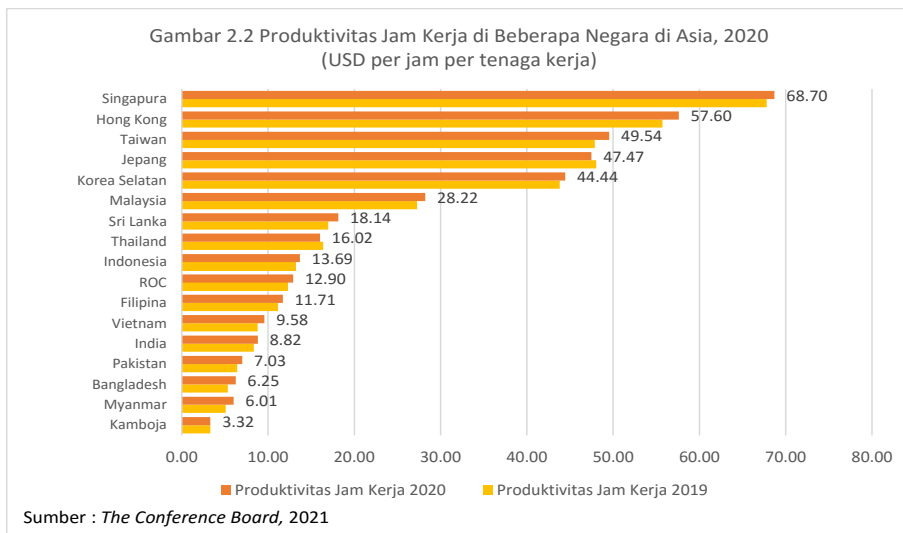
Produktivitas Indonesia di ASEAN dan Negara-Negara APO

Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing di antara negara-negara Asia dan ASEAN. Salah satunya adalah dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Capaian produktivitas Indonesia dan beberapa negara di dunia dilaporkan oleh *The Conference Board*. Menurut laporan *The Conference Board*, pada tahun 2020 Indonesia mampu menghasilkan produktivitas sebesar 25,58 ribu USD per tenaga kerja per tahun atau 13,69 USD per jam per tenaga kerja. Nilai produktivitas tersebut menurun dibanding tahun 2019 yang mencapai 26,22 ribu USD per tenaga kerja per tahun. Akan tetapi, untuk produktivitas per jam kerjanya meningkat sebesar 0,48 USD per jam per tenaga kerja dari tahun 2019 yang sebesar 13,21 USD per jam per tenaga kerja.



Produktivitas tenaga kerja Indonesia 2020 menurut laporan *The Conference Board* ini berada pada urutan ke 10 dari 17 negara Asia yang tercakup. Sedangkan untuk produktivitas jam kerja, Indonesia menduduki urutan ke 9 dari 17 negara Asia. Data dari *The Conference Board* menunjukkan bahwa peringkat Indonesia di tahun 2020 ini masih tetap jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan *The Conference Board*, lima besar peringkat teratas dalam capaian produktivitas tenaga kerja maupun produktivitas jam kerja didominasi oleh negara-negara dari Asia Timur. Negara-negara tersebut, yaitu Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan menempati peringkat ke-2 hingga ke-4 pada capaian produktivitas tenaga kerja maupun produktivitas jam kerja. Sementara peringkat ke-1 dengan capaian produktivitas tenaga kerja dan produktivitas jam kerja tertinggi diraih oleh salah satu negara ASEAN, yaitu Singapura. Nilai produktivitas tenaga kerja dan produktivitas jam kerja yang dicapai Singapura pada tahun 2020 masing-masing sebesar 152,68 ribu USD per tenaga kerja per tahun dan 68,70 USD per jam per tenaga kerja. Capaian Singapura ini telah jauh melampaui capaian negara-negara lainnya.



Sebagai sesama negara ASEAN, capaian Singapura ini jauh meninggalkan Indonesia. Dalam lingkup 8 negara ASEAN, produktivitas tenaga kerja maupun produktivitas jam kerja Indonesia berada pada peringkat ke-4. Capaian Indonesia ini berada di atas Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Namun, capaian Indonesia ini lebih rendah dibanding Thailand, Malaysia, dan Singapura.

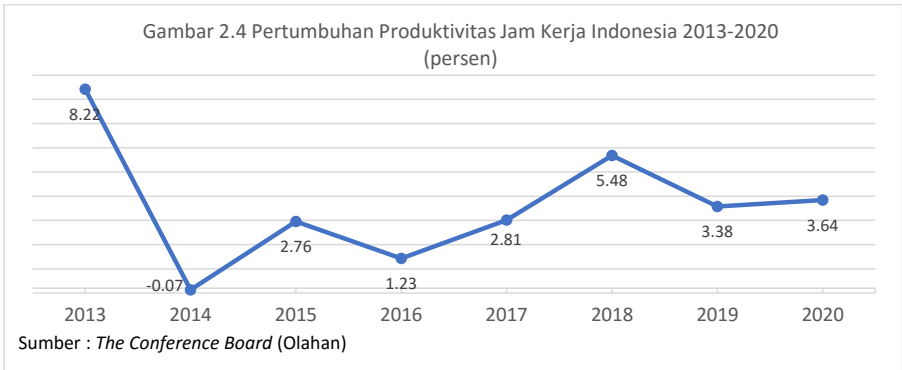
Produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah 8,19 ribu USD per tenaga kerja per tahun dibanding Thailand. Sementara itu nilai produktivitas jam kerja Indonesia lebih rendah 2,33 USD per jam per tenaga kerja dibanding Thailand. Produktivitas tenaga kerja maupun produktivitas jam kerja Malaysia mencapai lebih dari 2 kali lipatnya produktivitas Indonesia. Sedangkan perbedaan terbesar adalah produktivitas Indonesia dengan Singapura, yaitu lebih dari lima kali lipat baik pada produktivitas tenaga kerja maupun pada produktivitas jam kerjanya.

Produktivitas tenaga kerja Indonesia meningkat setiap tahun dengan pertumbuhan yang bervariasi. Gambar 2.3 menunjukkan terjadi perubahan pola pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia pada tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun 2015, produktivitas tenaga kerja Indonesia naik cepat, yaitu sebesar 4,94 persen. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi perlambatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja menjadi 1,13 persen. Selanjutnya pada tahun 2017, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia kembali mengalami percepatan. Percepatan pertumbuhan ini berlangsung setiap tahunnya dan pada tahun 2019 mencapai sebesar 3,19 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami penurunan, bahkan mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -2,41 persen. Hal tersebut dampak dari perekonomian Indonesia yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020.

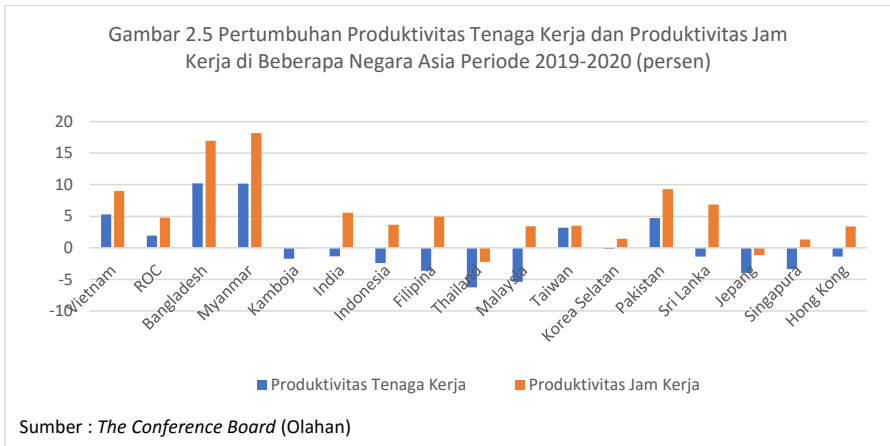
Data *The Conference Board* menunjukkan bahwa pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang cepat pada tahun 2015 disebabkan oleh pertumbuhan negatif pada jumlah tenaga kerja, sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun tersebut mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2015, PDB Indonesia tumbuh 4,88 persen, sedangkan tenaga kerjanya tumbuh -0,07 persen.



Produktivitas jam kerja Indonesia juga tumbuh positif hampir di setiap tahun. Gambar 2.4 menunjukkan pertumbuhan produktivitas jam kerja sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2014 yaitu sebesar -0,07 persen dan setelah itu Kembali tumbuh positif hingga tahun 2020. Data terakhir tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan produktivitas jam kerja Indonesia sebesar 3,64 persen. Pertumbuhan ini lebih cepat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 3,38 persen.



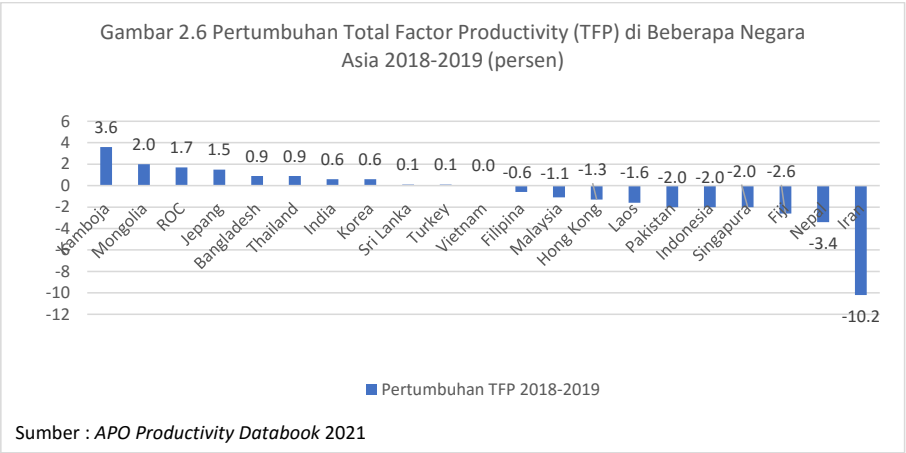
Berdasarkan data *The Conference Board*, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia periode 2019-2020 berada pada urutan ke-12, sedangkan produktivitas jam kerja menduduki urutan ke-9 dibandingkan dengan 17 negara Asia yang tercakup. Sementara dibandingkan 8 negara ASEAN yang tercakup, Indonesia berada pada urutan ke-4 baik pertumbuhan produktivitas tenaga kerja maupun produktivitas jam kerja.



Selain produktivitas tenaga kerja, ada juga *Multifactor productivity* (MFP), atau juga dikenal sebagai *Total Factor productivity* (TFP), yaitu ukuran kinerja ekonomi

yang membandingkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi (*output*) dengan jumlah *input* gabungan yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. *Input* dapat mencakup tenaga kerja, modal, energi, bahan, dan layanan yang dibeli.

Gambar 2.6 menyajikan pertumbuhan TFP 2018-2019 di beberapa negara Asia. Pertumbuhan TFP yang tertinggi dicapai Kamboja dengan pertumbuhan sebesar 3,6 persen, sedangkan pertumbuhan negatif yang terbesar terjadi di Iran sebesar -10,2 persen. Sementara, TFP Indonesia juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,0 persen bersama Pakistan dan Singapura. Pertumbuhan negatif TFP Indonesia lebih disebabkan kontribusi capital yang menurun.



Kinerja Ekonomi Menuju Pemulihan

World Economic Forum (WEF) merilis laporan *The Global Competitiveness Report* (GCR) edisi khusus 2020 di momen sejarah yang sangat sulit dan tidak pasti. Merebaknya pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan global dan resesi ekonomi yang dalam dan lebih dalam dari kemerosotan selama krisis keuangan tahun 2008–2009, akan tetapi juga menciptakan iklim ketidakpastian yang mendalam tentang prospek masa depan seluruh negara.

Pada momen penting ini, ada seruan yang berkembang untuk “membangun kembali dengan lebih baik”. Sementara prioritas langsung adalah untuk menanggapi krisis kesehatan, momen ini juga menawarkan kesempatan untuk merenungkan pendorong fundamental pertumbuhan dan produktivitas yang telah menurun sejak krisis keuangan. Ini juga merupakan momen untuk menentukan bagaimana negara dapat membentuk sistem ekonomi di masa depan sehingga produktif untuk kemakmuran bersama.

The Global Competitiveness Report sejak edisi pertamanya bertujuan untuk mendorong para pembuat kebijakan melampaui pertumbuhan jangka pendek dan bertujuan untuk kemakmuran jangka panjang. *The Global Competitiveness Report* edisi 2019 menunjukkan bagaimana tren penurunan dalam aspek fundamental produktivitas telah ditutupi oleh kebijakan moneter akomodatif yang sudah berlangsung lama tetapi tetap menjadi hambatan untuk memperkuat pembangunan ekonomi.

Momen yang tidak biasa ini membutuhkan inovasi dan perubahan kebijakan yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 2020 peringkat *Global Competitiveness Index* (GCI) yang sudah lama ada telah dihentikan sementara. Sebaliknya, pada tahun 2021 WEF menerbitkan edisi khusus "*The Global Competitiveness Report SPECIAL EDITION 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery*" yang didedikasikan untuk menguraikan prioritas pemulihan dan kebangkitan, dan mempertimbangkan transformasi menuju sistem ekonomi baru.

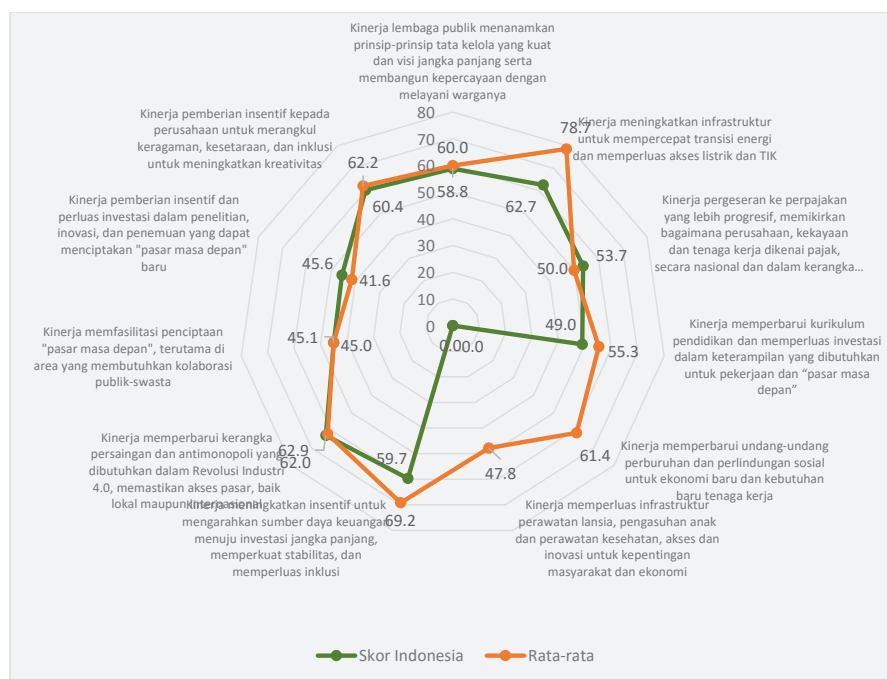
WEF membuat skor kinerja dengan menggunakan 11 prioritas transformasi ekonomi untuk 3-5 tahun kedepan. Kesebelas prioritas transformasi ekonomi yang diukur yaitu:

1. Kinerja lembaga publik menanamkan prinsip-prinsip tata kelola yang kuat dan visi jangka panjang serta membangun kepercayaan dengan melayani warganya.
2. Kinerja meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat transisi energi dan memperluas akses listrik dan TIK.
3. Kinerja pergeseran ke perpajakan yang lebih progresif, memikirkan bagaimana perusahaan, kekayaan dan tenaga kerja dikenai pajak, secara nasional dan dalam kerangka kerja sama internasional.
4. Kinerja memperbarui kurikulum pendidikan dan memperluas investasi dalam keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan dan "pasar masa depan".
5. Kinerja memperbarui undang-undang perburuhan dan perlindungan sosial untuk ekonomi baru dan kebutuhan baru tenaga kerja.
6. Kinerja memperluas infrastruktur perawatan lansia, pengasuhan anak dan perawatan kesehatan, akses dan inovasi untuk kepentingan masyarakat dan ekonomi.
7. Kinerja meningkatkan insentif untuk mengarahkan sumber daya keuangan menuju investasi jangka panjang, memperkuat stabilitas, dan memperluas inklusi.

8. Kinerja memperbaiki kerangka persaingan dan anti monopoli yang dibutuhkan dalam Revolusi Industri 4.0, memastikan akses pasar, baik lokal maupun internasional.
9. Kinerja memfasilitasi penciptaan “pasar masa depan”, terutama di area yang membutuhkan kolaborasi publik-swasta.
10. Kinerja pemberian insentif dan perluas investasi dalam penelitian, inovasi, dan penemuan yang dapat menciptakan “pasar masa depan” baru.
11. Kinerja pemberian insentif kepada perusahaan untuk merangkul keragaman, kesetaraan, dan inklusi untuk meningkatkan kreativitas.

Gambar 2.7 menyajikan Skor Kinerja Indonesia pada 11 prioritas transformasi ekonomi tahun 2020 dibandingkan skor rata-rata seluruh negara yang diukur.

Gambar 2.7 Skor Kinerja Indonesia pada prioritas transformasi ekonomi, pada tahun 2020 (skala 0–100)



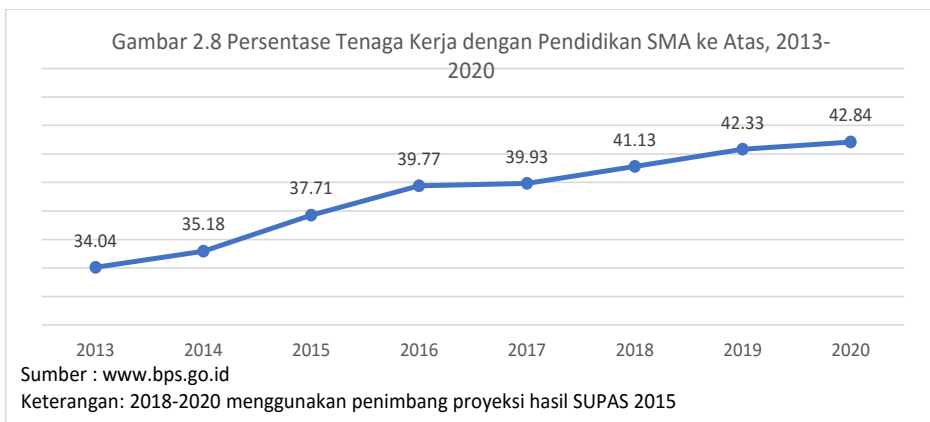
Sumber : The Global Competitiveness Report

Skor kinerja transformasi ekonomi Indonesia sebesar 55,3, masih dibawah skor rata-rata seluruh negara yang diukur. Dari 11 prioritas transformasi ekonomi, hanya 9 prioritas Indonesia yang diukur. 2 prioritas yang tidak diukur adalah kinerja memperbarui undang-undang perburuhan dan perlindungan sosial untuk ekonomi baru dan kebutuhan baru tenaga kerja, dan Kinerja memperluas

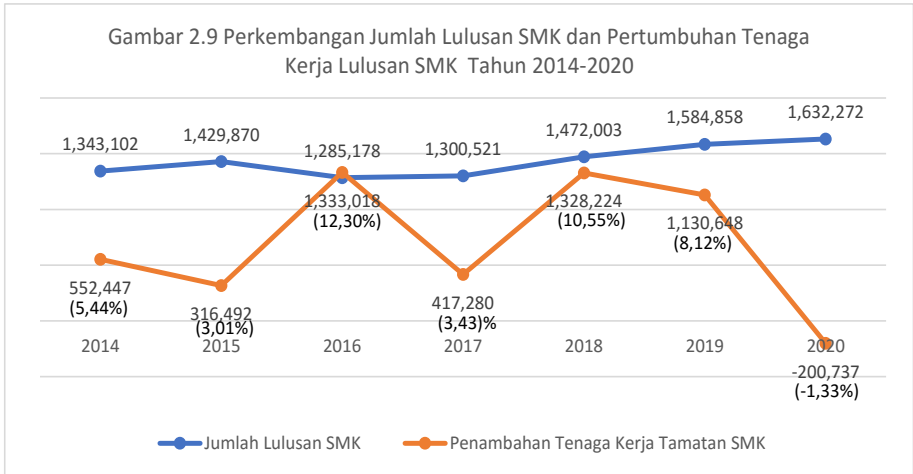
infrastruktur perawatan lansia, pengasuhan anak dan perawatan kesehatan, akses dan inovasi untuk kepentingan masyarakat dan ekonomi. Dari 9 prioritas yang diukur hanya 3 prioritas yang skornya diatas rata-rata yaitu kinerja pergeseran ke perpajakan yang lebih progresif, memikirkan kembali bagaimana perusahaan, kekayaan dan tenaga kerja dikenai pajak, secara nasional dan dalam kerangka kerja sama internasional, kinerja memperbarui kerangka persaingan dan anti monopoli yang dibutuhkan dalam Revolusi Industri 4.0, memastikan akses pasar, baik lokal maupun internasional, dan kinerja pemberian insentif dan perluas investasi dalam penelitian, inovasi, dan penemuan yang dapat menciptakan “pasar masa depan” baru dengan masing-masing skor sebesar 53,7, 62,9, dan 45,6.

Peluang dan Tantangan

Peningkatan daya saing suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya yang dimiliki, utamanya sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia akan berdampak langsung pada produktivitas yang dihasilkan. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja, produktivitas yang dihasilkan akan semakin meningkat. Pendidikan menjadi salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Sejak 2013 hingga 2020, persentase tenaga kerja dengan pendidikan SMA ke atas terus meningkat (Gambar 2.8). Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kompetensi tenaga kerja Indonesia. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, khususnya dalam kontribusinya terhadap dunia kerja menjadi pemicu meningkatnya pendidikan tenaga kerja Indonesia. Dengan meningkatnya pendidikan terakhir yang ditamatkan, diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan efisiensi kerja sehingga mampu mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja.



Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi salah satu tumpuan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia dari sisi pendidikan. Berbeda dengan lulusan SMA yang lebih diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, lulusan SMK ini lebih dipersiapkan untuk terjun ke dunia kerja. Pemerintah Indonesia gencar menyusun perbaikan dan peningkatan kebijakan untuk SMK, salah satunya melalui program revitalisasi SMK. Program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah lulusan SMK yang memasuki dunia kerja ini terus berjalan. Program ini dimulai sejak 2018, dan dilakukan secara bertahap mengingat banyaknya jumlah SMK baik negeri maupun swasta. Jumlah SMK tahun 2019 sebanyak 14.301 dan bertambah menjadi 15.905 pada tahun 2020.



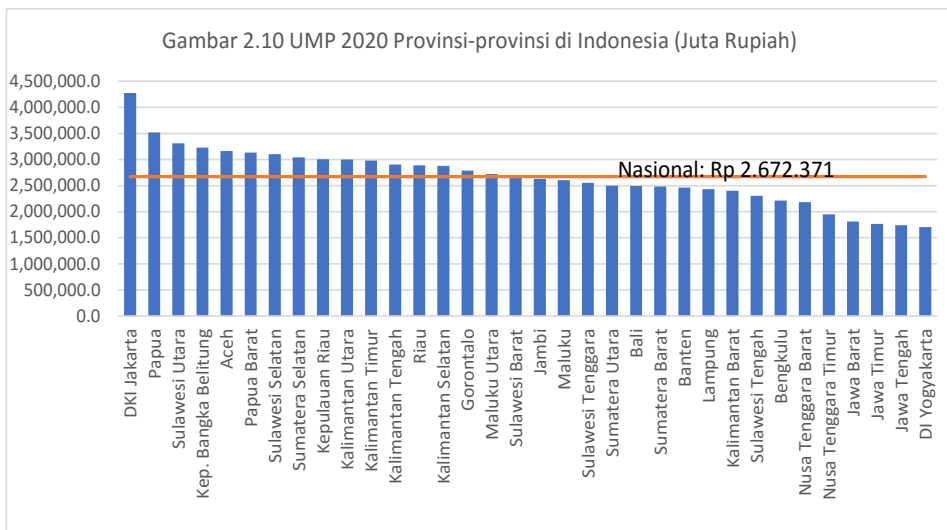
Sumber : www.bps.go.id dan Statistik SMK Kemendikbud

Bertambahnya jumlah SMK pada tahun 2020 berlawanan dengan peminat SMK di tahun tersebut. Pada tahun 2020 peminat SMK menurun -3,63 persen dibanding tahun sebelumnya (Kemendikbud). Walaupun peminatnya menurun, akan tetapi jumlah lulusannya terus meningkat. Pada tahun 2020, lulusan SMK berjumlah 1.632.272 orang (Gambar 2.8). Jumlah ini tumbuh 2,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Keselarasan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan kurikulum pendidikan SMK, akan meningkatkan peluang dari lulusan SMK untuk terserap di dunia kerja. Dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah terkait SMK, kualitas lulusan SMK diharapkan terus meningkat. Lulusan SMK selain dibekali kurikulum yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, mereka juga dibekali sertifikat kemahiran. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki kualifikasi keahlian sehingga bisa menempati posisi strategis, tidak selalu menjadi pekerja kasar.

Selama 2 tahun terakhir penyerapan tenaga kerja lulusan SMK mengalami penurunan (gambar 2.8). Pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja sebesar 8,12 persen, lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10,55 persen. Bahkan, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja lulusan SMK, dari 15,05 juta pekerja di tahun 2019 menjadi 14,86 juta pekerja pada tahun 2020, yang artinya terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar -1,33 persen.

Selain pendidikan, faktor lain yang dapat mendorong peningkatan kinerja pekerja adalah besaran upah yang diterima. Secara tidak langsung upah yang diterima menjadi salah satu pertimbangan penting dalam dunia kerja. Tinggi rendahnya upah yang diterima dapat mempengaruhi semangat kerja, dan akhirnya mempengaruhi kinerja pekerja. Tenaga kerja akan semakin bersemangat dan termotivasi untuk memberikan *output* yang terbaik jika merasa menerima upah dengan nominal yang layak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Kemnaker rutin menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebagai pedoman penetapan upah tenaga kerja.

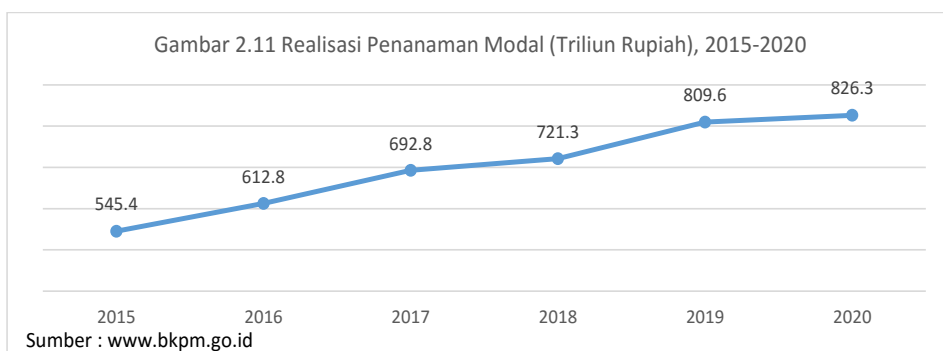


Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan Dalam Publikasi Statistik Indonesia 2021

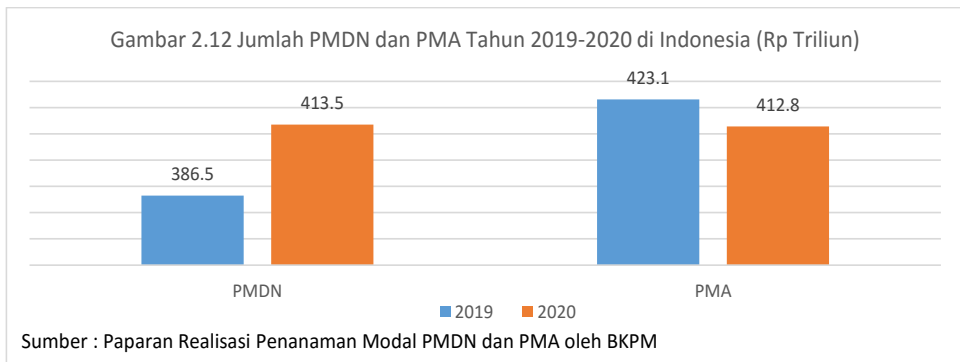
Secara nasional, UMP tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 2.672.371. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa provinsi dengan UMP tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta (Rp 4.276.350) dan terendah terjadi di provinsi DI Yogyakarta (Rp 1.704.608). Provinsi dengan kenaikan UMP 2020 terbesar terjadi di Provinsi Gorontalo. Provinsi ini menetapkan kenaikan UMP-nya sebesar 16,98 persen. Sementara pada tahun 2020, terdapat 14 provinsi memiliki UMP di atas angka nasional.

Faktor lainnya yang juga ikut mempengaruhi produktivitas selain sumber daya manusia dan upah adalah modal atau investasi, serta pemanfaatan teknologi yang mutakhir dalam proses produksi. Modal atau investasi sendiri memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menjamin keberlangsungan pekerjaan. Menyadari hal tersebut, pemerintah terus meningkatkan upaya untuk menarik minat investor baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA).

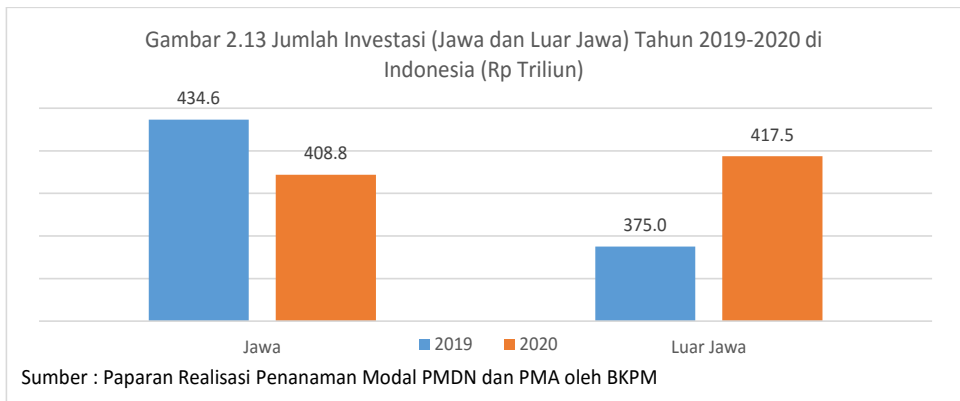
Sampai saat ini investasi Indonesia (PMDN dan PMA) masih terus meningkat. Investasi tahun 2020 tumbuh lebih lambat dari tahun sebelumnya. Tahun 2019, investasi Indonesia tumbuh 12,24 persen, sedangkan tahun 2020 investasi Indonesia tumbuh hanya 2,06 persen. Investasi pada tahun 2020 berjumlah 826,3 triliun rupiah (Gambar 2.11), naik hanya 16,7 triliun rupiah dari tahun 2019. Walaupun demikian, secara kumulatif pencapaian realisasi investasi tahun 2020 (Januari-Desember) berhasil melebihi target Rp817,2 triliun (101,1 persen), meskipun kondisi perekonomian nasional sempat mengalami kontraksi akibat pandemi COVID- 19.



Sepanjang tahun 2020, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp413,5 triliun (50,1%), sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 412,8 triliun (49,9%). Perolehan pada tahun 2020 tersebut mampu menyerap hingga 1.156.361 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan total 153.349 proyek investasi. PMDN berkontribusi lebih besar dibandingkan PMA. Di era pandemi COVID-19, peran PMDN sangat luar biasa sebagai benteng pertahanan realisasi investasi.



Investasi PMDN maupun PMA masih belum tersebar merata di wilayah Indonesia. Misalnya investasi antara daerah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Gambar 2.11 menunjukkan pada tahun 2019 dan 2020, investasi di pulau jawa masih lebih besar dari investasi di luar pulau jawa. Meskipun begitu, pada tahun 2020 peningkatan investasi di luar Pulau Jawa (11,33 persen) jauh lebih besar dari investasi di Pulau Jawa yang malah turun sebesar -5,94 persen.



Dalam menyikapi tantangan ketenagakerjaan saat ini, Kementerian ketenagakerjaan memiliki 9 lompatan sebagai berikut:

1. Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK)
2. *Link and Match* Ketenagakerjaan
3. Transformasi program perluasan kesempatan kerja
4. Pengembangan talenta muda
5. Perluasan pasar kerja luar negeri
6. Visi baru hubungan industrial
7. Reformasi pengawasan ketenagakerjaan
8. Pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan
9. Reformasi birokrasi

Arah kebijakan transformasi BLK adalah mengubah secara total Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai balai pelatihan vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Terdapat enam transformasi BLK yaitu:

1. Reformasi kelembagaan: meningkatkan kinerja organisasi BPVP yang lebih inovatif dan transformatif. Reformasi kelembagaan dilakukan dengan melakukan penguatan tata kelola, penataan cluster klasifikasi, pemerataan persebaran BPVP di seluruh Indonesia, penambahan tugas dan fungsi BPVP, dan pengembangan metode pelatihan berbasis produksi.
2. Redesign pelatihan: merespon tantangan ketenagakerjaan lokal, nasional, dan internasional. Redesign pelatihan dilakukan dengan peningkatan kapasitas pelatihan, dan peningkatan kompetensi lulusan.
3. Reorientasi: reorientasi SD instruktur, tenaga pelatihan, dan asesor kompetensi. Reorientasi SDM dilakukan dengan peningkatan kuantitas SDM BPVP, peningkatan kompetensi lulusan, dan pembentukan asesor kompetensi pendamping tenaga kerja asing (TKA).
4. Re-branding BLK: Balai latihan kerja (BLK) menjadi balai pelatihan vokasi dan produktivitas (BPVP). Re-branding BLK dilakukan dengan penguatan identitas dan daya tarik BPVP, peningkatan engagement publik terhadap BPVP, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kualitas BPVP.
5. Revitalisasi: fasilitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas kapasitas dan aksesibilitas BPVP. Revitalisasi dilakukan dengan peningkatan kapasitas pelatihan, peningkatan fasilitas dan infrastruktur pelatihan, dan peningkatan keterjangkauan.
6. Relationship: meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholder dalam memperkuat kinerja BPVP. Relationship dilakukan dengan pengembangan kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, peningkatan kemitraan dengan dunia usaha dunia industri (DUDI), dan perluasan jaringan dengan berbagai stakeholder.

Sebagai upaya dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, kementerian ketenagakerjaan memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja.
2. Perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja.
3. Penciptaan iklim hubungan industrial yang harmonis dan produktif

4. Reformasi pengawasan ketenagakerjaan.
5. Peningkatan partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai wujud perlindungan bagi pekerja.

Pengembangan kualitas SDM berbasis kompetensi, baik yang ditempuh melalui jalur pendidikan, akumulasi pelatihan maupun pengalaman kerja, adalah prasyarat utama yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk mampu bersaing di era globalisasi baik di pasar domestik maupun internasional. Di bidang pelatihan kerja, instansi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berfungsi sebagai penyelenggara pelatihan kerja (*training provider*) untuk mendapatkan tenaga kerja kompeten, cukup besar, baik Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah maupun LPK Swasta, yang tersebar di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

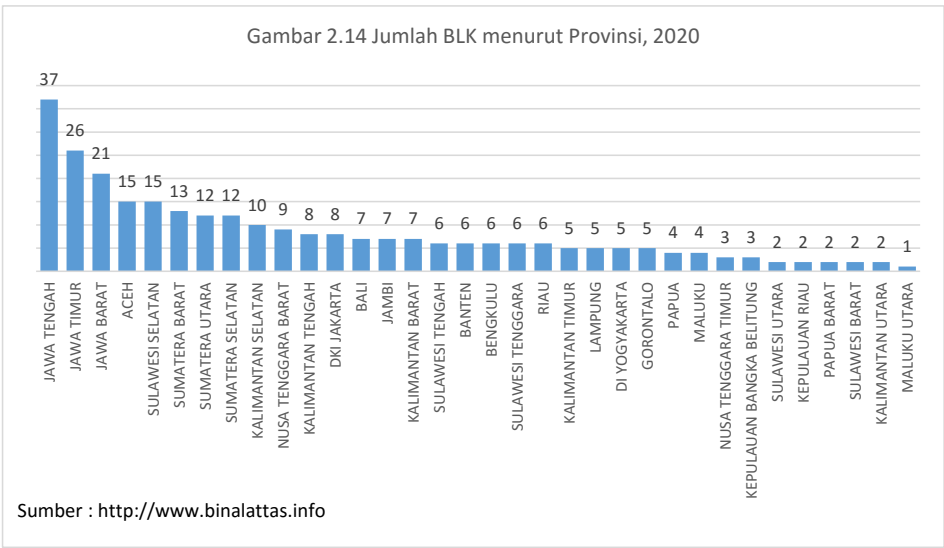
BLK Pemerintah yang berada dibawah pembinaan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan R.I cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) sebanyak 21 Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di 13 provinsi ditambah dengan 2 Balai Pengembangan Produktivitas (BPP). UPTP tersebut dikategorikan sesuai peruntukannya, yaitu:

1. Balai Pengembangan, yaitu 5 Balai Besar UPTP yang saat ini dimiliki oleh Kemnaker dibawah koordinasi Ditjen Binalavotas. Peran dan fungsi utama BLK Pengembangan antara lain adalah Pengembangan Pelatihan dan Pelatihan SDM Kepelatihan dan Pelatihan Percontohan (KKNI-L.4,5,6).
2. Balai Pembinaan, yaitu BLK UPTP yang tidak termasuk Balai Besar, berjumlah 16 tidak termasuk Balai Pengembangan Produktivitas. Jika di satu Provinsi terdapat lebih dari satu UPTP BLK dan semuanya memiliki peran dan fungsi sebagai BLK Pembina, maka BLK Pelaksana yang menjadi BLK binaannya akan dibagi berdasarkan wilayah.
3. Balai Pengembangan Produktivitas, merupakan balai UPTP yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan pengukuran dan peningkatan produktivitas.

Pada tahun 2020, jumlah BLK yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 282 BLK, berkurang 27 BLK dibanding tahun 2019 yang berjumlah 309 BLK. Seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki BLK. Pada tahun 2020 ini, jumlah BLK terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah BLK sebanyak 37. Sedangkan provinsi dengan jumlah BLK paling sedikit adalah Provinsi Maluku Utara sebanyak 1 BLK. Sementara, provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan

Riau, dan Sulawesi Utara masing-masing sebanyak 2 BLK. Keberadaan dan jumlah BLK yang ada pada setiap provinsi, menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi provinsi untuk lebih meningkatkan produktivitasnya. Persaingan antar daerah dalam mencetak tenaga kerja berkualitas menghadirkan iklim yang sehat dalam semangat peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional.

Keberhasilan BLK dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja tidak terlepas dari peran perusahaan dalam kesediaannya menerima lulusan BLK untuk melakukan magang. Dukungan dari berbagai perusahaan telah siap untuk implementasi kegiatan ini, salah satunya melalui program magang. Selain membantu penyerapan tenaga kerja, hal ini juga memberikan dampak positif bagi perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan tenaga terampil dari proses pemagangan tersebut, yang sekaligus dapat meningkatkan produktivitas perusahaannya.





KONDISI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Kualitas dari tenaga kerja akan menentukan tinggi atau rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dari suatu wilayah. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula produktivitas dari tenaga kerja. Pengukuran dan pemantauan terhadap kualitas tenaga kerja menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam melakukan analisis produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Kemampuan angkatan kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja dan bersaing untuk mendapatkan sebuah pekerjaan akan ditentukan oleh kualitas dari angkatan kerja. Semakin berkualitas seorang angkatan kerja akan semakin rendah angka pengangguran, tetapi sebaliknya apabila angkatan kerja tidak cukup berkualitas maka angka pengangguran akan tinggi dikarenakan tidak mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja. Angka pengangguran yang tinggi akan membuat produktivitas tenaga kerja menjadi rendah.

Dengan adanya informasi tentang kualitas angkatan kerja dan kualitas tenaga kerja, penerapan kebijakan produktivitas tenaga kerja diharapkan akan lebih tepat. Secara umum, pembahasan dalam bab ini mencakup tingkat dan kualitas angkatan kerja, tingkat dan kualitas tenaga kerja, dan tingkat produktivitas nasional dengan cakupan tahun 2018 hingga 2020.

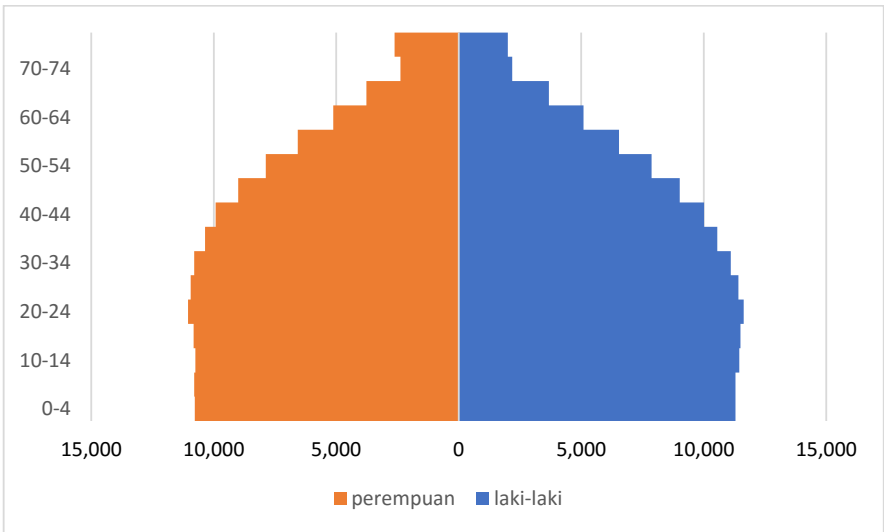
Selain membahas angka produktivitas Indonesia sejak tahun 2018, bab ini juga membahas kinerja produktivitas tenaga kerja kategori lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (Kategori O) sebagai bagian dari sektor publik. Keberadaan sektor publik menjadi bagian dari pemenuhan hak publik. Sektor publik saat ini tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Tuntutan yang sangat besar dari masyarakat terhadap kinerja sektor publik menjadikan analisis terkait produktivitas tenaga kerja sektor publik sangat diperlukan.

Bonus Demografi Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dan sedang mengalami kondisi bonus demografi. UNFPA (2014) menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif antara 15-64 tahun lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas.

Data BPS pada gambar 3.1 juga menunjukkan struktur penduduk Indonesia pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dibandingkan penduduk diluar usia produktif produktif. Penduduk Indonesia sebagian besar berada pada usia 15-45 tahun dengan jumlah mencapai 140,86 juta jiwa atau sekitar 52,13 persen dari total penduduk. Bonus demografi membuat Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) usia produktif dan angkatan kerja yang melimpah.

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Indonesia (dalam Ribu), 2020

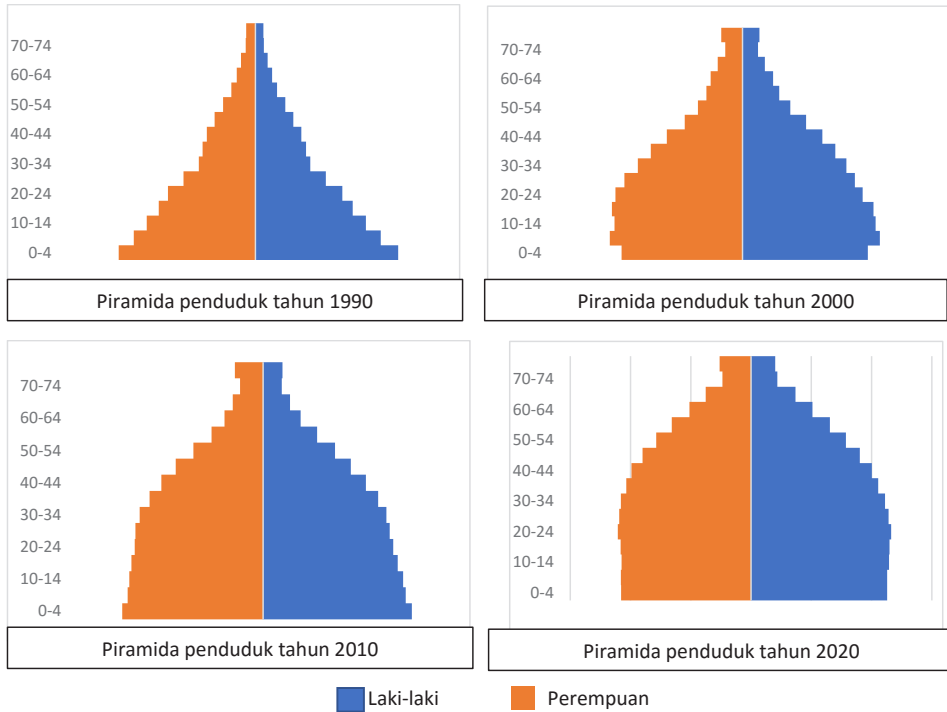


Sumber: Publikasi statistik Indonesia 2021

Pengamatan setiap 10 tahun sejak 1990 dapat memperlihatkan perubahan struktur penduduk Indonesia, hal ini dapat ditunjukkan pada gambar 3.2. Jika diamati lebih dalam, perkembangan struktur penduduk Indonesia selama 40 tahun mengarah ke peningkatan penduduk usia produktif. Pada awal tahun 1990 penduduk terbanyak didominasi oleh penduduk usia muda bahkan penduduk pada usia 15 tahun kebawah, sekitar 40 persen dari total jumlah penduduk.

Namun sejak tahun 2010 struktur penduduk Indonesia mengalami pergeseran dan di tahun 2020 struktur penduduk Indonesia lebih didominasi oleh usia produktif.

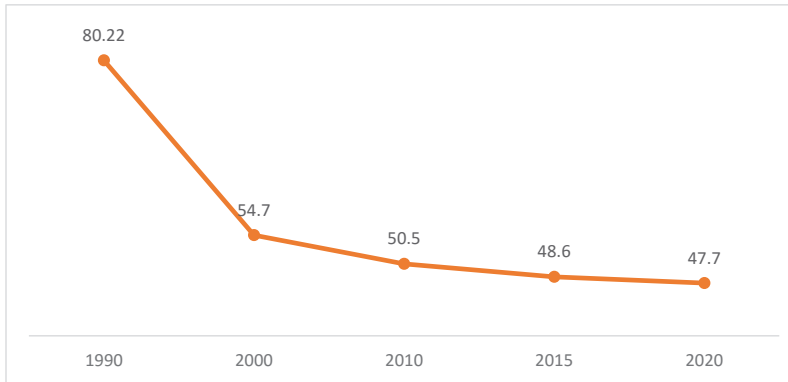
Gambar 3.2 Piramida Penduduk Indonesia, 1990 -2020



Sumber: Publikasi proyeksi penduduk 1990-2020 dan statistik Indonesia tahun 2021

Angka *dependency ratio* yang mengalami penurunan sejak tahun 1990 juga menunjukkan bahwa terjadinya perubahan struktur penduduk yang mana penduduk usia produktif di Indonesia semakin lama semakin mengalami peningkatan lebih cepat dibanding penduduk diluar usia produktif. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk sampai tahun 2035 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), beban tanggungan setiap 100 orang penduduk produktif terhadap penduduk non produktif terus menurun dan mencapai puncaknya pada tahun 2029. Pada tahun 2029, setiap 100 orang penduduk produktif akan menanggung 46,88 orang non produktif.

Gambar 3.3 *Dependency Ratio* Indonesia, 1990-2020



Sumber: Publikasi proyeksi penduduk Indonesia, 1990-2020

Bonus demografi dapat menjadi tantangan ataupun peluang bagi suatu negara. Hal ini tergantung bagaimana sebuah negara mengelola bonus demografi yang dialami. Banyak negara menjadi kaya karena berhasil memanfaatkan jendela peluang bonus demografinya untuk memacu pendapatan perkapita sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Namun tantangan berikutnya setelah masa bonus demografi berlalu adalah meledaknya usia tua, sedangkan transisi usia muda menjadi usia produktif belum sempurna (Adioetomo, 2005: 4). Bonus demografi menjadi hal yang merugikan bila jumlah lulusan pendidikan yang cukup tinggi, tetapi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sangat rendah sehingga sumber daya yang awalnya dapat meningkatkan angka produktivitas justru menjadi beban.

Bloom dalam UNFPA (2015) menyatakan bonus demografi dapat menjadi keuntungan apabila aspek penawaran tenaga kerja, tabungan dan modal manusia dimanfaatkan secara maksimal. Penjelasan terkait ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Aspek penawaran tenaga kerja

Bonus demografi akan mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja dengan cara meningkatkan jumlah penduduk usia produktif yang pada akhirnya meningkatkan jumlah pencari kerja. Penawaran tenaga kerja (*labor supply*) yang besar meningkatkan pendapatan perkapita jika mendapat kesempatan kerja yang produktif.

Selain itu peranan perempuan dalam menentukan aspek penawaran tenaga kerja juga tidak kalah penting. Jumlah anak yang sedikit memungkinkan

perempuan memasuki pasar kerja dan membantu peningkatan pendapatan. Sehingga hal ini dapat membantu dalam hal pemanfaatan bonus demografi.

(2) Aspek tabungan

Dalam prakteknya kegiatan menabung akan tergantung dari budaya dan kondisi ekonomi dari setiap rumah tangga. Namun pada umumnya pekerja yang memproduksi lebih dari konsumsinya akan memiliki kecenderungan untuk menabung. Tabungan masyarakat yang diinvestasikan secara produktif akan menjadi prospek yang baik terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

(3) Aspek modal manusia (*Human Capital*)

Angka kematian yang rendah, harapan hidup yang lebih lama, angka fertilitas yang rendah dan jumlah anggota keluarga yang kecil akan mempengaruhi pandangan seseorang terhadap kehidupan. Keluarga dengan jumlah anak yang sedikit akan memberikan investasi yang besar pada setiap anaknya dibandingkan dengan keluarga dengan jumlah anak yang banyak. Investasi yang dimaksud disini adalah investasi dalam bidang pendidikan. Hasil dari investasi pendidikan ini adalah seluruh tenaga kerja menjadi lebih produktif dan meningkatkan upah dan standar hidup yang lebih baik (UNFPA, 2015).

Oleh karena itu peran dari pemerintah sangat diperlukan dalam menghadapi masa bonus demografi yang saat ini sedang berlangsung agar bonus demografi yang terjadi di Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal hingga puncak bonus demografi.

Keadaan Angkatan Kerja Indonesia

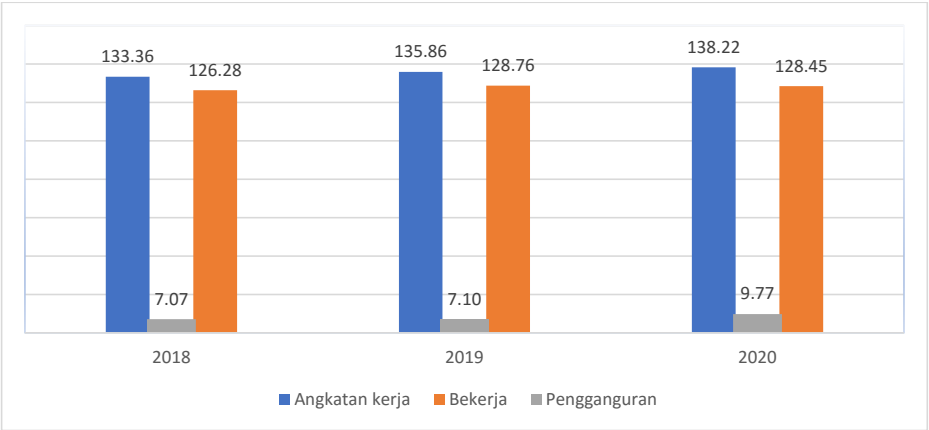
Era bonus demografi membuat angka angkatan kerja di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Data BPS yang digambarkan pada gambar 3.4 menunjukkan jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Meskipun Indonesia mengalami musibah pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, penawaran tenaga kerja tidak mengalami penurunan. Pada tahun 2020 angkatan kerja di Indonesia berjumlah 138,22 juta orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka angkatan kerja yang tinggi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan atau kualitas angkatan kerja dalam memasuki dunia kerja. Tingginya persaingan pasar tenaga kerja ditambah dengan terjadinya pandemi COVID-19

membuat angka penduduk bekerja di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2020. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebesar 301,09 ribu orang atau 0,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 angka persentase penduduk bekerja sebesar 0,95 persen, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020 pandemi COVID-19, mengakibatkan persentase penduduk bekerja mengalami penurunan sebesar 0,02 persen dibanding tahun sebelumnya.

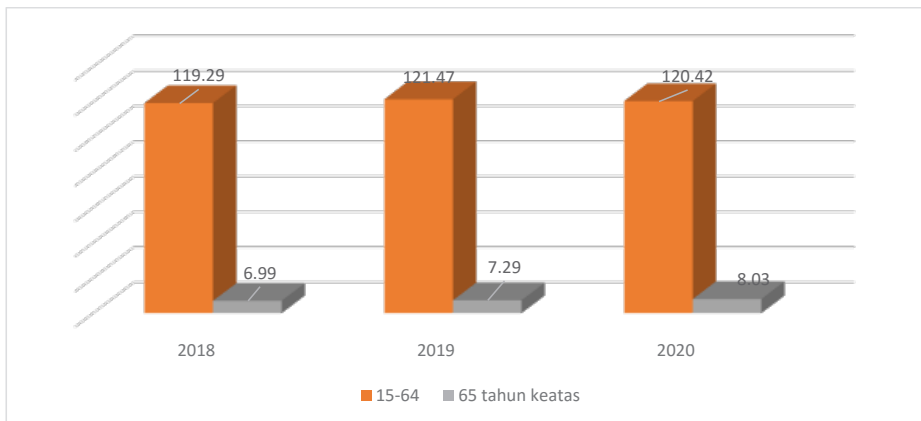
Gambar 3.4 Jumlah Angkatan Kerja , Tenaga Kerja dan Pengangguran (Orang), 2018-2020



Sumber: survei angkatan kerja Indonesia, 2018-2020 (diolah)

Definisi penduduk bekerja berdasarkan BPS adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang melakukan kegiatan bekerja selama seminggu yang lalu. Hal ini berarti bahwa di antara penduduk bekerja terdapat dua kategori, yaitu penduduk bekerja di usia produktif dan penduduk bekerja diluar usia produktif. Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja usia 15 hingga 64 tahun (usia produktif) berjumlah sekitar 120,42 juta orang, sedangkan penduduk usia 65 tahun keatas (diluar usia produktif) yang masih aktif bekerja berjumlah sekitar 8,03 juta orang. Meskipun jumlah penduduk bekerja usia non produktif hanya sebesar 6,25 persen dari total, namun jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahun sejak 2018. Pada tahun 2020 angka penduduk bekerja non produktif tumbuh sebesar 10,15 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk bekerja usia produktif dimana pada tahun 2020 justru mengalami perlambatan sebesar 0,86 persen dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 3.5 Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif (15-64 tahun) dan di Luar Usia Produktif (lebih dari 65 tahun) (juta orang), 2018-2020

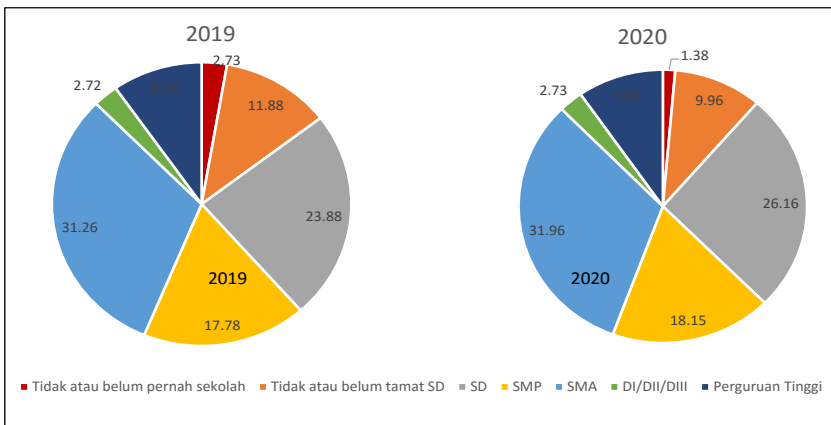


Sumber: Survei angkatan kerja (2018-2020), diolah

Pada era bonus demografi seperti sekarang ini, Indonesia memiliki jumlah penawaran tenaga kerja cukup tinggi, hal ini membuat kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan juga semakin tinggi setiap tahunnya. Kualitas angkatan kerja memegang peran yang sangat penting dalam menentukan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk bersaing memasuki pasar tenaga kerja.

Selain meningkat dari sisi kuantitas, angkatan kerja Indonesia secara umum juga mengalami peningkatan kualitas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SMA keatas pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,63 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu lulusan SD ke bawah mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,29 persen, yaitu dari 38,49 persen di tahun 2019 menjadi 37,2 persen di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan perkembangan yang baik dalam suplai tenaga kerja, sebab semakin tinggi pendidikan seseorang diharapkan lebih mampu atau mudah untuk mendapatkan pekerjaan.

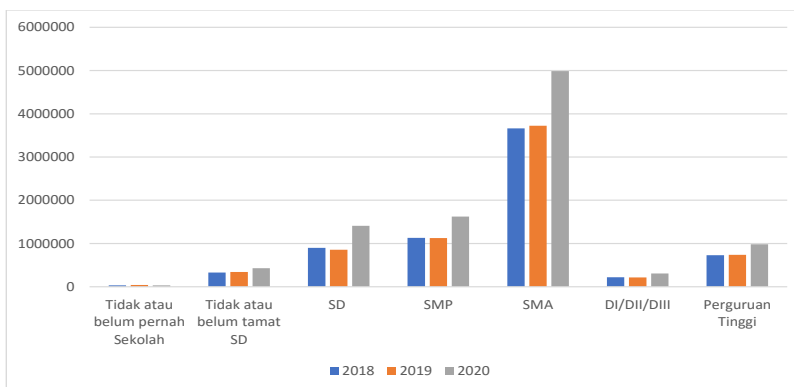
Gambar 3.6 Angkatan kerja di Indonesia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), 2019 dan 2020



Sumber: Publikasi keadaan angkatan kerja Indonesia 2018-2020

Penawaran kerja yang meningkat dengan disertai kualitas yang semakin baik idealnya menjadikan jumlah pengangguran semakin rendah. Namun sejak tahun 2018 pengangguran justru tetap tinggi pada jenjang Pendidikan SMA ke atas. Pandemi COVID-19 yang melanda menambah tekanan pada angkatan kerja, beberapa perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) agar dapat tetap bertahan dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil. Keadaan ini mengakibatkan peningkatan angka pengangguran yang cukup signifikan di hampir di setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2020 peningkatan angka pengangguran tertinggi terjadi di jenjang SMA, yaitu sebesar 1,2 juta orang atau tumbuh sebesar 34,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pengangguran dengan jenjang pendidikan tidak atau belum pernah sekolah menjadi satu-satunya yang mengalami penurunan nilai, yaitu sebesar 8,2 ribu orang.

Gambar 3.7 Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (orang), 2018-2020

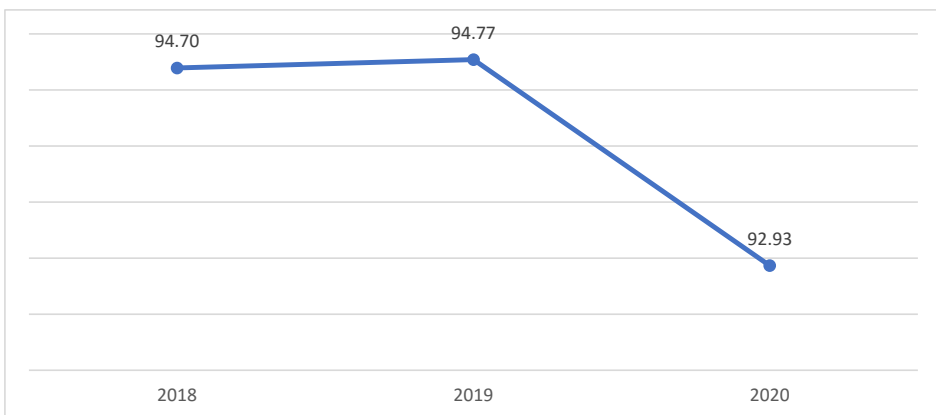


Sumber : Publikasi keadaan angkatan kerja Indonesia 2018-2020

Tinggi rendahnya angka pengangguran dipengaruhi oleh besarnya angka kesempatan kerja dan selanjutnya akan mempengaruhi bagaimana arah bonus demografi yang terjadi di Indonesia. Kesempatan kerja yang rendah akan menimbulkan adanya lonjakan angka pengangguran yang cukup tinggi dan menyebabkan peluang bonus demografi menjadi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Tekanan ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 membuat tingginya angka pengangguran dan penurunan angka tingkat kesempatan kerja pada tahun 2020. Tingkat kesempatan kerja di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 3.8). Keadaan pada tahun 2020 berbanding terbalik dengan keadaan di tahun 2019, pada saat ini kesempatan kerja mengalami peningkatan sebesar 0,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 3.8 Tingkat Kesempatan Kerja (Persen), 2018-2020



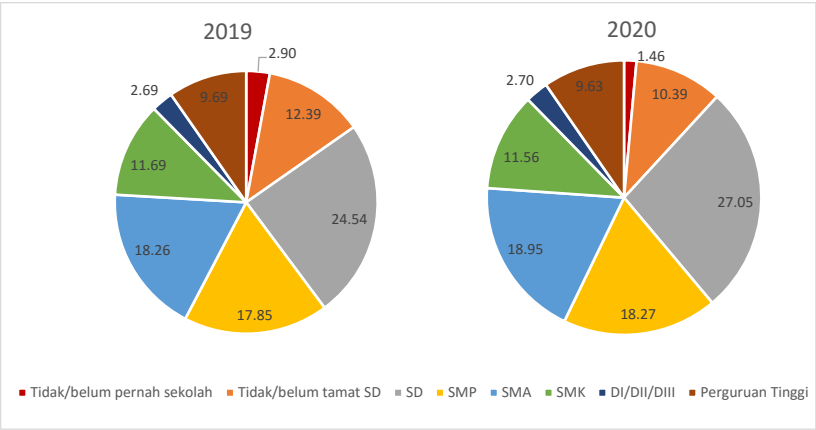
Sumber: SAKERNAS 2020 (diolah)

Kualitas Tenaga Kerja di Indonesia

Pendidikan dan keahlian seseorang merupakan investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tingkat pendidikan dan kapabilitas dari tenaga kerja akan menentukan tingkat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan tenaga kerja yang tidak terdidik. Kualitas tenaga kerja yang baik akan mendorong pembangunan ekonomi dalam negeri melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Keadaan pandemi COVID-19 tidak hanya membuat para calon pekerja kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, namun juga menjadi tantangan bagi para penduduk bekerja untuk mempertahankan pekerjaannya. Para pengusaha yang terkena gejolak ekonomi akibat pandemi, akan lebih mempertahankan pekerja yang berkualitas dibandingkan dengan pekerja dengan kualitas pendidikan rendah.

Gambar 3.9 Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen), 2019-2020



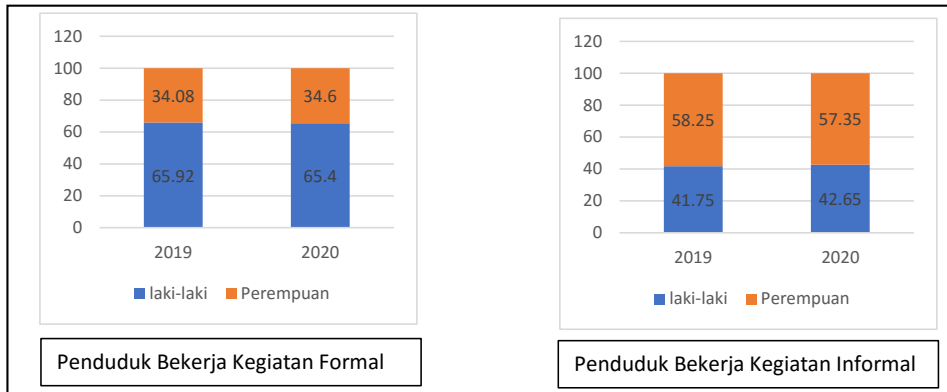
Sumber: www.bps.go.id

Tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan kualitas pada tahun 2020, hal ini dapat terlihat dari peningkatan penduduk yang bekerja dengan jenjang pendidikan terakhir SMA mengalami kenaikan proporsi sebesar 0,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, angka tenaga kerja yang belum pernah atau belum lulus SD di tahun 2020 mengalami penurunan proporsi sebesar 3,44 persen. Meskipun mengalami perbaikan namun tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh jenjang pendidikan SMP ke bawah. Proporsi penduduk bekerja dengan jenjang pendidikan SMP ke bawah sebesar 57,16 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

Selain kualitas dari tenaga kerja, peningkatan peranan kaum perempuan di pasar tenaga kerja juga dapat menjadi salah satu faktor pendorong angka produktivitas tenaga kerja. Tambun (1992) mengatakan bahwa tenaga kerja wanita adalah bagian dari penduduk yang secara ekonomis potensial untuk terjun ke dalam pasar tenaga kerja dan bertindak sebagai angkatan kerja. Berdasarkan pada data BPS, pekerja perempuan lebih banyak bekerja pada sektor informal dibandingkan

dengan sektor formal (Gambar 3.9). Meskipun demikian pada tahun 2020 angka persentase pekerja informal perempuan sedikit mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,9 persen, sedangkan pada kategori kegiatan formal, mengalami peningkatan sebesar 0,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 3.10 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2019-2020



Sumber: Keadaan angkatan kerja Indonesia, 2020

Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia

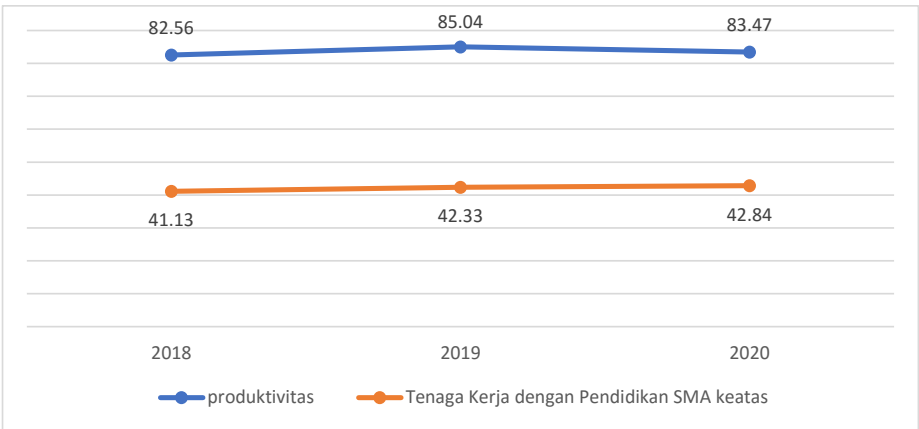
Produktivitas tenaga kerja menunjukkan seberapa besar kontribusi penggunaan *input* tenaga kerja untuk menghasilkan suatu *output* produk. Ada tiga ukuran penghitungan produktivitas tenaga kerja, yaitu produktivitas tenaga kerja, produktivitas jam kerja, dan produktivitas tenaga kerja penuh atau Ekuivalen Tenaga Kerja (ETK). Produktivitas tenaga kerja dapat diartikan sebagai indikator yang menggambarkan *output* yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja selama periode waktu satu tahun. Semakin efisien dan produktif tenaga kerja, semakin tinggi pula angka produktivitas tenaga kerja.

Pada tahun 2019, produktivitas tenaga kerja Indonesia mencapai 85,04 juta rupiah per tenaga kerja per tahun atau tumbuh sebesar 3,00 persen dibandingkan tahun. Namun pada tahun 2020 angka produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami perlambatan sebesar 1,84 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau turun 1,57 juta rupiah per tenaga kerja per tahun menjadi 83,47 juta rupiah per tenaga kerja per tahun.

Selain pengaruh dari pandemi Covid-19, penurunan angka produktivitas juga dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan pada tenaga kerja dengan pendidikan

SMA ke atas yang lebih lambat pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SMA ke atas meningkat sebesar 1,2 persen dibandingkan tahun 2018. Namun di tahun 2020 angka ini hanya mampu tumbuh sebesar 0,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 3.11 Produktivitas Tenaga Kerja (juta rupiah per tenaga kerja per tahun) dan Persentase Tenaga Kerja dengan Pendidikan SMA ke Atas, 2018-2020

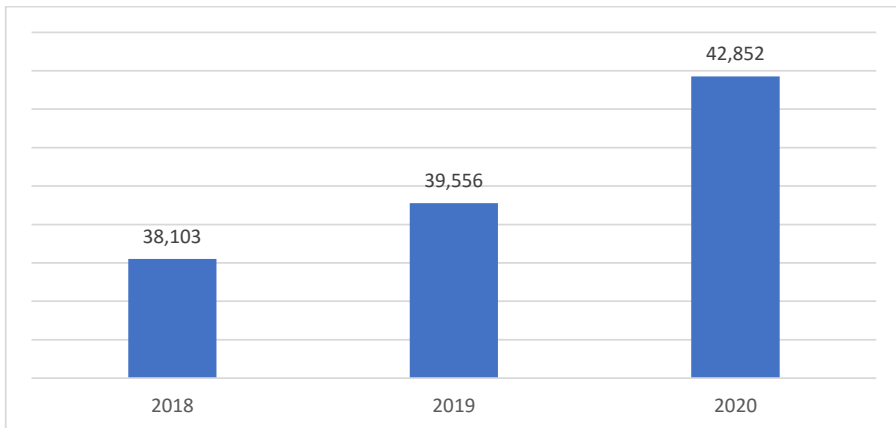


Sumber: Survei Angkatan Kerja, 2018-2020

Penghitungan produktivitas berikutnya adalah produktivitas jam kerja. Berbeda dengan penghitungan produktivitas tenaga kerja, produktivitas jam kerja mampu memberikan gambaran produktivitas seorang tenaga kerja per jamnya. Penghitungan produktivitas ini menggambarkan seberapa besar *output* yang mampu dihasilkan oleh seorang tenaga kerja setiap 1 jam bekerja.

Produktivitas jam kerja pada tahun 2020 mencapai 42.852 rupiah per tenaga kerja per jam. Ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap satu orang tenaga kerja Indonesia mampu menghasilkan *output* senilai 42.852 rupiah setiap jamnya. Produktivitas jam kerja tahun 2020 tumbuh sebesar 8,33 persen, sementara pada tahun 2019 produktivitas jam kerja tumbuh sebesar 3,8 persen. Produktivitas jam kerja sejak tahun 2018 hingga 2020 relatif mengalami pertumbuhan yang positif (Gambar 3.11).

Gambar 3.12 Produktivitas Jam Kerja (rupiah per jam), 2018-2020



Sumber: Survei Angkatan Kerja, 2018-2020

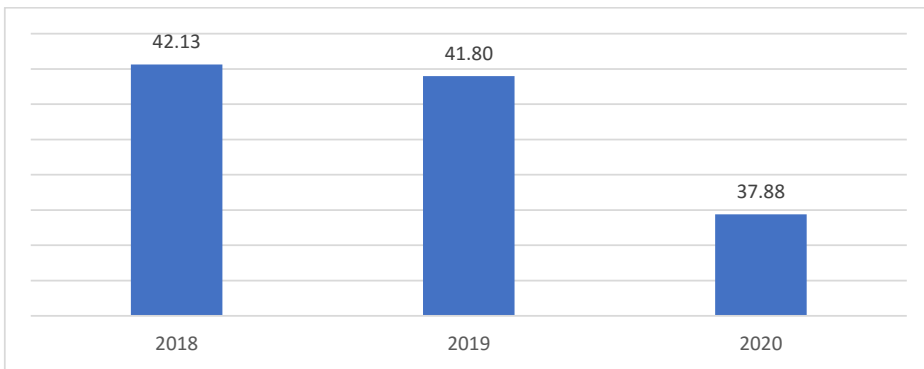
Peraturan mengenai jam kerja juga diatur secara khusus oleh pemerintah, yaitu tertuang dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada pasal 77 ayat 1, UU No. 13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja yang diatur dalam 2 sistem, yaitu:

- 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
- 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu

Kedua sistem tersebut dibedakan berdasarkan jumlah hari kerja, yaitu selama 5 dan 6 hari kerja. Sedangkan batasan jam kerja dalam seminggu tetap, yaitu 40 jam dalam 1 minggu. Apabila tenaga kerja bekerja melebihi ketentuan waktu kerja tersebut, maka kelebihan jam kerja dianggap sebagai waktu kerja lembur. Pekerja atau buruh yang bekerja mendapat tugas lembur berhak atas upah lembur.

Rata-rata jam kerja seminggu pekerja di Indonesia mengalami penurunan selama tahun 2018-2020. Pada tahun 2020 rata-rata jam kerja di Indonesia masih dalam batasan normal, yaitu 37,88 jam per minggu. Jumlah ini turun 3,92 jam per minggu dibandingkan tahun 2019. Secara umum, penurunan jam kerja ini menunjukkan semakin baiknya kinerja tenaga kerja Indonesia, karena dengan rata-rata jam kerja yang lebih sedikit mampu menghasilkan *output* yang lebih tinggi

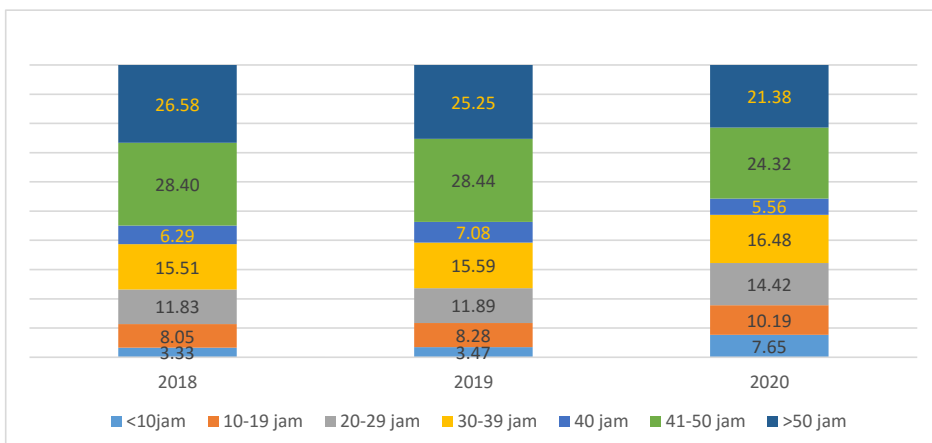
Gambar 3.13 Rata-rata Jam Kerja per Minggu, 2018-2020



Sumber: Survei Angkatan Kerja, 2018-2020

Berdasarkan data Sakernas yang dihasilkan BPS, persentase tenaga kerja Indonesia yang bekerja di atas 40 jam per minggu pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dibandingkan pada tahun sebelumnya, kategori tenaga kerja dengan jam kerja lebih dari 50 jam per minggu turun sebesar 3,87 persen. Hal serupa juga terjadi pada kategori jam kerja per minggu 41-50 jam turun sebesar 4,12 persen. Sementara itu, pada jumlah tenaga kerja yang memiliki jam kerja sebesar 40 jam per minggu mengalami penurunan sebesar 1,52 persen. Kondisi ini menunjukkan perbaikan atau peningkatan produktivitas dan tenaga kerja di Indonesia.

Gambar 3.14 Persentase Tenaga Kerja Menurut Kategori Kerja, 2018 – 2020



Sumber: Survei Angkatan Kerja Tahun 2018-2020 (diolah)

Pemenuhan kondisi jam kerja ideal selama 40 jam tidak tertangkap pada penghitungan produktivitas tenaga kerja. Namun, kondisi ini dapat terlihat pada

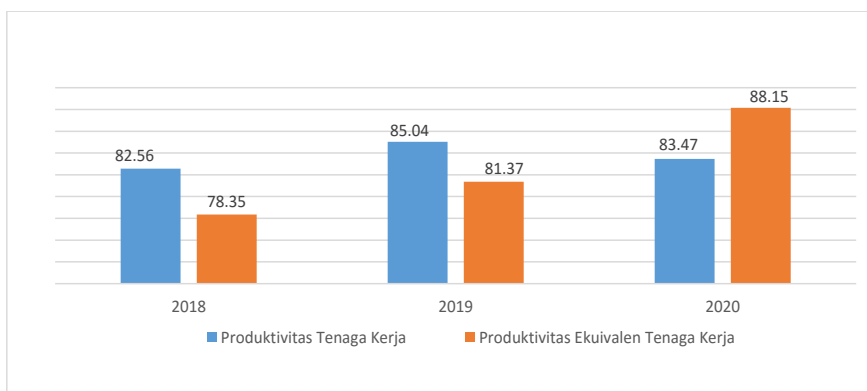
pengukuran produktivitas ekuivalen tenaga kerja (ETK) atau yang dikenal juga sebagai produktivitas tenaga kerja penuh. Tujuan penghitungan produktivitas ekuivalen tenaga kerja (ETK) adalah untuk melihat efisiensi tenaga kerja di Indonesia dalam menghasilkan *output*.

Produktivitas tenaga kerja dan produktivitas ekuivalen tenaga kerja dibedakan oleh penghitungan jumlah tenaga kerja berdasarkan jumlah jam kerja selama satu minggu. Pada produktivitas tenaga kerja, seseorang dalam satu minggu bekerja minimal 1 jam berturut turut maka ia terhitung sebagai 1 tenaga kerja. Sementara itu, pada produktivitas ekuivalen tenaga kerja seseorang yang bekerja selama 40 jam selama seminggu baru terhitung sebagai 1 tenaga kerja penuh. Jika seseorang bekerja kurang dari 40 jam seminggu maka seseorang tersebut dihitung sebagai kurang dari 1 tenaga kerja penuh, dan sebaliknya. Dengan demikian, efisiensi tenaga kerja dapat terjadi jika produktivitas ekuivalen tenaga kerja lebih tinggi dibanding produktivitas tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh kemampuan menghasilkan *output* yang sama dengan penggunaan jam kerja yang lebih sedikit.

Pada tahun 2020, produktivitas ekuivalen tenaga kerja (bekerja selama 40 jam selama seminggu) mencapai 88,15 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Produktivitas ini meningkat 7,39 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 85,62 juta rupiah per tenaga kerja per tahun dan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 4,65 persen (Gambar 3.13).

Produktivitas ekuivalen tenaga kerja pada tahun 2020 lebih tinggi 4,68 juta rupiah per tenaga kerja per tahun dibanding produktivitas tenaga kerja. Selisih perbedaan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019.

Gambar 3.15 Produktivitas Tenaga Kerja dan Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja (Juta Rupiah Per Tenaga Kerja Per Tahun) 2018-2020



Sumber: Survei Angkatan Kerja, 2018-2020 (diolah)

Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia pada sektor Publik

Pemerintahan suatu negara hakikatnya mencakup tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi yang meliputi: sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, fungsi distribusi yang meliputi: pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan dan fungsi stabilisasi yang meliputi: pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Peranan sektor publik merupakan peranan vital dalam memenuhi hak publik.

Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Anik Yuesti, 2020).

Sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (*publik funds*) (Anik Yuesti, 2020). Cakupan sektor publik sangat luas, sehingga pembahasan produktivitas sektor publik dibatasi pada kategori lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (Kategori O).

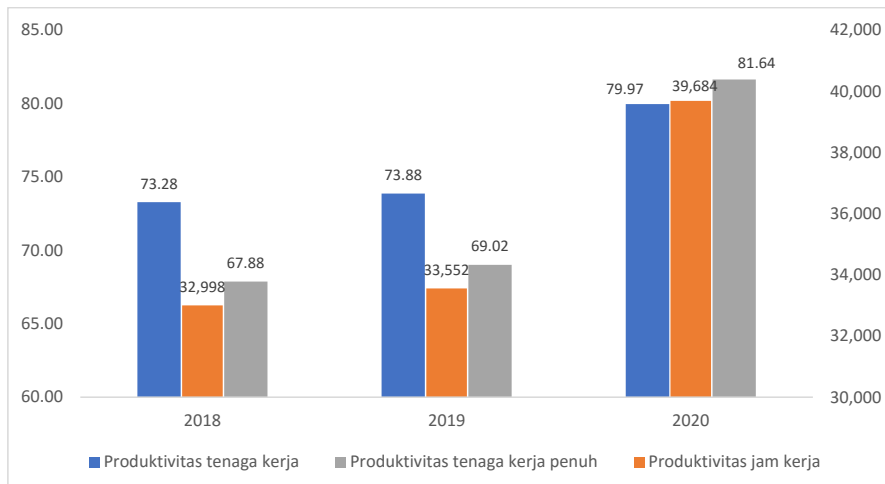
Meskipun dilanda dengan pandemi covid-19 produktivitas tenaga kerja kategori sektor publik di tahun 2020 kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (kategori O) mengalami peningkatan sebesar 6,09 persen atau tumbuh 8,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 produktivitas jam kerja pada kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (Kategori O) mengalami peningkatan sebesar 6.132 rupiah perjam atau tumbuh sebesar 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian efisiensi tenaga kerja yang digambarkan oleh produktivitas ekuivalen tenaga kerja (*full time worker equivalent*) menunjukkan kategori lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (Kategori O) mengalami peningkatan sebesar 12,61 juta rupiah per tenaga kerja per tahun atau tumbuh sebesar 18,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun

2020 angka produktivitas ekuivalen tenaga kerja lebih tinggi 1,67 juta rupiah per tenaga kerja per tahun dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja. Di Tengah situasi pandemi Covid-19 di tahun 2020, tenaga kerja yang bekerja pada kategori O telah bekerja dengan efisien.

Kinerja sektor publik terhadap pemenuhan hak publik setiap tahunnya semakin mengalami perbaikan. Peningkatan capaian produktivitas baik tenaga kerja, produktivitas ekuivalen tenaga kerja dan produktivitas jam kerja mengindikasikan bahwa tenaga kerja pada kategori lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (Kategori O) bekerja lebih produktif dan efisien pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 3.16 Produktivitas Tenaga Kerja, Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Sektor Publik (Juta Rupiah Per Tenaga Kerja Per tahun) dan Produktivitas Jam Kerja (Rupiah Per Jam), 2018-2020



Sumber: Survei Angkatan Kerja, 2018-2020 (diolah)



IV

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA REGIONAL DAN SEKTORAL

Produktivitas tenaga kerja di tingkat nasional merupakan gambaran umum dari produktivitas di tingkat regional maupun sektoral. Peningkatan produktivitas tenaga kerja seluruh wilayah dan sektoral akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja pada level nasional. Pengukuran dan pemantauan terhadap perkembangan produktivitas tenaga kerja regional dan sektoral menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengukuran produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya informasi tentang produktivitas tenaga kerja regional dan sektoral, penerapan kebijakan produktivitas tenaga kerja diharapkan akan lebih tepat, baik di tingkat nasional, regional, maupun sektoral.

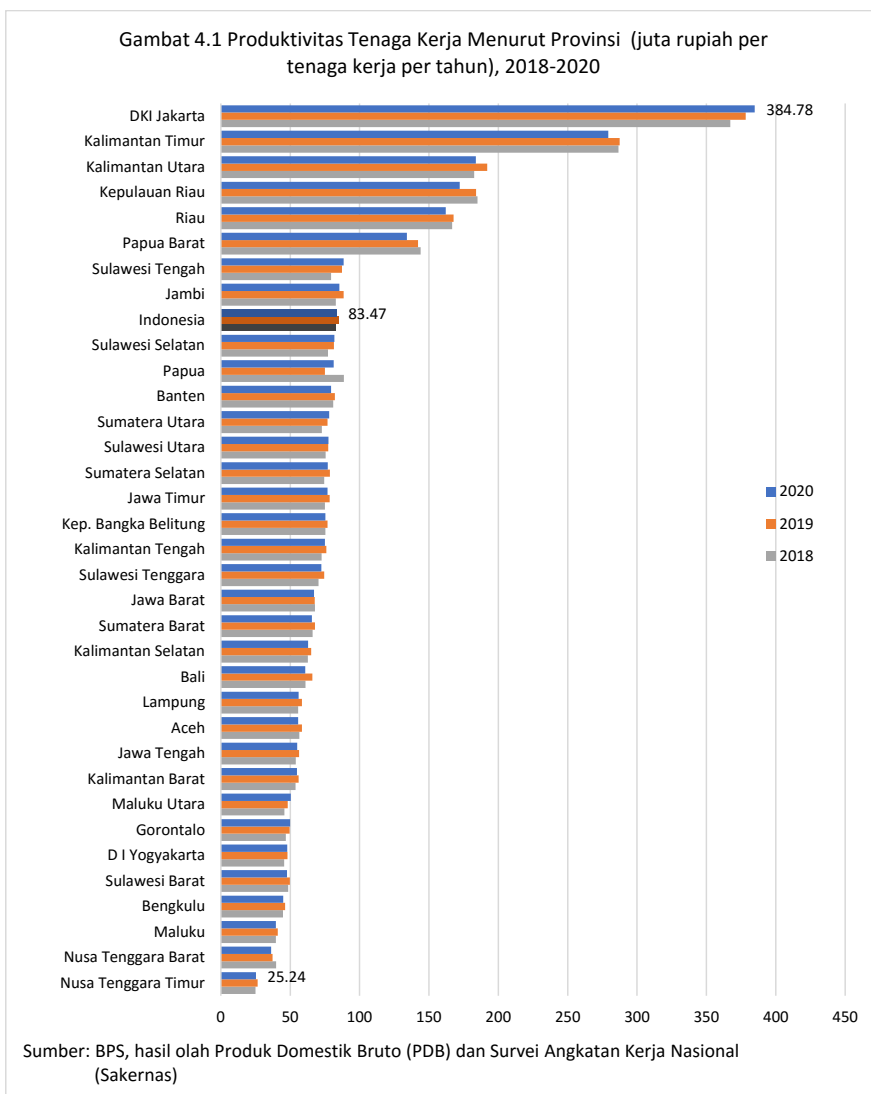
Secara umum, pembahasan produktivitas regional dalam publikasi ini mencakup level provinsi dan kabupaten/kota. Namun, pembahasan produktivitas regional di level kabupaten/kota tidak dirinci menurut kategori lapangan usaha karena keterbatasan data yang tersedia.

Produktivitas Tenaga Kerja Regional

Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi

Produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami penurunan bersamaan dengan terjadinya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Pada tahun 2019, produktivitas tenaga kerja Indonesia mencapai 85,04 juta rupiah per tenaga kerja per tahun atau tumbuh sebesar 3,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 mengakibatkan ekonomi Indonesia berkontraksi. Kondisi ini mengakibatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia turun menjadi 83,47 juta rupiah per tenaga kerja per tahun pada tahun 2020 atau tumbuh -1,84 persen dibanding tahun sebelumnya.

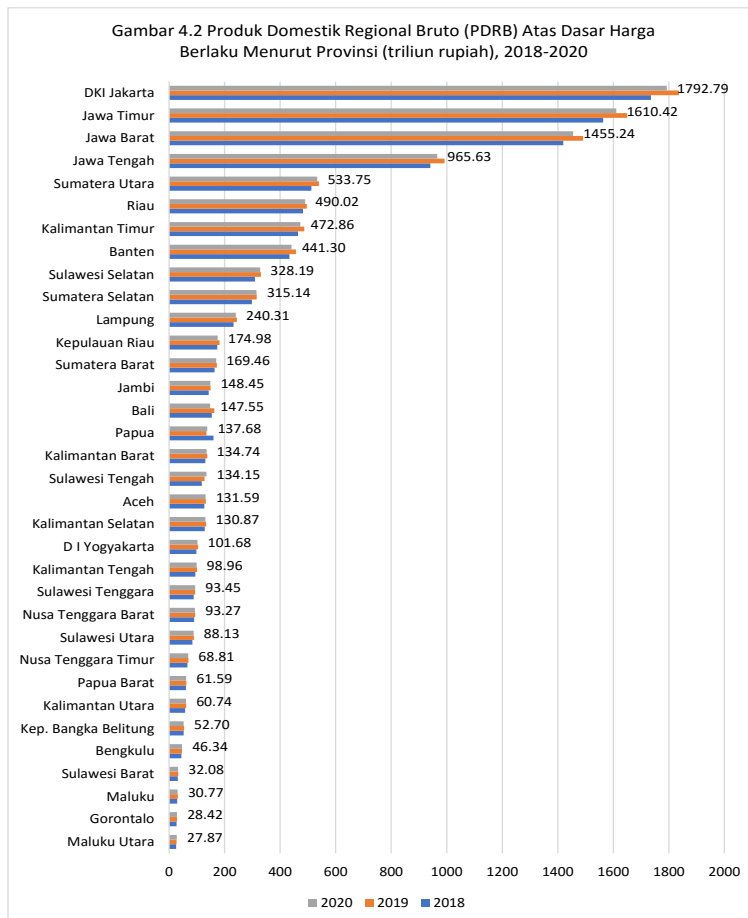
Penurunan produktivitas yang terjadi pada level nasional juga tercermin pada level provinsi. Pada tahun 2020, hampir seluruh provinsi mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja. Tercatat sebanyak 26 provinsi mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1. Sementara itu, delapan provinsi masih mengalami peningkatan produktivitas tenaga di tengah guncangan pandemi COVID-19.



Penurunan produktivitas tenaga kerja tertinggi terjadi di Provinsi Bali dan terendah terjadi di Provinsi DI Yogyakarta. Pada tahun 2019, produktivitas tenaga kerja di Provinsi Bali mencapai 65,89 juta rupiah per tenaga kerja per tahun atau tumbuh 8,02 persen dibanding tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan provinsi yang beribu kota di Kota Denpasar tersebut mengalami kontraksi ekonomi. Kondisi ini berdampak terhadap capaian produktivitas tenaga kerja di Provinsi Bali yang turun menjadi 172,12 juta rupiah per tenaga kerja per tahun atau tumbuh -7,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penurunan produktivitas tenaga kerja di Provinsi DI Yogyakarta tercatat paling rendah diantara provinsi lainnya. Pada tahun 2019, produktivitas tenaga

kerja di Provinsi DI Yogyakarta mencapai 48,05 juta rupiah per tenaga kerja per tahun atau tumbuh sebesar 5,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti halnya Provinsi Bali, pandemi COVID-19 juga mengakibatkan kontraksi ekonomi di Provinsi DI Yogyakarta yang mengakibatkan produktivitas tenaga kerja turun menjadi 47,82 juta rupiah per tenaga kerja per tahun atau tumbuh -0,47 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

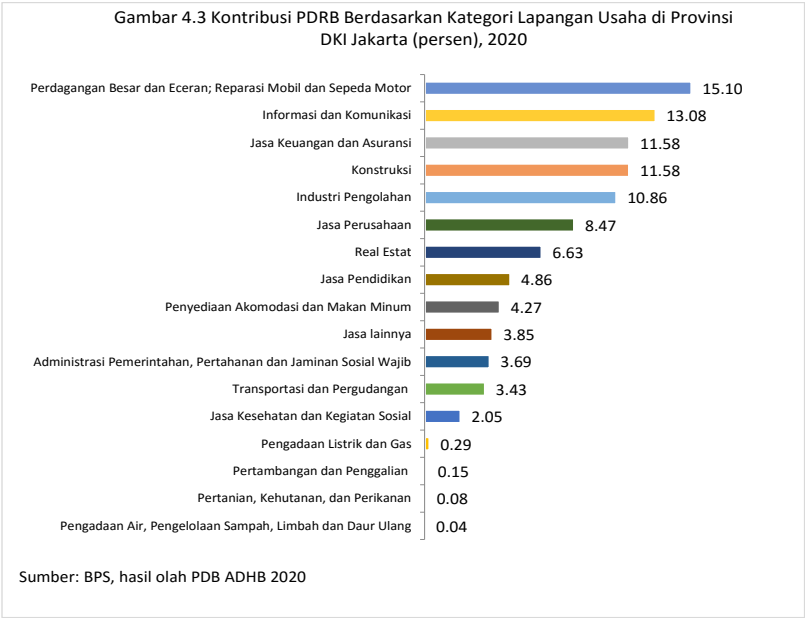
Sementara itu, delapan provinsi mengalami pertumbuhan yang positif pada produktivitas tenaga kerja meskipun terjadi tekanan ekonomi yang berat selama pandemi COVID-19 terjadi. Pada tahun 2020, Provinsi Papua tercatat mengalami pertumbuhan produktivitas tenaga kerja paling tinggi, yaitu sebesar 8,39 persen. Sementara itu, meskipun mengalami peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mencapai 0,25 persen, Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebagai provinsi yang mengalami pertumbuhan paling rendah.



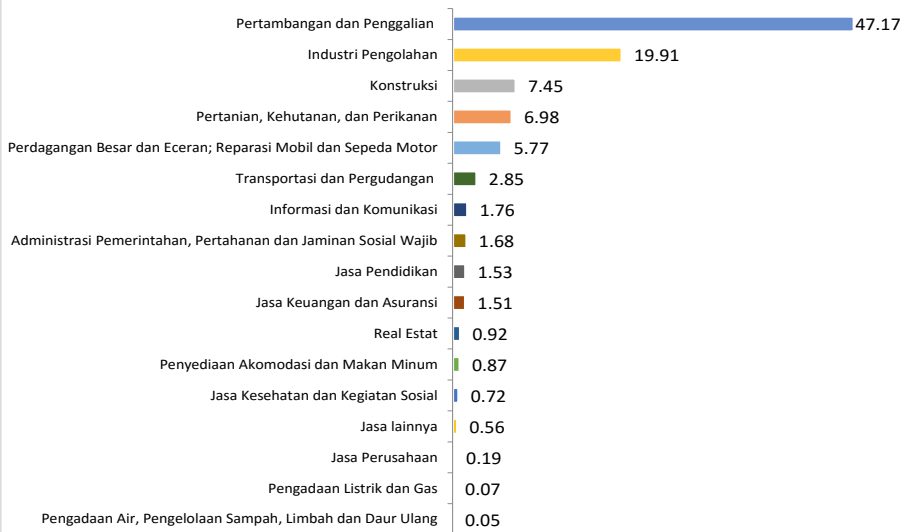
Sumber: BPS

Pada tahun 2020, kontribusi produktivitas tenaga kerja tertinggi berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dari ketiga provinsi tersebut, hanya Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kenaikan produktivitas tenaga kerja, sementara dua provinsi lainnya mengalami penurunan. Sebagai provinsi dengan capaian produktivitas tenaga kerja tertinggi, nilai produktivitas tenaga kerja Provinsi DKI Jakarta jauh melampaui provinsi yang lain, bahkan lebih dari 4 kali capaian nasional.

Sebagai salah satu komponen dalam penghitungan produktivitas tenaga kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya produktivitas tenaga kerja. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 telah berdampak terhadap penurunan PDRB di hampir seluruh provinsi. Meskipun demikian, provinsi di Pulau Jawa masih menjadi penggerak ekonomi nasional. Bahkan, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi kontributor terbesar terhadap ekonomi Jawa maupun nasional. Pada tahun 2020, PDRB (atas dasar harga berlaku) Provinsi DKI Jakarta mencapai 1.792,79 triliun rupiah (Gambar 4.2). Tingginya nilai PDRB DKI Jakarta menjadi salah pendorong tingginya capaian produktivitas tenaga kerja di provinsi ini. Sementara itu, sebagai salah satu kontributor utama ekonomi di Kalimantan, PDRB Provinsi Kalimantan Timur juga mendorong tingginya capaian produktivitas tenaga kerja. Hal yang berbeda justru terjadi pada Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki produktivitas tertinggi ketiga tetapi memiliki PDRB yang tergolong tidak tinggi. Capaian produktivitas yang tinggi didorong dari sisi tenaga kerja yang mampu memaksimalkan capaian *output* (PDRB).

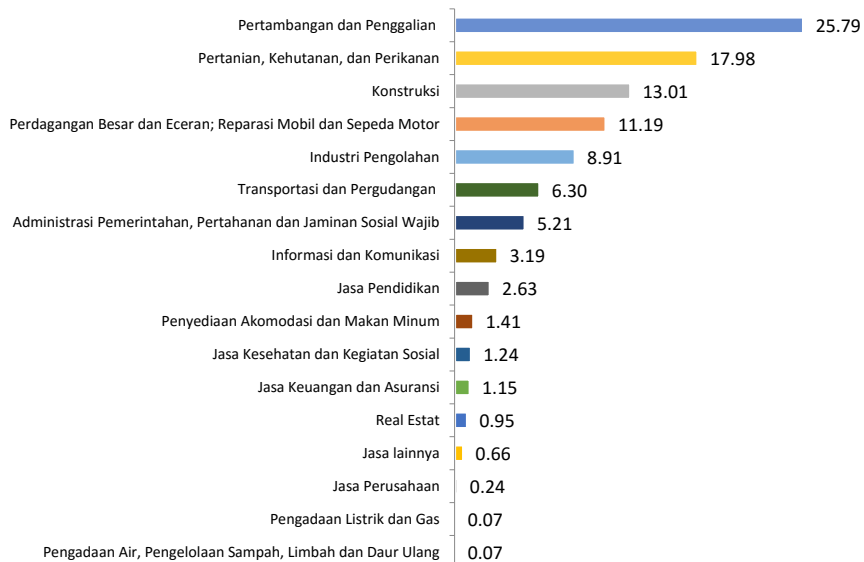


Gambar 4.4 Kontribusi PDRB Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Timur (persen), 2020



Sumber: BPS, hasil olah PDB ADHB 2020

Gambar 4.5 Kontribusi PDRB Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2020

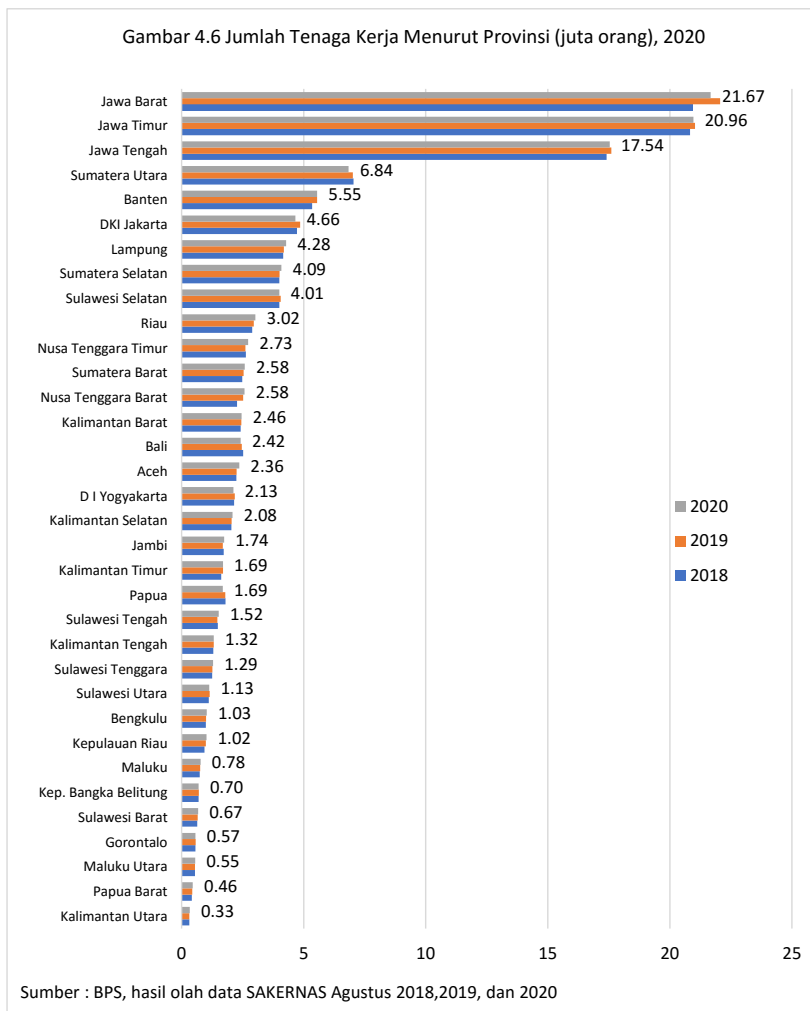


Sumber: BPS, hasil olah PDB ADHB 2020

Dari sisi kategori lapangan usaha, kontribusi PDRB Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 yang terbesar berasal dari kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G), seperti ditunjukkan pada Gambar 4.3. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020, kategori lapangan usaha ini menyumbangkan 271 triliun rupiah terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta atau 15,10 persen dari total PDRB Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat empat kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi di atas 10 persen, yaitu Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Konstruksi, dan Industri Pengolahan. Sementara itu, kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menjadi kontributor utama dalam menggerakkan PDRB Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, diikuti oleh kategori lapangan usaha lain seperti Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan juga berkontribusi besar terhadap PDRB di kedua provinsi tersebut.

Tenaga kerja merupakan komponen lain yang membentuk produktivitas. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas karena tenaga kerja memiliki kontribusi dalam penciptaan nilai tambah ekonomi. Gambar 4.6 menunjukkan bahwa terdapat tiga provinsi dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Indonesia pada tahun 2020, yaitu Provinsi Jawa Barat (21,67 juta orang), Provinsi Jawa Timur (20,96 juta orang), dan Provinsi Jawa Tengah (17,54 juta orang). Bersamaan dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, jumlah tenaga kerja di ketiga provinsi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang cukup tajam terjadi di Provinsi Jawa Barat hampir mencapai 389 ribu.

Meskipun ketiga provinsi memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup besar, produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan berada di bawah capaian nasional. Pada tahun 2020, capaian produktivitas tenaga kerja Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah masing-masing sebesar 67,17, 76,82, dan 55,06 juta rupiah per tenaga kerja per tahun serta berada pada peringkat ke-19, ke-15, dan ke-25 dari 34 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang tinggi tidak menjamin produktivitas tenaga kerja yang tinggi pula. Secara umum, hal ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh provinsi yang memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak, khususnya tiga provinsi ini.



Ketimpangan Produktivitas Tenaga Kerja Antarprovinsi

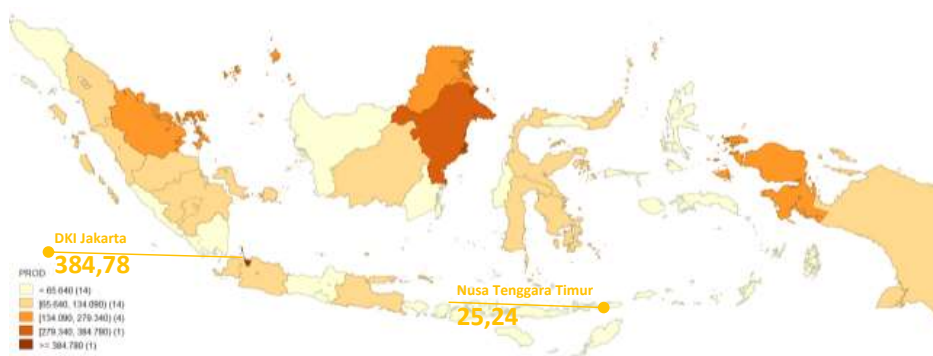
Capaian produktivitas tenaga kerja di tingkat nasional secara umum menggambarkan produktivitas di tingkat regional. Akan tetapi, perkembangan capaian di tingkat nasional masih menyimpan ketimpangan produktivitas tenaga kerja antarprovinsi. Pada tahun 2020, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan capaian produktivitas tenaga kerja tertinggi. Selama periode 2011-2019, Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur secara bergantian menjadi provinsi dengan capaian produktivitas tenaga kerja tertinggi. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan produktivitas terendah selama periode 2011-2020.



Sumber : Kemnaker, hasil olah pengukuran produktivitas

Secara umum, ketimpangan produktivitas tenaga kerja antar provinsi yang diindikasikan dengan selisih selisih capaian produktivitas tenaga kerja tertinggi dengan terendah di tingkat provinsi menunjukkan peningkatan. Hal ini terjadi karena selisih (*gap*) capaian produktivitas tenaga kerja tertinggi dengan terendah semakin besar. Selisih pada tahun 2011 sebesar 265,74 juta rupiah per pekerja per tahun, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 359,54 juta rupiah per pekerja per tahun. Selama periode 2011-2020, selisih tersebut rata-rata meningkat sebesar 3,42 persen per tahun. Sementara itu, pada tahun 2020 selisih tersebut meningkat sebesar 2,19 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan per tahun.

Gambar 4.8 Peta Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Provinsi (juta rupiah per tenaga kerja per tahun), 2020



Sumber : BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Dari sisi sebaran capaian, produktivitas tenaga kerja pada sebagian besar provinsi masih berada di bawah 88,47 juta rupiah per pekerja per tahun (Gambar 4.8). Terdapat delapan provinsi dengan produktivitas tenaga kerja di atas nasional pada tahun 2020. Kedelapan provinsi tersebut adalah Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Pada tahun 2019, capaian produktivitas tenaga kerja di delapan provinsi tersebut juga di atas capaian nasional.

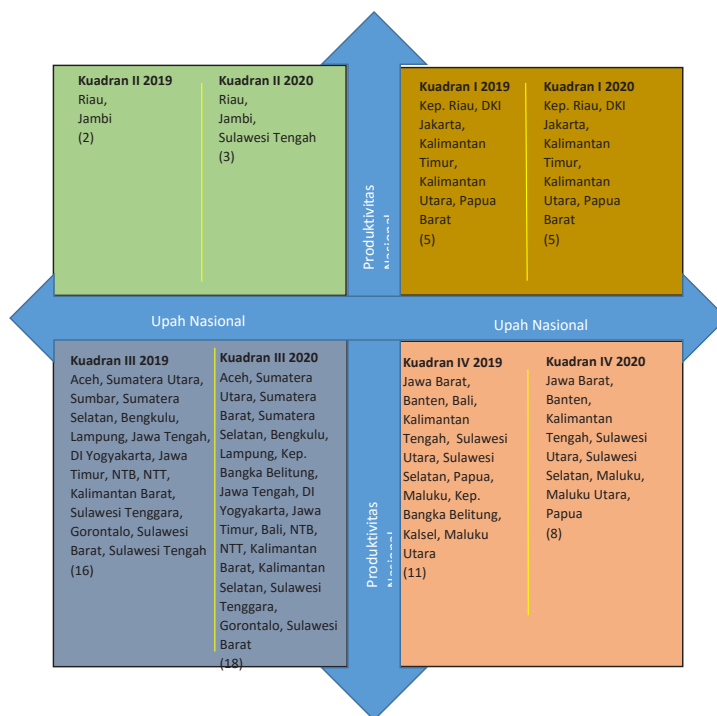
Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Upah Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja yang tinggi pada suatu wilayah mengindikasikan tingkat efisiensi dan kinerja tenaga kerja untuk menghasilkan *output* pada wilayah tersebut. Dalam kondisi ideal, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja akan berdampak pada semakin tinggi upah yang diterima tenaga kerja.

Hubungan produktivitas tenaga kerja dan upah yang diterima disajikan pada Gambar 4.9. Hubungan ini terbagi menjadi empat kuadran, yaitu:

- Kuadran I memuat provinsi-provinsi dengan produktivitas tenaga kerja dan upah tenaga kerja di atas nasional. Pada tahun 2020, terdapat lima provinsi yang masuk dalam kuadran ini, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Jumlah provinsi yang masuk dalam kuadran ini sama seperti tahun sebelumnya.
- Kuadran II memuat provinsi-provinsi dengan produktivitas tenaga kerja di atas nasional, tetapi upah tenaga kerja yang diterima di bawah upah nasional. Pada tahun 2020, terdapat tiga provinsi yang masuk dalam kuadran ini, yaitu Provinsi Riau, Jambi, dan Sulawesi Tengah. Pada tahun 2019, hanya Provinsi Riau dan Jambi yang berada pada kuadran ini.

Gambar 4.9 Hubungan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Upah Tenaga Kerja, 2019 dan 2020



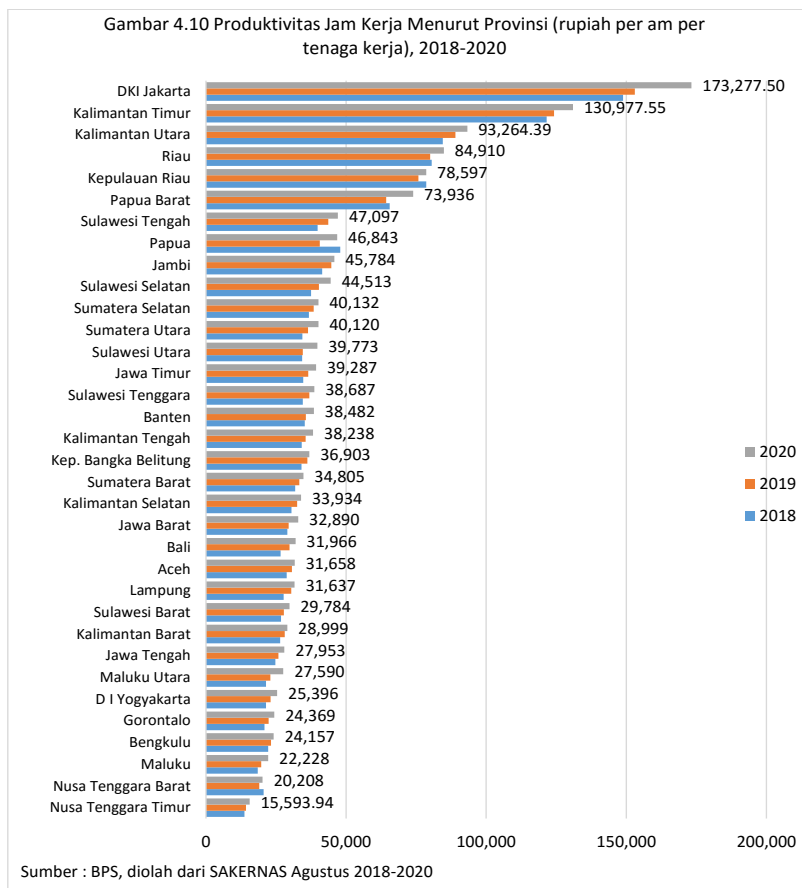
- Kuadran III memuat provinsi-provinsi dengan produktivitas tenaga kerja dan upah tenaga kerja berada di bawah nasional. Pada tahun 2020, terdapat 18 provinsi yang berada pada kuadran ini, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Jumlah provinsi yang berada pada ini bertambah dua dibandingkan dengan tahun 2019.
- Kuadran IV memuat provinsi-provinsi yang memiliki produktivitas tenaga kerja di bawah nasional, tetapi memiliki upah tenaga kerja di atas nasional. Pada tahun 2020, terdapat delapan provinsi yang berada pada kuadran ini, yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Jumlah provinsi yang berada pada ini berkurang tiga dibandingkan dengan tahun 2019.

Produktivitas Jam Kerja Provinsi

Sejalan dengan capaian nasional, di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada tahun 2020 seluruh provinsi mengalami pertumbuhan

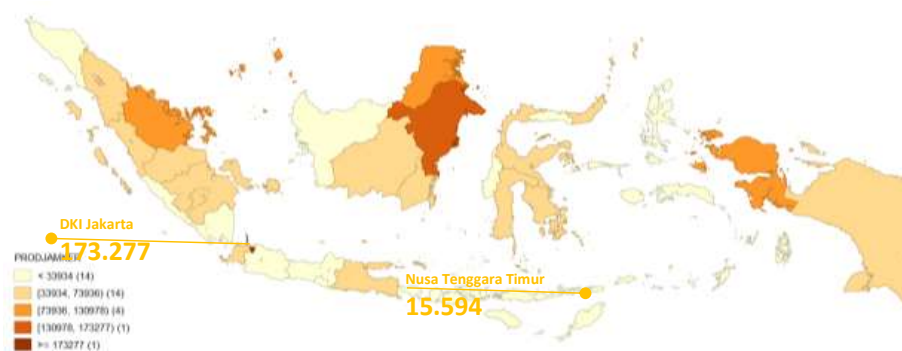
produktivitas jam kerja. Pertumbuhan produktivitas jam kerja tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara, yaitu tumbuh sebesar 20,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam dua tahun terakhir, produktivitas jam kerja di Provinsi Maluku rata-rata tumbuh 13,55 persen per tahun yang juga merupakan rata-rata pertumbuhan tertinggi. Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 2,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 terdapat sepuluh provinsi yang memiliki produktivitas jam kerja diatas nasional, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Jambi, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Produktivitas jam kerja terbesar dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 173.277,50 rupiah per jam per tenaga kerja. Sementara itu, produktivitas jam kerja terbesar kedua dan ketiga dicapai oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang masing-masing sebesar 130.978,55 dan 93.264,39 rupiah per jam per tenaga kerja.



Produktivitas jam kerja di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara jauh melampaui capaian nasional. Produktivitas jam kerja di Provinsi Kalimantan Timur sekitar tiga kali lipat dibandingkan nasional, sementara di Kalimantan Utara lebih dari dua kali lipat dibandingkan nasional. Bahkan, produktivitas jam kerja di Provinsi DKI Jakarta hampir mencapai empat kali lipat dibandingkan nasional. Selain cukup besar dibandingkan nasional, produktivitas jam kerja ketiga provinsi ini juga masih terus tumbuh. Dalam dua tahun terakhir, produktivitas jam kerja di ketiga provinsi tersebut masing-masing tumbuh 7,90 persen per tahun, 3,80 persen per tahun, dan 5,04 persen per tahun.

Gambar 4.11 Peta Produktivitas Jam Kerja Menurut Provinsi (rupiah per jam per tenaga kerja), 2020



Sumber : BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

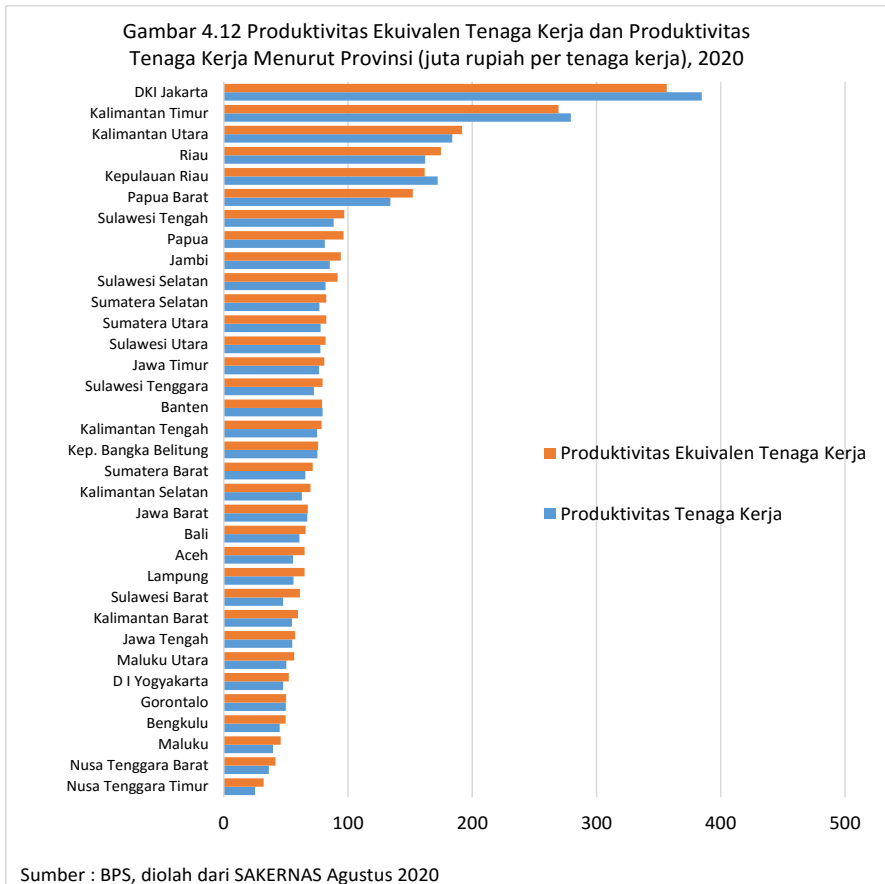
Produktivitas jam kerja terendah pada tahun 2020 dicapai oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar 15.594,94 rupiah per jam per tenaga kerja. Meskipun demikian, produktivitas jam kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga terus tumbuh. Tahun 2020, produktivitas jam kerja di provinsi ini tumbuh 9,33 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara dalam dua tahun terakhir, produktivitas jam kerja di provinsi ini rata-rata tumbuh 6,48 persen per tahun.

Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator yang menggambarkan kinerja tenaga kerja belum mempertimbangkan efisiensi dari sisi jam kerja. Indikator produktivitas tenaga kerja yang sudah mempertimbangkan jam kerja adalah ekuivalen tenaga kerja (ETK).

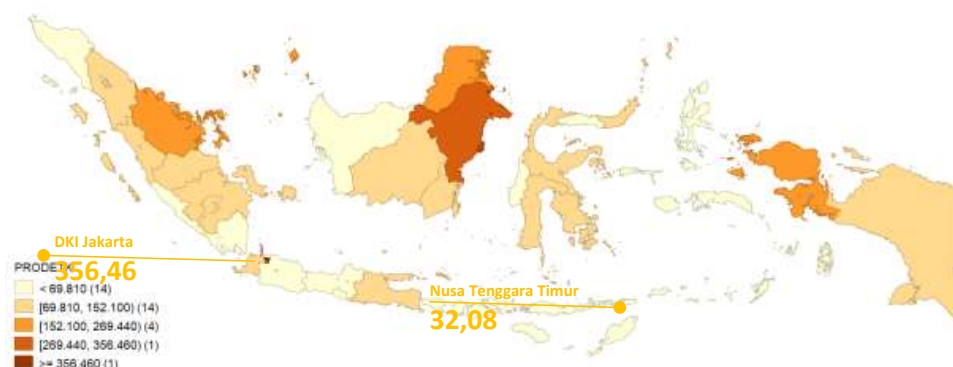
Untuk dapat mengetahui capaian efisiensi dari tenaga kerja, perlu dilakukan perbandingan antara capaian produktivitas ekuivalen tenaga kerja dengan

capaian produktivitas tenaga kerja. Capaian produktivitas ekuivalen tenaga kerja dari suatu kategori lapangan usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja menunjukkan bahwa tenaga kerja pada kategori lapangan usaha tersebut sudah bekerja lebih efisien, dan berlaku juga sebaliknya.



Berdasarkan penghitungan produktivitas ekuivalen tenaga kerja (Gambar 4.12), pada tahun 2020 terdapat tiga provinsi dengan dengan capaian, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Ketiga provinsi tersebut juga merupakan provinsi dengan capaian produktivitas jam kerja tertinggi. Secara umum, hampir seluruh provinsi cukup efisien dari sisi tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan produktivitas ekuivalen tenaga kerja yang lebih tinggi dari produktivitas tenaga kerja pada 30 provinsi. Sebaliknya, produktivitas ekuivalen tenaga kerja justru lebih rendah dari produktivitas tenaga kerja di Provinsi Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta.

Gambar 4.13 Peta Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Provinsi (juta rupiah per tenaga kerja per tahun), 2020



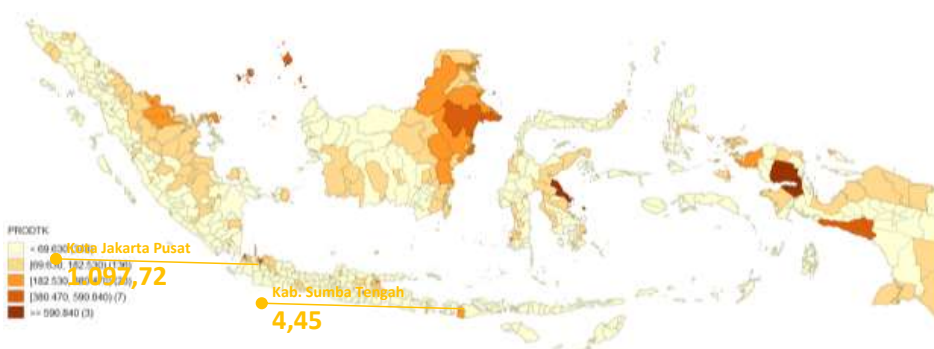
Sumber : BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020

Pada tahun 2020, efisiensi paling tinggi terjadi di Provinsi Papua Barat. Produktivitas ekuivalen tenaga kerja di provinsi ini lebih tinggi 18,01 juta rupiah per tenaga kerja per tahun dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja. Sementara itu, efisiensi terendah terjadi di Provinsi Gorontalo dengan selisih antara produktivitas ekuivalen tenaga kerja dengan produktivitas tenaga kerja hanya sebesar 0,14 juta rupiah per tenaga kerja per tahun.

Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota

Seperti halnya dengan produktivitas tenaga kerja di tingkat provinsi, capaian produktivitas di level kabupaten/kota juga cukup bervariasi pada tahun 2020. Capaian produktivitas tenaga kerja cenderung lebih bervariasi di kabupaten/kota di luar Jawa seperti ditunjukkan pada gambar 4.14. Tiga kabupaten/kota dengan capaian produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah Kota Jakarta Pusat (DKI Jakarta), Kabupaten Teluk Bintuni (Papua Barat), dan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah).

Gambar 4.14 Peta Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota (juta rupiah per tenaga kerja per tahun), 2020



Sumber: BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020

Produktivitas tenaga kerja Kota Jakarta Pusat pada tahun 2020 mencapai 1.097,72 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Capaian ini meningkat 3,44 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kota Jakarta Pusat merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di Indonesia, dimana sebagian besar kegiatan ekonomi yang beroperasi adalah kategori lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (Kategori K), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (Kategori G), serta Informasi dan Komunikasi (Kategori J) yang masing-masing berkontribusi sebesar 24,92 persen, 14,54 persen, dan 11,34 persen.

Capaian produktivitas tenaga kerja tertinggi kedua pada level kabupaten/kota pada tahun 2020 berada di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Produktivitas tenaga kerja di kabupaten ini mencapai 867,86 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Capaian ini mengalami penurunan 4,42 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur perekonomian di kabupaten ini berbeda dengan Kota Jakarta Pusat. Penopang ekonomi utama kabupaten ini adalah kategori lapangan usaha Industri Pengolahan (Kategori C), Pertambangan dan Penggalian (Kategori B), dan Konstruksi (Kategori F) dengan kontribusi terhadap total PDRB masing-masing sebesar 48,35 persen, 36,69 persen, dan 8,14 persen.

Kabupaten Morowali yang berada di Sulawesi Tengah merupakan kabupaten dengan capaian produktivitas tenaga kerja tertinggi ketiga setelah Kota Jakarta Pusat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Morowali mencapai 803,12 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Perekonomian di Kabupaten Morowali utamanya digerakkan oleh kategori lapangan usaha

yang sama seperti Kabupaten Teluk Bintuni. Kategori lapangan usaha Industri Pengolahan (Kategori C), Pertambangan dan Penggalian (Kategori B), dan Konstruksi (Kategori F) dengan kontribusi terhadap total PDRB masing-masing sebesar 69,98 persen, 18,33 persen, dan 5,00 persen.

Pada tahun 2020, capaian produktivitas tenaga kerja terendah terjadi di Kabupaten Sumba Tengah (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat), dan Kabupaten Nduga (Provinsi Papua). Produktivitas tenaga kerja pada masing-masing kabupaten sebesar 4,45, 6,62, dan 11,32 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Pada tahun 2020, produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Sumba Tengah dan Pegunungan Arfak meningkat masing-masing 2,65 persen dan 0,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Nduga mengalami penurunan sebesar 5,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, pertumbuhan positif produktivitas tenaga kerja terjadi di 155 kabupaten/kota atau 30,2 persen dari jumlah kabupaten/kota yang ada di Indonesia, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, jumlah kabupaten/kota dengan pertumbuhan positif mencapai 393 kabupaten/kota.

Pada tahun 2020, pertumbuhan positif produktivitas tenaga kerja tertinggi terjadi di Kabupaten Lanny Jaya (Provinsi Papua) dengan pertumbuhan mencapai 152,33 persen. Kabupaten Nias Barat (Sumatera Utara) dan Kabupaten Paniai (Papua) menjadi kabupaten dengan pertumbuhan positif produktivitas tenaga kerja tertinggi kedua dan ketiga dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 59,57 persen dan 54,34 persen. Sementara itu, Kabupaten Muna Barat (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur) menjadi kabupaten dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tertinggi yang negatif. Pertumbuhan pada ketiga kabupaten tersebut masing-masing adalah sebesar -16,64 persen, -16,22 persen, dan -15,70 persen.

Gambar 4.15 Peta Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2020

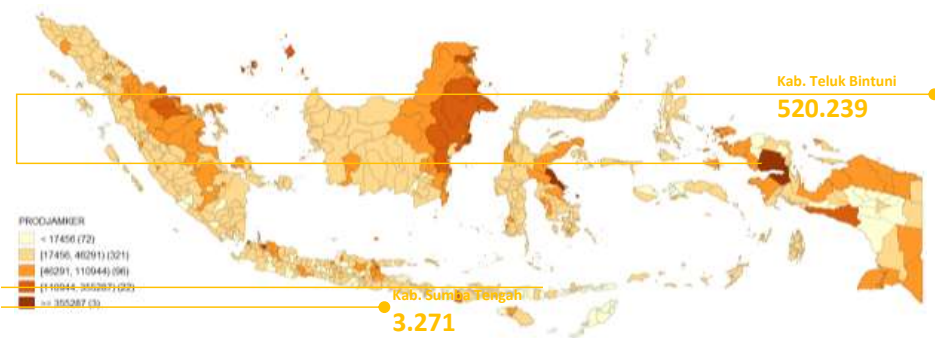


Sumber: BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020

Penurunan atau pertumbuhan negatif produktivitas tenaga kerja pada tahun 2020 terjadi di 358 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh provinsi. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang paling banyak mengalami pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang negatif. Dari 38 kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut, terdapat 30 kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan produktivitas yang negatif. Dari sisi persentase terhadap total kabupaten/kota dalam satu provinsi, Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak yang mengalami pertumbuhan negatif karena seluruh kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut mengalami pertumbuhan negatif.

Produktivitas jam kerja tertinggi tahun 2020 dicapai oleh Kabupaten Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat), Kota Jakarta Pusat (Provinsi DKI Jakarta), dan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dengan capaian masing-masing kabupaten/kota sebesar 520.239; 503.889; dan 355.287 rupiah per jam per tenaga kerja, sedangkan capaian produktivitas jam kerja terendah secara berturut-turut dicapai oleh kabupaten/kota yang sama dengan produktivitas tenaga kerja, yaitu Kabupaten Nduga (Provinsi Papua), Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat), dan Kabupaten Sumba Tengah (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Produktivitas jam kerja ketiga kabupaten/kota tersebut masing-masing sebesar 6.513, 4.705, dan 3.271 rupiah per jam per tenaga kerja.

Gambar 4.16 Peta Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota (rupiah per jam per tenaga kerja, 2020)

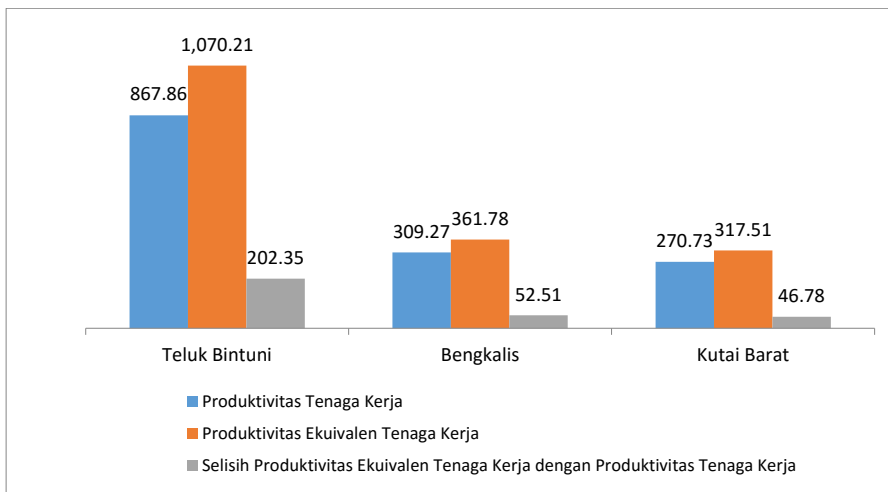


Sumber : BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020

Pada tahun 2020, 420 dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia atau sekitar 81,71 persen mengalami pertumbuhan produktivitas jam kerja positif. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 376 kabupaten/kota (73,15 persen). Pertumbuhan produktivitas jam kerja positif tertinggi terjadi di Kabupaten Lanny Jaya (Provinsi Papua) dengan pertumbuhan 166,91 persen. Pertumbuhan jam kerja positif tertinggi kedua terjadi di Kabupaten Nias Barat (Provinsi Sumatera Utara) dengan pertumbuhan sebesar 124,32 persen. Sementara itu, Kabupaten Samosir yang juga berada di Provinsi Sumatera Utara merupakan kabupaten dengan pertumbuhan jam kerja positif tertinggi ketiga dengan pertumbuhan sebesar 115,37 persen.

Bila ditinjau dari produktivitas ekuivalen tenaga kerja, kabupaten/kota yang mengalami peningkatan capaian produktivitas ekuivalen tenaga kerja pada tahun 2020 sebanyak 420 kabupaten/kota atau sekitar 81,71 persen dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Sementara itu, capaian produktivitas ekuivalen tertinggi pada tahun 2020 terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat) sebesar 1.070,21 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Capaian tertinggi kedua terjadi di Kota Jakarta Pusat (Provinsi DKI Jakarta) dengan capaian sebesar 1.036,57 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Capaian tertinggi ketiga ditempati Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dengan capaian sebesar 730,88 juta rupiah per tenaga kerja per tahun.

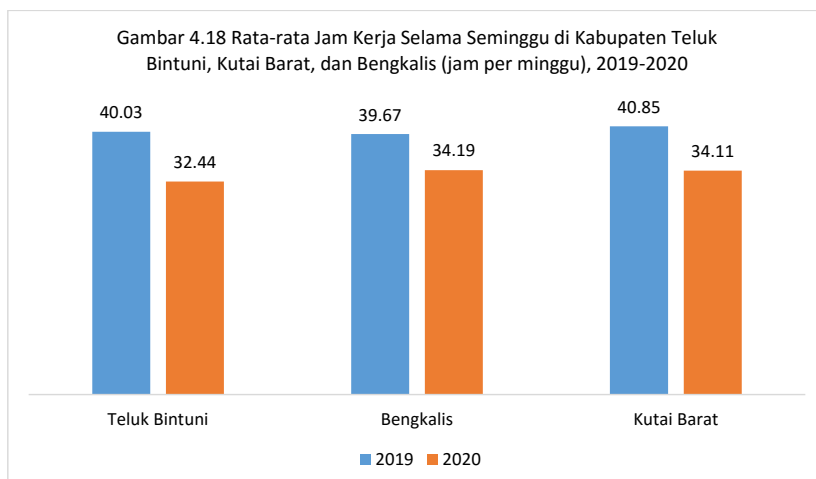
Gambar 4.17 Tiga Kabupaten/Kota dengan Efisiensi Tertinggi (juta rupiah per tenaga kerja per tahun), 2020



Sumber : BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019

Pada tahun 2020, sebanyak 407 kabupaten/kota atau sekitar 79,186 persen kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalami efisiensi produktivitas. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 272 kabupaten/kota (52,92 persen).

Efisiensi terbesar terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan (Gambar 4.17). Produktivitas ekuivalen tenaga kerja di Kabupaten Teluk Bintuni lebih tinggi 202,35 juta rupiah per tenaga kerja per tahun atau sekitar 23,32 persen dibanding produktivitas tenaga kerja. Efisiensi tertinggi kedua dan ketiga secara berturut-turut dicapai oleh Kabupaten Kabupaten Bengkalis (Provinsi Riau) dan Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur) dengan selisih antara produktivitas ekuivalen tenaga kerja dengan produktivitas tenaga kerjanya masing-masing sebesar 52,51 dan 46,78 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Sementara itu, capaian efisiensi terendah terjadi di Kota Banjar Baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian produktivitas ekuivalen tenaga kerja di Kota Banjar Baru lebih tinggi 0,11 juta rupiah per tenaga kerja per tahun dibandingkan dengan capaian produktivitas tenaga kerjanya.



Sumber : BPS, hasil olah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 dan 2020

Tiga kabupaten/kota dengan capaian efisiensi tertinggi pada tahun 2020 didorong oleh capaian rata-rata jam kerja per minggu yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Rata-rata jam kerja di Kabupaten Teluk Bintuni turun menjadi 32,44 jam per minggu atau turun 18,96 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata jam kerja per minggu di Kabupaten Bengkalis juga turun menjadi 34,19 jam per minggu atau turun sebesar 13,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, rata-rata jam kerja per minggu di Kabupaten Kutai Barat turun menjadi 34,11 jam per minggu atau turun sekitar 16,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral

Aktivitas ekonomi pada setiap kategori lapangan usaha merupakan penggerak perekonomian pada suatu wilayah. Begitu juga dengan produktivitas setiap kategori lapangan usaha di suatu wilayah akan menggerakkan produktivitas secara total. Pertumbuhan dan kontribusi setiap lapangan usaha dalam menghasilkan produktivitas tenaga kerja akan sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian nasional.

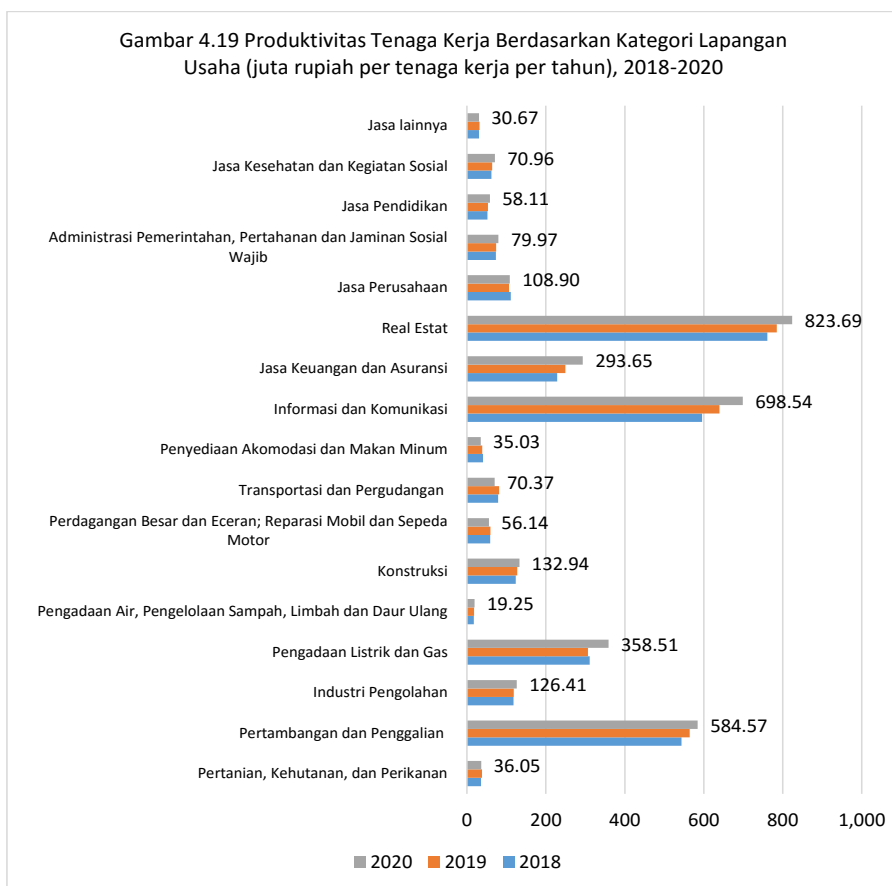
Bab ini membahas kondisi produktivitas tenaga kerja, produktivitas jam kerja, dan produktivitas ekuivalen tenaga kerja di level lapangan usaha atau sektoral. Kebijakan produktivitas tenaga kerja tidak hanya menyangkut peran regional dalam pertumbuhannya, tetapi yang juga penting, melihat peran lapangan usaha atau sektoral secara langsung dalam upaya peningkatan dan perbaikan

produktivitas tenaga kerjanya. Keberadaan revolusi industri 4.0 serta kemajuan teknologi yang semakin maju menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi setiap lapangan usaha untuk berbenah dan menciptakan inovasi baru dalam meningkatkan daya saing dan kinerja tenaga kerja dalam menghasilkan *output* yang lebih baik.

Capaian Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral

Pada tahun 2020, dua belas kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Tahun sebelumnya, terdapat empat belas kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja yang tumbuh positif tahun 2020 terjadi pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (Kategori B); Industri Pengolahan (Kategori C); Pengadaan Listrik dan Gas (Kategori D); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kategori E); Konstruksi (Kategori F); Informasi dan Komunikasi (Kategori J); Jasa Keuangan dan Asuransi (Kategori K); Real Estat (Kategori L); Jasa Perusahaan (Kategori M, N); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (Kategori O); Jasa Pendidikan (Kategori P); dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kategori Q).

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, produktivitas tenaga kerja secara sektoral pada tahun 2020 tidak banyak berubah dari sisi peringkat kategori lapangan usaha. Gambar 4.19 menunjukkan tiga kategori lapangan usaha dengan capaian produktivitas tenaga kerja tertinggi pada tahun 2020, yaitu Real Estat (Kategori L); Informasi dan Komunikasi (Kategori J); serta kategori Pertambangan dan Penggalian (Kategori B). Capaian produktivitas tenaga kerja pada masing-masing kategori lapangan usaha tersebut dalam juta rupiah per tenaga kerja per tahun adalah 823,69; 698,54; dan 584,57.



Sumber : BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Produktivitas tenaga kerja pada ketiga kategori tersebut tetap mengalami pertumbuhan meskipun terjadi pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, produktivitas tenaga kerja pada masing-masing kategori L, J, dan B tumbuh sebesar 3,10 persen, 7,45 persen, dan 3,89 persen. Sementara itu, pada tahun 2020 ketiga kategori tersebut kembali berhasil meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Adapun peningkatan capaian produktivitas tenaga kerja pada kategori lapangan usaha Real Estat (Kategori L); Informasi dan Komunikasi (Kategori J); serta kategori Pertambangan dan Penggalian (Kategori B) masing masing sebesar 4,98 persen, 9,15 persen, dan 3,58 persen dari tahun 2018.

Kategori lapangan usaha dengan capaian produktivitas tenaga kerja tertinggi merupakan lapangan usaha yang padat modal. Dari sisi jumlah tenaga kerja, ketiga kategori lapangan usaha tersebut memiliki karakteristik yang hampir sama.

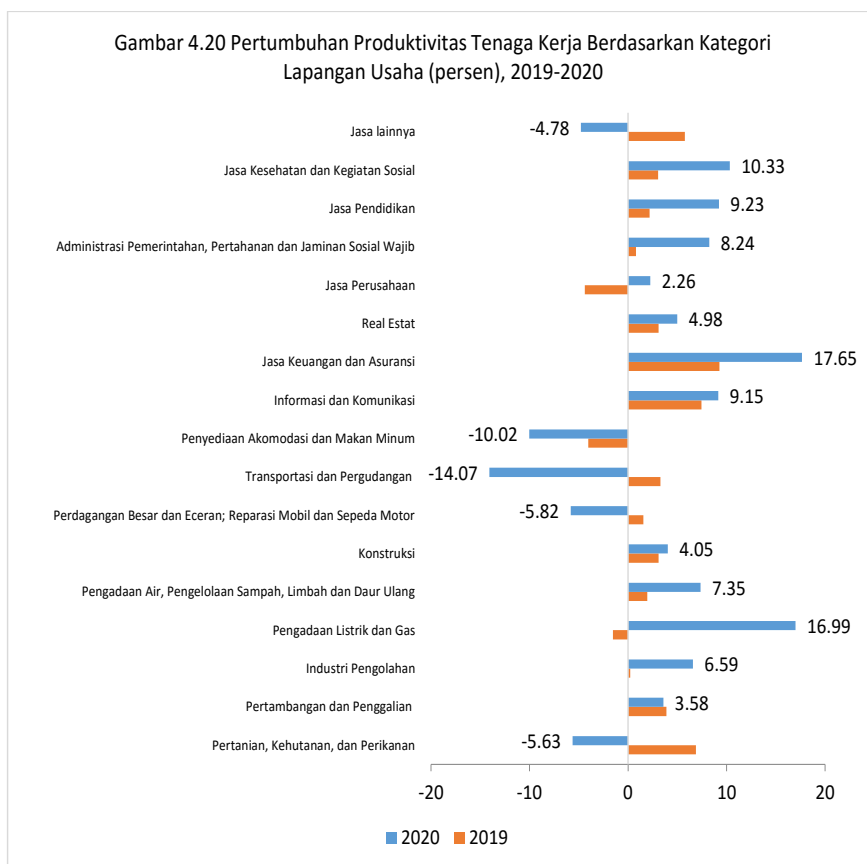
Tenaga kerja yang terlibat dalam kategori lapangan usaha ini cenderung sedikit jika dibandingkan dengan kategori lapangan usaha lainnya. Namun, jumlah tenaga kerja yang sedikit dari ketiga kategori lapangan usaha tersebut mampu menghasilkan *output* jauh lebih besar dibandingkan kategori lainnya.

Berdasarkan hasil penghitungan, kategori lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kategori E) menjadi kategori lapangan usaha dengan produktivitas tenaga kerja terendah. Capaian produktivitas tenaga kerja pada kategori lapangan usaha ini hanya mencapai 19,25 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Sementara itu, kategori lapangan usaha Jasa Lainnya (Kategori R, S, T, U); dan kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I) memiliki capaian produktivitas tenaga kerja kedua dan ketiga terendah, dengan capaian 30,67 dan 35,03 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Ketiga kategori tersebut termasuk lapangan usaha padat karya.

Capaian produktivitas tenaga kerja kategori lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kategori E) pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kategori lapangan usaha Jasa Lainnya (Kategori R, S, T, U) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I) mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada masa pandemi, produktivitas tenaga kerja pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I) mengalami kontraksi hingga mencapai 10,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontraksi ini merupakan yang tertinggi kedua setelah kontraksi pada kategori Transportasi dan Pergudangan (H) yang mencapai 14,07 persen.

Pada tahun 2020, produktivitas tenaga kerja pada kategori lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (Kategori K) tercatat paling tinggi, mencapai 17,65 persen. Tahun sebelumnya, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pada kategori juga merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 9,29 persen. Kategori berikutnya yang tumbuh paling tinggi pada tahun 2020 secara berturut-turut adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas (Kategori D) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kategori Q) dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 16,99 persen dan 10,33 persen.

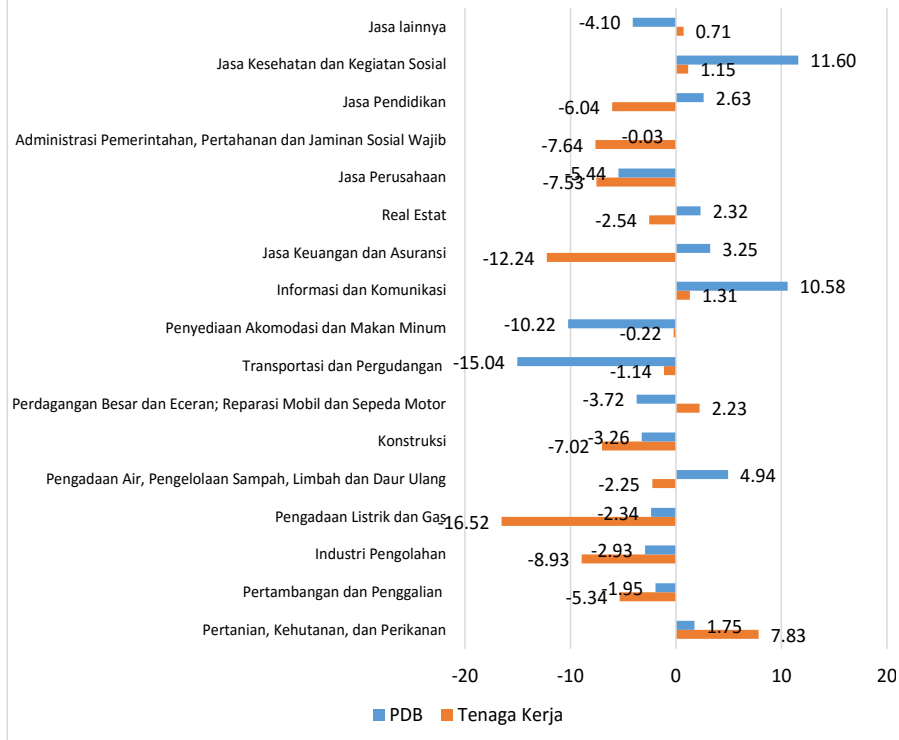
Gambar 4.20 Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha (persen), 2019-2020



Sumber : BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

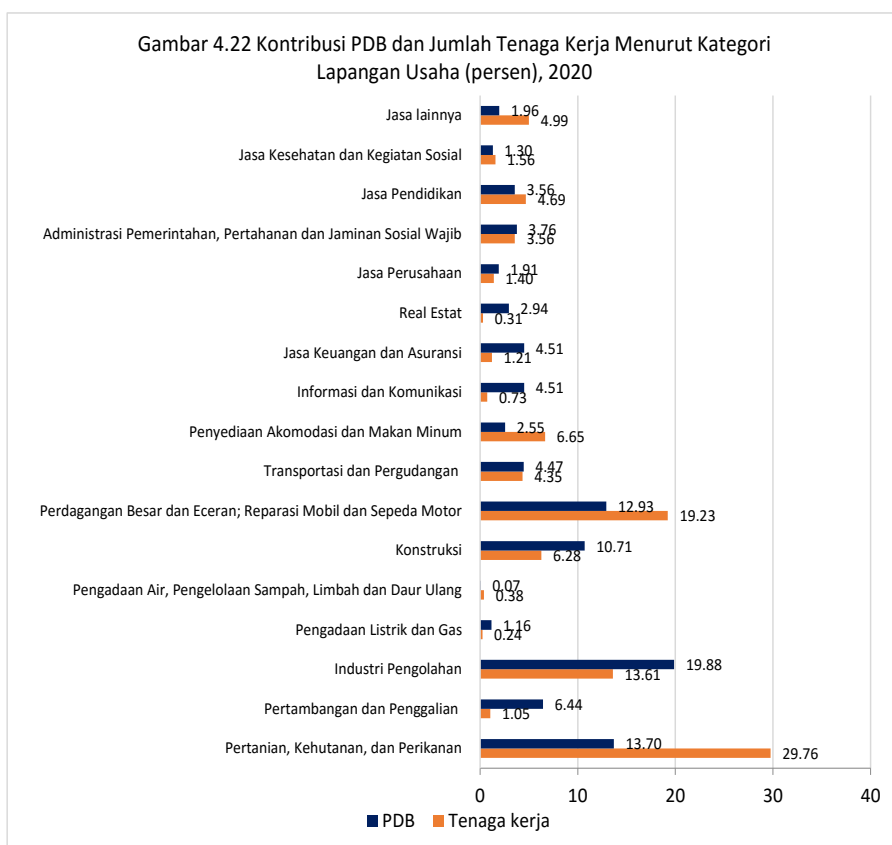
Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi perubahan pada komponen PDB atau tenaga kerjanya. Gambar 4.21 menunjukkan kategori lapangan usaha yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja pada tahun 2020. Bersamaan dengan terjadinya pandemi COVID-19, hampir seluruh kategori lapangan usaha mengalami penurunan jumlah tenaga kerja kecuali lima kategori, yaitu kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Kategori A); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G); Informasi dan Komunikasi (Kategori J); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kategori Q); serta Jasa lainnya (Kategori R, S, T, U).

Gambar 4.21 Pertumbuhan PDB dan Tenaga Kerja Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha (persen), 2020



Sumber : BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Penurunan terbesar terjadi pada kategori lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (Kategori D) sebesar 16,52 persen. Tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja pada kategori ini masih tumbuh sebesar 5,67 persen. Sementara itu, pandemi yang terjadi justru memunculkan fenomena peningkatan jumlah tenaga kerja pada kategori lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (Kategori J) serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kategori Q). Jumlah tenaga kerja pada kedua kategori tumbuh cukup tinggi masing-masing sebesar 10,58 persen dan 11,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber : BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) ADHB dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Capaian produktivitas tenaga kerja setiap kategori lapangan usaha tidak selalu sama dengan kontribusi setiap lapangan usaha pada PDB. Kategori lapangan usaha dengan karakter padat karya, cenderung memiliki kontribusi PDB yang cukup tinggi namun dengan capaian produktivitas tenaga kerja yang cenderung rendah. Salah satunya adalah kategori lapangan usaha Industri Pengolahan (Kategori C) yang memiliki kontribusi PDB tertinggi hingga 19,88 persen. Namun, capaian produktivitas tenaga kerja pada kategori ini hanya berada di posisi ke-7. Tiga provinsi besar di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah berkontribusi besar terhadap kategori lapangan usaha Industri Pengolahan (Kategori C). Kontribusi ketiga provinsi tersebut dalam capaian PDB kategori lapangan usaha ini mencapai 55,42 persen. Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi hingga 23 persen dari keseluruhan capaian PDRB dari kategori lapangan usaha Industri Pengolahan.

Kategori lapangan usaha yang hampir serupa dengan kategori lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (Kategori G) serta kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Kategori A) memiliki kontribusi PDB masing-masing sebesar 12,93 persen dan 13,70 persen. Provinsi DKI Jakarta menjadi kontributor terbesar pada capaian PDB Indonesia kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (Kategori G), yaitu sebesar 20,41 persen, sedangkan pada kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Kategori A) kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 13,39 persen.

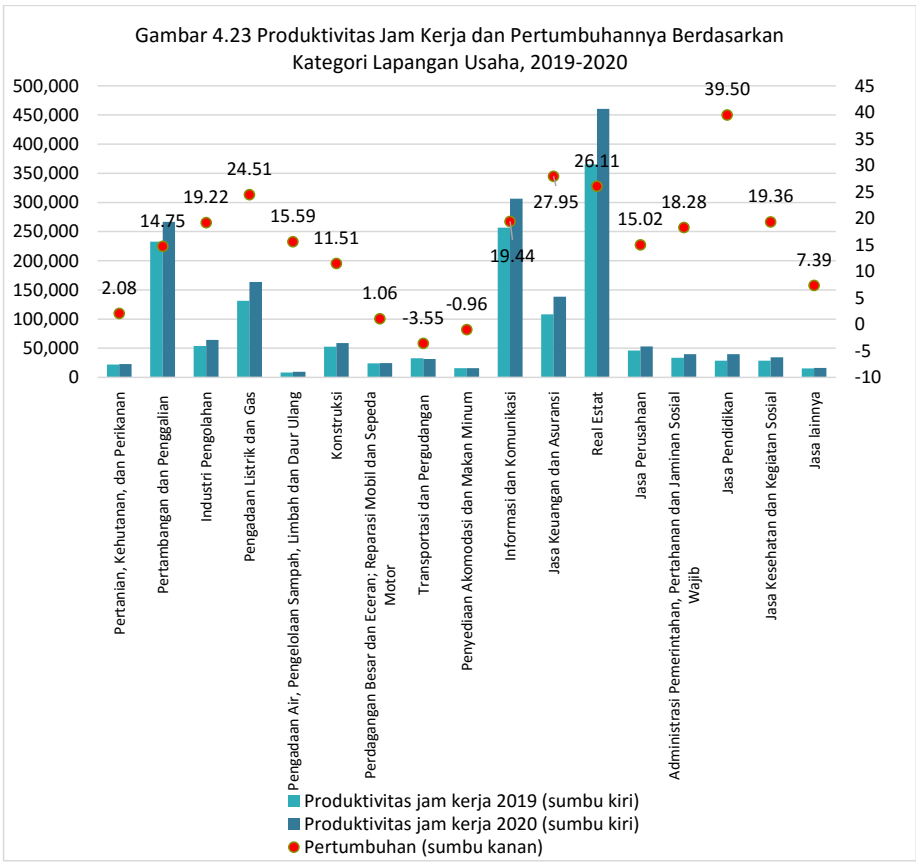
Sebagai kategori lapangan usaha dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi, kategori lapangan usaha Real Estat (Kategori L) memiliki kontribusi yang tidak begitu besar dalam PDB Indonesia. Kontribusi kategori lapangan usaha Real Estat (Kategori L) pada PDB hanya sebesar 2,94 persen. Rendahnya kontribusi kategori lapangan usaha ini terhadap PDB disebabkan oleh kategori lapangan usaha ini hanya terpusat di wilayah tertentu, salah satunya adalah Provinsi DKI Jakarta. Kontribusi DKI Jakarta terhadap PDB kategori lapangan usaha Real Estat mencapai 34,86 persen. Selain Provinsi DKI Jakarta, provinsi penyangga seperti Banten juga memiliki kontribusi cukup besar dalam PDB kategori lapangan usaha Real Estat, yaitu 10,82 persen. Selain terpusat di Pulau Jawa, kategori lapangan usaha Real Estat juga berkembang di Pulau Sumatera, dengan pusat pengembangan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari kontribusi provinsi ini pada PDB kategori lapangan usaha Real Estat yang mencapai 8,51 persen.

Produktivitas Jam Kerja Sektoral

Rata-rata jam kerja di Indonesia pada tahun 2020 adalah 37,88 jam per minggu, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (41,80 jam per minggu). Pandemi yang terjadi pada tahun 2020 berimbas pada penurunan rata-rata jam kerja per minggu sebesar 3,93 jam. Menurunnya rata-rata jam kerja dan meningkatnya capaian produktivitas baik tenaga kerja, ekuivalen tenaga kerja, maupun jam kerja mengindikasikan tenaga kerja di Indonesia lebih produktif.

Pada tahun 2020, seluruh kategori mengalami penurunan rata-rata jam kerja. Terdapat tiga kategori lapangan usaha dengan penurunan rata-rata jam kerja paling tinggi, yaitu kategori Jasa Pendidikan (Kategori P); Real Estat (Kategori L); dan Transportasi dan Pergudangan (Kategori H). Masing-masing kategori lapangan usaha mengalami penurunan rata-rata jam kerja sebesar 7,89 jam per minggu, 7,00 jam per minggu, dan 5,28 jam per minggu.

Selain memiliki pertumbuhan yang cukup besar pada tahun 2020, kategori lapangan usaha Real Estat (Kategori L) juga menghasilkan produktivitas jam kerja tertinggi. Capaian produktivitas jam kerja kategori lapangan usaha ini pada tahun 2020 adalah 460.463 rupiah per jam per tenaga kerja, atau meningkat 26,11 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan produktivitas jam kerja tertinggi adalah kategori lapangan usaha Jasa Pendidikan (Kategori P) dengan peningkatan 39,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber : BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

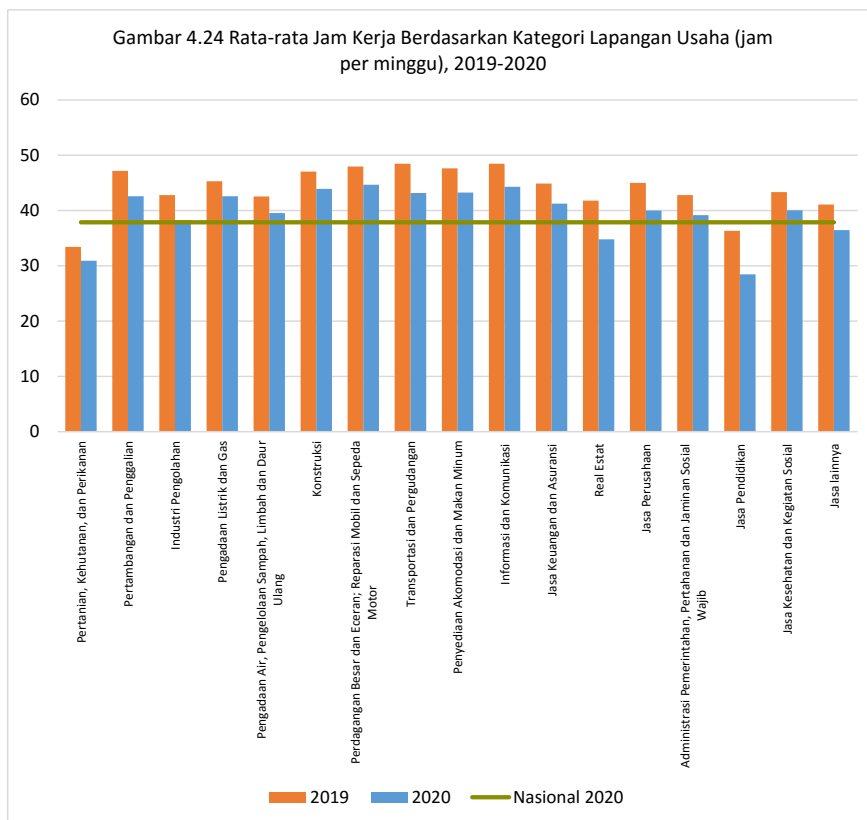
Adapun capaian terendah dari produktivitas jam kerja pada tahun 2020 terjadi pada kategori lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kategori E). Produktivitas jam kerja kategori ini pada tahun 2020 mencapai 9.465 rupiah per jam per tenaga kerja. Kategori lapangan usaha

dengan capaian produktivitas jam kerja terendah kedua dan ketiga adalah kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) serta kategori Jasa Lainnya (Kategori R, S, T, U). Capaian produktivitas jam kerja pada kedua kategori lapangan usaha tersebut masing-masing adalah 15.740 dan 16.362 rupiah per jam per tenaga kerja.

Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Sektoral

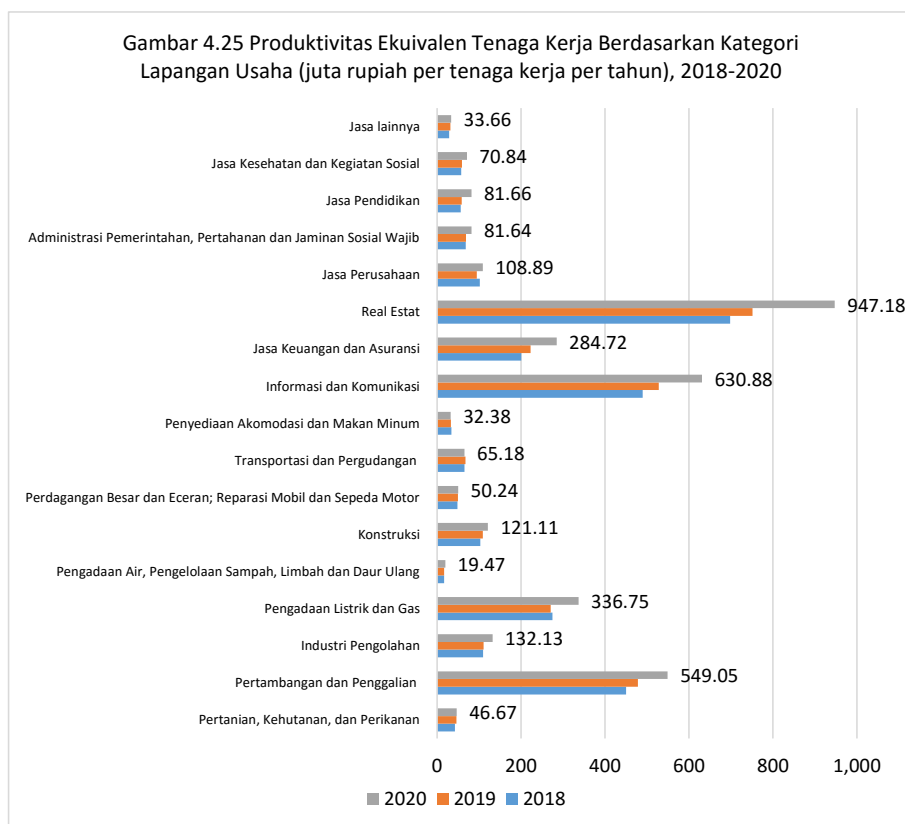
Pada tahun 2020, tujuh kategori lapangan usaha memiliki rata-rata jam kerja per minggu kurang dari 40 jam, lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah dua kategori lapangan usaha. Sembilan kategori lapangan usaha tersebut adalah kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Kategori A); Industri Pengolahan (Kategori C); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kategori E); Real Estat (Kategori L); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Kategori O); Jasa Pendidikan (Kategori P); serta Jasa Lainnya (Kategori R, S, T, U). Tenaga kerja yang bekerja pada sembilan kategori lapangan usaha tersebut secara berturut-turut memiliki rata-rata jam kerja per minggu sebesar 30,90 jam; 38,27 jam; 39,54 jam; 34,78 jam; 39,18; 28,47 jam; dan 36,45 jam.

Rata-rata jam kerja yang rendah pada suatu kategori lapangan usaha, tidak serta merta menunjukkan efisiensi dari tenaga kerja pada kategori tersebut. Misalnya pada kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Kategori A) yang sangat dipengaruhi oleh faktor musiman. Begitu juga pada kategori lapangan usaha Jasa Pendidikan (Kategori P), jam sekolah dan hari libur sekolah menjadi penyebab utama rendahnya rata-rata jam kerja tenaga kerja pada kategori lapangan usaha ini.



Sumber : BPS, hasil olah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 dan 2020

Capaian produktivitas ekuivalen tenaga kerja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa jam kerja tenaga kerja semakin berkurang, namun *output* yang dihasilkan sama atau bahkan meningkat. Selama periode 2018-2020, terdapat tiga belas kategori lapangan usaha yang konsisten mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut meskipun terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Ketiga belas kategori lapangan usaha tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Kategori A); Pertambangan dan Penggalian (Kategori B); Industri Pengolahan (Kategori C); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kategori E); Konstruksi (Kategori F); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (Kategori G), Informasi dan Komunikasi (Kategori J); Jasa Keuangan dan Asuransi (Kategori K); Real Estat (Kategori L); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (Kategori O), Jasa Pendidikan (Kategori P), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kategori Q), dan Jasa Lainnya (Kategori R, S, T, U).



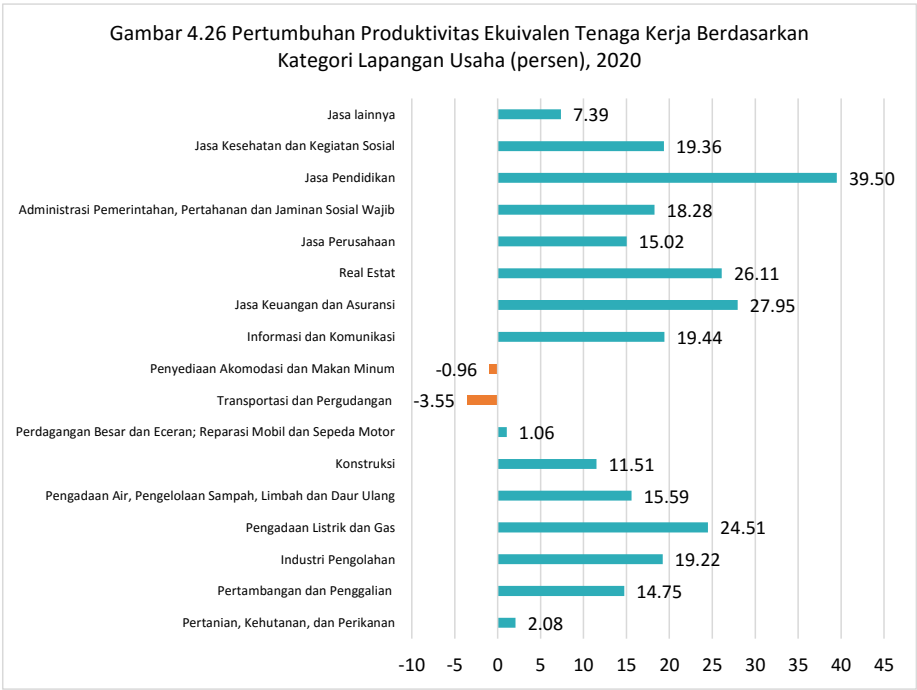
Sumber : BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Sama halnya dengan capaian produktivitas tenaga kerja, tiga kategori lapangan usaha dengan capaian produktivitas ekuivalen tenaga kerja tertinggi adalah Real Estat (Kategori L); Informasi dan Komunikasi (Kategori J); serta kategori Pertambangan dan Penggalian (Kategori B). Capaian produktivitas ekuivalen tenaga kerja masing-masing kategori lapangan usaha tersebut dalam juta rupiah per tenaga kerja per tahun adalah 947,18; 630,88; dan 549,05 juta rupiah per tenaga kerja per tahun.

Kategori lapangan usaha dengan capaian produktivitas ekuivalen tenaga kerja terendah pada tahun 2020 terjadi pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (Kategori E) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I). Capaian kedua kategori lapangan usaha ini masing-masing sebesar 19,47 dan 32,38 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Sementara itu, capaian produktivitas ekuivalen tenaga kerja terendah ketiga pada tahun 2020

terjadi pada kategori lapangan usaha Jasa Lainnya (Kategori R, S, T, U) dengan capaian sebesar 33,66 juta rupiah per tenaga kerja per tahun.

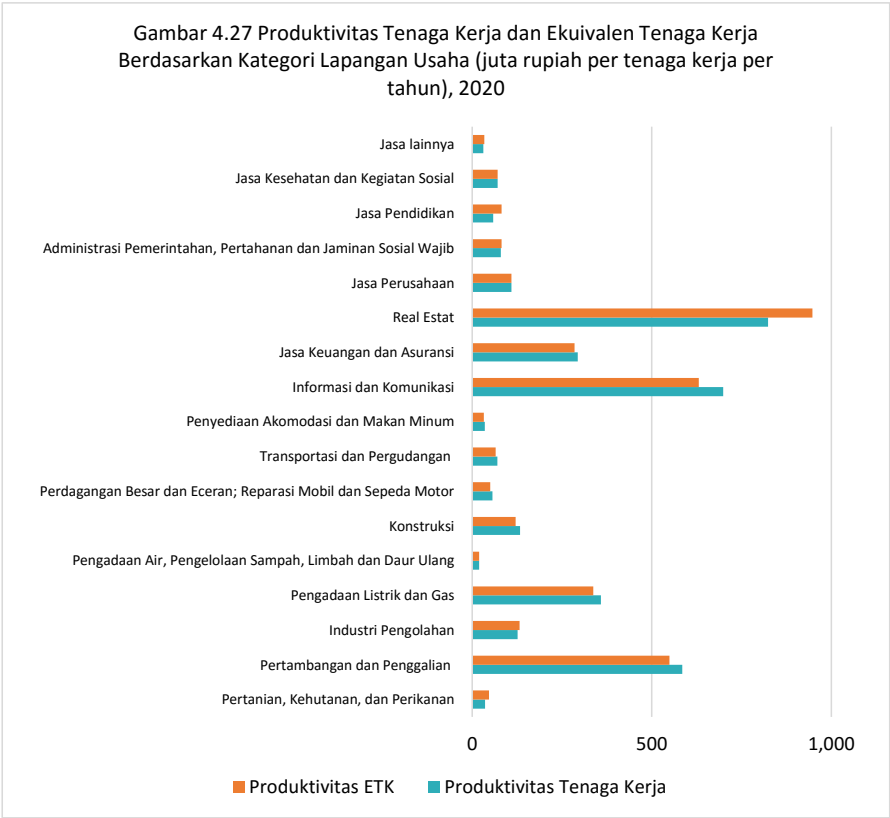
Pertumbuhan produktivitas ekuivalen tenaga kerja pada tahun 2020 berdasarkan kategori lapangan usaha menunjukkan bahwa 15 kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dua kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020, yaitu kategori lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (Kategori H) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I). Pertumbuhan positif tertinggi terjadi pada kategori lapangan usaha Jasa Pendidikan (Kategori P) dengan pertumbuhan sebesar 39,50 persen. Kategori lapangan usaha berikutnya yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Keuangan dan Asuransi (Kategori K) dan kategori Real Estat (Kategori L). Peningkatan pada kedua kategori lapangan usaha tersebut masing-masing sebesar 27,95 persen dan 26,11 persen.



Sumber : BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Di tengah situasi pandemi pada tahun 2020, tenaga kerja yang bekerja pada tujuh kategori lapangan usaha telah bekerja dengan lebih efisien. Tujuh kategori lapangan usaha tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Kategori

A); Industri Pengolahan (Kategori C); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kategori E); Real Estat (Kategori L); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Kategori O); Jasa Pendidikan (Kategori P); dan Jasa Lainnya (Kategori R,S,T,U). Hal ini ditunjukkan dari capaian produktivitas ekuivalen tenaga kerja pada sembilan kategori lapangan usaha tersebut yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian produktivitas tenaga kerjanya.



Sumber : BPS, hasil olah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Pandemi memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Peningkatan efisiensi tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian produktivitas ekuivalen tenaga kerja yang semakin tinggi dan mendekati capaian dari produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2020, seluruh kategori lapangan usaha yang mengalami peningkatan produktivitas ekuivalen tenaga kerja serta memperpendek jarak/gap dengan capaian produktivitas tenaga kerjanya. Kategori lapangan usaha Real Estat (Kategori L) mengalami perpendekan gap tertinggi. Selisih capaian produktivitas tenaga kerja dan produktivitas ekuivalen tenaga kerja pada kategori ini tahun

2019 mencapai -33,49 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Sementara pada tahun 2020, selisih ini menurun menjadi 123,49 juta rupiah.

Selain kategori lapangan usaha Real Estat (Kategori L), kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (Kategori B) adalah kategori dengan perpendekan *gap* antara capaian produktivitas ekuivalen tenaga kerja dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi kedua. Pada kategori lapangan usaha ini, selisih capaian produktivitas tenaga kerja dan produktivitas ekuivalen tenaga kerjanya menyempit dari -85,86 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi -35,51 juta rupiah per tenaga kerja per tahun pada tahun 2020.



DAYA SAING TENAGA KERJA
DAN KAITANNYA DENGAN
PRODUKTIVITAS

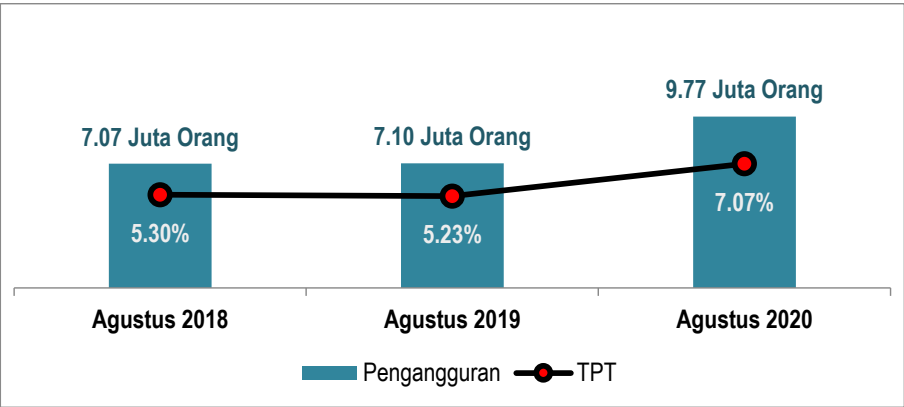
Daya Saing Tenaga Kerja

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global menjadi modal utama membangun daya saing bangsa. Bonus demografi Indonesia yang diperkirakan terjadi antara tahun 2010 hingga 2035, menjadi peluang bagi bangsa Indonesia dalam hal ketersediaan sumber daya manusia (SDM) usia produktif. Melimpahnya SDM usia produktif yang didukung oleh pendidikan yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan lapangan kerja, perhatian pada bidang kesehatan, meningkatnya angka partisipasi kerja, serta meningkatnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, akan memberikan keuntungan pada bangsa Indonesia. Daya saing tenaga kerja menjadi penopang utama daya saing bangsa. Hal ini ditunjukkan oleh korelasi yang kuat dan searah antara daya saing wilayah dan daya saing tenaga kerja. Investasi yang efisien dalam sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang kuat (World Bank, 2018). Daya saing tenaga kerja kokoh akan menjadi pendorong utama peningkatan daya saing bangsa.

Daya saing tenaga kerja nasional terbentuk dari daya saing regional. Berdasarkan indeks daya saing tenaga kerja 2020, daya saing tenaga kerja di 34 provinsi pada tahun 2020 menunjukkan penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 menjadi faktor utama menurunnya daya saing tenaga kerja. Meningkatnya angka pengangguran menjadi salah satu contoh dampak pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan Indonesia, seperti ditunjukkan pada Gambar 5.1. Lima provinsi dengan capaian daya saing tenaga kerja tertinggi yaitu Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Daya saing yang tinggi di Indonesia terjadi di provinsi-provinsi dimana wilayah perkotaan utama berada, provinsi yang berdekatan dengan pusat perdagangan kawasan regional, serta provinsi dengan sumber daya alam (Tan dan Amri, 2013). Namun, tidak semua provinsi yang diberkahi sumber daya alam memiliki daya saing tenaga kerja yang tinggi, seperti

provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki dan peningkatan aspek lain seperti pendidikan, pemanfaatan teknologi, tata kelola, infrastruktur, dan kualitas hidup, daya saing kedua provinsi ini akan meningkat.

Gambar 5.1. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Agustus 2018 - Agustus 2020



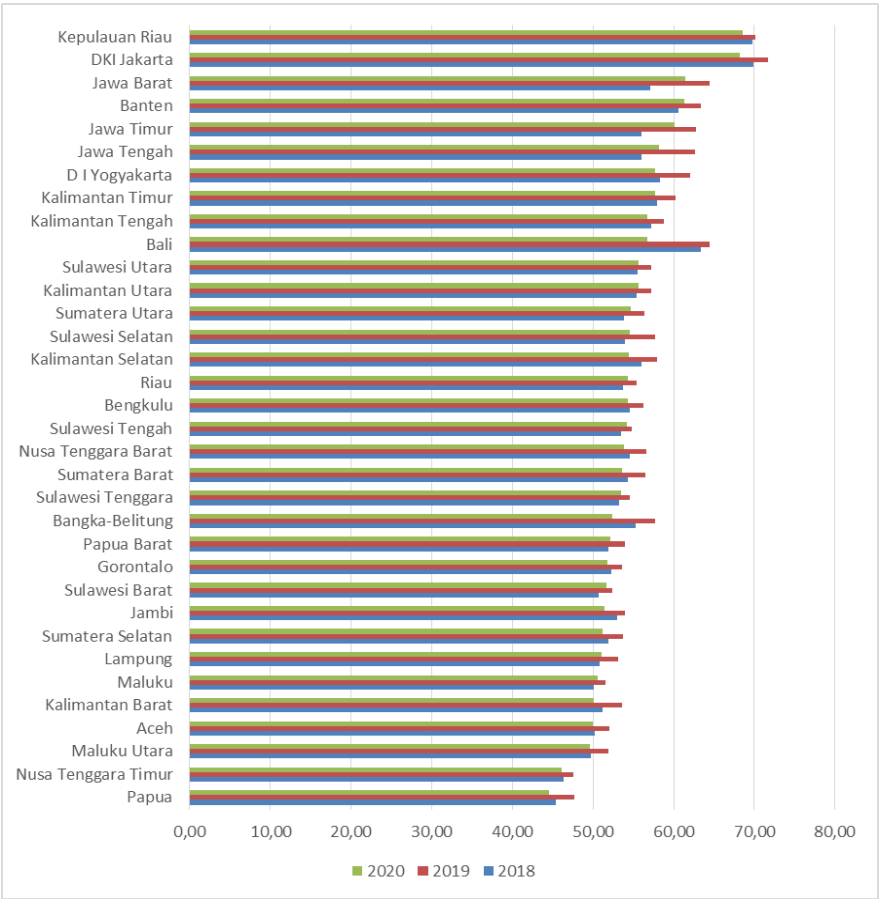
Sumber: Sakernas Agustus 2018-2020

Pemerintah terus berupaya untuk memperkecil ketimpangan dan meningkatkan daya saing wilayah di Indonesia, khususnya dalam pembangunan SDM. Sejak beberapa dekade terakhir, pembangunan di Indonesia telah berhasil meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat. Namun ketimpangan masih tinggi dan menjadi tantangan hingga saat ini (OECD dan ADB, 2020; Miranti, dan Mendez, 2020). Selain pembangunan infrastruktur, ketimpangan dalam meningkatkan kualitas SDM juga terjadi pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah masih menjadi tantangan dalam pembangunan SDM dan pengentasan kemiskinan di sebagian besar provinsi di Indonesia. Provinsi Papua menjadikan angka melek huruf sebagai permasalahan utama dalam pengentasan kemiskinan (Sumargo dan Simanjuntak, 2019). Sementara itu kesiapan setiap provinsi dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, semakin memperjelas ketimpangan akses kesehatan di Indonesia.

Pandemi COVID-19 yang mulai masuk Indonesia pada awal tahun 2020 berdampak pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Pada tahun 2020, seluruh provinsi mengalami penurunan skor indeks daya saing tenaga kerja sebagai akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi. Namun, meskipun mengalami penurunan skor, beberapa provinsi berhasil mempertahankan peringkat indeks daya saingnya,

seperti Provinsi Kepulauan Riau dan DKI Jakarta yang masih bertahan pada peringkat teratas. Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan capaian indeks daya saing tenaga kerja tertinggi di tahun 2020, dengan skor 68,60. Selanjutnya pada peringkat kedua dan ketiga, masing-masing dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Peringkat Provinsi DKI Jakarta turun satu peringkat dari tahun sebelumnya, sedangkan Provinsi Jawa Barat bertahan di peringkat tiga, sama seperti tahun sebelumnya. Adapun provinsi dengan capaian indeks daya saing terendah terjadi di Provinsi Papua. Selama tahun 2018 sampai 2020, skor indeks daya saing tenaga kerja provinsi ini tidak banyak berubah. Walaupun skornya sempat naik 2,22 poin di tahun 2019 dan berhasil naik satu peringkat, tetapi akibat pandemi COVID-19, skor indeks daya saing tenaga kerja provinsi ini mengalami penurunan di tahun 2020. Sementara itu, Provinsi Bali menjadi provinsi dengan penurunan daya saing tenaga kerja tertinggi. Anjloknya sektor pariwisata selama Pandemi COVID-19 menjadi pukulan keras bagi perekonomian provinsi ini.

Gambar 5.2. Indeks Daya Saing Tenaga Kerja Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2020



Sumber: Kemnaker

Capaian indeks daya saing Indonesia sebagian besar disumbangkan oleh capaian dimensi pemberdayaan angkatan kerja. Besarnya kontribusi dimensi ini menunjukkan baiknya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terus meningkat, tetapi mereka mampu terserap ke pasar kerja. Hal ini didukung oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terus menurun, kecuali tahun 2020. Namun, pemberdayaan angkatan kerja tersebut belum didukung oleh kualitas, produktivitas, dan kompensasi tenaga kerja. Ini tercermin dari masih rendahnya capaian dimensi kualitas tenaga kerja serta dimensi kompensasi dan produktivitas pada skor indeks daya saing tenaga kerja. Tabel 5.1 menunjukkan kebanyakan provinsi memiliki skor yang tinggi pada dimensi pemberdayaan angkatan kerja dengan rata-rata sebesar 68,16. Sementara, skor dimensi kualitas tenaga kerja serta dimensi kompensasi dan produktivitas kebanyakan provinsi cenderung rendah, yaitu dengan rata-rata masing-masing sebesar 52,11 dan 41,48.

Tabel 5.1. Capaian Indeks Daya Saing Tenaga Kerja dan Dimensi Penyusunnya menurut Provinsi Tahun 2020

Provinsi	Dimensi Pemberdayaan Angkatan Kerja	Dimensi Kualitas Tenaga Kerja	Dimensi Kompensasi dan Produktivitas	Indeks Daya Saing Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	61,07	52,07	34,11	49,96
Sumatera Utara	67,79	54,33	39,36	54,68
Sumatera Barat	67,82	51,61	38,74	53,55
Riau	63,87	54,50	42,66	54,32
Jambi	65,49	50,47	35,85	51,47
Sumatera Selatan	66,67	49,63	34,53	51,20
Bengkulu	72,58	48,06	39,81	54,29
Lampung	67,53	49,25	33,31	51,01
Bangka-Belitung	70,61	50,63	32,63	52,39
Kepulauan Riau	73,23	58,98	74,58	68,60
DKI Jakarta	64,66	63,31	78,23	68,17
Jawa Barat	64,75	68,39	49,10	61,43
Jawa Tengah	72,24	61,35	37,66	58,23
D I Yogyakarta	72,02	55,64	43,20	57,76
Jawa Timur	71,64	62,17	43,64	60,06
Banten	63,63	56,81	64,02	61,34

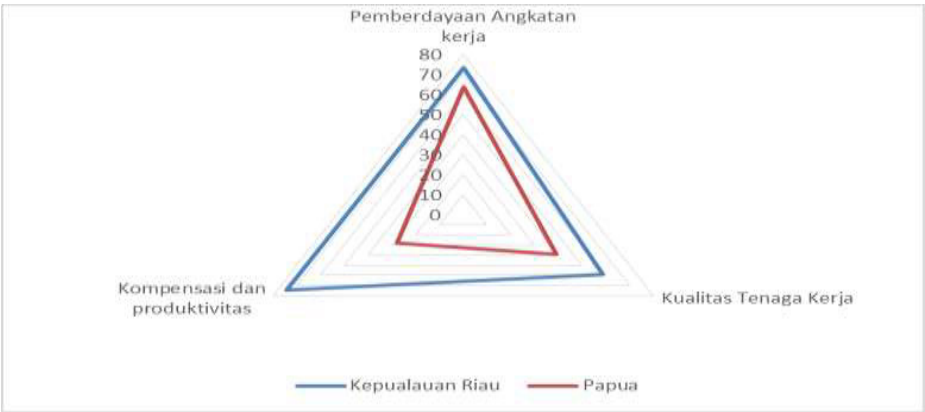
Provinsi	Dimensi Pemberdayaan Angkatan Kerja	Dimensi Kualitas Tenaga Kerja	Dimensi Kompensasi dan Produktivitas	Indeks Daya Saing Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bali	72,44	53,50	41,62	56,69
Nusa Tenggara Barat	78,87	46,89	32,29	53,88
Nusa Tenggara Timur	65,44	43,53	25,95	46,09
Kalimantan Barat	63,84	47,44	36,99	50,16
Kalimantan Tengah	71,19	51,15	46,24	56,78
Kalimantan Selatan	73,55	51,32	35,19	54,42
Kalimantan Timur	65,06	57,10	49,52	57,68
Kalimantan Utara	66,15	53,63	45,45	55,64
Sulawesi Utara	64,30	52,15	49,65	55,70
Sulawesi Tengah	74,24	48,14	37,24	54,15
Sulawesi Selatan	67,53	52,64	41,19	54,53
Sulawesi Tenggara	69,93	49,39	38,80	53,52
Gorontalo	68,16	47,38	37,26	51,74
Sulawesi Barat	74,85	44,61	32,28	51,66
Maluku	64,82	48,76	35,72	50,60
Maluku Utara	66,02	47,31	32,67	49,61
Papua Barat	61,43	50,60	42,89	52,16
Papua	63,88	39,14	27,81	44,54

Sumber: BPS (Diolah)

Indeks daya saing tenaga kerja suatu provinsi terbentuk dari capaian indikator penyusunnya. Gambar 5.3 menunjukkan capaian indeks daya saing tenaga kerja beserta capaian dimensi pembentuknya untuk Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Papua. Tingginya capaian indeks daya saing tenaga kerja Provinsi Kepulauan Riau terutama ditopang oleh tingginya capaian dimensi kompensasi dan produktivitas; dan dimensi pemberdayaan angkatan kerja dengan skor masing-masing sebesar 74,58 dan 73,23. Besarnya capaian kedua dimensi ini disumbang oleh capaian indikator penyusunnya yang memiliki skor tertinggi dibanding capaian provinsi lain. Indikator-indikator tersebut antara lain rata-rata upah sektor industri dan jasa; indikator produktivitas upah ekuivalen tenaga kerja; indikator persentase tenaga kerja setengah menganggur; serta persentase

morbiditas tenaga kerja. Sedangkan, rendahnya capaian indeks daya saing tenaga kerja di Provinsi Papua dipengaruhi terutama oleh rendahnya capaian dimensi kualitas tenaga kerja dan dimensi kompensasi dan produktivitas, dengan skor masing-masing dimensi sebesar 39,14 dan 27,81. Rendahnya capaian kedua dimensi ini disumbangkan oleh capaian indikator penyusunnya yang memiliki skor terendah dibanding capaian provinsi lainnya, yaitu indikator persentase pekerja tidak dibayar, persentase pengusaha, persentase pekerja dengan akses internet, dan rata-rata lama sekolah penduduk bekerja, dan indikator gap upah.

Gambar 5.3. Perbandingan Capaian Indeks Daya Saing Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Papua menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020

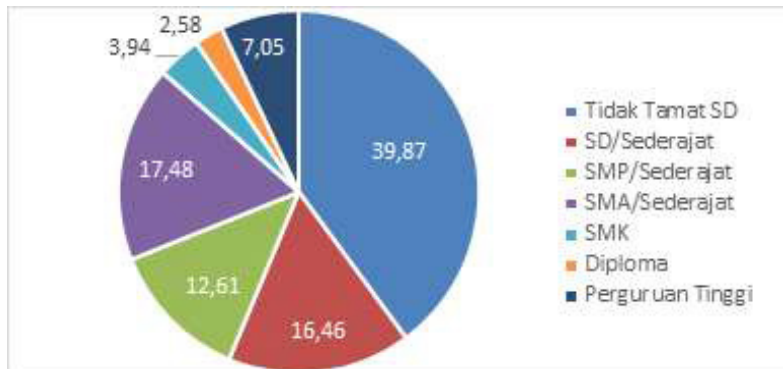


Sumber: BPS (Diolah)

Upah dan pendidikan masih menjadi masalah utama dalam daya saing tenaga kerja di Provinsi Papua. Dari sisi upah, rata-rata tenaga kerja yang bekerja penuh selama 40 jam seminggu di Provinsi Papua menerima upah sebesar 704.416 rupiah. Sementara sebanyak 29,78 persen tenaga kerja di Provinsi ini berstatus pekerja tidak dibayar. Persentase ini hampir dua kali rata-rata persentase pekerja tidak dibayar seluruh provinsi yang berkisar 15,37 persen. Dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah tenaga kerja di Provinsi Papua mencapai 6,37 tahun. Dengan rata-rata lama sekolah tersebut, tenaga kerja di provinsi ini rata-rata menyelesaikan sekolah sampai tingkat sekolah dasar (SD). Hal ini juga tercermin dari rendahnya angka melek huruf yang merupakan deprivasi utama dari kemiskinan multidimensi di Papua (Sumargo, 2019). Data Sakernas Agustus tahun 2020 menunjukkan bahwa 39,87 persen tenaga kerja di Provinsi Papua tidak tamat SD, dan sekitar 16,46 persen hanya menyelesaikan pendidikan SD. Rendahnya pendidikan menyebabkan rendahnya kompetensi tenaga kerja serta kurangnya

keterampilan dan skill tenaga kerja, seperti penggunaan internet. Masifnya perkembangan teknologi menuntut penggunaan teknologi yang semakin tinggi dalam dunia kerja. Persentase tenaga kerja di Provinsi Papua yang menggunakan internet dalam bekerja masih rendah, yaitu sekitar 25,06 persen.

Gambar 5.4. Persentase Tenaga Kerja Provinsi Papua menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2020



Sumber: diolah dari Sakernas Agustus 2020

Daya Saing dan Produktivitas

Produktivitas merupakan pendorong dan penggerak daya saing. Produktivitas mampu menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan dengan produktivitas yang tinggi akan lebih siap untuk bersaing di pasar global. Dalam penelitian Hendayana (2019) terhadap pengusaha batik di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa produktivitas berpengaruh signifikan terhadap daya saing. Kesimpulan penelitian ini mendukung teori persaingan Porter (1990) yang menyatakan bahwa produktivitas dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan atau ketahanan dalam persaingan pasar. Hal ini salah satunya dapat terwujud melalui penekanan biaya *input*, seperti peningkatan efisiensi tenaga kerja. Perusahaan perlu terus meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan meningkatkan penggunaan teknologi yang canggih dalam proses produksi (ILO, 2020). Proses produksi yang melibatkan perkembangan teknologi dan disertai dengan keterampilan yang *up to date* akan lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan *output* yang lebih banyak dan berkualitas. Hal ini sekaligus mengantisipasi peningkatan dan persaingan produktivitas secara global.

Pertumbuhan produktivitas memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan maupun negara secara keseluruhan. Perusahaan bisa melakukan penghematan melalui efisiensi operasional. Hal ini memungkinkan alokasi yang lebih besar

untuk mencapai *output* yang lebih besar dengan menggunakan jumlah *input* yang sama. Manfaat ekonomi yang kemudian diterima perusahaan dapat menjadi investasi baik dalam meningkatkan kompetensi pekerja maupun menambah modal berupa mesin dan peralatan. Peningkatan jumlah dan kualitas modal ini dapat mendorong peningkatan *output* ke depannya dan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan produktivitas. Dalam lingkup negara, produktivitas akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang erat antara peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh korelasi yang kuat, yaitu sebesar 91 persen (ILO, 2020). Dalam publikasi yang sama, ILO juga menyampaikan bahwa peningkatan produktivitas secara tidak langsung dapat menurunkan pengangguran. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari peningkatan produktivitas dapat disalurkan kepada konsumen melalui harga beli yang lebih rendah. Selanjutnya, peningkatan daya beli masyarakat ini akan mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

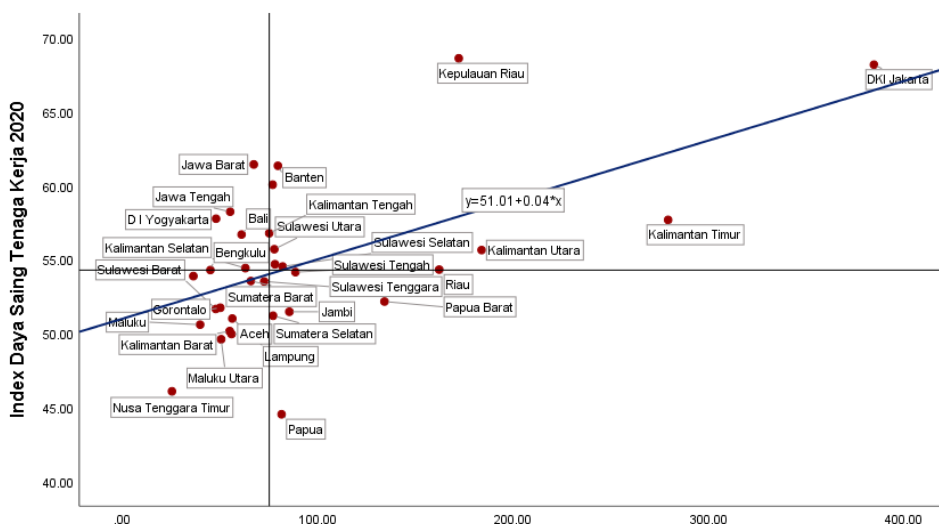
Peningkatan produktivitas berperan penting dalam mempertahankan daya saing Indonesia. Peningkatan produktivitas dan daya saing dibutuhkan Indonesia untuk keluar dari negara berpendapatan menengah bawah menuju negara berpendapatan menengah atas. Lebih jauh lagi, hal ini dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu dari 5 negara ekonomi terbesar dunia di tahun 2045. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan rencana untuk meningkatkan produktivitas, diantaranya memprioritaskan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi, penyederhanaan peraturan dan birokrasi, serta mendorong pertumbuhan manufaktur (OECD, 2020). Upaya tersebut tercermin dari peningkatan produktivitas Indonesia beberapa tahun terakhir. Namun di tataran global, produktivitas Indonesia tertinggal dari rata-rata negara berkembang OECD dan G20 (OECD, 2020). Pada level nasional, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih bergantung pada konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah. Sementara di tingkat provinsi, efisiensi tenaga kerja yang rendah masih menjadi tantangan di banyak provinsi di Indonesia (Mendez dkk, 2020).

Produktivitas tenaga kerja menjadi ukuran efisiensi parsial yang paling sering digunakan dalam menggambarkan perekonomian. Terdapat hubungan kausalitas searah dari pertumbuhan ekonomi ke produktivitas tenaga kerja (Suna Korkomaz

dan Oya Korkomaz, 2017). Produktivitas tenaga kerja menjadi kunci keberhasilan untuk bangkit di masa krisis. Pemulihan ekonomi sangat tergantung pada peningkatan produktivitas tenaga kerja selama krisis dan ketika masa transisi. Jika tingkat produktivitas stagnan atau menurun selama krisis, hal tersebut akan menghasilkan krisis yang lebih lama, lebih dalam, dan pemulihan yang lebih lambat. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama untuk memastikan perbaikan ekonomi secara konstan dan stabil pada periode pasca krisis. (Auzina Emsina, 2014). Salah satunya dikarenakan lapangan pekerjaan dan produktivitas berkorelasi kuat dan positif dalam siklus bisnis dan berfluktuasi secara pro-siklus (Landmann, 2004).

Produktivitas dan indeks daya saing tenaga kerja idealnya memiliki keselarasan arah asosiasi. Menurut Dresch (2018), produktivitas merupakan faktor utama di antara elemen-elemen lain yang penting dalam menentukan daya saing perusahaan. Produktivitas tenaga kerja secara langsung dipengaruhi oleh efisiensi, teknologi, inovasi, dan juga oleh kemampuan tenaga kerja untuk dengan cepat menyelesaikan masalah yang muncul dalam organisasi. Dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, maka akan dimungkinkan terjadinya efektivitas dan efisiensi pada proses produksi. Efektivitas dan efisiensi tenaga kerja selanjutnya menjadi jembatan antara produktivitas daya saing tenaga kerja.

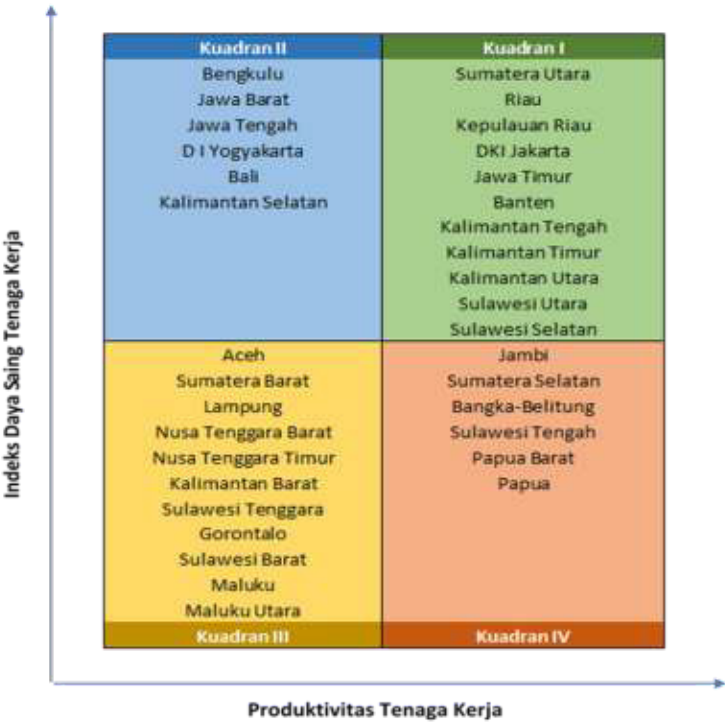
Gambar 5.5. *Scatter Plot* Indeks Daya Saing Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020



Sumber: BPS (Diolah)

Pada tahun 2020, terlihat adanya asosiasi positif antara produktivitas dan indeks daya saing tenaga kerja. Hal ini terlihat dari pola garis trend yang dibentuk dari scatter plot indeks daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan garis trend yang terbentuk, dapat dilakukan evaluasi dari masing-masing provinsi terkait dengan kondisi daya saing dan produktivitas tenaga kerjanya. Garis tren merupakan kumpulan titik pusat (keseimbangan) secara general pada tahun 2020. Sementara itu, titik-titik outlier merupakan titik yang dirasa kurang optimal. Sebagai contoh, Provinsi Papua merupakan titik yang tergolong outlier. Kondisi pada Provinsi Papua merupakan kondisi dimana saat nilai produktivitas kurang selaras dengan indeks daya saing yang dimiliki. Kondisi ini juga menunjukkan terjadinya inefisiensi produktivitas atau perkembangan daya saing tenaga kerja yang lambat. Sedangkan, pada daerah lain seperti Provinsi Kepulauan Riau, terjadi kondisi yang sangat efisien terkait asosiasi produktivitas dan indeks daya saing tenaga kerja. Dengan capaian produktivitas tenaga kerja tertinggi ketiga, Provinsi Kepulauan Riau mampu mencapai indeks daya saing tenaga kerja yang tinggi.

Gambar 5.6. Analisis Kuadran Indeks Daya Saing Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020

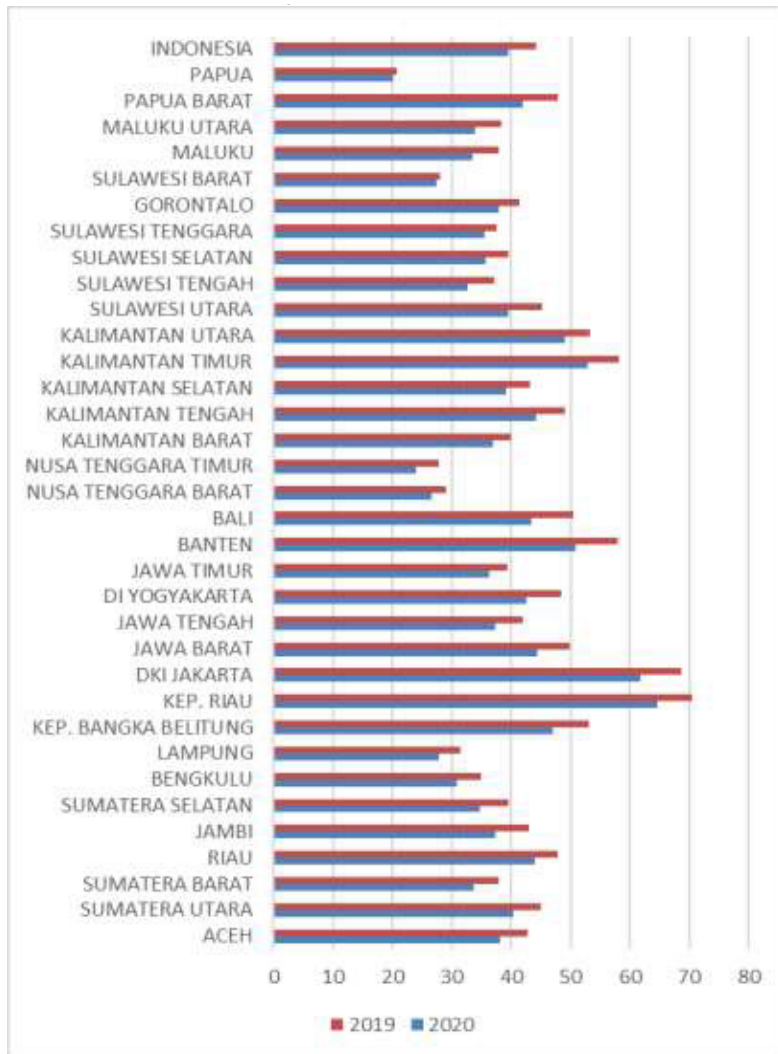


Sumber: BPS (Diolah)

Hubungan produktivitas tenaga kerja dan indeks daya saing tenaga kerja Indonesia tahun 2020 memiliki korelasi sebesar 0,57. Menurut J. Supranto (2008), nilai korelasi tersebut tergolong cukup kuat karena akan memberikan asosiasi yang signifikan antara kedua variabel. Korelasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,53. Provinsi dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi cenderung menghasilkan daya saing tenaga kerja yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Perbandingan capaian produktivitas tenaga kerja dan daya saing tenaga kerja diperlihatkan oleh Gambar 5.6. Dari 34 provinsi di Indonesia, 22 provinsi menunjukkan kesesuaian capaian produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Sebelas provinsi dengan capaian produktivitas tenaga kerja di atas median memiliki indeks daya saing tenaga kerja yang juga di atas median. Sementara, sebelas provinsi dengan capaian produktivitas tenaga kerja di bawah median memiliki daya saing tenaga kerja di bawah median. Adapun 12 provinsi lainnya menunjukkan hubungan yang tidak searah antara keduanya. Enam provinsi dengan capaian produktivitas tenaga kerja di atas median tetapi memiliki daya saing tenaga kerja di bawah median. Enam provinsi lainnya memiliki capaian produktivitas tenaga kerja di bawah median tetapi memiliki daya saing tenaga kerja di atas median.

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi Indonesia akibat adanya pandemi COVID-19. Kondisi Produktivitas dan daya saing tenaga kerja juga mengalami guncangan akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi. Produktivitas dan daya saing tenaga kerja pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini akibat dari Pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh pada lapangan pekerjaan, utamanya pada sektor formal. Menurut data BPS yang ditunjukkan pada Gambar 5.7, seluruh provinsi mengalami penurunan persentase pekerja formal. Kondisi ini memungkinkan adanya peningkatan pekerja di sektor informal dengan produktivitas yang lebih rendah. Kondisi ini juga tercermin dari persentase penurunan PDB yang lebih dalam dari persentase penurunan jumlah tenaga kerja. PDB pada tahun 2020 turun sebesar 2,07 persen, sedangkan jumlah tenaga kerja turun sebesar 0,23 persen. Selain itu, penurunan persentase pekerja formal juga memungkinkan peningkatan tingkat pengangguran yang memiliki pengaruh kepada produktivitas dan daya saing tenaga kerja.

Gambar 5.7. Persentase Pekerja Formal Menurut Provinsi Tahun 2019 dan 2020



Sumber: BPS

Akses pendidikan dan pengembangan kemampuan SDM Indonesia terus meningkat. Namun, antara pendidikan dan ketersediaan lapangan pekerjaan belum sepenuhnya selaras. Sinkronisasi antara lembaga pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja harus terus ditingkatkan agar lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi tidak menjadi pengangguran terdidik dengan kompetensi rendah (Cerya dan Sari, 2018). Hal ini berakibat pada belum optimalnya penyerapan dan pemanfaatan SDM Indonesia dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Tenaga kerja terdidik di Indonesia belum memanfaatkan

secara optimal di Indonesia (Ibnu dan Farida, 2020). Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, belum selarasnya pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja menjadi salah satu penyebab tingginya pengangguran terdidik di Indonesia. Capaian dalam pendidikan dan pelatihan antarwilayah juga belum merata. Peningkatan pendidikan dan keterampilan di tingkat lokal di Indonesia harus dilengkapi dengan upaya untuk menciptakan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan yang berkualitas (OECD/ADB, 2020).

Pemerintah memegang peranan penting dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan regulasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi daya saing tenaga kerja Indonesia (Aris dan Asmal, 2020). Deindustrialisasi prematur yang terjadi di Indonesia dan menyiratkan perlunya perbaikan produktivitas untuk beradaptasi dengan disrupsi digital dan perubahan struktur ekonomi. Perbaikan sisi penawaran membutuhkan pengembangan infrastruktur dan modal manusia (Indarwati dan Kuncoro, 2021). Perbaikan dan peningkatan dalam bidang pendidikan menjadi hal utama dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Selain keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja, penanganan pengangguran di Indonesia juga menghadapi tantangan pesatnya pertumbuhan angkatan kerja dalam era bonus demografi. Belum sebandingnya pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja, serta timpangnya pendapatan berdampak pada meningkatnya pengangguran. Kondisi ini juga tercermin dari korelasi antara jumlah angkatan kerja dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia cenderung positif (Nugraha dkk., 2021). Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha, serta meningkatkan kapabilitas tenaga kerja dalam pemanfaatan teknologi, meningkatkan inovasi dan entrepreneur melalui pendidikan vokasi, merupakan solusi dalam mengatasi pengangguran dan penciptaan lapangan kerja di era revolusi 4.0.

Pekerja anak adalah tantangan lain yang harus dihadapi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Pekerja anak sedikit banyak berpengaruh pada daya saing dan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Pekerja anak menghasilkan inefisiensi produktivitas tenaga kerja, utamanya di masa revolusi industri 4.0. Meskipun memiliki produktivitas rendah dari tenaga kerja dewasa, adanya kebutuhan ekonomi dan kebutuhan akan tenaga kerja murah menyebabkan pekerja anak tetap ada, baik dari sisi penyediaan maupun

permintaan (ILO, 2007). Kategori lapangan usaha jasa-jasa menjadi penyumbang pekerja anak tertinggi, diikuti oleh kategori pertanian dan manufaktur. Sementara itu, jika dilihat menurut jenis kelamin persentase anak laki-laki yang menjadi pekerja anak lebih tinggi dibandingkan perempuan. Persentase anak laki-laki dan anak perempuan yang menjadi pekerja anak masing-masing sebesar 3,34 dan 3,16 persen.

Tidak seluruh orang tua dan anak memiliki pandangan bahwa setiap anak yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, menjadi salah satu tantangan dalam pengentasan pekerja anak di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya pemikiran bahwa pekerjaan yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk pengembangan diri anak dan bentuk kewajiban moral kepada keluarga (Nurhadi, 2015). Keluarga yang mempekerjakan anak mereka akan mendapatkan pendapatan jangka pendek tetapi mereka mengorbankan pendapatan jangka panjang (ILO, 2009). Anak yang menjadi pekerja anak cenderung memiliki kualitas pendidikan lebih rendah dibanding dengan teman-temannya yang bukan pekerja anak.



VI

KESIMPULAN

- Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pekerjaan “layak” di era revolusi industri 4.0. Implementasi teknologi dan otomatisasi proses melalui *internet of things* (IoT) pada era ini akan meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta membuka lapangan kerja baru. Namun saat ini, tenaga kerja Indonesia belum sepenuhnya siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
- Selama lima tahun terakhir, selisih (*gap*) capaian produktivitas tenaga kerja antara provinsi dengan capaian tertinggi dan provinsi dengan capaian terendah semakin besar. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya ketimpangan produktivitas antar provinsi di Indonesia.
- Belum selarasnya pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja menyebabkan masih tingginya pengangguran terdidik. Pengentasan pengangguran di Indonesia juga menghadapi tantangan lain, yaitu pesatnya pertumbuhan angkatan kerja dalam era bonus demografi yang belum seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja.
- Berdasarkan capaian indeks daya saing tenaga kerja, dimensi pemberdayaan angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja di Indonesia relatif cukup baik. Hal ini juga tercermin dari angka TPT yang secara umum menurun setiap tahun. Namun, pemberdayaan angkatan kerja tersebut belum didukung oleh kualitas, produktivitas, dan kompensasi tenaga kerja yang optimal.
- Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak pada berbagai aspek kehidupan, serta menciptakan iklim ketidakpastian tentang prospek ke depan. Tahun 2020, produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia mengalami penurunan. Pembatasan mobilitas dan ekonomi yang berkontraksi berimbas pada tingginya PHK. Banyak tenaga kerja yang menganggur dan sebagian beralih pekerjaan ke sektor dengan produktivitas yang lebih rendah.

- Pembatasan mobilitas dan perpindahan tenaga kerja ke sektor dengan produktivitas lebih rendah dan jam kerja lebih singkat selama pandemi, berdampak pada menurunnya rata-rata jam kerja. Penurunan PDB yang terjadi selama tahun 2020 tidak sedalam penurunan rata-rata jam kerja, yang berdampak pada meningkatnya produktivitas jam kerja dan produktivitas ETK. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat mengindikasikan semakin efisiennya tenaga kerja Indonesia dalam menghasilkan produk barang dan jasa.
- Dua kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan produktivitas ETK dan produktivitas jam kerja negatif pada tahun 2020 adalah kategori lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (Kategori H) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I). Hal ini berdampak langsung pada daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai penopang perekonomian, seperti Provinsi Bali yang mengalami penurunan produktivitas dan daya saing tenaga kerja tertinggi.
- Produktivitas tenaga kerja menjadi kunci peningkatan daya saing dan keberhasilan untuk bangkit di masa krisis. Pemulihan ekonomi sangat tergantung pada peningkatan produktivitas tenaga kerja selama krisis dan ketika masa transisi. Tingkat produktivitas yang stagnan atau menurun selama krisis, akan menghasilkan krisis yang lebih lama, lebih dalam, dan pemulihan yang lebih lambat. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama untuk memastikan perbaikan ekonomi secara konstan dan stabil pada periode pasca pandemi.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- A A Aris and S Asmal. 2020. Effect of government regulation on labor competitiveness: Study of nine major Indonesian companies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, doi:10.1088/1757-899X/885/1/012043, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/885/1/012043/pdf>, diakses pada 10 Juni 2021
- Adioetomo dan Moertiningsih, Sri. Bonus Demografi : Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta : BKKBN, 2005.
- Anik Yuesti, et al. 2020. Akuntansi Sektor Publik. Bali: Noah Alethia.
- APO. (2020). APO Productivity Databook 2020. Tokyo: APO.
- APO. (2021). APO Productivity Databook 2021. Tokyo: APO.
- Arshad, M.N. and Malik Z. 2015. Quality of Human Capital and labor Productivity: a Case of Malaysia. International Journal of Economics, 1(2015):37-55
- Auzina Emsina, Astra. (2014). Labour Productivity, Economic Growth and Global Competitiveness in Post-crisis Period. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 156. 10.1016/j.sbspro.2014.11.195. https://www.researchgate.net/publication/275544920_Labour_Productivity_Economic_Growth_and_Global_Competitiveness_in_Post-crisis_Period, diakses 07 Juni 2021
- BKPM. (2021). *Paparan Realisasi Investasi TW_IV_2020_Bahasa_Indonesia*. (www.bkpm.go.id)
- BPS. (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta : BPS
- BPS. (2013). Statistik Inodonesia. Jakarta : BPS
- BPS. (2018). Keadaan angkatan kerja Indonesia. Jakarta : BPS
- BPS. (2019). Keadaan angkatan kerja Indonesia. Jakarta: BPS
- BPS. (2019). ANALISIS HASIL SE2016 LANJUTAN POTENSI PENINGKATAN KINERJA USAHA MIKRO KECIL. Jakarta: BPS.
- BPS. (2020). Analisis Isu Terkini 2020. Jakarta: BPS.

BPS. (2020). Keadaan angkatan kerja Indonesia. Jakarta: BPS

Dresch, Aline, Collatto, Dalila C., & Lacerda, Daniel P.. (2018). Theoretical understanding between competitiveness and productivity: firm level. *Ingeniería y competitividad*, 20(2), 69-86. <https://doi.org/10.25100/iyc.v20i1.5897>, diakses 2 Desember 2021.

EfniCerya, Jusmanila Mustika Sari. 2018. Labor Competitiveness in Digital Economy: A Systematic Review of College Graduates. Proceedings of the First Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA 2018), Series: Advances in Economics, Business and Management Research. <https://doi.org/10.2991/piceeba-18.2018.2>, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/piceeba-18/25902633>, diakses tanggal 10 Juni 2021

Hendayana, Yana and Suryana, Suryana, The Effect of Productivity and Innovation on the Competitiveness of Batik SMEs in West Java Indonesia (March 4, 2019). *Journal of Management and Marketing Review* 4 (1) 19-26 (2019), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3352576>, diakses pada 10 Juni 2021

<https://www.apo-tokyo.org>

<https://www.binalattas.info>

<https://www.bps.go.id>.

<https://www.conference-board.org>

<https://www.ilo.org>

<https://www.oecd.org>

Ibnu Abbas, A. S. M. H., & Farida Rahmawati, S. M. (2020). Technological Changes, Investments, and Unemployment in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 4(14), 679–691. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7925>, <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/7925>, diakses online 11 Juni 2021

Indrawati, S. M., & Kuncoro, A. (2021). Improving Competitiveness Through Vocational and Higher Education: Indonesia's Vision For Human Capital Development In 2019–2024. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 29-59. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1909692>, diakses pada 10 Juni 2021

- International Labour Office (ILO). 2007. Child labour wages and productivity: Results from demand-side surveys. International Labour Office, Geneva May 2007
- ILO. 2020. Driving ILO. (2009). Menghapuskan Pekerja Anak – Panduan Untuk Pengusaha: Panduan Satu, Pengenalan terhadap Permasalahan Pekerja Anak. ILO - Jakarta, hal. 26. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_747329.pdf, diakses pada 02 Juni 2021
- ILO. 2020. Driving Up Productivity - A guide for employer and business membership organizations. Lima: ILO / Regional Office for Latin America and the Caribbean, Bureau for Employers' Activities (ACT/EMP), 2020. 146 pp. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_758749.pdf, diakses pada 09 Juni 2021
- ILO dan National Confederation of Entrepreneurs (Employers') Organizations of Azerbaijan Republic. Employers' Organizations Productivity and Competitiveness Caucasus and Central Asia - AZERBAIJAN Productivity and competitiveness Handbook for employers. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_593313.pdf, diakses pada 09 Juni 2021
- Jati, W.R. (2015). Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana di Indonesia?. *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada*, 23 Nomor 1, 1-19.
- KBBI. (2021, Juni 15). KBBI. Retrieved from KBBI.co.id: <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/produktivitas>
- Kemendikbud. 2021. Statistik Persekolahan SMK 2020/2021. Jakarta: Kemendikbud
- Kemnaker. 2021. Buku Informasi Pelatihan dan Produktivitas Tahun 2020
- Kemnaker. 2021. Materi Buku Profil UPTP 2021_Sisnaker
- Kemnaker. 2021. Realisasi PN PBK dan Realisasi Anggaran TW III September Tahun 2021
- Korkmaz, Suna & Korkmaz, Oya. (2017). The Relationship between Labor Productivity and Economic Growth in OECD Countries. *International Journal of Economics and Finance*. 9. 71. 10.5539/ijef.v9n5p71. https://www.researchgate.net/publication/316209111_The_Relationship_between_Labor_Productivity_and_Economic_Growth_in_OECD_Countries, diakses 07 Juni 2021

- Landmann, Oliver. (2004). *Employment, Productivity, dan Output Growth*. Employment Strategy Papers. Employment Strategy Department of Freiburg University. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/documents/publication/wcms_114299.pdf, diakses 07 Juni 2021
- Mendez-Guerra, Carlos and Kataoka, Mitsuhiro. 2020. Disparities in Regional Productivity, Capital Accumulation, and Efficiency across Indonesia: A Convergence Clubs Approach. MPRA Paper No. 99322, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99322/1/MPRA_paper_99322.pdf, diakses pada 11 Juni 2021
- Miranti, Ragdad Cani and Mendez-Guerra, Carlos. (2020). Human Development Dynamics across Districts of Indonesia: A Study of Regional Convergence and Spatial Approach, MPRA Paper No. 100479, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/100479/1/MPRA_paper_100479.pdf, diakses pada 11 Juni 2021
- Nugraha, A.T., Prayitno, G., Situmorang, M. E., & Nasution, A. 2020. The role of infrastructure in economic growth and income inequality in Indonesia. *Economics and Sociology*, 13(1), 102-115. doi:10.14254/2071-789X.2020/13-1/7, <https://www.proquest.com/openview/a90d00e43718699d9e7357ae055eddc8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1416337>, diakses 14 Juni 2021
- Nurhadi. (2015). *Child Labour In Rural Indonesia: Children And Parents' Perspectives*. PhD thesis, University of York. <https://etheses.whiterose.ac.uk/9691/>, diakses 18 Mei 2021
- OECD/ADB (2020), *Employment and Skills Strategies in Indonesia*, OECD Reviews on Local Job Creation, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/dc9f0c7c-en>. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f8c39b2-en/index.html?itemId=/content/component/1f8c39b2-en#section-d1e9225>, diakses 07 Juni 2021
- OECD. (2001). *Measuring Productivity MEASUREMENT OF AGGREGATE AND INDUSTRY-LEVEL PRODUCTIVITY GROWTH*. Paris : OECD.
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antar Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), hal. 160-172, <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i2.793>, diakses 23 Agustus 2021

- Tan, Khee Giap dan Amri, Mulya. (2013). Subnational Competitiveness and National Performance: Analysis and Simulation for Indonesia. *Journal of CENTRUM Cathedra: The Business and Economics Research Journal*, Vol. 6, Issue 2, pp. 173-192, 2013. <https://ssrn.com/abstract=2332885>, diakses 11 Juni 2021
- UNDP. (2021, Juni 15). <http://www.hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN>. Retrieved from UNDP: <http://www.hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN>
- UNFPA. (2014). *Indonesia on the Threshold of Population Ageing*. Jakarta: UNFPA Indonesia
- UNFPA. 2015. *Taking advantage of the demography dividend in Indonesia: A brief introduction to theory and practice*. Jakarta: UNFPA Indonesia
- WEF. (2021). *The Global Competitiveness Report SPECIAL EDITION 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery*, Klaus Schwab, Saadia Zahidi, *World Economic Forum*
- World Bank. (2018). *Productivity Unplugged - The Challenges of Malaysia's Transition into a High-Income Country*. Knowledge & Research, The Malaysia Development Experience Series, June 2018. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/185861527855417221/pdf/126781-WP-PUBLIC-P160562-World-Bank-Report-08-Productivity-Unplugged-FA-Full-Web.pdf>, diakses 11 Juni 2021
- World Bank. (2021). *The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19*. Washington: World Bank.
- World Economic Forum. 2019. *The Global Competitiveness Report 2019*. Geneva : The World Economic Forum



LAMPIRAN

Lampiran 1. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Provinsi, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	56,53	58,52	55,76
SUMATERA UTARA	72,84	76,94	78,01
SUMATERA BARAT	66,12	67,80	65,64
RIAU	166,79	167,82	162,10
JAMBI	82,85	88,59	85,36
SUMATERA SELATAN	74,52	78,62	77,03
BENGKULU	44,70	46,25	44,91
LAMPUNG	55,76	58,38	56,15
KEP. BANGKA BELITUNG	75,37	76,84	75,30
KEPULAUAN RIAU	184,97	183,95	172,12
DKI JAKARTA	367,18	378,37	384,78
JAWA BARAT	67,80	67,60	67,14
JAWA TENGAH	54,04	56,35	55,06
D I YOGYAKARTA	45,57	48,05	47,82
JAWA TIMUR	75,05	78,44	76,82
BANTEN	81,06	82,26	79,48
BALI	61,00	65,89	60,88
NUSA TENGGARA BARAT	39,81	37,22	36,21
NUSA TENGGARA TIMUR	25,06	26,53	25,24
KALIMANTAN BARAT	53,89	56,13	54,81
KALIMANTAN TENGAH	72,61	72,71	75,07
KALIMANTAN SELATAN	62,80	63,36	62,82
KALIMANTAN TIMUR	286,68	287,23	279,34
KALIMANTAN UTARA	182,54	178,84	183,82
SULAWESI UTARA	75,59	76,94	77,66
SULAWESI TENGAH	79,43	71,37	88,47
SULAWESI SELATAN	77,17	81,91	81,91
SULAWESI TENGGARA	70,41	73,15	72,48
GORONTALO	46,91	48,10	49,99
SULAWESI BARAT	48,55	50,23	47,67
MALUKU	39,60	42,09	39,66
MALUKU UTARA	45,73	48,58	50,44
PAPUA BARAT	143,98	144,81	134,09
PAPUA	88,69	89,91	81,38
INDONESIA	82,56	84,07	83,47

Lampiran 2. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Provinsi, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	59,28	63,15	65,13
SUMATERA UTARA	70,83	74,98	82,53
SUMATERA BARAT	65,43	68,58	71,60
RIAU	165,71	164,55	174,67
JAMBI	85,28	92,01	94,18
SUMATERA SELATAN	75,61	79,09	82,56
BENGKULU	45,65	47,76	49,69
LAMPUNG	57,02	62,68	65,08
KEP. BANGKA BELITUNG	70,08	74,43	75,92
KEPULAUAN RIAU	161,71	155,91	161,69
DKI JAKARTA	306,17	314,81	356,46
JAWA BARAT	59,76	60,65	67,66
JAWA TENGAH	50,95	53,23	57,50
D I YOGYAKARTA	44,00	47,37	52,24
JAWA TIMUR	71,41	75,05	80,82
BANTEN	72,47	73,35	79,16
BALI	54,79	61,30	65,76
NUSA TENGGARA BARAT	42,37	39,06	41,57
NUSA TENGGARA TIMUR	28,29	29,34	32,08
KALIMANTAN BARAT	54,43	57,77	59,66
KALIMANTAN TENGAH	70,29	73,15	78,66
KALIMANTAN SELATAN	62,70	67,00	69,81
KALIMANTAN TIMUR	250,08	255,47	269,44
KALIMANTAN UTARA	173,89	183,14	191,86
SULAWESI UTARA	70,67	71,11	81,82
SULAWESI TENGAH	81,97	89,71	96,89
SULAWESI SELATAN	77,08	82,95	91,57
SULAWESI TENGGARA	71,03	75,83	79,59
GORONTALO	42,93	46,03	50,13
SULAWESI BARAT	55,09	57,14	61,27
MALUKU	37,95	40,59	45,73
MALUKU UTARA	44,02	47,22	56,76
PAPUA BARAT	134,93	132,31	152,10
PAPUA	98,55	83,55	96,36
INDONESIA	78,38	81,37	88,15

Lampiran 3. Produktivitas Jam Kerja Menurut Provinsi, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	28.815	30.696	31.658
SUMATERA UTARA	34.433	36.450	40.120
SUMATERA BARAT	31.808	33.337	34.805
RIAU	80.554	79.989	84.910
JAMBI	41.454	44.729	45.784
SUMATERA SELATAN	36.754	38.448	40.132
BENGKULU	22.191	23.216	24.157
LAMPUNG	27.719	30.469	31.637
KEP. BANGKA BELITUNG	34.068	36.180	36.903
KEPULAUAN RIAU	78.608	75.789	78.597
DKI JAKARTA	148.831	153.033	173.277
JAWA BARAT	29.049	29.485	32.890
JAWA TENGAH	24.766	25.874	27.953
D I YOGYAKARTA	21.389	23.027	25.396
JAWA TIMUR	34.711	36.483	39.287
BANTEN	35.228	35.655	38.482
BALI	26.634	29.800	31.966
NUSA TENGGARA BARAT	20.594	18.989	20.208
NUSA TENGGARA TIMUR	13.753	14.263	15.594
KALIMANTAN BARAT	26.458	28.084	28.999
KALIMANTAN TENGAH	34.168	35.560	38.238
KALIMANTAN SELATAN	30.478	32.571	33.934
KALIMANTAN TIMUR	121.565	124.189	130.978
KALIMANTAN UTARA	84.532	89.026	93.264
SULAWESI UTARA	34.353	34.568	39.773
SULAWESI TENGAH	39.848	43.607	47.097
SULAWESI SELATAN	37.469	40.325	44.513
SULAWESI TENGGARA	34.528	36.862	38.687
GORONTALO	20.867	22.375	24.369
SULAWESI BARAT	26.778	27.775	29.784
MALUKU	18.447	19.731	22.228
MALUKU UTARA	21.399	22.952	27.590
PAPUA BARAT	65.591	64.318	73.936
PAPUA	47.906	40.615	46.843
INDONESIA	38.103	39.556	42.852

Lampiran 4. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	39,99	44,22	43,15
SUMATERA UTARA	50,95	53,67	56,24
SUMATERA BARAT	43,35	43,75	40,64
RIAU	109,73	115,32	114,27
JAMBI	46,10	50,65	49,23
SUMATERA SELATAN	27,20	28,43	28,31
BENGKULU	24,93	28,49	26,45
LAMPUNG	37,64	39,92	35,64
KEP. BANGKA BELITUNG	44,07	47,59	46,97
KEPULAUAN RIAU	78,05	76,42	60,07
DKI JAKARTA	86,97	60,94	52,02
JAWA BARAT	35,04	35,56	29,19
JAWA TENGAH	28,93	30,11	27,40
D I YOGYAKARTA	18,42	19,75	19,88
JAWA TIMUR	24,23	25,19	24,18
BANTEN	32,11	41,37	36,71
BALI	41,06	46,38	38,93
NUSA TENGGARA BARAT	27,89	27,92	24,02
NUSA TENGGARA TIMUR	12,48	14,60	13,32
KALIMANTAN BARAT	24,45	26,71	26,70
KALIMANTAN TENGAH	39,02	41,56	42,21
KALIMANTAN SELATAN	25,49	29,61	26,48
KALIMANTAN TIMUR	89,98	102,75	95,22
KALIMANTAN UTARA	117,30	105,18	105,67
SULAWESI UTARA	58,97	52,31	52,41
SULAWESI TENGAH	44,95	49,33	45,28
SULAWESI SELATAN	42,51	45,23	41,45
SULAWESI TENGGARA	46,01	48,61	45,84
GORONTALO	57,72	59,80	57,47
SULAWESI BARAT	36,04	41,05	37,78
MALUKU	24,76	27,21	27,90
MALUKU UTARA	21,05	23,53	23,73
PAPUA BARAT	42,48	45,91	41,13
PAPUA	13,51	13,57	14,57
INDONESIA	35,74	38,21	36,05

Lampiran 5. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	509,66	614,44	660,50
SUMATERA UTARA	158,18	166,07	182,15
SUMATERA BARAT	161,00	237,85	215,86
RIAU	2.665,80	2.913,89	2.366,38
JAMBI	781,04	744,95	495,26
SUMATERA SELATAN	1.179,35	1.093,68	1.090,02
BENGKULU	98,91	106,64	114,04
LAMPUNG	508,76	502,78	604,49
KEP. BANGKA BELITUNG	71,18	68,58	84,37
KEPULAUAN RIAU	2.483,79	2.207,14	2.086,38
DKI JAKARTA	113,90	177,06	226,16
JAWA BARAT	205,84	184,34	249,55
JAWA TENGAH	189,60	200,84	195,57
D I YOGYAKARTA	28,47	33,84	31,57
JAWA TIMUR	461,70	636,40	610,63
BANTEN	113,88	111,30	183,36
BALI	235,99	147,89	151,20
NUSA TENGGARA BARAT	343,29	328,21	590,67
NUSA TENGGARA TIMUR	28,38	33,88	32,27
KALIMANTAN BARAT	167,03	121,69	99,38
KALIMANTAN TENGAH	185,00	208,88	169,90
KALIMANTAN SELATAN	430,18	429,34	451,49
KALIMANTAN TIMUR	1.565,77	1.666,41	1.812,66
KALIMANTAN UTARA	1.549,33	1.529,37	1.448,91
SULAWESI UTARA	148,64	198,26	154,51
SULAWESI TENGAH	747,29	769,06	1.084,60
SULAWESI SELATAN	641,33	545,35	621,13
SULAWESI TENGGARA	546,11	666,54	614,44
GORONTALO	20,16	28,00	31,19
SULAWESI BARAT	134,13	75,57	104,07
MALUKU	69,08	120,71	107,81
MALUKU UTARA	176,08	180,67	188,24
PAPUA BARAT	1.746,80	1.290,96	1.458,81
PAPUA	4.298,68	2.419,21	3.439,28
INDONESIA	543,24	564,35	584,57

Lampiran 6. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	36,70	34,23	31,08
SUMATERA UTARA	133,29	139,74	147,28
SUMATERA BARAT	75,76	66,73	65,68
RIAU	674,63	675,34	678,12
JAMBI	177,42	165,86	177,84
SUMATERA SELATAN	179,80	235,57	244,81
BENGKULU	50,67	47,72	48,49
LAMPUNG	115,43	99,51	112,90
KEP. BANGKA BELITUNG	240,40	221,99	196,47
KEPULAUAN RIAU	292,44	292,18	308,23
DKI JAKARTA	357,06	363,60	379,21
JAWA BARAT	140,42	137,96	152,67
JAWA TENGAH	84,63	85,93	90,10
D I YOGYAKARTA	35,56	35,60	34,87
JAWA TIMUR	141,02	149,64	159,39
BANTEN	119,39	117,79	130,82
BALI	26,25	28,09	25,31
NUSA TENGGARA BARAT	15,37	13,44	15,16
NUSA TENGGARA TIMUR	3,57	3,46	3,35
KALIMANTAN BARAT	131,78	150,57	151,23
KALIMANTAN TENGAH	206,75	193,17	201,49
KALIMANTAN SELATAN	93,16	90,47	89,05
KALIMANTAN TIMUR	829,02	752,20	893,10
KALIMANTAN UTARA	203,33	220,89	209,15
SULAWESI UTARA	82,74	81,54	89,92
SULAWESI TENGAH	224,62	273,20	356,20
SULAWESI SELATAN	112,78	124,30	131,00
SULAWESI TENGGARA	48,87	51,47	56,58
GORONTALO	16,34	25,92	24,87
SULAWESI BARAT	69,81	62,35	66,23
MALUKU	25,33	24,04	18,86
MALUKU UTARA	65,78	62,21	101,15
PAPUA BARAT	681,75	1.105,13	822,15
PAPUA	94,74	85,44	78,37
INDONESIA	118,33	118,59	126,41

Lampiran 7. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	23,64	33,94	24,51
SUMATERA UTARA	34,68	34,28	50,16
SUMATERA BARAT	33,83	18,56	29,08
RIAU	73,93	30,56	67,66
JAMBI	23,52	28,38	21,36
SUMATERA SELATAN	64,26	48,15	42,03
BENGKULU	22,14	15,83	35,73
LAMPUNG	34,73	53,13	72,05
KEP. BANGKA BELITUNG	23,52	24,79	24,61
KEPULAUAN RIAU	263,77	230,36	315,31
DKI JAKARTA	453,09	404,06	389,75
JAWA BARAT	95,00	91,75	98,34
JAWA TENGAH	21,09	26,56	28,39
D I YOGYAKARTA	25,65	42,88	57,74
JAWA TIMUR	83,29	103,79	136,64
BANTEN	229,40	157,22	212,39
BALI	53,70	59,32	51,67
NUSA TENGGARA BARAT	9,65	12,82	20,19
NUSA TENGGARA TIMUR	7,81	9,24	12,80
KALIMANTAN BARAT	19,03	14,16	19,22
KALIMANTAN TENGAH	25,86	13,70	29,54
KALIMANTAN SELATAN	26,09	28,21	47,14
KALIMANTAN TIMUR	40,30	26,58	30,37
KALIMANTAN UTARA	22,86	29,87	56,07
SULAWESI UTARA	21,48	21,03	27,51
SULAWESI TENGAH	10,80	8,71	7,32
SULAWESI SELATAN	29,95	18,56	22,95
SULAWESI TENGGARA	8,96	12,47	6,91
GORONTALO	15,17	16,77	16,64
SULAWESI BARAT	23,86	10,34	24,64
MALUKU	9,70	15,27	11,94
MALUKU UTARA	15,80	13,01	16,69
PAPUA BARAT	24,20	9,39	18,88
PAPUA	16,38	23,70	21,96
INDONESIA	311,25	306,45	358,51

Lampiran 8. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	11,63	15,81	11,70
SUMATERA UTARA	16,86	28,68	28,81
SUMATERA BARAT	17,04	30,63	51,50
RIAU	6,41	4,58	6,72
JAMBI	40,99	50,24	54,32
SUMATERA SELATAN	49,79	34,57	49,46
BENGKULU	14,52	19,18	20,39
LAMPUNG	35,35	16,79	30,95
KEP. BANGKA BELITUNG	5,81	5,71	13,04
KEPULAUAN RIAU	39,09	37,50	32,16
DKI JAKARTA	27,36	56,67	32,43
JAWA BARAT	9,55	7,36	7,71
JAWA TENGAH	16,76	13,57	13,77
D I YOGYAKARTA	17,95	24,75	20,31
JAWA TIMUR	19,85	23,17	23,60
BANTEN	7,99	10,90	13,75
BALI	55,13	28,49	40,39
NUSA TENGGARA BARAT	4,84	8,24	8,50
NUSA TENGGARA TIMUR	7,63	10,32	7,38
KALIMANTAN BARAT	50,36	38,13	75,43
KALIMANTAN TENGAH	26,98	32,83	40,03
KALIMANTAN SELATAN	70,31	100,71	89,54
KALIMANTAN TIMUR	26,60	17,86	26,44
KALIMANTAN UTARA	49,05	52,26	92,95
SULAWESI UTARA	47,04	35,59	44,71
SULAWESI TENGAH	22,67	37,17	57,96
SULAWESI SELATAN	36,03	27,20	32,05
SULAWESI TENGGARA	84,90	36,79	36,64
GORONTALO	32,66	18,44	54,03
SULAWESI BARAT	64,27	106,12	143,54
MALUKU	48,56	282,88	536,33
MALUKU UTARA	26,16	16,17	23,58
PAPUA BARAT	44,60	50,01	96,02
PAPUA	88,63	54,70	70,03
INDONESIA	17,58	17,93	19,25

Lampiran 9. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Konstruksi Menurut Provinsi, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	70,31	86,19	94,41
SUMATERA UTARA	173,93	174,72	170,84
SUMATERA BARAT	99,21	116,05	120,81
RIAU	239,53	289,40	287,21
JAMBI	112,64	129,33	136,89
SUMATERA SELATAN	172,82	173,17	180,85
BENGKULU	38,94	36,88	46,68
LAMPUNG	88,64	94,69	98,23
KEP. BANGKA BELITUNG	128,16	130,96	144,67
KEPULAUAN RIAU	352,28	440,51	455,03
DKI JAKARTA	1.346,24	1.154,76	1.072,64
JAWA BARAT	76,04	76,26	78,31
JAWA TENGAH	64,12	66,84	70,76
D I YOGYAKARTA	61,40	77,55	75,33
JAWA TIMUR	98,26	101,59	105,55
BANTEN	120,82	134,02	131,41
BALI	95,89	100,56	99,85
NUSA TENGGARA BARAT	58,26	47,30	55,00
NUSA TENGGARA TIMUR	61,57	50,91	52,06
KALIMANTAN BARAT	91,50	92,65	93,87
KALIMANTAN TENGAH	103,23	116,26	112,57
KALIMANTAN SELATAN	104,84	92,59	92,41
KALIMANTAN TIMUR	397,11	357,05	324,71
KALIMANTAN UTARA	421,96	450,25	401,97
SULAWESI UTARA	114,94	146,49	145,02
SULAWESI TENGAH	136,74	136,67	127,11
SULAWESI SELATAN	141,47	155,90	180,78
SULAWESI TENGGARA	140,22	157,88	152,05
GORONTALO	83,38	94,37	106,19
SULAWESI BARAT	61,25	71,00	65,02
MALUKU	44,64	59,02	67,42
MALUKU UTARA	64,01	68,55	70,07
PAPUA BARAT	309,33	263,79	276,73
PAPUA	380,17	395,25	420,13
INDONESIA	123,93	127,77	132,94

Lampiran 10. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	61,93	57,32	51,73
SUMATERA UTARA	71,53	78,29	75,00
SUMATERA BARAT	54,83	57,94	55,87
RIAU	91,77	91,72	80,53
JAMBI	52,61	56,72	52,57
SUMATERA SELATAN	48,94	50,73	49,94
BENGKULU	45,73	46,36	42,66
LAMPUNG	35,44	38,52	35,02
KEP. BANGKA BELITUNG	57,23	62,36	55,49
KEPULAUAN RIAU	79,13	88,96	76,39
DKI JAKARTA	234,34	247,28	228,53
JAWA BARAT	46,51	46,79	43,09
JAWA TENGAH	41,88	43,28	41,72
D I YOGYAKARTA	20,52	20,93	18,47
JAWA TIMUR	77,05	81,32	74,79
BANTEN	56,76	53,74	48,05
BALI	27,90	31,88	28,77
NUSA TENGGARA BARAT	28,01	27,26	23,87
NUSA TENGGARA TIMUR	30,67	29,41	26,22
KALIMANTAN BARAT	62,66	59,36	52,79
KALIMANTAN TENGAH	48,94	58,08	51,65
KALIMANTAN SELATAN	31,22	31,90	29,04
KALIMANTAN TIMUR	79,24	77,48	73,00
KALIMANTAN UTARA	116,36	136,18	116,22
SULAWESI UTARA	52,68	63,56	57,75
SULAWESI TENGAH	45,33	43,36	37,78
SULAWESI SELATAN	62,03	69,88	69,62
SULAWESI TENGGARA	50,68	54,43	48,54
GORONTALO	32,13	32,26	33,10
SULAWESI BARAT	34,42	31,94	32,13
MALUKU	40,30	43,64	38,48
MALUKU UTARA	71,07	71,18	68,80
PAPUA BARAT	62,13	58,09	53,25
PAPUA	92,70	96,26	90,96
INDONESIA	58,69	59,60	56,14

Lampiran 11. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengangkutan dan Pergudangan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	114,83	112,62	79,39
SUMATERA UTARA	70,74	78,32	69,54
SUMATERA BARAT	221,81	213,24	229,38
RIAU	42,54	37,56	29,89
JAMBI	91,66	91,35	69,84
SUMATERA SELATAN	34,27	37,44	34,12
BENGKULU	149,02	158,42	128,92
LAMPUNG	68,50	77,43	81,86
KEP. BANGKA BELITUNG	168,84	132,41	90,47
KEPULAUAN RIAU	79,40	68,56	36,72
DKI JAKARTA	121,47	118,87	112,24
JAWA BARAT	59,41	64,44	60,70
JAWA TENGAH	55,63	60,61	45,00
D I YOGYAKARTA	68,42	63,81	59,95
JAWA TIMUR	76,07	73,29	61,47
BANTEN	79,53	79,91	50,59
BALI	156,01	153,59	136,11
NUSA TENGGARA BARAT	81,91	68,72	50,50
NUSA TENGGARA TIMUR	32,13	29,07	27,32
KALIMANTAN BARAT	83,64	94,69	71,01
KALIMANTAN TENGAH	149,08	167,69	175,86
KALIMANTAN SELATAN	91,03	102,34	94,35
KALIMANTAN TIMUR	192,31	156,02	156,84
KALIMANTAN UTARA	230,87	268,40	237,29
SULAWESI UTARA	88,38	90,16	87,43
SULAWESI TENGAH	91,84	101,19	67,67
SULAWESI SELATAN	70,59	64,13	54,28
SULAWESI TENGGARA	104,35	88,04	82,19
GORONTALO	41,38	41,68	42,02
SULAWESI BARAT	31,96	27,75	24,55
MALUKU	30,49	28,69	24,60
MALUKU UTARA	46,51	48,38	38,04
PAPUA BARAT	56,60	69,14	56,54
PAPUA	116,60	119,46	98,68
INDONESIA	79,27	81,88	70,37

Lampiran 12. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	16,56	16,76	14,45
SUMATERA UTARA	27,99	26,14	25,10
SUMATERA BARAT	9,82	10,86	8,80
RIAU	12,84	11,82	9,71
JAMBI	24,96	22,13	21,09
SUMATERA SELATAN	26,15	25,01	23,49
BENGKULU	21,93	19,28	20,14
LAMPUNG	21,81	21,12	20,62
KEP. BANGKA BELITUNG	44,71	40,24	37,42
KEPULAUAN RIAU	65,20	51,49	31,39
DKI JAKARTA	177,90	160,29	140,40
JAWA BARAT	23,75	22,11	21,41
JAWA TENGAH	25,05	27,96	23,40
D I YOGYAKARTA	44,39	49,98	48,44
JAWA TIMUR	65,68	64,11	55,43
BANTEN	34,22	33,34	28,38
BALI	96,53	100,44	100,90
NUSA TENGGARA BARAT	16,56	14,95	9,49
NUSA TENGGARA TIMUR	22,94	15,85	13,52
KALIMANTAN BARAT	31,09	25,58	21,56
KALIMANTAN TENGAH	34,94	30,37	30,10
KALIMANTAN SELATAN	16,77	16,33	18,38
KALIMANTAN TIMUR	36,90	35,02	33,90
KALIMANTAN UTARA	56,27	53,41	65,19
SULAWESI UTARA	36,08	34,95	28,84
SULAWESI TENGAH	10,48	8,94	8,34
SULAWESI SELATAN	32,95	33,00	28,97
SULAWESI TENGGARA	11,66	11,56	12,58
GORONTALO	31,07	26,63	24,71
SULAWESI BARAT	6,71	4,35	4,20
MALUKU	26,34	26,64	19,26
MALUKU UTARA	12,60	8,10	9,04
PAPUA BARAT	28,59	23,60	17,79
PAPUA	50,10	56,02	36,96
INDONESIA	40,57	38,93	35,03

Lampiran 13. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	543,70	656,36	761,39
SUMATERA UTARA	304,67	387,50	404,80
SUMATERA BARAT	746,80	1.061,14	963,85
RIAU	313,72	261,45	249,03
JAMBI	845,28	819,39	892,74
SUMATERA SELATAN	564,85	630,30	648,22
BENGKULU	715,20	335,37	370,80
LAMPUNG	602,51	844,10	991,26
KEP. BANGKA BELITUNG	272,58	288,66	644,76
KEPULAUAN RIAU	526,30	488,13	512,88
DKI JAKARTA	1.648,08	1.800,33	2.055,42
JAWA BARAT	247,17	236,39	381,78
JAWA TENGAH	533,26	647,30	733,65
D I YOGYAKARTA	668,34	540,86	462,13
JAWA TIMUR	788,41	947,03	849,85
BANTEN	384,71	399,11	363,54
BALI	1.398,44	910,37	861,77
NUSA TENGGARA BARAT	367,37	268,44	209,04
NUSA TENGGARA TIMUR	908,90	1.356,57	1.141,62
KALIMANTAN BARAT	731,95	784,44	928,52
KALIMANTAN TENGAH	183,46	214,03	267,32
KALIMANTAN SELATAN	301,69	433,25	410,37
KALIMANTAN TIMUR	523,45	694,11	549,13
KALIMANTAN UTARA	468,46	856,62	646,98
SULAWESI UTARA	425,21	660,58	673,83
SULAWESI TENGAH	578,37	681,24	781,84
SULAWESI SELATAN	1.012,55	943,45	1.247,76
SULAWESI TENGGARA	385,83	418,05	377,05
GORONTALO	339,36	249,12	290,18
SULAWESI BARAT	2.078,14	1.099,66	937,34
MALUKU	224,56	298,53	272,27
MALUKU UTARA	311,32	411,41	470,43
PAPUA BARAT	689,37	400,67	658,78
PAPUA	963,62	2.256,61	2.693,75
INDONESIA	595,62	639,97	698,54

Lampiran 14. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	124,57	165,18	198,50
SUMATERA UTARA	190,07	239,40	226,10
SUMATERA BARAT	214,71	170,11	220,67
RIAU	131,63	133,85	156,89
JAMBI	224,80	299,68	264,87
SUMATERA SELATAN	247,40	213,93	205,25
BENGKULU	154,16	132,44	272,87
LAMPUNG	140,96	170,44	194,12
KEP. BANGKA BELITUNG	159,69	185,22	160,98
KEPULAUAN RIAU	273,91	338,39	273,83
DKI JAKARTA	942,45	1.125,62	1.306,81
JAWA BARAT	95,93	98,64	119,62
JAWA TENGAH	102,97	113,36	134,17
D I YOGYAKARTA	101,43	113,18	130,21
JAWA TIMUR	164,13	155,82	177,85
BANTEN	91,21	111,42	128,28
BALI	100,32	95,13	103,76
NUSA TENGGARA BARAT	133,84	112,98	161,43
NUSA TENGGARA TIMUR	140,33	128,45	124,43
KALIMANTAN BARAT	238,01	240,42	318,01
KALIMANTAN TENGAH	337,53	337,29	468,60
KALIMANTAN SELATAN	196,59	202,29	267,95
KALIMANTAN TIMUR	250,71	300,31	335,09
KALIMANTAN UTARA	77,73	147,62	201,66
SULAWESI UTARA	148,68	169,65	231,73
SULAWESI TENGAH	157,28	181,19	193,29
SULAWESI SELATAN	214,89	251,06	298,41
SULAWESI TENGGARA	169,41	146,75	182,21
GORONTALO	217,10	134,18	186,73
SULAWESI BARAT	198,09	245,29	393,64
MALUKU	186,89	139,30	173,99
MALUKU UTARA	115,99	197,57	215,54
PAPUA BARAT	148,69	141,37	321,18
PAPUA	303,51	192,54	206,85
INDONESIA	228,38	249,59	293,65

Lampiran 15. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Real Estat Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	21.758,00	28.261,53	13.217,67
SUMATERA UTARA	2.326,63	2.681,79	4.026,08
SUMATERA BARAT	5.565,65	2.469,99	1.814,15
RIAU	1.631,32	759,42	940,51
JAMBI	1.255,64	1.529,99	986,95
SUMATERA SELATAN	1.433,63	2.555,21	1.857,59
BENGKULU	2.023,02	6.685,27	7.404,17
LAMPUNG	4.241,67	3.073,59	2.863,36
KEP. BANGKA BELITUNG	1.314,63	1.218,62	1.114,30
KEPULAUAN RIAU	557,46	379,19	1.038,30
DKI JAKARTA	1.049,19	1.113,12	1.008,53
JAWA BARAT	139,23	174,93	161,75
JAWA TENGAH	1.243,97	1.343,90	1.325,20
D I YOGYAKARTA	3.604,81	4.979,83	2.221,92
JAWA TIMUR	729,18	600,58	835,94
BANTEN	756,13	725,53	1.017,02
BALI	2.210,64	1.825,12	2.425,53
NUSA TENGGARA BARAT	-	-	1.395,50
NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	3.151,21
KALIMANTAN BARAT	809,78	1.659,62	1.797,04
KALIMANTAN TENGAH	1.467,02	1.194,70	877,82
KALIMANTAN SELATAN	633,55	1.360,32	1.079,71
KALIMANTAN TIMUR	1.343,70	605,77	731,53
KALIMANTAN UTARA	-	-	753,91
SULAWESI UTARA	3.267,64	1.904,53	3.690,04
SULAWESI TENGAH	-	-	2.445,36
SULAWESI SELATAN	1.171,00	1.259,76	1.543,83
SULAWESI TENGGARA	1.978,33	944,77	1.415,89
GORONTALO	3.289,90	2.024,90	3.887,82
SULAWESI BARAT	8.252,76	3.562,24	-
MALUKU	1.154,51	105,93	236,76
MALUKU UTARA	-	-	228,18
PAPUA BARAT	3.109,92	3.867,47	1.796,19
PAPUA	3.676,34	3.781,74	2.210,35
INDONESIA	761,00	784,59	823,69

Keterangan : '-' data tidak tersedia

Lampiran 16. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	44,67	48,41	41,19
SUMATERA UTARA	73,09	51,64	66,36
SUMATERA BARAT	20,23	22,97	38,72
RIAU	0,86	0,71	0,54
JAMBI	99,76	99,76	110,26
SUMATERA SELATAN	11,43	10,23	8,17
BENGKULU	119,92	103,20	93,07
LAMPUNG	10,52	9,98	10,10
KEP. BANGKA BELITUNG	20,43	17,96	20,26
KEPULAUAN RIAU	0,61	0,37	0,21
DKI JAKARTA	723,49	679,58	774,51
JAWA BARAT	17,22	15,51	13,75
JAWA TENGAH	21,55	20,12	18,92
D I YOGYAKARTA	22,48	23,04	30,46
JAWA TIMUR	56,34	48,47	52,07
BANTEN	28,88	35,56	27,98
BALI	29,13	30,95	40,55
NUSA TENGGARA BARAT	11,94	10,46	8,02
NUSA TENGGARA TIMUR	9,44	12,44	7,48
KALIMANTAN BARAT	29,10	41,87	40,88
KALIMANTAN TENGAH	3,14	3,79	2,95
KALIMANTAN SELATAN	33,96	33,37	40,01
KALIMANTAN TIMUR	23,89	18,03	24,76
KALIMANTAN UTARA	43,57	32,04	46,13
SULAWESI UTARA	6,63	6,02	5,65
SULAWESI TENGAH	20,57	30,60	18,70
SULAWESI SELATAN	36,93	35,73	26,04
SULAWESI TENGGARA	26,45	18,80	27,60
GORONTALO	5,63	6,60	4,05
SULAWESI BARAT	8,75	9,41	8,38
MALUKU	71,01	41,41	56,23
MALUKU UTARA	26,14	40,18	28,34
PAPUA BARAT	17,77	15,63	12,85
PAPUA	273,73	221,08	187,62
INDONESIA	111,40	106,50	108,90

Lampiran 17. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	76,95	70,20	70,30
SUMATERA UTARA	60,77	77,21	74,45
SUMATERA BARAT	71,09	77,13	77,85
RIAU	69,21	61,34	63,36
JAMBI	57,88	60,59	64,17
SUMATERA SELATAN	71,99	71,55	70,00
BENGKULU	75,11	70,59	68,37
LAMPUNG	52,31	56,34	63,47
KEP. BANGKA BELITUNG	66,09	72,68	75,35
KEPULAUAN RIAU	75,35	64,57	70,05
DKI JAKARTA	338,93	300,42	333,26
JAWA BARAT	43,37	47,62	50,90
JAWA TENGAH	63,71	61,31	77,50
D I YOGYAKARTA	95,15	95,87	95,45
JAWA TIMUR	70,14	72,40	76,04
BANTEN	54,14	46,26	63,86
BALI	61,55	71,46	78,05
NUSA TENGGARA BARAT	50,53	44,51	51,09
NUSA TENGGARA TIMUR	61,29	63,24	67,89
KALIMANTAN BARAT	70,12	75,71	78,59
KALIMANTAN TENGAH	63,76	57,28	65,92
KALIMANTAN SELATAN	82,37	81,26	86,62
KALIMANTAN TIMUR	69,61	73,44	69,63
KALIMANTAN UTARA	79,38	96,88	98,77
SULAWESI UTARA	70,00	63,46	62,12
SULAWESI TENGAH	54,47	52,65	52,03
SULAWESI SELATAN	59,29	57,12	66,16
SULAWESI TENGGARA	43,08	43,06	46,76
GORONTALO	48,24	40,39	42,27
SULAWESI BARAT	71,05	77,40	69,13
MALUKU	104,30	86,90	98,50
MALUKU UTARA	77,23	71,06	74,87
PAPUA BARAT	86,38	94,83	92,03
PAPUA	93,02	103,93	107,77
INDONESIA	73,28	73,88	79,97

Lampiran 18. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pendidikan Menurut Provinsi, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	21,73	20,82	22,13
SUMATERA UTARA	28,92	28,21	32,03
SUMATERA BARAT	43,64	41,55	45,82
RIAU	12,74	14,46	14,80
JAMBI	49,03	57,13	61,35
SUMATERA SELATAN	39,75	46,66	44,52
BENGKULU	58,97	53,52	54,68
LAMPUNG	39,59	36,12	40,95
KEP. BANGKA BELITUNG	46,26	43,63	45,95
KEPULAUAN RIAU	52,52	47,93	34,33
DKI JAKARTA	365,99	433,35	507,86
JAWA BARAT	38,54	41,80	47,47
JAWA TENGAH	50,73	52,34	55,45
D I YOGYAKARTA	72,25	61,39	73,06
JAWA TIMUR	44,35	45,40	51,77
BANTEN	56,23	47,63	51,62
BALI	72,69	90,01	86,43
NUSA TENGGARA BARAT	34,53	30,49	33,96
NUSA TENGGARA TIMUR	38,01	34,32	36,33
KALIMANTAN BARAT	46,62	50,57	52,93
KALIMANTAN TENGAH	56,47	55,51	68,82
KALIMANTAN SELATAN	48,07	53,60	56,05
KALIMANTAN TIMUR	65,01	73,85	74,36
KALIMANTAN UTARA	65,16	70,05	81,20
SULAWESI UTARA	36,44	38,29	44,25
SULAWESI TENGAH	42,86	43,44	46,49
SULAWESI SELATAN	78,05	75,05	84,23
SULAWESI TENGGARA	47,78	58,97	62,93
GORONTALO	32,86	36,41	43,84
SULAWESI BARAT	54,54	44,15	45,74
MALUKU	30,73	29,41	27,04
MALUKU UTARA	21,67	23,97	23,45
PAPUA BARAT	74,96	59,71	61,29
PAPUA	68,61	69,89	71,42
INDONESIA	52,07	53,20	58,11

Lampiran 19. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	61,98	60,83	59,68
SUMATERA UTARA	40,72	48,34	49,52
SUMATERA BARAT	48,58	59,13	56,45
RIAU	21,26	22,54	24,03
JAMBI	61,34	66,75	72,26
SUMATERA SELATAN	36,92	36,53	35,77
BENGKULU	55,45	43,94	51,75
LAMPUNG	44,26	51,68	58,52
KEP. BANGKA BELITUNG	60,52	53,24	59,20
KEPULAUAN RIAU	100,71	77,97	67,74
DKI JAKARTA	253,77	310,05	315,66
JAWA BARAT	37,63	38,72	37,10
JAWA TENGAH	36,17	37,54	40,85
D I YOGYAKARTA	72,54	58,83	72,83
JAWA TIMUR	44,82	39,88	48,07
BANTEN	64,19	84,15	95,65
BALI	72,64	71,62	78,79
NUSA TENGGARA BARAT	88,87	63,92	45,52
NUSA TENGGARA TIMUR	37,12	32,96	33,67
KALIMANTAN BARAT	71,60	76,99	78,15
KALIMANTAN TENGAH	83,69	76,79	73,12
KALIMANTAN SELATAN	79,37	74,00	81,63
KALIMANTAN TIMUR	97,25	97,35	94,79
KALIMANTAN UTARA	81,23	92,93	87,60
SULAWESI UTARA	161,32	158,04	187,62
SULAWESI TENGAH	52,11	55,69	55,97
SULAWESI SELATAN	87,10	81,36	93,14
SULAWESI TENGGARA	30,24	33,97	37,85
GORONTALO	98,87	107,96	81,89
SULAWESI BARAT	88,92	79,48	70,75
MALUKU	45,53	41,95	45,07
MALUKU UTARA	93,12	67,75	63,68
PAPUA BARAT	46,25	39,97	43,16
PAPUA	90,40	127,42	118,64
INDONESIA	62,41	64,32	70,96

Lampiran 20. Produktivitas Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Jasa Lainnya Menurut Provinsi, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	22,47	23,54	19,51
SUMATERA UTARA	7,29	8,23	7,57
SUMATERA BARAT	45,79	37,60	33,94
RIAU	22,80	27,74	15,46
JAMBI	31,94	28,96	26,90
SUMATERA SELATAN	18,22	17,45	16,23
BENGKULU	17,76	13,24	11,26
LAMPUNG	14,59	17,79	15,17
KEP. BANGKA BELITUNG	14,27	14,99	14,06
KEPULAUAN RIAU	13,54	13,67	4,23
DKI JAKARTA	116,92	134,32	131,14
JAWA BARAT	23,67	23,44	22,94
JAWA TENGAH	20,61	21,77	20,22
D I YOGYAKARTA	18,96	22,15	17,56
JAWA TIMUR	21,30	22,11	19,85
BANTEN	19,51	16,75	16,27
BALI	20,47	20,21	19,54
NUSA TENGGARA BARAT	22,11	23,84	19,71
NUSA TENGGARA TIMUR	28,16	32,61	25,34
KALIMANTAN BARAT	19,88	20,20	17,60
KALIMANTAN TENGAH	24,31	23,53	19,33
KALIMANTAN SELATAN	17,27	14,07	14,65
KALIMANTAN TIMUR	35,05	33,46	32,26
KALIMANTAN UTARA	38,07	36,36	36,44
SULAWESI UTARA	28,55	32,30	31,02
SULAWESI TENGAH	17,89	20,21	19,34
SULAWESI SELATAN	39,73	37,68	36,73
SULAWESI TENGGARA	48,57	49,07	55,45
GORONTALO	15,60	20,59	17,99
SULAWESI BARAT	66,69	55,33	48,42
MALUKU	24,95	23,15	24,09
MALUKU UTARA	19,59	19,50	18,49
PAPUA BARAT	16,96	11,86	10,60
PAPUA	71,50	82,65	70,52
INDONESIA	30,46	32,21	30,67

Lampiran 21. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	22,47	23,54	19,51
SUMATERA UTARA	7,29	8,23	7,57
SUMATERA BARAT	45,79	37,60	33,94
RIAU	22,80	27,74	15,46
JAMBI	31,94	28,96	26,90
SUMATERA SELATAN	18,22	17,45	16,23
BENGKULU	17,76	13,24	11,26
LAMPUNG	14,59	17,79	15,17
KEP. BANGKA BELITUNG	14,27	14,99	14,06
KEPULAUAN RIAU	13,54	13,67	4,23
DKI JAKARTA	116,92	134,32	131,14
JAWA BARAT	23,67	23,44	22,94
JAWA TENGAH	20,61	21,77	20,22
D I YOGYAKARTA	18,96	22,15	17,56
JAWA TIMUR	21,30	22,11	19,85
BANTEN	19,51	16,75	16,27
BALI	20,47	20,21	19,54
NUSA TENGGARA BARAT	22,11	23,84	19,71
NUSA TENGGARA TIMUR	28,16	32,61	25,34
KALIMANTAN BARAT	19,88	20,20	17,60
KALIMANTAN TENGAH	24,31	23,53	19,33
KALIMANTAN SELATAN	17,27	14,07	14,65
KALIMANTAN TIMUR	35,05	33,46	32,26
KALIMANTAN UTARA	38,07	36,36	36,44
SULAWESI UTARA	28,55	32,30	31,02
SULAWESI TENGAH	17,89	20,21	19,34
SULAWESI SELATAN	39,73	37,68	36,73
SULAWESI TENGGARA	48,57	49,07	55,45
GORONTALO	15,60	20,59	17,99
SULAWESI BARAT	66,69	55,33	48,42
MALUKU	24,95	23,15	24,09
MALUKU UTARA	19,59	19,50	18,49
PAPUA BARAT	16,96	11,86	10,60
PAPUA	71,50	82,65	70,52
INDONESIA	30,46	32,21	30,67

Lampiran 22. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	496,20	617,35	647,86
SUMATERA UTARA	143,45	155,30	205,12
SUMATERA BARAT	145,90	245,99	259,17
RIAU	2.131,01	2.395,43	2.094,77
JAMBI	616,27	642,49	457,42
SUMATERA SELATAN	962,44	877,60	951,32
BENGKULU	83,13	97,43	116,25
LAMPUNG	510,75	474,07	576,31
KEP. BANGKA BELITUNG	64,11	64,11	78,80
KEPULAUAN RIAU	2.078,31	1.743,82	2.026,07
DKI JAKARTA	105,49	158,89	257,33
JAWA BARAT	176,18	160,58	257,50
JAWA TENGAH	168,07	177,57	195,47
D I YOGYAKARTA	25,30	27,19	35,99
JAWA TIMUR	383,75	562,58	582,89
BANTEN	91,93	101,26	173,55
BALI	186,40	127,67	143,05
NUSA TENGGARA BARAT	307,91	325,56	567,67
NUSA TENGGARA TIMUR	28,82	37,66	38,00
KALIMANTAN BARAT	140,63	102,40	90,82
KALIMANTAN TENGAH	146,65	164,33	157,94
KALIMANTAN SELATAN	323,07	316,58	375,11
KALIMANTAN TIMUR	1.056,64	1.158,38	1.411,63
KALIMANTAN UTARA	1.068,30	1.080,08	1.297,77
SULAWESI UTARA	126,52	176,28	145,27
SULAWESI TENGAH	650,19	656,79	1.083,67
SULAWESI SELATAN	557,69	490,19	599,72
SULAWESI TENGGARA	448,22	572,24	611,55
GORONTALO	16,19	23,30	25,26
SULAWESI BARAT	134,48	79,29	111,77
MALUKU	57,43	108,82	109,19
MALUKU UTARA	128,41	139,67	158,56
PAPUA BARAT	1.675,88	1.063,93	1.728,01
PAPUA	3.605,61	1.984,48	3.111,17
INDONESIA	449,85	478,49	549,05

Lampiran 23. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	40,86	38,80	39,15
SUMATERA UTARA	126,13	130,27	152,33
SUMATERA BARAT	77,68	67,69	73,89
RIAU	609,24	612,15	687,93
JAMBI	170,31	156,84	181,75
SUMATERA SELATAN	173,06	224,43	264,57
BENGKULU	49,50	45,98	51,47
LAMPUNG	112,57	102,04	127,54
KEP. BANGKA BELITUNG	231,60	229,78	232,05
KEPULAUAN RIAU	259,19	253,70	301,05
DKI JAKARTA	308,94	311,04	357,96
JAWA BARAT	124,74	125,01	156,29
JAWA TENGAH	79,23	80,38	93,87
D I YOGYAKARTA	35,74	35,26	39,77
JAWA TIMUR	127,56	136,46	160,45
BANTEN	106,14	105,44	130,83
BALI	24,73	27,70	29,66
NUSA TENGGARA BARAT	16,01	14,41	17,72
NUSA TENGGARA TIMUR	4,33	4,22	4,64
KALIMANTAN BARAT	128,45	149,91	166,90
KALIMANTAN TENGAH	195,33	191,78	211,79
KALIMANTAN SELATAN	95,64	95,18	101,82
KALIMANTAN TIMUR	745,89	673,39	876,48
KALIMANTAN UTARA	173,03	214,99	221,47
SULAWESI UTARA	80,58	77,47	96,07
SULAWESI TENGAH	239,86	304,60	414,28
SULAWESI SELATAN	107,50	124,54	146,55
SULAWESI TENGGARA	52,35	53,94	62,99
GORONTALO	16,01	25,26	27,37
SULAWESI BARAT	76,20	72,01	83,73
MALUKU	26,38	25,80	23,86
MALUKU UTARA	76,59	64,78	119,11
PAPUA BARAT	602,86	1.082,01	1.033,84
PAPUA	80,38	83,39	80,86
INDONESIA	109,44	110,82	132,13

Lampiran 24. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	21,36	33,18	24,08
SUMATERA UTARA	29,92	30,38	46,84
SUMATERA BARAT	30,31	16,03	28,08
RIAU	68,48	27,64	67,82
JAMBI	21,16	22,59	20,09
SUMATERA SELATAN	51,15	42,40	36,91
BENGKULU	16,39	13,29	34,04
LAMPUNG	32,07	54,42	74,83
KEP. BANGKA BELITUNG	19,71	20,06	20,58
KEPULAUAN RIAU	260,67	197,59	289,21
DKI JAKARTA	450,88	367,92	387,63
JAWA BARAT	86,83	83,76	78,65
JAWA TENGAH	18,34	22,66	27,80
D I YOGYAKARTA	20,06	45,30	61,05
JAWA TIMUR	72,05	87,93	155,30
BANTEN	198,52	133,93	199,83
BALI	44,41	57,66	53,47
NUSA TENGGARA BARAT	11,36	11,76	18,04
NUSA TENGGARA TIMUR	7,84	8,30	12,88
KALIMANTAN BARAT	14,71	13,17	17,32
KALIMANTAN TENGAH	22,77	12,33	25,96
KALIMANTAN SELATAN	20,56	26,44	38,42
KALIMANTAN TIMUR	29,46	22,81	30,45
KALIMANTAN UTARA	20,83	24,02	52,93
SULAWESI UTARA	20,30	18,66	27,05
SULAWESI TENGAH	9,62	8,12	6,29
SULAWESI SELATAN	25,86	15,75	21,53
SULAWESI TENGGARA	8,31	11,69	7,13
GORONTALO	13,06	15,47	14,05
SULAWESI BARAT	23,58	9,04	36,96
MALUKU	7,33	12,91	10,01
MALUKU UTARA	18,65	9,73	15,51
PAPUA BARAT	28,94	7,14	20,67
PAPUA	11,75	18,87	19,37
INDONESIA	274,56	270,47	336,75

Lampiran 25. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	11,79	17,67	11,05
SUMATERA UTARA	17,24	24,86	26,97
SUMATERA BARAT	18,09	32,45	57,81
RIAU	6,27	3,59	5,32
JAMBI	37,26	48,49	51,22
SUMATERA SELATAN	50,32	32,36	49,33
BENGKULU	16,17	22,99	20,98
LAMPUNG	32,59	17,92	32,82
KEP. BANGKA BELITUNG	6,04	5,59	13,99
KEPULAUAN RIAU	46,39	33,23	30,74
DKI JAKARTA	23,02	51,03	32,59
JAWA BARAT	8,39	6,91	7,93
JAWA TENGAH	15,75	13,68	14,11
D I YOGYAKARTA	17,83	22,19	17,73
JAWA TIMUR	19,00	22,17	24,26
BANTEN	7,25	9,63	13,22
BALI	47,69	23,34	44,95
NUSA TENGGARA BARAT	6,30	8,52	10,42
NUSA TENGGARA TIMUR	6,46	8,54	6,19
KALIMANTAN BARAT	45,99	40,33	75,35
KALIMANTAN TENGAH	22,98	29,34	32,18
KALIMANTAN SELATAN	76,90	105,65	96,61
KALIMANTAN TIMUR	25,50	16,82	25,76
KALIMANTAN UTARA	41,41	59,46	103,92
SULAWESI UTARA	36,66	32,40	40,19
SULAWESI TENGAH	27,56	49,90	72,96
SULAWESI SELATAN	35,03	24,04	38,57
SULAWESI TENGGARA	70,90	31,65	42,39
GORONTALO	30,56	16,72	53,06
SULAWESI BARAT	44,23	114,10	93,47
MALUKU	66,34	223,81	613,40
MALUKU UTARA	25,92	19,64	26,44
PAPUA BARAT	36,55	34,71	84,10
PAPUA	99,25	57,51	64,83
INDONESIA	16,53	16,85	19,47

Lampiran 26. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Konstruksi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	63,83	82,31	91,21
SUMATERA UTARA	153,37	150,53	160,49
SUMATERA BARAT	85,17	106,67	113,80
RIAU	201,70	244,48	270,23
JAMBI	95,02	107,73	124,37
SUMATERA SELATAN	145,68	144,81	162,85
BENGKULU	33,54	32,52	44,05
LAMPUNG	72,89	83,59	87,86
KEP. BANGKA BELITUNG	109,37	118,99	133,22
KEPULAUAN RIAU	301,10	353,03	415,15
DKI JAKARTA	1.113,29	958,74	1.013,43
JAWA BARAT	62,15	64,41	71,57
JAWA TENGAH	53,63	57,15	63,82
D I YOGYAKARTA	51,56	67,69	69,72
JAWA TIMUR	79,60	83,46	92,49
BANTEN	99,41	112,69	121,07
BALI	78,79	85,94	88,26
NUSA TENGGARA BARAT	51,05	41,54	49,70
NUSA TENGGARA TIMUR	52,35	44,05	50,39
KALIMANTAN BARAT	76,24	79,47	84,55
KALIMANTAN TENGAH	87,83	99,02	104,10
KALIMANTAN SELATAN	91,07	83,79	86,68
KALIMANTAN TIMUR	332,71	290,96	290,86
KALIMANTAN UTARA	334,41	365,35	364,95
SULAWESI UTARA	101,26	125,97	140,48
SULAWESI TENGAH	118,67	123,34	120,20
SULAWESI SELATAN	118,89	135,17	174,86
SULAWESI TENGGARA	117,64	133,55	139,90
GORONTALO	66,24	76,93	90,25
SULAWESI BARAT	50,86	64,99	60,91
MALUKU	35,56	48,88	66,42
MALUKU UTARA	50,10	55,83	61,18
PAPUA BARAT	244,09	220,49	267,17
PAPUA	310,55	336,99	404,19
INDONESIA	103,14	108,61	121,11

Lampiran 27. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	52,63	50,42	47,27
SUMATERA UTARA	59,20	66,35	67,33
SUMATERA BARAT	47,01	49,60	51,66
RIAU	73,75	73,69	67,70
JAMBI	43,60	48,25	46,03
SUMATERA SELATAN	41,20	42,60	45,61
BENGKULU	37,49	40,00	38,68
LAMPUNG	30,63	34,59	33,54
KEP. BANGKA BELITUNG	47,66	54,72	50,06
KEPULAUAN RIAU	64,38	67,38	61,05
DKI JAKARTA	183,17	195,60	197,67
JAWA BARAT	36,66	37,56	37,47
JAWA TENGAH	35,46	37,06	37,88
D I YOGYAKARTA	17,74	18,36	17,70
JAWA TIMUR	63,34	68,18	67,65
BANTEN	44,96	43,02	41,37
BALI	22,62	26,69	27,44
NUSA TENGGARA BARAT	26,18	25,12	22,96
NUSA TENGGARA TIMUR	26,30	25,31	25,37
KALIMANTAN BARAT	49,67	48,18	44,16
KALIMANTAN TENGAH	39,58	47,61	44,76
KALIMANTAN SELATAN	27,47	29,28	27,87
KALIMANTAN TIMUR	61,31	62,25	61,04
KALIMANTAN UTARA	95,57	105,87	100,44
SULAWESI UTARA	44,56	52,33	54,50
SULAWESI TENGAH	38,95	36,74	33,89
SULAWESI SELATAN	52,98	60,30	63,08
SULAWESI TENGGARA	43,23	48,26	45,62
GORONTALO	25,08	26,46	28,12
SULAWESI BARAT	30,42	28,83	31,70
MALUKU	32,95	37,16	34,79
MALUKU UTARA	55,19	58,41	61,77
PAPUA BARAT	49,76	43,17	45,41
PAPUA	76,97	75,72	77,16
INDONESIA	48,23	49,72	50,24

Lampiran 28. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengangkutan dan Pergudangan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	101,38	101,79	78,07
SUMATERA UTARA	55,12	61,06	59,84
SUMATERA BARAT	185,70	178,70	226,78
RIAU	33,02	31,99	26,64
JAMBI	79,87	77,24	66,19
SUMATERA SELATAN	26,99	30,53	29,51
BENGKULU	131,42	133,19	120,27
LAMPUNG	59,41	69,08	80,99
KEP. BANGKA BELITUNG	142,40	120,05	89,59
KEPULAUAN RIAU	67,92	54,65	31,20
DKI JAKARTA	95,92	92,81	94,14
JAWA BARAT	50,01	52,43	55,77
JAWA TENGAH	46,26	50,69	43,75
D I YOGYAKARTA	57,70	52,83	60,49
JAWA TIMUR	60,53	60,75	57,45
BANTEN	65,43	64,46	45,26
BALI	123,08	125,05	155,03
NUSA TENGGARA BARAT	83,66	68,38	57,86
NUSA TENGGARA TIMUR	28,19	25,85	27,89
KALIMANTAN BARAT	70,85	81,73	63,95
KALIMANTAN TENGAH	127,82	147,65	175,24
KALIMANTAN SELATAN	80,04	91,45	97,87
KALIMANTAN TIMUR	161,33	128,49	146,25
KALIMANTAN UTARA	221,53	262,81	247,94
SULAWESI UTARA	71,10	69,37	80,50
SULAWESI TENGAH	85,25	89,68	68,57
SULAWESI SELATAN	55,81	55,02	54,09
SULAWESI TENGGARA	81,17	76,27	83,14
GORONTALO	30,78	33,22	36,46
SULAWESI BARAT	28,17	27,07	26,71
MALUKU	26,02	24,72	24,53
MALUKU UTARA	36,10	38,38	33,14
PAPUA BARAT	43,59	53,84	51,95
PAPUA	95,01	93,73	87,34
INDONESIA	65,25	67,59	65,18

Lampiran 29. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	13,86	14,83	13,13
SUMATERA UTARA	23,28	22,36	22,64
SUMATERA BARAT	8,59	9,56	7,90
RIAU	11,16	9,92	8,94
JAMBI	22,79	19,74	19,82
SUMATERA SELATAN	22,71	20,90	22,65
BENGKULU	17,44	16,12	17,50
LAMPUNG	19,08	19,71	20,88
KEP. BANGKA BELITUNG	38,66	34,83	33,21
KEPULAUAN RIAU	52,16	40,84	28,35
DKI JAKARTA	140,51	125,53	125,12
JAWA BARAT	19,03	18,10	19,37
JAWA TENGAH	21,38	23,67	22,17
D I YOGYAKARTA	37,61	44,38	45,64
JAWA TIMUR	53,91	53,33	50,05
BANTEN	29,23	27,25	25,89
BALI	78,70	85,15	112,86
NUSA TENGGARA BARAT	15,01	13,50	9,83
NUSA TENGGARA TIMUR	19,22	12,33	13,31
KALIMANTAN BARAT	25,15	21,51	18,74
KALIMANTAN TENGAH	28,67	24,63	26,12
KALIMANTAN SELATAN	14,64	15,51	17,91
KALIMANTAN TIMUR	30,31	30,64	30,70
KALIMANTAN UTARA	48,11	46,23	56,79
SULAWESI UTARA	30,19	30,03	28,47
SULAWESI TENGAH	9,89	8,51	8,21
SULAWESI SELATAN	28,73	28,69	26,93
SULAWESI TENGGARA	10,56	10,37	11,97
GORONTALO	27,12	24,37	22,78
SULAWESI BARAT	4,92	3,88	4,50
MALUKU	24,23	24,04	22,13
MALUKU UTARA	11,04	7,95	8,61
PAPUA BARAT	21,33	19,09	16,28
PAPUA	41,50	45,62	40,03
INDONESIA	33,72	32,69	32,38

Lampiran 30. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	479,31	547,50	696,17
SUMATERA UTARA	237,63	293,46	322,16
SUMATERA BARAT	622,71	875,32	840,01
RIAU	260,21	200,27	214,49
JAMBI	638,95	851,21	804,18
SUMATERA SELATAN	405,23	558,78	617,59
BENGKULU	584,00	255,03	307,55
LAMPUNG	492,84	721,10	814,67
KEP. BANGKA BELITUNG	265,42	259,31	463,48
KEPULAUAN RIAU	407,40	406,23	455,54
DKI JAKARTA	1.387,30	1.547,13	1.929,65
JAWA BARAT	197,47	193,16	349,86
JAWA TENGAH	427,35	511,50	637,27
D I YOGYAKARTA	568,33	487,68	468,15
JAWA TIMUR	690,48	782,36	751,77
BANTEN	323,23	331,74	334,03
BALI	1.388,94	707,53	788,66
NUSA TENGGARA BARAT	325,37	249,58	214,27
NUSA TENGGARA TIMUR	721,22	1.200,43	1.088,23
KALIMANTAN BARAT	510,77	575,95	844,91
KALIMANTAN TENGAH	145,65	171,17	255,70
KALIMANTAN SELATAN	256,70	378,01	381,73
KALIMANTAN TIMUR	442,24	619,40	446,42
KALIMANTAN UTARA	447,75	808,02	538,33
SULAWESI UTARA	370,96	519,60	596,00
SULAWESI TENGAH	523,40	572,51	659,00
SULAWESI SELATAN	848,31	774,62	1.203,79
SULAWESI TENGGARA	276,24	338,84	355,43
GORONTALO	258,92	197,22	217,34
SULAWESI BARAT	1.925,79	1.042,11	1.140,16
MALUKU	184,27	250,55	299,16
MALUKU UTARA	252,56	435,32	371,09
PAPUA BARAT	502,49	335,60	627,72
PAPUA	793,43	1.760,18	2.373,67
INDONESIA	489,33	528,22	630,88

Lampiran 31. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	107,78	153,33	188,08
SUMATERA UTARA	170,00	214,65	210,06
SUMATERA BARAT	185,70	160,20	217,63
RIAU	110,10	121,09	155,17
JAMBI	195,89	268,94	263,49
SUMATERA SELATAN	226,54	183,95	189,09
BENGKULU	135,23	118,73	268,28
LAMPUNG	125,67	158,22	182,58
KEP. BANGKA BELITUNG	128,30	177,98	163,78
KEPULAUAN RIAU	237,49	300,59	253,04
DKI JAKARTA	879,93	1.041,15	1.346,14
JAWA BARAT	83,65	88,69	117,12
JAWA TENGAH	88,91	98,39	124,85
D I YOGYAKARTA	84,55	100,17	135,59
JAWA TIMUR	139,97	136,12	169,54
BANTEN	83,34	102,17	130,06
BALI	89,50	87,03	101,77
NUSA TENGGARA BARAT	118,56	101,78	154,28
NUSA TENGGARA TIMUR	121,33	107,32	112,13
KALIMANTAN BARAT	205,04	211,59	305,52
KALIMANTAN TENGAH	297,61	286,40	457,81
KALIMANTAN SELATAN	169,80	188,32	262,97
KALIMANTAN TIMUR	232,71	273,01	346,50
KALIMANTAN UTARA	72,70	135,60	180,96
SULAWESI UTARA	124,00	147,27	221,65
SULAWESI TENGAH	141,71	151,81	176,78
SULAWESI SELATAN	184,99	219,28	299,15
SULAWESI TENGGARA	133,66	128,49	171,74
GORONTALO	185,00	114,19	171,93
SULAWESI BARAT	181,80	228,95	367,39
MALUKU	147,71	111,93	177,69
MALUKU UTARA	96,90	166,02	201,93
PAPUA BARAT	110,91	107,79	304,11
PAPUA	237,84	165,77	188,28
INDONESIA	200,26	222,52	284,72

Lampiran 32. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Real Estat Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	145.053,31	117.756,37	24.524,56
SUMATERA UTARA	1.858,69	2.549,43	5.988,64
SUMATERA BARAT	6.263,86	2.580,54	2.565,74
RIAU	2.270,74	954,68	2.943,88
JAMBI	1.633,93	1.399,72	1.392,96
SUMATERA SELATAN	1.276,34	2.061,23	3.903,01
BENGKULU	4.899,25	7.289,12	7.493,48
LAMPUNG	3.335,23	3.213,41	2.688,13
KEP. BANGKA BELITUNG	1.225,75	1.981,31	1.361,62
KEPULAUAN RIAU	529,23	326,04	1.314,52
DKI JAKARTA	1.055,89	1.039,49	1.229,51
JAWA BARAT	123,03	174,54	184,10
JAWA TENGAH	1.013,86	1.234,35	1.436,74
D I YOGYAKARTA	5.968,50	4.868,62	2.120,47
JAWA TIMUR	616,44	527,25	799,71
BANTEN	627,96	670,50	977,14
BALI	2.287,91	2.303,78	4.768,98
NUSA TENGGARA BARAT	-	-	1.305,71
NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	8.154,49
KALIMANTAN BARAT	799,16	1.495,12	1.826,48
KALIMANTAN TENGAH	1.569,44	1.744,02	1.506,32
KALIMANTAN SELATAN	1.005,05	1.604,10	1.094,28
KALIMANTAN TIMUR	1.630,10	642,80	1.348,09
KALIMANTAN UTARA	-	-	1.195,11
SULAWESI UTARA	3.285,49	1.645,09	4.591,87
SULAWESI TENGAH	-	-	8.788,51
SULAWESI SELATAN	963,93	1.209,22	1.333,32
SULAWESI TENGGARA	5.079,05	996,88	1.542,66
GORONTALO	5.061,39	2.114,54	3.579,26
SULAWESI BARAT	5.157,98	3.773,00	-
MALUKU	1.099,53	79,79	896,80
MALUKU UTARA	-	-	748,12
PAPUA BARAT	30.705,59	24.578,31	6.890,17
PAPUA	11.280,30	11.948,32	13.720,97
INDONESIA	697,97	751,11	947,18

Keterangan : '-' data tidak tersedia

Lampiran 33. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	43,29	49,07	44,29
SUMATERA UTARA	72,05	45,51	67,15
SUMATERA BARAT	20,48	21,42	42,94
RIAU	0,79	0,64	0,56
JAMBI	89,32	90,34	108,56
SUMATERA SELATAN	10,98	10,36	8,13
BENGKULU	133,08	92,04	99,42
LAMPUNG	10,22	9,97	11,55
KEP. BANGKA BELITUNG	19,76	17,77	22,13
KEPULAUAN RIAU	0,49	0,32	0,20
DKI JAKARTA	637,99	578,05	730,23
JAWA BARAT	15,57	13,62	13,30
JAWA TENGAH	19,87	18,36	20,25
D I YOGYAKARTA	21,11	22,02	32,87
JAWA TIMUR	52,86	42,25	51,18
BANTEN	25,03	30,88	26,25
BALI	24,62	26,34	49,83
NUSA TENGGARA BARAT	12,45	9,45	8,26
NUSA TENGGARA TIMUR	8,11	11,49	7,58
KALIMANTAN BARAT	28,90	38,33	38,43
KALIMANTAN TENGAH	2,86	3,56	2,58
KALIMANTAN SELATAN	33,79	30,14	43,42
KALIMANTAN TIMUR	22,21	15,80	23,81
KALIMANTAN UTARA	42,64	29,34	59,69
SULAWESI UTARA	5,63	5,63	5,99
SULAWESI TENGAH	19,97	30,44	20,90
SULAWESI SELATAN	33,35	33,58	29,04
SULAWESI TENGGARA	23,52	16,73	35,43
GORONTALO	5,54	6,51	4,66
SULAWESI BARAT	10,94	8,48	9,70
MALUKU	60,18	35,46	61,61
MALUKU UTARA	25,49	39,50	36,47
PAPUA BARAT	14,85	13,67	11,58
PAPUA	220,04	190,37	161,27
INDONESIA	101,83	94,67	108,89

Lampiran 34. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	71,98	70,29	73,84
SUMATERA UTARA	55,93	71,00	74,69
SUMATERA BARAT	66,63	72,17	76,86
RIAU	68,77	59,88	64,57
JAMBI	55,85	57,90	68,11
SUMATERA SELATAN	65,95	66,51	70,60
BENGKULU	69,38	68,56	68,27
LAMPUNG	49,81	54,57	68,99
KEP. BANGKA BELITUNG	58,69	68,96	72,61
KEPULAUAN RIAU	70,81	60,71	70,16
DKI JAKARTA	292,00	272,00	335,69
JAWA BARAT	38,34	42,79	50,83
JAWA TENGAH	58,96	54,41	75,42
D I YOGYAKARTA	81,67	86,98	97,17
JAWA TIMUR	61,32	64,92	73,47
BANTEN	48,24	43,29	65,28
BALI	56,60	65,60	74,28
NUSA TENGGARA BARAT	48,40	42,48	50,79
NUSA TENGGARA TIMUR	59,82	59,79	70,97
KALIMANTAN BARAT	68,36	72,33	79,94
KALIMANTAN TENGAH	61,24	53,39	67,67
KALIMANTAN SELATAN	82,10	81,42	95,33
KALIMANTAN TIMUR	69,67	71,85	75,20
KALIMANTAN UTARA	77,30	95,47	107,45
SULAWESI UTARA	63,85	60,27	64,81
SULAWESI TENGAH	51,60	50,83	57,20
SULAWESI SELATAN	56,81	54,27	66,22
SULAWESI TENGGARA	42,87	43,35	52,31
GORONTALO	44,11	38,28	44,34
SULAWESI BARAT	77,75	79,22	85,28
MALUKU	95,20	81,40	100,73
MALUKU UTARA	79,77	72,44	85,81
PAPUA BARAT	86,05	93,51	121,22
PAPUA	92,32	102,32	115,99
INDONESIA	67,88	69,02	81,64

Lampiran 35. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pendidikan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	26,97	27,68	35,34
SUMATERA UTARA	32,20	31,22	46,86
SUMATERA BARAT	45,44	46,44	58,91
RIAU	14,31	16,21	22,61
JAMBI	56,42	68,20	87,90
SUMATERA SELATAN	43,78	55,10	64,28
BENGKULU	65,36	62,71	74,83
LAMPUNG	45,72	42,58	71,78
KEP. BANGKA BELITUNG	52,54	48,98	57,26
KEPULAUAN RIAU	54,02	50,92	43,48
DKI JAKARTA	382,43	459,81	666,60
JAWA BARAT	40,98	45,74	68,01
JAWA TENGAH	51,85	54,04	67,82
D I YOGYAKARTA	75,42	65,68	83,16
JAWA TIMUR	46,91	49,08	70,46
BANTEN	62,99	51,91	75,40
BALI	72,03	88,77	103,30
NUSA TENGGARA BARAT	45,05	35,79	51,15
NUSA TENGGARA TIMUR	41,04	37,15	53,80
KALIMANTAN BARAT	53,51	59,02	77,75
KALIMANTAN TENGAH	69,06	65,06	102,70
KALIMANTAN SELATAN	56,00	61,04	88,34
KALIMANTAN TIMUR	69,07	81,11	111,01
KALIMANTAN UTARA	77,81	77,29	105,88
SULAWESI UTARA	38,53	41,62	64,63
SULAWESI TENGAH	49,58	49,20	69,64
SULAWESI SELATAN	85,86	83,11	126,89
SULAWESI TENGGARA	54,15	72,05	109,91
GORONTALO	33,37	35,64	51,97
SULAWESI BARAT	65,32	52,16	85,44
MALUKU	32,45	30,61	45,97
MALUKU UTARA	23,25	26,49	38,88
PAPUA BARAT	79,50	67,92	109,12
PAPUA	75,38	74,05	96,65
INDONESIA	56,42	58,53	81,66

Lampiran 36. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	62,03	61,52	70,28
SUMATERA UTARA	38,24	42,94	49,53
SUMATERA BARAT	44,08	55,56	57,38
RIAU	17,91	20,65	22,92
JAMBI	57,62	61,79	76,09
SUMATERA SELATAN	33,95	34,87	35,83
BENGKULU	56,17	41,04	49,94
LAMPUNG	40,41	50,94	60,25
KEP. BANGKA BELITUNG	59,36	48,80	61,97
KEPULAUAN RIAU	83,04	64,03	60,98
DKI JAKARTA	237,11	281,17	297,04
JAWA BARAT	34,97	34,70	36,52
JAWA TENGAH	32,23	34,78	39,65
D I YOGYAKARTA	67,42	51,07	70,56
JAWA TIMUR	40,34	36,16	46,87
BANTEN	54,91	77,15	93,32
BALI	64,79	63,25	78,98
NUSA TENGGARA BARAT	95,88	59,49	47,65
NUSA TENGGARA TIMUR	34,41	31,20	32,61
KALIMANTAN BARAT	68,33	75,20	79,29
KALIMANTAN TENGAH	79,50	72,31	72,96
KALIMANTAN SELATAN	82,34	73,22	87,03
KALIMANTAN TIMUR	86,04	89,93	96,99
KALIMANTAN UTARA	74,94	85,14	90,69
SULAWESI UTARA	148,51	140,02	192,35
SULAWESI TENGAH	48,02	56,38	55,06
SULAWESI SELATAN	80,72	77,61	97,23
SULAWESI TENGGARA	32,35	36,04	43,38
GORONTALO	93,04	109,62	83,92
SULAWESI BARAT	91,17	82,97	84,53
MALUKU	42,28	39,21	48,76
MALUKU UTARA	81,23	69,62	68,09
PAPUA BARAT	44,82	39,58	52,07
PAPUA	83,29	116,30	119,28
INDONESIA	57,44	59,35	70,84

Lampiran 37. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja di Kategori Lapangan Usaha Jasa Lainnya Menurut Provinsi, 2018-2020 (Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	25,24	27,63	23,97
SUMATERA UTARA	7,77	8,75	8,48
SUMATERA BARAT	47,53	40,21	40,88
RIAU	22,11	27,77	17,39
JAMBI	32,09	30,07	32,37
SUMATERA SELATAN	18,96	18,15	17,88
BENGKULU	19,39	13,90	12,80
LAMPUNG	15,26	19,32	18,34
KEP. BANGKA BELITUNG	13,99	16,01	17,44
KEPULAUAN RIAU	11,62	11,78	4,02
DKI JAKARTA	96,88	112,93	127,92
JAWA BARAT	21,92	23,08	25,09
JAWA TENGAH	18,98	20,63	21,50
D I YOGYAKARTA	19,12	21,36	20,35
JAWA TIMUR	20,18	21,17	21,25
BANTEN	18,46	15,39	18,60
BALI	18,37	18,88	23,68
NUSA TENGGARA BARAT	24,75	24,85	23,40
NUSA TENGGARA TIMUR	28,13	31,53	28,80
KALIMANTAN BARAT	20,96	21,64	19,36
KALIMANTAN TENGAH	23,65	24,50	21,45
KALIMANTAN SELATAN	17,92	16,41	18,34
KALIMANTAN TIMUR	32,51	32,67	35,58
KALIMANTAN UTARA	40,40	42,74	39,72
SULAWESI UTARA	31,32	33,36	40,36
SULAWESI TENGAH	18,84	22,22	23,71
SULAWESI SELATAN	36,52	38,07	38,10
SULAWESI TENGGARA	48,11	53,81	67,78
GORONTALO	19,43	26,73	23,26
SULAWESI BARAT	76,44	53,16	62,04
MALUKU	26,89	27,44	29,61
MALUKU UTARA	21,61	22,81	21,04
PAPUA BARAT	15,30	11,17	12,96
PAPUA	77,08	84,58	81,64
INDONESIA	28,90	31,34	33,66

Lampiran 38. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	24.017	27.001	29.541
SUMATERA UTARA	28.732	30.370	34.252
SUMATERA BARAT	24.993	26.068	25.292
RIAU	66.616	67.496	73.037
JAMBI	27.310	30.603	30.882
SUMATERA SELATAN	15.928	16.365	16.539
BENGKULU	14.353	16.846	16.506
LAMPUNG	22.393	25.403	23.337
KEP. BANGKA BELITUNG	21.763	24.125	24.257
KEPULAUAN RIAU	39.151	37.138	32.439
DKI JAKARTA	31.033	25.888	24.154
JAWA BARAT	19.047	19.883	18.683
JAWA TENGAH	16.539	17.060	17.158
D I YOGYAKARTA	11.370	13.471	14.102
JAWA TIMUR	14.115	14.573	15.259
BANTEN	18.001	23.782	24.025
BALI	21.620	26.634	22.898
NUSA TENGGARA BARAT	17.013	17.384	16.233
NUSA TENGGARA TIMUR	8.003	9.303	9.600
KALIMANTAN BARAT	13.888	15.793	16.691
KALIMANTAN TENGAH	21.698	22.117	24.680
KALIMANTAN SELATAN	14.456	17.679	16.582
KALIMANTAN TIMUR	44.362	53.515	50.990
KALIMANTAN UTARA	66.088	56.797	61.985
SULAWESI UTARA	31.180	25.593	29.192
SULAWESI TENGAH	25.364	27.770	26.194
SULAWESI SELATAN	25.457	27.605	26.739
SULAWESI TENGGARA	26.916	27.613	26.536
GORONTALO	28.794	29.457	31.174
SULAWESI BARAT	23.772	27.876	27.166
MALUKU	12.963	15.041	17.564
MALUKU UTARA	10.814	12.335	14.856
PAPUA BARAT	22.907	25.084	26.713
PAPUA	8.224	8.356	9.328
INDONESIA	20.612	22.224	22.685

Lampiran 39. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	241.207	300.103	314.930
SUMATERA UTARA	69.733	75.491	99.712
SUMATERA BARAT	70.922	119.579	125.984
RIAU	1.035.907	1.164.444	1.018.293
JAMBI	299.574	312.324	222.358
SUMATERA SELATAN	467.851	426.611	462.447
BENGKULU	40.409	47.362	56.512
LAMPUNG	248.281	230.452	280.152
KEP. BANGKA BELITUNG	31.165	31.164	38.303
KEPULAUAN RIAU	1.010.288	847.688	984.893
DKI JAKARTA	51.278	77.238	125.090
JAWA BARAT	85.641	78.062	125.173
JAWA TENGAH	81.702	86.319	95.019
D I YOGYAKARTA	12.298	13.219	17.497
JAWA TIMUR	186.547	273.476	283.351
BANTEN	44.688	49.223	84.363
BALI	90.611	62.062	69.536
NUSA TENGGARA BARAT	149.678	158.256	275.950
NUSA TENGGARA TIMUR	14.009	18.306	18.471
KALIMANTAN BARAT	68.361	49.779	44.151
KALIMANTAN TENGAH	71.288	79.885	76.777
KALIMANTAN SELATAN	157.046	153.892	182.346
KALIMANTAN TIMUR	513.646	563.104	686.208
KALIMANTAN UTARA	519.311	525.039	630.862
SULAWESI UTARA	61.504	85.694	70.618
SULAWESI TENGAH	316.067	319.272	526.786
SULAWESI SELATAN	271.101	238.287	291.531
SULAWESI TENGGARA	217.886	278.170	297.282
GORONTALO	7.868	11.325	12.280
SULAWESI BARAT	65.370	38.545	54.334
MALUKU	27.915	52.899	53.080
MALUKU UTARA	62.422	67.894	77.077
PAPUA BARAT	814.665	517.189	840.004
PAPUA	1.752.725	964.679	1.512.374
INDONESIA	218.679	232.601	266.901

Lampiran 40. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	19.860	18.859	19.031
SUMATERA UTARA	61.315	63.324	74.048
SUMATERA BARAT	37.763	32.906	35.920
RIAU	296.160	297.571	334.411
JAMBI	82.790	76.243	88.351
SUMATERA SELATAN	84.126	109.096	128.608
BENGKULU	24.061	22.353	25.018
LAMPUNG	54.722	49.605	61.999
KEP. BANGKA BELITUNG	112.582	111.698	112.804
KEPULAUAN RIAU	125.997	123.327	146.343
DKI JAKARTA	150.178	151.199	174.009
JAWA BARAT	60.636	60.768	75.974
JAWA TENGAH	38.514	39.074	45.632
D I YOGYAKARTA	17.375	17.141	19.331
JAWA TIMUR	62.007	66.335	77.999
BANTEN	51.594	51.256	63.600
BALI	12.022	13.464	14.417
NUSA TENGGARA BARAT	7.782	7.006	8.615
NUSA TENGGARA TIMUR	2.106	2.050	2.257
KALIMANTAN BARAT	62.440	72.872	81.133
KALIMANTAN TENGAH	94.951	93.226	102.953
KALIMANTAN SELATAN	46.490	46.270	49.497
KALIMANTAN TIMUR	362.585	327.344	426.066
KALIMANTAN UTARA	84.110	104.507	107.660
SULAWESI UTARA	39.169	37.659	46.702
SULAWESI TENGAH	116.596	148.071	201.387
SULAWESI SELATAN	52.259	60.538	71.240
SULAWESI TENGGARA	25.446	26.223	30.619
GORONTALO	7.782	12.279	13.303
SULAWESI BARAT	37.042	35.003	40.702
MALUKU	12.822	12.542	11.598
MALUKU UTARA	37.232	31.489	57.902
PAPUA BARAT	293.055	525.975	502.560
PAPUA	39.073	40.535	39.309
INDONESIA	53.200	53.872	64.228

Lampiran 41. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	10.384	16.131	11.704
SUMATERA UTARA	14.543	14.767	22.768
SUMATERA BARAT	14.735	7.793	13.649
RIAU	33.290	13.434	32.969
JAMBI	10.285	10.982	9.767
SUMATERA SELATAN	24.865	20.610	17.941
BENGKULU	7.969	6.461	16.546
LAMPUNG	15.588	26.452	36.376
KEP. BANGKA BELITUNG	9.579	9.751	10.005
KEPULAUAN RIAU	126.713	96.052	140.588
DKI JAKARTA	219.179	178.850	188.430
JAWA BARAT	42.207	40.714	38.235
JAWA TENGAH	8.915	11.014	13.512
D I YOGYAKARTA	9.751	22.022	29.678
JAWA TIMUR	35.023	42.745	75.492
BANTEN	96.501	65.105	97.138
BALI	21.588	28.029	25.993
NUSA TENGGARA BARAT	5.524	5.719	8.767
NUSA TENGGARA TIMUR	3.813	4.034	6.263
KALIMANTAN BARAT	7.151	6.402	8.419
KALIMANTAN TENGAH	11.068	5.993	12.617
KALIMANTAN SELATAN	9.995	12.853	18.677
KALIMANTAN TIMUR	14.319	11.090	14.800
KALIMANTAN UTARA	10.125	11.676	25.731
SULAWESI UTARA	9.868	9.069	13.149
SULAWESI TENGAH	4.678	3.946	3.059
SULAWESI SELATAN	12.570	7.655	10.465
SULAWESI TENGGARA	4.041	5.681	3.467
GORONTALO	6.350	7.522	6.828
SULAWESI BARAT	11.460	4.395	17.964
MALUKU	3.565	6.276	4.867
MALUKU UTARA	9.064	4.732	7.542
PAPUA BARAT	14.068	3.473	10.047
PAPUA	5.712	9.173	9.416
INDONESIA	133.466	131.478	163.699

Lampiran 42. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	5.731	8.592	5.373
SUMATERA UTARA	8.379	12.086	13.110
SUMATERA BARAT	8.793	15.772	28.101
RIAU	3.049	1.745	2.585
JAMBI	18.111	23.572	24.897
SUMATERA SELATAN	24.462	15.731	23.981
BENGKULU	7.862	11.174	10.198
LAMPUNG	15.844	8.714	15.953
KEP. BANGKA BELITUNG	2.934	2.717	6.801
KEPULAUAN RIAU	22.550	16.151	14.941
DKI JAKARTA	11.191	24.808	15.844
JAWA BARAT	4.078	3.360	3.853
JAWA TENGAH	7.657	6.649	6.861
D I YOGYAKARTA	8.667	10.789	8.618
JAWA TIMUR	9.236	10.779	11.792
BANTEN	3.526	4.682	6.425
BALI	23.184	11.344	21.850
NUSA TENGGARA BARAT	3.064	4.139	5.064
NUSA TENGGARA TIMUR	3.139	4.150	3.008
KALIMANTAN BARAT	22.355	19.607	36.626
KALIMANTAN TENGAH	11.171	14.263	15.642
KALIMANTAN SELATAN	37.380	51.359	46.963
KALIMANTAN TIMUR	12.395	8.175	12.520
KALIMANTAN UTARA	20.130	28.903	50.515
SULAWESI UTARA	17.820	15.751	19.537
SULAWESI TENGAH	13.399	24.259	35.468
SULAWESI SELATAN	17.028	11.688	18.751
SULAWESI TENGGARA	34.463	15.384	20.607
GORONTALO	14.858	8.129	25.791
SULAWESI BARAT	21.502	55.468	45.437
MALUKU	32.249	108.796	298.183
MALUKU UTARA	12.600	9.550	12.852
PAPUA BARAT	17.766	16.872	40.884
PAPUA	48.245	27.955	31.517
INDONESIA	8.036	8.189	9.465

Lampiran 43. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Konstruksi Menurut Provinsi, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	31.029	40.012	44.340
SUMATERA UTARA	74.557	73.172	78.016
SUMATERA BARAT	41.402	51.853	55.318
RIAU	98.048	118.845	131.359
JAMBI	46.189	52.369	60.457
SUMATERA SELATAN	70.817	70.393	79.162
BENGKULU	16.306	15.809	21.413
LAMPUNG	35.430	40.633	42.709
KEP. BANGKA BELITUNG	53.167	57.844	64.762
KEPULAUAN RIAU	146.369	171.614	201.809
DKI JAKARTA	541.183	466.052	492.637
JAWA BARAT	30.211	31.312	34.793
JAWA TENGAH	26.071	27.779	31.023
D I YOGYAKARTA	25.065	32.906	33.890
JAWA TIMUR	38.693	40.570	44.958
BANTEN	48.326	54.779	58.851
BALI	38.302	41.775	42.906
NUSA TENGGARA BARAT	24.815	20.193	24.161
NUSA TENGGARA TIMUR	25.449	21.414	24.494
KALIMANTAN BARAT	37.063	38.631	41.100
KALIMANTAN TENGAH	42.693	48.134	50.604
KALIMANTAN SELATAN	44.270	40.732	42.135
KALIMANTAN TIMUR	161.735	141.441	141.392
KALIMANTAN UTARA	162.559	177.600	177.406
SULAWESI UTARA	49.221	61.235	68.290
SULAWESI TENGAH	57.689	59.957	58.429
SULAWESI SELATAN	57.793	65.709	85.003
SULAWESI TENGGARA	57.186	64.921	68.008
GORONTALO	32.202	37.398	43.870
SULAWESI BARAT	24.725	31.592	29.611
MALUKU	17.286	23.762	32.289
MALUKU UTARA	24.356	27.141	29.740
PAPUA BARAT	118.656	107.182	129.873
PAPUA	150.960	163.813	196.479
INDONESIA	50.138	52.795	58.873

Lampiran 44. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	25.582	24.512	22.977
SUMATERA UTARA	28.779	32.253	32.731
SUMATERA BARAT	22.850	24.110	25.110
RIAU	35.853	35.823	32.908
JAMBI	21.195	23.456	22.378
SUMATERA SELATAN	20.029	20.709	22.172
BENGKULU	18.224	19.442	18.804
LAMPUNG	14.889	16.814	16.306
KEP. BANGKA BELITUNG	23.168	26.598	24.334
KEPULAUAN RIAU	31.298	32.753	29.677
DKI JAKARTA	89.041	95.083	96.088
JAWA BARAT	17.822	18.258	18.216
JAWA TENGAH	17.237	18.015	18.413
D I YOGYAKARTA	8.624	8.927	8.605
JAWA TIMUR	30.792	33.144	32.883
BANTEN	21.856	20.913	20.109
BALI	10.997	12.977	13.341
NUSA TENGGARA BARAT	12.727	12.210	11.162
NUSA TENGGARA TIMUR	12.784	12.304	12.335
KALIMANTAN BARAT	24.147	23.422	21.465
KALIMANTAN TENGAH	19.238	23.143	21.756
KALIMANTAN SELATAN	13.355	14.235	13.546
KALIMANTAN TIMUR	29.803	30.262	29.674
KALIMANTAN UTARA	46.459	51.463	48.825
SULAWESI UTARA	21.663	25.437	26.492
SULAWESI TENGAH	18.936	17.858	16.476
SULAWESI SELATAN	25.754	29.312	30.662
SULAWESI TENGGARA	21.014	23.462	22.175
GORONTALO	12.190	12.864	13.671
SULAWESI BARAT	14.788	14.017	15.409
MALUKU	16.019	18.066	16.913
MALUKU UTARA	26.827	28.392	30.027
PAPUA BARAT	24.190	20.985	22.073
PAPUA	37.418	36.809	37.508
INDONESIA	23.445	24.167	24.422

Lampiran 45. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pengangkutan dan Pergudangan Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	49.284	49.481	37.952
SUMATERA UTARA	26.797	29.681	29.087
SUMATERA BARAT	90.272	86.868	110.241
RIAU	16.049	15.549	12.948
JAMBI	38.828	37.546	32.174
SUMATERA SELATAN	13.121	14.839	14.344
BENGKULU	63.884	64.744	58.466
LAMPUNG	28.882	33.579	39.370
KEP. BANGKA BELITUNG	69.224	58.360	43.549
KEPULAUAN RIAU	33.016	26.565	15.167
DKI JAKARTA	46.630	45.115	45.761
JAWA BARAT	24.310	25.487	27.110
JAWA TENGAH	22.489	24.643	21.267
D I YOGYAKARTA	28.051	25.679	29.407
JAWA TIMUR	29.422	29.529	27.925
BANTEN	31.807	31.333	22.000
BALI	59.832	60.790	75.363
NUSA TENGGARA BARAT	40.666	33.240	28.128
NUSA TENGGARA TIMUR	13.703	12.567	13.560
KALIMANTAN BARAT	34.443	39.728	31.087
KALIMANTAN TENGAH	62.136	71.772	85.186
KALIMANTAN SELATAN	38.907	44.453	47.576
KALIMANTAN TIMUR	78.424	62.461	71.093
KALIMANTAN UTARA	107.687	127.755	120.524
SULAWESI UTARA	34.563	33.720	39.130
SULAWESI TENGAH	41.441	43.594	33.330
SULAWESI SELATAN	27.128	26.746	26.292
SULAWESI TENGGARA	39.460	37.076	40.417
GORONTALO	14.962	16.149	17.721
SULAWESI BARAT	13.695	13.157	12.983
MALUKU	12.647	12.015	11.924
MALUKU UTARA	17.551	18.658	16.111
PAPUA BARAT	21.190	26.173	25.254
PAPUA	46.187	45.564	42.459
INDONESIA	31.718	32.855	31.687

Lampiran 46. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	6.738	7.208	6.381
SUMATERA UTARA	11.316	10.868	11.008
SUMATERA BARAT	4.176	4.646	3.841
RIAU	5.427	4.824	4.345
JAMBI	11.078	9.596	9.634
SUMATERA SELATAN	11.042	10.162	11.008
BENGKULU	8.477	7.836	8.507
LAMPUNG	9.277	9.581	10.149
KEP. BANGKA BELITUNG	18.793	16.930	16.142
KEPULAUAN RIAU	25.354	19.853	13.783
DKI JAKARTA	68.304	61.021	60.820
JAWA BARAT	9.250	8.801	9.416
JAWA TENGAH	10.395	11.505	10.779
D I YOGYAKARTA	18.283	21.573	22.187
JAWA TIMUR	26.207	25.923	24.332
BANTEN	14.210	13.249	12.585
BALI	38.257	41.393	54.861
NUSA TENGGARA BARAT	7.297	6.562	4.779
NUSA TENGGARA TIMUR	9.343	5.995	6.472
KALIMANTAN BARAT	12.228	10.454	9.109
KALIMANTAN TENGAH	13.938	11.975	12.697
KALIMANTAN SELATAN	7.115	7.538	8.707
KALIMANTAN TIMUR	14.735	14.897	14.926
KALIMANTAN UTARA	23.386	22.472	27.607
SULAWESI UTARA	14.674	14.596	13.841
SULAWESI TENGAH	4.806	4.135	3.991
SULAWESI SELATAN	13.965	13.945	13.091
SULAWESI TENGGARA	5.132	5.041	5.818
GORONTALO	13.182	11.848	11.075
SULAWESI BARAT	2.392	1.887	2.189
MALUKU	11.777	11.686	10.757
MALUKU UTARA	5.366	3.862	4.185
PAPUA BARAT	10.367	9.278	7.914
PAPUA	20.176	22.174	19.460
INDONESIA	16.393	15.893	15.740

Lampiran 47. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	233.000	266.148	338.415
SUMATERA UTARA	115.513	142.654	156.603
SUMATERA BARAT	302.706	425.501	408.340
RIAU	126.491	97.355	104.264
JAMBI	310.600	413.782	390.922
SUMATERA SELATAN	196.985	271.631	300.218
BENGKULU	283.888	123.973	149.502
LAMPUNG	239.577	350.534	396.018
KEP. BANGKA BELITUNG	129.025	126.055	225.300
KEPULAUAN RIAU	198.040	197.473	221.442
DKI JAKARTA	674.380	752.078	938.022
JAWA BARAT	95.994	93.898	170.072
JAWA TENGAH	207.740	248.647	309.786
D I YOGYAKARTA	276.273	237.068	227.574
JAWA TIMUR	335.652	380.315	365.446
BANTEN	157.128	161.263	162.378
BALI	675.181	343.940	383.375
NUSA TENGGARA BARAT	158.166	121.323	104.158
NUSA TENGGARA TIMUR	350.591	583.543	529.002
KALIMANTAN BARAT	248.290	279.976	410.722
KALIMANTAN TENGAH	70.802	83.210	124.296
KALIMANTAN SELATAN	124.787	183.756	185.565
KALIMANTAN TIMUR	214.976	301.096	217.009
KALIMANTAN UTARA	217.656	392.788	261.690
SULAWESI UTARA	180.328	252.582	289.724
SULAWESI TENGAH	254.430	278.301	320.347
SULAWESI SELATAN	412.372	376.552	585.173
SULAWESI TENGGARA	134.284	164.716	172.779
GORONTALO	125.865	95.871	105.652
SULAWESI BARAT	936.149	506.580	554.245
MALUKU	89.575	121.794	145.427
MALUKU UTARA	122.772	211.615	180.390
PAPUA BARAT	244.265	163.138	305.141
PAPUA	385.696	855.642	1.153.865
INDONESIA	237.867	256.772	306.677

Lampiran 48. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	52.395	74.535	91.430
SUMATERA UTARA	82.639	104.343	102.115
SUMATERA BARAT	90.271	77.874	105.792
RIAU	53.519	58.862	75.428
JAMBI	95.224	130.736	128.087
SUMATERA SELATAN	110.124	89.418	91.919
BENGKULU	65.736	57.716	130.412
LAMPUNG	61.088	76.913	88.755
KEP. BANGKA BELITUNG	62.369	86.516	79.613
KEPULAUAN RIAU	115.448	146.119	123.003
DKI JAKARTA	427.744	506.116	654.371
JAWA BARAT	40.664	43.111	56.932
JAWA TENGAH	43.222	47.830	60.689
D I YOGYAKARTA	41.100	48.692	65.910
JAWA TIMUR	68.041	66.171	82.414
BANTEN	40.513	49.667	63.225
BALI	43.505	42.308	49.470
NUSA TENGGARA BARAT	57.631	49.474	74.998
NUSA TENGGARA TIMUR	58.981	52.171	54.510
KALIMANTAN BARAT	99.674	102.854	148.517
KALIMANTAN TENGAH	144.672	139.221	222.546
KALIMANTAN SELATAN	82.543	91.546	127.834
KALIMANTAN TIMUR	113.125	132.715	168.436
KALIMANTAN UTARA	35.342	65.916	87.969
SULAWESI UTARA	60.279	71.590	107.749
SULAWESI TENGAH	68.887	73.799	85.933
SULAWESI SELATAN	89.925	106.594	145.421
SULAWESI TENGGARA	64.975	62.460	83.485
GORONTALO	89.931	55.511	83.579
SULAWESI BARAT	88.374	111.295	178.593
MALUKU	71.805	54.411	86.375
MALUKU UTARA	47.106	80.704	98.163
PAPUA BARAT	53.915	52.397	147.830
PAPUA	115.618	80.584	91.523
INDONESIA	97.349	108.168	138.405

Lampiran 49. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Real Estat Menurut Provinsi, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	70.512.025	57.242.682	11.921.660
SUMATERA UTARA	903.528	1.239.307	2.911.144
SUMATERA BARAT	3.044.934	1.254.431	1.247.235
RIAU	1.103.833	464.082	1.431.053
JAMBI	794.272	680.421	677.135
SUMATERA SELATAN	620.445	1.001.986	1.897.298
BENGKULU	2.381.580	3.543.323	3.642.661
LAMPUNG	1.621.290	1.562.073	1.306.730
KEP. BANGKA BELITUNG	595.851	963.136	661.897
KEPULAUAN RIAU	257.265	158.494	639.003
DKI JAKARTA	513.278	505.306	597.678
JAWA BARAT	59.807	84.844	89.494
JAWA TENGAH	492.851	600.031	698.414
D I YOGYAKARTA	2.901.356	2.366.692	1.030.786
JAWA TIMUR	299.661	256.304	388.746
BANTEN	305.257	325.936	474.997
BALI	1.112.178	1.119.891	2.318.255
NUSA TENGGARA BARAT	-	392.667	634.718
NUSA TENGGARA TIMUR	-	1.444.311	3.963.988
KALIMANTAN BARAT	388.480	726.797	887.872
KALIMANTAN TENGAH	762.922	847.786	732.237
KALIMANTAN SELATAN	488.564	779.773	531.942
KALIMANTAN TIMUR	792.412	312.472	655.319
KALIMANTAN UTARA	-	656.461	580.954
SULAWESI UTARA	1.597.112	799.699	2.232.157
SULAWESI TENGAH	-	17.795.471	4.272.193
SULAWESI SELATAN	468.579	587.818	648.141
SULAWESI TENGGARA	2.468.980	484.597	749.904
GORONTALO	2.460.396	1.027.901	1.739.919
SULAWESI BARAT	2.507.349	1.834.098	-
MALUKU	534.494	38.789	435.945
MALUKU UTARA	-	-	363.671
PAPUA BARAT	14.926.327	11.947.790	3.349.386
PAPUA	5.483.480	5.808.209	6.669.918
INDONESIA	339.291	365.121	460.436

Keterangan : '-' data tidak tersedia

Lampiran 50. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Menurut Provinsi, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	21.046	23.854	21.530
SUMATERA UTARA	35.023	22.124	32.642
SUMATERA BARAT	9.957	10.413	20.875
RIAU	383	313	271
JAMBI	43.421	43.916	52.771
SUMATERA SELATAN	5.336	5.034	3.954
BENGKULU	64.689	44.740	48.327
LAMPUNG	4.968	4.846	5.613
KEP. BANGKA BELITUNG	9.605	8.638	10.755
KEPULAUAN RIAU	239	157	95
DKI JAKARTA	310.134	280.998	354.971
JAWA BARAT	7.568	6.622	6.467
JAWA TENGAH	9.661	8.926	9.841
D I YOGYAKARTA	10.263	10.705	15.979
JAWA TIMUR	25.695	20.539	24.881
BANTEN	12.166	15.010	12.759
BALI	11.966	12.807	24.221
NUSA TENGGARA BARAT	6.054	4.592	4.014
NUSA TENGGARA TIMUR	3.944	5.585	3.686
KALIMANTAN BARAT	14.047	18.631	18.680
KALIMANTAN TENGAH	1.389	1.729	1.253
KALIMANTAN SELATAN	16.425	14.652	21.107
KALIMANTAN TIMUR	10.798	7.683	11.576
KALIMANTAN UTARA	20.727	14.265	29.014
SULAWESI UTARA	2.738	2.737	2.910
SULAWESI TENGAH	9.707	14.799	10.161
SULAWESI SELATAN	16.211	16.324	14.114
SULAWESI TENGGARA	11.432	8.133	17.222
GORONTALO	2.693	3.165	2.265
SULAWESI BARAT	5.320	4.124	4.714
MALUKU	29.254	17.236	29.948
MALUKU UTARA	12.391	19.201	17.729
PAPUA BARAT	7.220	6.646	5.631
PAPUA	106.964	92.543	78.396
INDONESIA	49.501	46.021	52.933

Lampiran 51. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	34.988	34.171	35.893
SUMATERA UTARA	27.186	34.513	36.309
SUMATERA BARAT	32.392	35.081	37.362
RIAU	33.432	29.108	31.390
JAMBI	27.151	28.148	33.109
SUMATERA SELATAN	32.057	32.329	34.321
BENGKULU	33.725	33.330	33.188
LAMPUNG	24.215	26.528	33.537
KEP. BANGKA BELITUNG	28.530	33.522	35.295
KEPULAUAN RIAU	34.420	29.510	34.104
DKI JAKARTA	141.945	132.222	163.181
JAWA BARAT	18.640	20.801	24.710
JAWA TENGAH	28.663	26.450	36.660
D I YOGYAKARTA	39.700	42.282	47.235
JAWA TIMUR	29.806	31.557	35.717
BANTEN	23.450	21.045	31.734
BALI	27.515	31.890	36.110
NUSA TENGGARA BARAT	23.528	20.650	24.689
NUSA TENGGARA TIMUR	29.080	29.064	34.500
KALIMANTAN BARAT	33.229	35.159	38.858
KALIMANTAN TENGAH	29.767	25.954	32.893
KALIMANTAN SELATAN	39.909	39.581	46.340
KALIMANTAN TIMUR	33.866	34.925	36.554
KALIMANTAN UTARA	37.579	46.408	52.235
SULAWESI UTARA	31.039	29.299	31.506
SULAWESI TENGAH	25.083	24.707	27.803
SULAWESI SELATAN	27.617	26.382	32.191
SULAWESI TENGGARA	20.840	21.074	25.426
GORONTALO	21.440	18.610	21.554
SULAWESI BARAT	37.793	38.512	41.456
MALUKU	46.278	39.572	48.967
MALUKU UTARA	38.778	35.213	41.715
PAPUA BARAT	41.832	45.457	58.925
PAPUA	44.876	49.739	56.383
INDONESIA	32.998	33.552	39.684

Lampiran 52. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Pendidikan Menurut Provinsi, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	13.109	13.457	17.177
SUMATERA UTARA	15.655	15.176	22.781
SUMATERA BARAT	22.088	22.574	28.635
RIAU	6.957	7.878	10.990
JAMBI	27.426	33.153	42.728
SUMATERA SELATAN	21.281	26.784	31.246
BENGKULU	31.773	30.482	36.374
LAMPUNG	22.227	20.698	34.895
KEP. BANGKA BELITUNG	25.538	23.808	27.833
KEPULAUAN RIAU	26.262	24.754	21.135
DKI JAKARTA	185.901	223.520	324.043
JAWA BARAT	19.922	22.237	33.060
JAWA TENGAH	25.206	26.272	32.967
D I YOGYAKARTA	36.663	31.930	40.424
JAWA TIMUR	22.805	23.856	34.249
BANTEN	30.621	25.232	36.652
BALI	35.017	43.152	50.216
NUSA TENGGARA BARAT	21.897	17.396	24.866
NUSA TENGGARA TIMUR	19.951	18.059	26.152
KALIMANTAN BARAT	26.010	28.692	37.797
KALIMANTAN TENGAH	33.568	31.625	49.925
KALIMANTAN SELATAN	27.223	29.674	42.943
KALIMANTAN TIMUR	33.573	39.429	53.961
KALIMANTAN UTARA	37.823	37.570	51.469
SULAWESI UTARA	18.732	20.233	31.415
SULAWESI TENGAH	24.102	23.918	33.854
SULAWESI SELATAN	41.739	40.403	61.684
SULAWESI TENGGARA	26.325	35.026	53.430
GORONTALO	16.221	17.324	25.265
SULAWESI BARAT	31.752	25.356	41.531
MALUKU	15.776	14.879	22.346
MALUKU UTARA	11.301	12.876	18.902
PAPUA BARAT	38.646	33.014	53.044
PAPUA	36.642	35.995	46.983
INDONESIA	27.425	28.454	39.694

Lampiran 53. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Menurut Provinsi, 2018-2020 (Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	30.154	29.904	34.162
SUMATERA UTARA	18.587	20.874	24.077
SUMATERA BARAT	21.429	27.009	27.894
RIAU	8.705	10.038	11.142
JAMBI	28.011	30.039	36.988
SUMATERA SELATAN	16.504	16.951	17.416
BENGKULU	27.304	19.951	24.277
LAMPUNG	19.645	24.763	29.288
KEP. BANGKA BELITUNG	28.857	23.722	30.126
KEPULAUAN RIAU	40.365	31.124	29.645
DKI JAKARTA	115.262	136.681	144.395
JAWA BARAT	16.999	16.867	17.752
JAWA TENGAH	15.667	16.906	19.274
D I YOGYAKARTA	32.773	24.828	34.299
JAWA TIMUR	19.609	17.579	22.782
BANTEN	26.694	37.506	45.364
BALI	31.493	30.748	38.393
NUSA TENGGARA BARAT	46.609	28.920	23.163
NUSA TENGGARA TIMUR	16.727	15.169	15.850
KALIMANTAN BARAT	33.214	36.557	38.545
KALIMANTAN TENGAH	38.647	35.150	35.467
KALIMANTAN SELATAN	40.028	35.593	42.306
KALIMANTAN TIMUR	41.824	43.715	47.146
KALIMANTAN UTARA	36.429	41.388	44.085
SULAWESI UTARA	72.190	68.064	93.506
SULAWESI TENGAH	23.345	27.405	26.763
SULAWESI SELATAN	39.240	37.729	47.264
SULAWESI TENGGARA	15.724	17.521	21.090
GORONTALO	45.225	53.288	40.796
SULAWESI BARAT	44.319	40.331	41.093
MALUKU	20.553	19.062	23.702
MALUKU UTARA	39.489	33.843	33.100
PAPUA BARAT	21.786	19.242	25.311
PAPUA	40.490	56.534	57.985
INDONESIA	27.923	28.850	34.436

Lampiran 54. Produktivitas Jam Kerja di Kategori Lapangan Usaha Jasa Lainnya Menurut Provinsi, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	12.271	13.429	11.654
SUMATERA UTARA	3.779	4.254	4.120
SUMATERA BARAT	23.105	19.549	19.870
RIAU	10.749	13.502	8.451
JAMBI	15.602	14.617	15.737
SUMATERA SELATAN	9.219	8.821	8.691
BENGKULU	9.426	6.757	6.221
LAMPUNG	7.418	9.393	8.917
KEP. BANGKA BELITUNG	6.799	7.785	8.478
KEPULAUAN RIAU	5.649	5.729	1.956
DKI JAKARTA	47.095	54.896	62.185
JAWA BARAT	10.657	11.219	12.198
JAWA TENGAH	9.224	10.026	10.453
D I YOGYAKARTA	9.293	10.382	9.893
JAWA TIMUR	9.811	10.290	10.330
BANTEN	8.972	7.482	9.043
BALI	8.931	9.180	11.510
NUSA TENGGARA BARAT	12.033	12.079	11.374
NUSA TENGGARA TIMUR	13.676	15.325	14.002
KALIMANTAN BARAT	10.191	10.517	9.411
KALIMANTAN TENGAH	11.498	11.911	10.429
KALIMANTAN SELATAN	8.711	7.978	8.916
KALIMANTAN TIMUR	15.804	15.881	17.297
KALIMANTAN UTARA	19.641	20.775	19.310
SULAWESI UTARA	15.223	16.218	19.621
SULAWESI TENGAH	9.161	10.801	11.524
SULAWESI SELATAN	17.750	18.505	18.521
SULAWESI TENGGARA	23.388	26.159	32.946
GORONTALO	9.444	12.995	11.308
SULAWESI BARAT	37.158	25.843	30.156
MALUKU	13.069	13.337	14.393
MALUKU UTARA	10.503	11.090	10.228
PAPUA BARAT	7.438	5.428	6.300
PAPUA	37.467	41.115	39.687
INDONESIA	14.050	15.236	16.362

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	56,53	58,52	55,76
Simeulue	39,36	41,96	36,58
Aceh Singkil	36,48	40,55	37,23
Aceh Selatan	38,78	44,28	41,70
Aceh Tenggara	33,23	36,60	34,61
Aceh Timur	44,16	50,44	48,02
Aceh Tengah	54,67	56,03	49,46
Aceh Barat	88,50	80,60	82,26
Aceh Besar	58,56	62,69	57,74
Pidie	41,01	41,01	38,57
Bireuen	45,86	45,90	44,62
Aceh Utara	66,72	69,20	69,63
Aceh Barat Daya	43,78	49,32	48,46
Gayo Lues	39,81	41,34	35,59
Aceh Tamiang	43,67	47,28	47,83
Nagan Raya	90,16	92,40	86,91
Aceh Jaya	42,90	42,90	39,59
Bener Meriah	44,37	46,00	42,26
Pidie Jaya	38,04	38,97	37,58
Kota Banda Aceh	127,46	127,30	123,62
Kota Sabang	69,77	66,01	65,40
Kota Langsa	51,10	49,00	49,15
Kota Lhokseumawe	95,04	88,40	84,76
Kota Subulussalam	47,47	45,10	44,88

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SUMATERA UTARA	72,84	76,94	78,01
Nias	33,35	33,39	36,07
Mandailing Natal	41,72	45,57	48,23
Tapanuli Selatan	66,38	69,03	66,63
Tapanuli Tengah	38,08	41,51	40,70
Tapanuli Utara	32,54	34,62	34,95
Toba Samosir	52,95	53,02	53,76
Labuhan Batu	101,62	111,80	106,02
Asahan	74,41	82,21	89,21
Simalungun	59,56	62,99	62,89
Dairi	37,76	39,83	48,50
Karo	55,58	56,84	55,44
Deli Serdang	65,55	67,85	69,28
Langkat	54,89	59,40	58,49
Nias Selatan	25,50	28,38	26,78
Humbang Hasundutan	35,32	37,16	37,23
Pakpak Barat	27,42	29,79	29,04
Samosir	41,94	44,78	68,39
Serdang Bedagai	63,83	63,98	64,93
Batu Bara	119,25	132,97	122,64
Padang Lawas Utara	57,74	59,65	69,23
Padang Lawas	59,71	57,81	56,29
Labuhan Batu Selatan	119,65	127,21	135,00
Labuhan Batu Utara	99,25	107,50	105,64
Nias Utara	32,57	35,66	37,17
Nias Barat	25,02	28,85	46,04
Kota Sibolga	80,21	86,58	86,40
Kota Tanjung Balai	67,68	77,10	74,66
Kota Pematang Siantar	82,35	78,39	77,26
Kota Tebing Tinggi	48,44	52,21	49,94
Kota Medan	139,63	149,04	151,72
Kota Binjai	59,86	61,31	62,70
Kota Padang Sidempuan	37,11	37,67	37,89
Kota Gunung Sitoli	51,61	50,70	57,34

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SUMATERA BARAT	66,12	67,80	65,64
Kepulauan Mentawai	65,58	61,18	59,40
Pesisir Selatan	44,29	44,53	46,60
Solok	55,96	55,15	51,20
Sawah Lunto/Sijunjung	58,77	58,94	57,78
Tanah Datar	54,51	56,24	56,08
Padang Pariaman	73,17	76,14	64,98
Agam	60,57	61,70	59,46
Limapuluh Koto	54,24	55,83	55,28
Pasaman	48,44	47,14	44,55
Solok Selatan	45,14	47,34	46,05
Dharmas Raya	62,11	62,09	57,68
Pasaman Barat	56,49	59,12	55,51
Kota Padang	102,98	107,77	105,99
Kota Solok	88,27	95,32	87,27
Kota Sawah Lunto	85,44	93,09	91,09
Kota Padang Panjang	102,06	100,40	99,25
Kota Bukit Tinggi	93,86	101,55	93,12
Kota Payakumbuh	63,73	68,27	67,75
Kota Pariaman	85,01	84,81	89,36

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
RIAU	166,79	167,82	162,10
Kuantan Sengingi	163,43	165,33	156,43
Indragiri Hulu	146,28	154,49	145,77
Indragiri Hilir	138,23	140,16	129,37
Pelalawan	160,10	158,28	157,40
Siak	257,80	262,08	267,00
Kampar	142,80	152,18	141,00
Rokan Hulu	86,90	83,36	84,46
Bengkalis	337,09	333,88	309,27
Rokan Hilir	167,48	168,27	175,61
Kepulauan Meranti	142,86	146,34	146,40
Kota Pekanbaru	139,05	142,86	135,96
Kota Dumai	186,23	179,34	182,76

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
JAMBI	82,85	88,59	85,36
Kerinci	47,62	52,74	51,58
Merangin	50,28	52,38	51,72
Sarolangun	75,59	79,71	75,69
Batanghari	90,70	102,25	90,95
Muara Jambi	79,34	88,06	83,18
Tanjung Jabung Timur	151,00	160,31	144,07
Tanjung Jabung Barat	167,44	185,37	169,86
Tebo	55,44	57,92	56,26
Bungo	69,81	75,63	74,22
Kota Jambi	67,64	68,98	71,34
Kota Sungai Penuh	96,87	112,48	108,62

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SUMATERA SELATAN	74,52	78,62	77,03
Ogan Komering Ulu	55,44	55,68	54,14
Ogan Komering Ilir	47,28	48,60	52,33
Muara Enim (Liot)	124,38	135,69	136,98
Lahat	54,89	60,17	59,43
Musi Rawas	61,86	66,69	65,74
Musi Banyuasin	148,94	151,62	140,32
Banyuasin	48,98	53,00	52,09
Ogan Komering Ulu Selatan	28,45	28,95	30,84
Ogan Komering Ulu Timur	28,23	30,86	28,64
Ogan Ilir	32,45	34,02	35,43
Empat Lawang	25,74	27,58	25,89
Penukal Abab Lematang Ilir	47,43	51,46	47,90
Musi Rawas Utara	59,93	60,62	60,56
Kota Palembang	141,42	147,27	137,52
Kota Prabumulih	58,30	60,64	59,72
Kota Pagar Alam	30,32	31,96	32,98
Kota Lubuk Linggau	38,06	38,03	38,67

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
BENGKULU	44,70	46,25	44,91
Bengkulu Selatan	40,26	41,88	41,39
Rejang Lebong	38,18	40,26	39,41
Bengkulu Utara	33,24	36,31	33,00
Kaur	33,68	35,36	36,45
Seluma	27,43	27,31	26,31
Mukomuko	39,59	39,60	38,66
Lebong	35,54	34,10	33,85
Kepahiang	35,58	36,11	34,35
Bengkulu Tengah	48,54	53,99	51,56
Kota Bengkulu	86,08	87,61	87,84

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
LAMPUNG	55,76	58,38	56,15
Lampung Barat	27,21	28,26	26,41
Tanggamus	31,94	36,63	40,89
Lampung Selatan	61,88	66,06	60,62
Lampung Timur	55,86	56,12	51,38
Lampung Tengah	66,12	70,44	69,04
Lampung Utara	53,45	56,18	55,21
Way Kanan	40,11	39,01	38,64
Tulang Bawang	69,57	73,61	70,57
Pesawaran	51,21	53,45	50,79
Pringsewu	38,03	39,42	38,79
Mesuji	72,58	71,49	67,98
Tulang Bawang Barat	53,85	56,23	53,90
Pesisir Barat	40,61	41,21	40,07
Kota Bandar Lampung	77,27	80,79	76,47
Kota Metro	51,98	51,54	49,41

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KEP. BANGKA BELITUNG	75,37	76,84	75,30
Bangka	66,37	66,62	66,00
Belitung	66,81	69,55	66,94
Bangka Barat	99,94	110,45	105,09
Bangka Tengah	62,26	63,99	59,99
Bangka Selatan	63,66	63,54	61,25
Belitung Timur	79,32	81,30	80,87
Kota Pangkal Pinang	93,25	88,98	93,68

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KEPULAUAN RIAU	184,97	183,95	172,12
Karimun	86,76	100,28	94,68
Bintan	205,18	216,99	205,05
Natuna	423,50	419,74	380,47
Lingga	65,68	69,34	68,50
Kepulauan Anambas	603,74	638,51	534,92
Kota Batam	177,88	171,20	161,23
Kota Tanjung Pinang	153,68	153,02	149,88

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
DKI JAKARTA	367,18	378,37	384,78
Kep. Seribu	407,16	413,41	371,65
Kota Jakarta Selatan	373,80	410,01	414,52
Kota Jakarta Timur	240,99	236,63	238,29
Kota Jakarta Pusat	997,29	1.061,22	1.097,72
Kota Jakarta Barat	260,46	268,24	275,38
Kota Jakarta Utara	378,54	380,09	379,93

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
JAWA BARAT	67,80	67,60	67,14
Bogor	62,67	61,78	65,77
Sukabumi	41,94	44,01	44,56
Cianjur	33,52	31,79	30,14
Bandung	49,44	49,09	51,48
Garut	36,11	36,03	36,67
Tasikmalaya	29,45	29,40	27,75
Ciamis	35,31	36,59	34,29
Kuningan	36,13	36,64	36,44
Cirebon	35,82	35,00	35,50
Majalengka	34,39	35,21	34,75
Sumedang	43,44	44,35	41,18
Indramayu	74,11	72,42	69,32
Subang	38,57	37,86	37,86
Purwakarta	112,28	114,26	117,89
Karawang	152,34	160,82	153,44
Bekasi	164,53	155,98	149,36
Bandung Barat	43,72	44,73	46,70
Pangandaran	31,16	34,13	33,19
Kota Bogor	64,84	66,79	71,44
Kota Sukabumi	61,41	61,10	69,57
Kota Bandung	163,28	162,29	165,39
Kota Cirebon	106,60	121,30	119,46
Kota Bekasi	49,91	50,58	50,16
Kota Depok	44,91	44,42	44,67
Kota Cimahi	77,81	84,66	87,71
Kota Tasikmalaya	50,46	50,70	48,85
Kota Banjar	35,21	35,22	35,53

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
JAWA TENGAH	54,04	56,35	55,06
Cilacap	131,32	127,31	111,39
Banyumas	44,79	47,36	47,43
Purbalingga	35,57	37,90	36,56
Banjarnegara	29,93	32,32	32,28
Kebumen	33,61	33,44	32,81
Purworejo	35,55	36,73	34,65
Wonosobo	31,57	33,23	33,49
Magelang	32,22	32,12	30,84
Boyolali	39,83	42,02	40,76
Klaten	43,72	44,72	45,33
Sukoharjo	55,15	58,18	58,57
Wonogiri	34,97	39,47	36,86
Karanganyar	53,36	56,57	53,97
Sragen	56,99	58,62	57,46
Grobogan	25,70	27,84	27,26
Blora	36,92	40,86	37,32
Rembang	39,53	42,39	42,60
Pati	46,09	48,95	50,26
Kudus	151,77	155,79	146,00
Jepara	32,28	33,66	33,06
Demak	30,58	32,78	31,98
Semarang	58,72	59,32	57,78
Temanggung	33,97	34,21	43,36
Kendal	63,27	64,83	61,74
Batang	36,75	39,11	38,76
Pekalongan	34,71	35,97	35,91
Pemalang	29,28	30,43	30,77
Tegal	36,92	38,06	37,99
Brebes	36,96	39,53	39,75
Kota Magelang	96,37	106,72	104,17
Kota Surakarta	127,79	127,85	130,89
Kota Salatiga	86,84	97,60	93,12
Kota Semarang	148,59	152,57	148,98
Kota Pekalongan	46,33	46,80	50,18
Kota Tegal	92,00	91,31	95,98

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
D I YOGYAKARTA	45,57	48,05	47,82
Kulon Progo	30,53	34,19	32,44
Bantul	31,85	33,52	32,19
Gunung Kidul	29,04	30,33	34,70
Sleman	50,44	53,18	50,77
Kota Yogyakarta	115,43	117,99	120,35

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
JAWA TIMUR	75,05	78,44	76,82
Pacitan	29,70	30,84	30,28
Ponorogo	27,52	29,11	28,86
Trenggalek	29,98	31,91	30,37
Tulungagung	45,99	48,63	45,71
Blitar	38,81	39,12	39,44
Kediri	34,85	34,15	34,22
Malang	47,02	49,30	47,43
Lumajang	39,29	42,30	40,69
Jember	41,16	43,60	42,10
Banyuwangi	59,19	62,41	61,01
Bondowoso	30,35	29,59	29,72
Situbondo	33,12	34,87	33,84
Probolinggo	37,38	38,50	35,72
Pasuruan	120,24	126,86	126,63
Sidoarjo	124,25	125,39	126,83
Mojokerto	92,05	99,27	98,89
Jombang	40,97	42,07	42,87
Nganjuk	31,58	33,90	34,24
Madiun	33,92	35,05	34,29
Magetan	32,70	36,36	35,43
Ngawi	26,61	28,92	28,76
Bojonegoro	102,07	101,44	97,48
Tuban	66,28	72,30	66,19
Lamongan	41,77	43,64	41,73
Gresik	150,48	160,04	155,21
Bangkalan	38,33	41,95	38,37
Sampang	29,15	29,73	28,10
Pamekasan	23,93	25,07	23,99
Sumenep	38,39	36,56	36,37
Kota Kediri	595,97	633,27	590,84
Kota Blitar	59,33	62,75	64,51
Kota Malang	114,59	119,56	120,26
Kota Probolinggo	69,03	74,12	67,33
Kota Pasuruan	58,40	59,98	56,14
Kota Mojokerto	69,17	77,42	73,63
Kota Madiun	113,91	115,81	113,61
Kota Surabaya	266,36	274,09	273,83
Kota Batu	99,75	103,55	97,90

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
BANTEN	81,06	82,26	79,48
Pandeglang	38,11	40,72	40,74
Lebak	34,27	37,65	34,62
Tangerang	60,46	58,83	58,58
Serang	88,51	87,83	86,74
Kota Tangerang	109,29	107,79	99,92
Kota Cilegon	385,22	406,91	411,85
Kota Serang	76,95	79,77	76,95
Kota Tangerang Selatan	75,64	80,12	78,15

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
BALI	61,00	65,89	60,88
Jembrana	54,79	65,69	56,59
Tabanan	54,50	58,30	55,82
Badung	96,83	97,68	84,76
Gianyar	58,03	62,64	64,46
Klungkung	53,14	56,89	55,52
Bangli	29,31	31,53	30,63
Karangasem	41,16	43,71	42,06
Buleleng	59,14	68,95	60,85
Kota Denpasar	64,89	69,06	65,35

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
NUSA TENGGARA BARAT	39,81	37,22	36,21
Lombok Barat	35,55	30,70	29,56
Lombok Tengah	26,06	24,97	22,32
Lombok Timur	24,99	25,46	23,98
Sumbawa	44,27	46,87	43,55
Dompu	43,94	43,82	40,27
Bima	31,71	32,29	31,99
Sumbawa Barat	175,96	178,22	221,72
Lombok Utara	0,00	29,83	27,40
Kota Mataram	60,06	59,64	53,32
Kota Bima	32,17	33,49	30,31

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
NUSA TENGGARA TIMUR	25,06	26,53	25,24
Sumba Barat	25,20	23,57	23,78
Sumba Timur	27,45	31,99	30,78
Kupang	25,04	29,88	25,19
Timor Tengah Selatan	18,14	20,63	19,85
Timor Tengah Utara	20,33	22,61	21,21
Belu	28,93	31,56	29,25
Alor	20,33	19,70	18,61
Lembata	16,68	16,81	16,86
Flores Timur	26,92	28,52	27,15
Sikka	19,21	21,76	19,71
Ende	26,77	28,69	28,56
Ngada	27,07	28,43	28,91
Manggarai	17,37	18,59	17,43
Rote Nda	21,16	22,41	21,54
Manggarai Barat	17,32	16,79	15,93
Sumba Barat Daya	72,89	70,22	69,55
Sumba Tengah	4,17	4,33	4,45
Nageko	19,88	19,60	19,23
Manggarai Timur	14,67	12,94	12,96
Sabu Raijua	15,32	17,12	15,69
Malaka	19,13	20,01	21,54
Kota Kupang	88,25	88,76	82,30

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN BARAT	53,89	56,13	54,81
Sambas	48,72	50,43	47,36
Bengkayang	40,80	43,80	41,36
Landak	33,97	38,60	36,26
Pontianak	42,89	45,36	45,28
Sanggau	51,61	55,90	54,78
Ketapang	71,14	76,36	82,87
Sintang	43,39	45,26	42,07
Kapuas Hulu	42,91	43,38	44,32
Sekadau	37,33	38,61	37,79
Melawai	30,02	30,26	29,82
Kayong Utara	47,93	49,02	48,08
Kubu Raya	70,03	70,58	66,09
Kota Pontianak	88,87	89,16	89,88
Kota Singkawang	71,92	66,12	68,20

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN TENGAH	72,61	76,09	75,07
Kotawaringin Barat	77,81	79,06	79,80
Kotawaringin Timur	80,11	85,74	82,10
Kapuas	57,62	63,88	59,75
Barito Selatan	69,49	64,33	66,26
Barito Utara	99,93	110,44	105,07
Sukamara	85,17	89,02	97,79
Lamandau	89,88	93,07	90,08
Seruyan	56,96	60,07	62,04
Katingan	59,91	61,26	63,82
Pulang Pisau	48,23	47,61	50,53
Gunung Mas	54,11	58,80	62,21
Barito Timur	73,32	79,76	72,30
Murung Raya	102,83	111,81	110,77
Kota Palangka Raya	81,06	82,95	80,82

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN SELATAN	62,80	65,14	62,82
Tanah Laut	63,02	62,34	57,96
Kota Baru	107,81	114,67	115,77
Banjar	38,87	39,79	38,34
Barito Kuala	31,85	35,01	34,50
Tapin	66,06	68,20	65,60
Hulu Sungai Selatan	36,69	38,72	36,67
Hulu Sungai Tengah	32,92	35,77	34,89
Hulu Sungai Utara	27,66	29,39	28,52
Tabalong	107,91	118,03	115,04
Tanah Bumbu	94,44	93,50	85,26
Balangan	131,08	144,59	129,40
Kota Banjarmasin	68,10	70,13	72,14
Kota Banjar Baru	52,03	53,93	48,63

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN TIMUR	286,68	287,40	279,34
Pasir	266,12	273,43	255,17
Kutai Barat	267,87	299,07	270,73
Kutai	359,15	357,29	355,24
Kutai Timur	522,67	543,25	506,16
Berau	260,97	271,64	253,87
Penajam Paser Utara	92,02	95,12	85,88
Mahakam Ulu	113,90	134,56	121,57
Kota Balikpapan	287,02	282,28	294,40
Kota Samarinda	118,01	114,53	114,31
Kota Bontang	551,60	501,05	472,28

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN UTARA	182,54	191,92	183,82
Malinau	174,63	196,57	198,90
Bulungan	176,54	188,43	182,18
Tana Tidung	317,38	300,96	270,35
Nunukan	160,54	173,20	167,90
Kota Tarakan	194,77	193,80	182,53

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI UTARA	75,59	77,47	77,66
Bolaang Mongondow	45,09	49,65	49,04
Minahasa	68,30	73,33	73,57
Kep.Sangihe Talaud	45,03	48,31	47,02
Kepulauan Talaud	33,39	33,32	29,06
Minahasa Selatan	59,37	56,47	58,77
Minahasa Utara	102,04	102,07	104,95
Bolaang Mongondow Utara	48,84	47,40	47,19
Kep. Siau Tagulandang Biaro	44,32	48,75	47,88
Minahasa Tenggara	73,61	70,44	72,83
Bolaang Mongondow Selatan	47,07	51,20	46,89
Bolaang Mongondow Timur	56,46	55,54	54,12
Kota Manado	133,94	134,67	144,79
Kota Bitung	119,74	122,59	123,61
Kota Tomohon	64,00	64,91	67,99
Kota Kotamobago	38,35	40,96	39,23

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI TENGAH	79,43	87,27	88,47
Banggai Kepulauan	44,67	43,37	41,91
Banggai	95,02	105,36	95,13
Morowali	557,08	636,79	803,12
Poso	43,78	47,22	43,20
Donggala	61,59	61,77	59,90
Toli-Toli	50,00	55,50	50,52
Buol	55,43	55,27	50,73
Parigi Moutong	46,88	49,67	43,82
Tojo Una-Una	45,66	45,75	45,68
Sigi	51,59	52,30	50,85
Banggai Laut	46,34	50,21	45,25
Morowali Utara	113,15	135,09	126,22
Kota Palu	83,12	87,84	83,38

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI SELATAN	77,17	81,43	81,91
Selayar	51,78	55,94	53,12
Bulukumba	41,42	40,78	40,48
Bantaeng	51,32	56,37	56,14
Jeneponto	34,63	36,87	35,87
Takalar	43,39	47,49	47,84
Gowa	34,71	37,76	38,05
Sinjai	54,58	60,53	57,81
Maros	91,17	85,65	78,42
Pangkajene Kepulauan	108,38	116,38	110,18
Barru	62,12	64,37	67,62
Bone	63,44	65,21	64,72
Soppeng	56,91	67,91	71,30
Wajo	67,49	65,88	62,35
Sidenreng Rappang	65,09	68,15	67,30
Pinrang	73,88	79,26	79,83
Enrekang	43,76	44,79	44,41
Luwu	58,62	59,44	64,37
Tana Toraja	32,57	34,77	37,31
Luwu Utara	54,48	52,20	62,48
Luwu Timur	107,24	115,94	108,03
Toraja Utara	41,69	45,22	47,60
Kota Makasar	180,50	195,04	206,56
Kota Pare Pare	71,01	75,39	73,56
Kota Palopo	71,44	71,43	71,80

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI TENGGARA	70,41	74,49	72,48
Buton	56,16	61,62	63,22
Muna	54,27	55,19	57,20
Konawe/Kab Kendari	51,77	59,61	64,10
Kolaka	141,79	147,50	137,15
Konawe Selatan	50,45	54,12	52,38
Bombana	50,01	53,22	51,25
Wakatobi	57,23	62,63	63,98
Kolaka Utara	77,24	74,41	71,38
Buton Utara	67,80	73,93	70,78
Konawe Utara	85,53	96,49	87,51
Kolaka Timur	42,48	44,54	42,93
Konawe Kepulauan	57,30	68,93	65,72
Muna Barat	41,24	54,50	45,43
Buton Tengah	43,34	43,05	45,21
Buton Selatan	63,77	64,31	56,96
Kota Kendari	97,21	95,89	93,84
Kota Bau-Bau	81,48	87,37	87,42

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
GORONTALO	46,91	49,63	49,99
Boalemo	41,40	43,15	44,23
Gorontalo	44,66	49,06	49,29
Pokuwato	56,35	58,19	56,47
Bone Bolango	39,59	42,21	43,55
Gorontalo Utara	38,98	42,94	42,91
Kota Gorontalo	60,39	60,07	60,84

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI BARAT	48,55	49,78	47,67
Majene	40,88	45,16	43,81
Polewali Mamasa	43,22	43,92	41,22
Mamasa	25,87	26,65	25,90
Mamuju	63,54	61,99	61,02
Mamuju Utara	87,69	87,03	85,95
Mamuju Tengah	31,51	34,85	34,01

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
MALUKU	39,60	40,95	39,66
Maluku Tenggara Barat	30,91	33,03	31,08
Maluku Tenggara	43,75	47,08	44,81
Maluku Tengah	34,65	39,72	39,03
Buru	23,49	24,56	23,08
Kepulauan Aru	54,55	52,85	51,89
Seram Bagian Barat	24,86	24,60	24,55
Seram Bagian Timur	41,02	37,20	37,76
Maluku Barat Daya	27,83	28,20	30,25
Buru Selatan	30,77	30,62	30,28
Kota Ambon	56,04	56,30	53,57
Kota Tual	52,19	54,89	49,68

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
MALUKU UTARA	45,73	48,14	50,44
Halmahera Barat	27,29	29,30	28,56
Halmahera Tengah	61,48	63,44	77,04
Kepulauan Sula	36,62	37,95	41,21
Halmahera Selatan	39,56	45,73	54,09
Halmahera Utara	45,92	49,39	46,77
Halmahera Timur	46,64	52,93	53,34
Pulau Morotai	37,10	34,68	36,83
Pulau Taliabu	35,98	38,07	39,19
Kota Ternate	70,49	70,21	70,20
Kota Tidore Kepulauan	41,61	43,46	42,97

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
PAPUA BARAT	143,98	142,14	134,09
Fak-Fak	113,43	108,58	98,86
Kaimana	67,17	63,91	58,01
Teluk Wondama	74,94	68,05	59,83
Teluk Bintuni	839,62	908,02	867,86
Manokwari	89,26	90,10	80,13
Sorong Selatan	61,61	55,32	56,78
Sorong	212,30	205,59	204,32
Raja Ampat	108,06	105,85	96,62
Tambrau	19,42	20,99	20,50
Maybrat	20,54	20,46	18,52
Manokwari Selatan	48,17	42,75	39,71
Pegunungan Arfak	6,89	6,56	6,62
Kota Sorong	93,76	100,97	91,66

Lampiran 55. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
PAPUA	88,69	75,08	81,38
Merauke	82,67	89,97	85,31
Jayawijaya	33,57	36,40	36,32
Jayapura	160,28	178,20	173,46
Nabire	98,04	104,59	96,96
Yapen Waropen	67,29	62,96	68,53
Biak Namfor	56,02	59,38	52,10
Paniai	29,73	29,23	45,11
Puncak Jaya	11,20	14,05	12,68
Mimika	755,93	480,76	544,24
Boven Digoel	89,73	96,04	97,02
Mappi	38,29	44,47	45,86
Asmat	29,70	29,51	29,93
Yahukimo	13,00	14,15	13,60
Pegunungan Bintang	31,38	30,45	33,05
Tolikara	10,97	11,43	11,36
Sarmi	87,70	107,17	98,27
Keerom	65,70	62,51	61,00
Waropen	113,67	118,16	109,90
Supiori	100,54	87,75	81,59
Membramo Raya	96,46	98,51	96,58
Nduga	12,21	11,92	11,32
Lanny Jaya	9,34	9,55	24,11
Mamberamo Tengah	21,18	22,81	26,69
Yalimo	19,01	18,74	18,01
Puncak	11,06	12,74	12,18
Dogiyai	15,58	15,42	16,53
Intan Jaya	28,53	27,04	30,54
Deiyai	18,39	16,85	17,28
Kota Jayapura	164,76	176,81	170,05

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	59,28	63,15	65,13
Simeulue	36,86	40,31	40,34
Aceh Singkil	36,12	43,06	45,57
Aceh Selatan	41,03	49,45	53,05
Aceh Tenggara	35,10	37,72	43,96
Aceh Timur	48,36	55,77	54,15
Aceh Tengah	63,71	67,00	63,68
Aceh Barat	91,47	84,46	81,90
Aceh Besar	55,95	58,65	61,40
Pidie	44,30	45,31	49,52
Bireuen	50,45	57,23	57,86
Aceh Utara	80,80	79,03	94,65
Aceh Barat Daya	44,88	54,04	52,92
Gayo Lues	42,05	42,78	41,57
Aceh Tamiang	41,34	47,47	49,36
Nagan Raya	96,81	106,78	102,47
Aceh Jaya	44,50	51,08	46,59
Bener Meriah	44,37	47,28	48,33
Pidie Jaya	44,08	44,77	48,61
Kota Banda Aceh	114,38	120,11	120,33
Kota Sabang	72,74	73,30	72,55
Kota Langsa	52,09	52,97	51,50
Kota Lhokseumawe	85,83	82,05	83,50
Kota Subulussalam	53,52	53,71	53,31

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SUMATERA UTARA	70,83	74,98	82,53
Nias	43,20	39,77	49,36
Mandailing Natal	43,57	46,83	56,61
Tapanuli Selatan	74,51	85,17	84,37
Tapanuli Tengah	37,77	41,53	43,19
Tapanuli Utara	36,89	37,77	41,45
Toba Samosir	58,92	56,59	60,82
Labuhan Batu	99,28	110,19	116,23
Asahan	68,84	75,98	95,09
Simalungun	64,45	68,81	77,25
Dairi	41,61	46,13	58,63
Karo	53,90	57,51	60,78
Deli Serdang	58,34	61,01	66,00
Langkat	55,82	59,74	63,01
Nias Selatan	28,69	34,15	28,95
Humbang Hasundutan	40,37	41,43	45,70
Pakpak Barat	31,09	33,26	34,75
Samosir	51,16	50,41	108,58
Serdang Bedagai	64,09	63,92	66,38
Batu Bara	116,55	124,75	127,48
Padang Lawas Utara	66,17	71,69	99,72
Padang Lawas	78,52	70,58	70,56
Labuhan Batu Selatan	124,07	128,89	149,26
Labuhan Batu Utara	98,50	114,96	117,98
Nias Utara	42,07	39,67	49,18
Nias Barat	32,38	38,38	86,10
Kota Sibolga	68,40	73,68	77,89
Kota Tanjung Balai	53,50	60,77	62,90
Kota Pematang Siantar	69,27	70,03	73,35
Kota Tebing Tinggi	40,98	43,61	46,02
Kota Medan	118,61	125,06	143,08
Kota Binjai	50,52	52,90	57,61
Kota Padang Sidempuan	35,37	37,68	39,60
Kota Gunung Sitoli	52,81	52,48	63,16

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SUMATERA BARAT	65,43	68,58	71,60
Kepulauan Mentawai	72,16	64,99	67,72
Pesisir Selatan	47,46	48,39	52,74
Solok	53,15	61,14	60,07
Sawah Lunto/Sijunjung	67,30	69,32	69,94
Tanah Datar	55,08	61,50	71,40
Padang Pariaman	76,01	76,24	70,89
Agam	60,26	58,94	65,24
Limapuluh Koto	55,18	61,20	61,44
Pasaman	52,83	49,24	49,89
Solok Selatan	46,70	50,78	54,73
Dharmas Raya	64,36	60,43	59,65
Pasaman Barat	54,57	62,57	62,28
Kota Padang	92,79	96,82	101,60
Kota Solok	77,93	89,72	81,60
Kota Sawah Lunto	80,75	88,29	93,82
Kota Padang Panjang	84,00	85,71	99,17
Kota Bukit Tinggi	81,44	91,59	96,76
Kota Payakumbuh	61,18	64,14	69,80
Kota Pariaman	82,50	83,73	97,68

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
RIAU	165,71	164,55	174,67
Kuantan Sengingi	197,75	183,68	186,99
Indragiri Hulu	156,52	169,20	169,38
Indragiri Hilir	134,16	143,43	137,77
Pelalawan	158,84	149,95	172,58
Siak	265,53	258,84	286,46
Kampar	147,72	152,86	154,55
Rokan Hulu	97,65	88,81	100,53
Bengkalis	331,21	336,68	361,78
Rokan Hilir	180,71	169,93	200,62
Kepulauan Meranti	148,10	157,81	169,67
Kota Pekanbaru	115,13	118,84	123,09
Kota Dumai	172,79	165,94	187,60

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
JAMBI	85,28	92,01	94,18
Kerinci	52,35	59,82	60,39
Merangin	53,14	55,93	57,90
Sarolangun	80,06	76,32	79,28
Batanghari	104,66	106,55	105,96
Muara Jambi	78,01	94,50	94,60
Tanjung Jabung Timur	160,27	179,33	171,20
Tanjung Jabung Barat	188,99	204,70	193,55
Tebo	60,86	66,71	63,78
Bungo	70,17	79,73	82,12
Kota Jambi	60,49	61,59	69,34
Kota Sungai Penuh	89,91	113,37	123,18

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SUMATERA SELATAN	75,61	79,09	82,56
Ogan Komering Ulu	54,72	58,66	61,76
Ogan Komering Ilir	53,88	53,08	62,81
Muara Enim (Liot)	132,99	138,23	143,90
Lahat	53,44	63,68	62,08
Musi Rawas	71,85	74,88	76,78
Musi Banyuasin	150,92	145,80	146,43
Banyuasin	53,63	56,07	54,92
Ogan Komering Ulu Selatan	32,38	30,51	36,81
Ogan Komering Ulu Timur	31,82	35,63	33,02
Ogan Ilir	31,60	33,66	37,20
Empat Lawang	28,33	32,96	28,06
Penukal Abab Lematang Ilir	46,17	52,56	48,17
Musi Rawas Utara	66,00	71,24	71,44
Kota Palembang	119,89	124,39	134,10
Kota Prabumulih	54,50	55,77	61,90
Kota Pagar Alam	26,98	29,50	34,41
Kota Lubuk Linggau	36,85	34,42	39,43

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
BENGKULU	45,65	47,76	49,69
Bengkulu Selatan	41,79	46,73	47,56
Rejang Lebong	42,42	41,14	41,40
Bengkulu Utara	36,43	38,63	39,90
Kaur	35,15	38,97	41,63
Seluma	28,73	33,50	33,81
Mukomuko	42,31	40,34	47,27
Lebong	34,64	35,82	40,07
Kepahiang	37,74	37,27	35,44
Bengkulu Tengah	52,36	57,95	60,87
Kota Bengkulu	73,04	76,68	80,82

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
LAMPUNG	57,02	62,68	65,08
Lampung Barat	29,60	33,63	27,51
Tanggamus	32,95	38,57	47,69
Lampung Selatan	57,55	66,64	66,60
Lampung Timur	63,65	63,04	63,14
Lampung Tengah	70,59	80,94	87,60
Lampung Utara	52,12	62,88	64,40
Way Kanan	45,36	45,28	47,39
Tulang Bawang	75,67	82,07	82,29
Pesawaran	52,51	57,59	60,00
Pringsewu	40,33	42,18	47,49
Mesuji	84,21	85,68	85,54
Tulang Bawang Barat	57,60	62,50	66,03
Pesisir Barat	46,74	49,87	46,53
Kota Bandar Lampung	67,15	71,77	75,53
Kota Metro	44,02	49,47	54,69

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KEP. BANGKA BELITUNG	70,08	74,43	75,92
Bangka	61,18	65,80	65,87
Belitung	58,54	58,34	64,36
Bangka Barat	105,19	118,22	112,43
Bangka Tengah	59,78	68,40	62,44
Bangka Selatan	57,13	65,05	63,50
Belitung Timur	71,98	70,07	73,75
Kota Pangkal Pinang	84,26	83,45	96,39

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KEPULAUAN RIAU	161,71	155,91	161,69
Karimun	80,11	92,11	95,09
Bintan	186,51	185,64	198,29
Natuna	407,41	397,34	399,29
Lingga	69,63	70,64	76,44
Kepulauan Anambas	547,82	596,39	532,56
Kota Batam	151,84	140,36	146,41
Kota Tanjung Pinang	126,61	130,92	144,75

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
DKI JAKARTA	306,17	314,81	356,46
Kep. Seribu	363,74	336,08	314,68
Kota Jakarta Selatan	323,93	346,10	388,32
Kota Jakarta Timur	203,18	202,50	228,23
Kota Jakarta Pusat	834,79	905,70	1.036,57
Kota Jakarta Barat	209,67	216,83	246,32
Kota Jakarta Utara	310,27	306,75	344,29

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
JAWA BARAT	59,76	60,65	67,66
Bogor	54,93	55,74	65,77
Sukabumi	38,09	42,26	47,48
Cianjur	30,53	30,81	34,06
Bandung	43,57	42,38	50,50
Garut	35,41	33,79	38,81
Tasikmalaya	29,64	29,15	33,41
Ciamis	33,90	36,54	37,51
Kuningan	30,04	31,95	36,64
Cirebon	30,64	31,12	34,41
Majalengka	29,43	32,85	34,24
Sumedang	38,65	38,56	41,32
Indramayu	69,69	71,32	72,70
Subang	32,95	33,85	38,74
Purwakarta	96,28	101,09	115,76
Karawang	140,58	147,47	155,66
Bekasi	138,84	132,22	144,52
Bandung Barat	37,22	39,80	47,98
Pangandaran	29,14	33,93	36,30
Kota Bogor	51,94	55,42	67,77
Kota Sukabumi	53,18	54,76	66,28
Kota Bandung	136,72	137,43	156,57
Kota Cirebon	87,71	107,66	112,43
Kota Bekasi	42,99	42,02	46,66
Kota Depok	38,05	38,86	42,08
Kota Cimahi	65,34	72,22	85,18
Kota Tasikmalaya	42,33	44,02	50,87
Kota Banjar	31,10	32,10	37,44

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
JAWA TENGAH	50,95	53,23	57,50
Cilacap	124,59	119,83	121,94
Banyumas	41,82	44,70	48,11
Purbalingga	32,53	36,14	39,65
Banjarnegara	28,97	32,69	34,20
Kebumen	33,32	33,85	35,91
Purworejo	35,90	36,85	39,91
Wonosobo	31,15	35,08	35,38
Magelang	30,32	31,58	35,15
Boyolali	40,26	40,36	42,96
Klaten	43,31	43,83	46,56
Sukoharjo	51,46	52,41	58,51
Wonogiri	35,02	36,82	36,13
Karanganyar	49,79	50,84	53,53
Sragen	51,94	56,01	62,24
Grobogan	24,97	26,88	31,50
Blora	36,81	45,27	43,89
Rembang	37,16	41,94	48,11
Pati	43,58	43,94	52,19
Kudus	140,88	137,94	143,00
Jepara	29,55	30,07	32,74
Demak	28,60	30,34	33,70
Semarang	54,86	55,18	59,80
Temanggung	32,64	32,05	45,97
Kendal	59,14	60,23	63,41
Batang	33,01	35,65	37,85
Pekalongan	32,22	34,07	37,46
Pemalang	27,31	26,30	29,83
Tegal	32,62	35,12	36,98
Brebes	35,92	41,83	44,86
Kota Magelang	84,62	97,26	106,70
Kota Surakarta	116,67	116,43	128,90
Kota Salatiga	80,78	88,65	103,58
Kota Semarang	129,58	132,41	142,38
Kota Pekalongan	41,22	43,11	53,03
Kota Tegal	80,63	77,30	90,87

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
D I YOGYAKARTA	44,00	47,37	52,24
Kulon Progo	30,62	35,85	35,51
Bantul	31,19	31,39	33,95
Gunung Kidul	28,11	32,76	42,50
Sleman	47,77	51,05	53,45
Kota Yogyakarta	108,78	113,24	133,70

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
JAWA TIMUR	71,41	75,05	80,82
Pacitan	32,36	31,29	35,87
Ponorogo	30,26	31,29	33,28
Trenggalek	29,88	33,26	33,85
Tulungagung	43,19	47,28	50,25
Blitar	36,81	40,31	43,22
Kediri	31,85	32,40	36,61
Malang	42,40	44,44	47,10
Lumajang	36,04	40,30	42,24
Jember	41,00	40,85	41,97
Banyuwangi	60,16	63,13	67,29
Bondowoso	29,26	27,43	31,12
Situbondo	30,19	32,16	35,02
Probolinggo	37,35	37,77	40,01
Pasuruan	114,27	116,92	132,65
Sidoarjo	105,69	110,28	123,38
Mojokerto	79,85	90,75	95,58
Jombang	39,26	39,23	46,39
Nganjuk	29,45	31,26	34,05
Madiun	32,60	33,65	36,20
Magetan	29,38	33,76	36,38
Ngawi	25,15	28,41	31,65
Bojonegoro	99,19	101,51	107,20
Tuban	58,75	70,13	67,83
Lamongan	40,68	40,62	43,46
Gresik	141,25	153,03	152,85
Bangkalan	39,24	44,13	44,56
Sampang	36,57	37,78	40,34
Pamekasan	29,48	28,63	29,94
Sumenep	42,87	39,45	41,51
Kota Kediri	496,16	540,57	555,56
Kota Blitar	54,95	56,80	62,83
Kota Malang	105,27	106,76	120,05
Kota Probolinggo	59,56	66,24	63,52
Kota Pasuruan	53,17	53,26	54,89
Kota Mojokerto	61,19	65,94	73,13
Kota Madiun	95,07	105,00	109,92
Kota Surabaya	230,85	243,34	265,14
Kota Batu	89,17	91,83	102,72

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
BANTEN	72,47	73,35	79,16
Pandeglang	39,32	41,46	48,53
Lebak	33,36	38,09	38,50
Tangerang	52,11	51,14	56,34
Serang	82,40	82,33	89,66
Kota Tangerang	91,94	90,80	95,23
Kota Cilegon	332,20	349,84	400,02
Kota Serang	69,22	69,41	71,70
Kota Tangerang Selatan	66,41	67,86	74,37

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
BALI	54,79	61,30	65,76
Jembrana	49,48	62,56	59,32
Tabanan	51,65	57,28	60,71
Badung	87,29	84,49	94,37
Gianyar	53,37	58,07	72,52
Klungkung	44,14	52,36	60,25
Bangli	26,54	31,19	29,94
Karangasem	41,32	45,96	49,44
Buleleng	52,91	67,42	63,22
Kota Denpasar	54,00	59,56	69,14

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
NUSA TENGGARA BARAT	42,37	39,06	41,57
Lombok Barat	34,91	30,98	32,68
Lombok Tengah	27,60	27,39	26,95
Lombok Timur	29,54	27,50	27,20
Sumbawa	42,86	49,15	48,02
Dompu	49,57	49,93	52,77
Bima	34,75	34,39	39,82
Sumbawa Barat	169,08	165,76	249,17
Lombok Utara	0,00	30,14	30,85
Kota Mataram	61,91	57,55	56,47
Kota Bima	32,66	34,52	32,88

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
NUSA TENGGARA TIMUR	28,29	29,34	32,08
Sumba Barat	32,46	30,90	34,01
Sumba Timur	29,03	36,56	43,93
Kupang	28,27	33,90	33,59
Timor Tengah Selatan	24,07	24,80	27,18
Timor Tengah Utara	20,88	26,46	27,31
Belu	29,73	30,03	31,08
Alor	24,54	23,52	25,10
Lembata	19,71	17,58	21,34
Flores Timur	28,88	32,20	36,35
Sikka	20,35	23,35	23,38
Ende	32,09	31,79	36,46
Ngada	30,52	30,67	37,41
Manggarai	18,20	19,68	19,79
Rote Nda	22,47	22,66	26,31
Manggarai Barat	19,78	18,54	22,39
Sumba Barat Daya	97,45	90,85	102,80
Sumba Tengah	5,99	5,89	6,73
Nageko	24,68	23,53	27,10
Manggarai Timur	16,65	15,24	16,15
Sabu Raijua	15,79	19,75	19,18
Malaka	23,16	20,51	26,17
Kota Kupang	79,70	74,70	83,33

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN BARAT	54,43	57,77	59,66
Sambas	49,90	55,65	53,47
Bengkayang	40,00	47,21	45,48
Landak	35,86	40,69	42,22
Pontianak	41,10	43,06	49,36
Sanggau	55,82	66,46	65,33
Ketapang	69,46	77,59	85,54
Sintang	49,51	47,95	48,68
Kapuas Hulu	44,18	45,41	45,59
Sekadau	42,79	47,46	48,54
Melawai	33,42	35,10	36,46
Kayong Utara	48,47	50,84	54,64
Kubu Raya	67,06	67,71	70,90
Kota Pontianak	79,05	77,14	80,62
Kota Singkawang	65,47	59,36	67,34

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN TENGAH	70,29	73,15	78,66
Kotawaringin Barat	70,41	67,09	73,25
Kotawaringin Timur	74,42	82,50	84,64
Kapuas	59,06	64,97	63,30
Barito Selatan	72,65	72,15	76,97
Barito Utara	107,78	127,82	128,25
Sukamara	96,97	87,99	105,80
Lamandau	89,70	88,87	96,59
Seruyan	53,75	56,16	62,46
Katingan	56,70	54,49	69,77
Pulang Pisau	49,99	44,21	54,82
Gunung Mas	52,25	57,52	69,26
Barito Timur	86,08	92,97	105,32
Murung Raya	98,93	110,83	112,85
Kota Palangka Raya	68,33	73,45	75,14

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN SELATAN	62,70	67,00	69,81
Tanah Laut	62,85	61,98	63,62
Kota Baru	104,14	115,35	127,20
Banjar	39,27	42,08	43,81
Barito Kuala	31,70	35,32	34,93
Tapin	68,90	67,76	72,70
Hulu Sungai Selatan	40,46	46,17	46,72
Hulu Sungai Tengah	36,73	39,71	45,00
Hulu Sungai Utara	31,34	34,96	34,81
Tabalong	124,50	133,53	139,66
Tanah Bumbu	85,92	87,77	84,33
Balangan	160,75	204,33	175,82
Kota Banjarmasin	60,56	65,51	74,93
Kota Banjar Baru	44,50	48,90	48,74

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN TIMUR	250,08	255,47	269,44
Pasir	250,53	260,08	265,83
Kutai Barat	301,53	292,86	317,51
Kutai	316,68	320,42	321,84
Kutai Timur	469,58	480,19	467,60
Berau	222,05	231,10	248,51
Penajam Paser Utara	81,90	92,13	87,09
Mahakam Ulu	109,11	123,09	136,39
Kota Balikpapan	243,91	235,50	279,78
Kota Samarinda	94,82	100,97	109,15
Kota Bontang	506,91	468,00	499,01

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN UTARA	173,89	183,14	191,86
Malinau	170,07	200,79	224,80
Bulongan	164,43	188,55	204,71
Tana Tidung	315,41	285,10	286,16
Nunukan	172,11	175,62	176,97
Kota Tarakan	169,18	169,04	177,82

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI UTARA	70,67	71,11	81,82
Bolaang Mongondow	45,73	48,67	54,56
Minahasa	64,63	66,29	84,97
Kep.Sangihe Talaud	49,26	48,54	52,64
Kepulauan Talaud	33,09	33,74	33,59
Minahasa Selatan	58,89	54,84	66,54
Minahasa Utara	92,22	94,22	114,03
Bolaang Mongondow Utara	46,78	47,60	50,71
Kep. Siau Tagulandang Biaro	51,00	50,88	55,79
Minahasa Tenggara	81,54	68,74	83,53
Bolaang Mongondow Selatan	48,77	54,61	59,43
Bolaang Mongondow Timur	51,52	51,46	51,81
Kota Manado	114,57	110,31	131,51
Kota Bitung	97,23	103,29	117,65
Kota Tomohon	56,50	61,75	72,12
Kota Kotamobago	31,38	34,41	35,10

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI TENGAH	81,97	89,71	96,89
Banggai Kepulauan	52,08	52,61	56,98
Banggai	98,91	104,78	101,38
Morowali	523,12	655,40	730,88
Poso	45,04	50,30	49,41
Donggala	69,11	62,49	62,74
Toli-Toli	47,08	50,50	57,01
Buol	52,37	55,08	50,18
Parigi Moutong	53,34	56,93	51,00
Tojo Una-Una	43,56	47,06	46,61
Sigi	61,43	61,38	65,97
Banggai Laut	47,00	51,39	46,84
Morowali Utara	117,42	133,07	144,25
Kota Palu	74,53	78,96	82,87

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI SELATAN	77,08	82,95	91,57
Selayar	47,80	54,88	60,88
Bulukumba	43,34	41,12	47,09
Bantaeng	51,44	62,59	67,08
Jeneponto	35,93	40,60	44,23
Takalar	46,21	45,91	50,25
Gowa	33,01	37,69	41,12
Sinjai	59,98	64,04	65,22
Maros	96,30	96,40	92,94
Pangkajene Kepulauan	101,78	110,58	125,60
Barru	58,29	62,76	74,57
Bone	69,26	69,03	82,20
Soppeng	59,01	68,88	84,88
Wajo	67,03	72,48	67,55
Sidenreng Rappang	65,93	73,50	68,90
Pinrang	81,38	96,26	92,50
Enrekang	47,60	51,68	51,43
Luwu	63,56	65,92	74,70
Tana Toraja	42,14	43,41	55,20
Luwu Utara	63,13	61,29	94,73
Luwu Timur	108,80	119,15	121,44
Toraja Utara	49,48	49,75	58,96
Kota Makasar	150,55	164,44	190,55
Kota Pare Pare	63,24	69,22	71,78
Kota Palopo	60,71	64,95	71,05

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI TENGGARA	71,03	75,83	79,59
Buton	57,63	63,37	61,98
Muna	61,76	65,39	74,61
Konawe/Kab Kendari	56,41	62,74	68,14
Kolaka	147,16	132,99	131,03
Konawe Selatan	49,55	56,89	57,94
Bombana	51,58	56,88	60,96
Wakatobi	55,15	67,82	75,36
Kolaka Utara	86,14	78,44	80,76
Buton Utara	68,21	79,44	83,06
Konawe Utara	90,82	100,75	107,40
Kolaka Timur	42,62	48,27	48,44
Konawe Kepulauan	71,93	70,38	80,51
Muna Barat	49,36	61,63	67,71
Buton Tengah	45,36	47,75	49,57
Buton Selatan	58,20	67,77	65,79
Kota Kendari	83,32	85,04	91,50
Kota Bau-Bau	75,90	84,12	97,63

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
GORONTALO	42,93	46,03	50,13
Boalemo	40,87	40,97	46,13
Gorontalo	42,82	47,28	50,71
Pokuwato	50,68	53,04	55,64
Bone Bolango	35,19	37,45	41,47
Gorontalo Utara	37,53	45,39	48,59
Kota Gorontalo	48,44	50,56	56,29

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI BARAT	55,09	57,14	61,27
Majene	45,81	51,78	56,57
Polewali Mamasa	50,34	49,60	52,18
Mamasa	30,06	33,11	38,42
Mamuju	71,97	67,40	76,58
Mamuju Utara	86,88	101,27	99,55
Mamuju Tengah	39,03	42,32	46,54

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
MALUKU	37,95	40,59	45,73
Maluku Tenggara Barat	32,15	38,42	43,22
Maluku Tenggara	41,19	49,66	49,25
Maluku Tengah	31,64	38,74	43,22
Buru	21,53	25,41	25,49
Kepulauan Aru	53,08	53,94	58,57
Seram Bagian Barat	25,48	22,57	27,28
Seram Bagian Timur	45,00	40,04	49,32
Maluku Barat Daya	35,72	34,50	41,94
Buru Selatan	34,81	35,43	40,78
Kota Ambon	48,77	50,41	59,89
Kota Tual	51,00	52,73	50,18

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
MALUKU UTARA	44,02	47,22	56,76
Halmahera Barat	28,21	30,48	35,53
Halmahera Tengah	61,11	61,79	81,95
Kepulauan Sula	41,15	36,82	46,71
Halmahera Selatan	37,94	49,01	71,54
Halmahera Utara	43,25	47,22	57,48
Halmahera Timur	42,92	49,46	57,09
Pulau Morotai	37,93	38,57	44,80
Pulau Taliabu	37,33	38,96	42,33
Kota Ternate	61,23	63,36	64,06
Kota Tidore Kepulauan	40,80	40,18	47,05

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
PAPUA BARAT	134,93	132,31	152,10
Fak-Fak	106,09	93,67	110,43
Kaimana	60,13	61,65	68,66
Teluk Wondama	77,96	71,98	59,43
Teluk Bintuni	823,38	907,41	1.070,21
Manokwari	86,68	83,45	88,77
Sorong Selatan	60,89	58,76	98,83
Sorong	200,78	191,86	211,38
Raja Ampat	112,02	109,03	129,82
Tambrauw	25,36	26,43	31,87
Maybrat	21,70	22,98	27,17
Manokwari Selatan	52,84	43,53	48,55
Pegunungan Arfak	8,31	8,13	9,68
Kota Sorong	75,50	79,37	88,15

Lampiran 56. Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Juta Rupiah per Tenaga Kerja per Tahun)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
PAPUA	98,55	83,55	96,36
Merauke	85,13	87,41	95,68
Jayawijaya	38,24	41,65	41,91
Jayapura	168,73	194,17	187,02
Nabire	99,54	97,18	103,67
Yapen Waropen	70,08	63,94	90,04
Biak Namfor	56,03	60,82	57,46
Paniai	40,06	39,25	73,00
Puncak Jaya	22,88	20,05	15,33
Mimika	603,04	389,35	527,26
Boven Digoel	91,21	103,95	125,29
Mappi	41,63	57,73	70,94
Asmat	36,49	32,84	31,98
Yahukimo	15,08	17,46	16,77
Pegunungan Bintang	36,70	41,14	43,02
Tolikara	12,84	15,28	19,06
Sarmi	157,52	136,58	115,78
Keerom	71,72	65,42	68,14
Waropen	107,95	126,10	124,12
Supiori	118,12	110,61	120,15
Membramo Raya	240,00	143,89	132,54
Nduga	12,80	13,23	13,40
Lanny Jaya	10,28	10,23	27,31
Mamberamo Tengah	28,06	26,60	30,89
Yalimo	20,21	20,55	21,53
Puncak	16,23	17,71	17,76
Dogiyai	19,08	20,80	20,62
Intan Jaya	33,98	37,70	39,73
Deiyai	24,76	27,52	22,26
Kota Jayapura	135,78	147,63	157,53

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	28.815	30.696	31.658
Simeulue	17.918	19.597	19.611
Aceh Singkil	17.559	20.934	22.153
Aceh Selatan	19.944	24.040	25.789
Aceh Tenggara	17.062	18.335	21.370
Aceh Timur	23.509	27.109	26.324
Aceh Tengah	30.971	32.572	30.958
Aceh Barat	44.465	41.056	39.811
Aceh Besar	27.198	28.511	29.846
Pidie	21.535	22.027	24.074
Bireuen	24.526	27.820	28.124
Aceh Utara	39.280	38.417	46.010
Aceh Barat Daya	21.816	26.267	25.727
Gayo Lues	20.440	20.798	20.209
Aceh Tamiang	20.097	23.076	23.996
Nagan Raya	47.063	51.906	49.810
Aceh Jaya	21.630	24.830	22.649
Bener Meriah	21.568	22.984	23.493
Pidie Jaya	21.429	21.764	23.632
Kota Banda Aceh	55.602	58.387	58.494
Kota Sabang	35.361	35.633	35.267
Kota Langsa	25.322	25.750	25.035
Kota Lhokseumawe	41.721	39.886	40.592
Kota Subulussalam	26.014	26.108	25.913

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SUMATERA UTARA	34.433	36.450	40.120
Nias	21.000	19.331	23.993
Mandailing Natal	21.182	22.765	27.518
Tapanuli Selatan	36.218	41.403	41.012
Tapanuli Tengah	18.359	20.188	20.996
Tapanuli Utara	17.934	18.361	20.150
Toba Samosir	28.641	27.510	29.564
Labuhan Batu	48.262	53.565	56.502
Asahan	33.465	36.936	46.225
Simalungun	31.332	33.451	37.551
Dairi	20.229	22.426	28.503
Karo	26.200	27.954	29.548
Deli Serdang	28.361	29.660	32.083
Langkat	27.137	29.040	30.630
Nias Selatan	13.947	16.598	14.074
Humbang Hasundutan	19.623	20.138	22.215
Pakpak Barat	15.111	16.167	16.890
Samosir	24.871	24.507	52.781
Serdang Bedagai	31.156	31.072	32.267
Batu Bara	56.656	60.641	61.970
Padang Lawas Utara	32.167	34.850	48.475
Padang Lawas	38.168	34.310	34.298
Labuhan Batu Selatan	60.310	62.653	72.558
Labuhan Batu Utara	47.884	55.882	57.352
Nias Utara	20.449	19.283	23.909
Nias Barat	15.740	18.659	41.856
Kota Sibolga	33.248	35.816	37.863
Kota Tanjung Balai	26.009	29.541	30.578
Kota Pematang Siantar	33.672	34.041	35.658
Kota Tebing Tinggi	19.920	21.197	22.369
Kota Medan	57.659	60.793	69.552
Kota Binjai	24.559	25.715	28.006
Kota Padang Sidempuan	17.193	18.319	19.252
Kota Gunung Sitoli	25.671	25.511	30.703

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SUMATERA BARAT	31.808	33.337	34.805
Kepulauan Mentawai	35.079	31.591	32.920
Pesisir Selatan	23.069	23.522	25.639
Solok	25.838	29.721	29.201
Sawah Lunto/Sijunjung	32.713	33.695	33.997
Tanah Datar	26.776	29.898	34.710
Padang Pariaman	36.949	37.061	34.462
Agam	29.293	28.654	31.714
Limapuluh Koto	26.824	29.752	29.867
Pasaman	25.684	23.936	24.254
Solok Selatan	22.702	24.685	26.604
Dharmas Raya	31.287	29.375	28.997
Pasaman Barat	26.529	30.418	30.277
Kota Padang	45.107	47.065	49.387
Kota Solok	37.883	43.614	39.669
Kota Sawah Lunto	39.254	42.919	45.608
Kota Padang Panjang	40.831	41.664	48.208
Kota Bukit Tinggi	39.591	44.521	47.034
Kota Payakumbuh	29.740	31.179	33.928
Kota Pariaman	40.102	40.700	47.484

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
RIAU	80.554	79.989	84.910
Kuantan Sengingi	96.128	89.291	90.899
Indragiri Hulu	76.087	82.248	82.335
Indragiri Hilir	65.216	69.723	66.973
Pelalawan	77.215	72.892	83.891
Siak	129.075	125.823	139.253
Kampar	71.809	74.308	75.129
Rokan Hulu	47.468	43.172	48.868
Bengkalis	161.007	163.665	175.866
Rokan Hilir	87.844	82.604	97.524
Kepulauan Meranti	71.994	76.715	82.477
Kota Pekanbaru	55.968	57.768	59.837
Kota Dumai	83.993	80.664	91.194

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
JAMBI	41.454	44.729	45.784
Kerinci	25.450	29.081	29.355
Merangin	25.833	27.190	28.145
Sarolangun	38.920	37.101	38.538
Batanghari	50.875	51.797	51.507
Muara Jambi	37.924	45.940	45.986
Tanjung Jabung Timur	77.908	87.172	83.220
Tanjung Jabung Barat	91.871	99.508	94.088
Tebo	29.586	32.426	31.006
Bungo	34.111	38.758	39.919
Kota Jambi	29.405	29.942	33.706
Kota Sungai Penuh	43.705	55.110	59.878

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SUMATERA SELATAN	36.754	38.448	40.132
Ogan Komering Ulu	26.598	28.517	30.024
Ogan Komering Ilir	26.193	25.805	30.533
Muara Enim (Liot)	64.646	67.196	69.949
Lahat	25.979	30.955	30.179
Musi Rawas	34.927	36.399	37.325
Musi Banyuasin	73.364	70.874	71.183
Banyuasin	26.072	27.257	26.697
Ogan Komering Ulu Selatan	15.740	14.833	17.894
Ogan Komering Ulu Timur	15.469	17.322	16.052
Ogan Ilir	15.360	16.361	18.083
Empat Lawang	13.773	16.024	13.642
Penukal Abab Lematang Ilir	22.446	25.551	23.416
Musi Rawas Utara	32.082	34.632	34.727
Kota Palembang	58.279	60.466	65.187
Kota Prabumulih	26.495	27.110	30.092
Kota Pagar Alam	13.114	14.341	16.727
Kota Lubuk Linggau	17.913	16.734	19.165

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
BENGKULU	22.191	23.216	24.157
Bengkulu Selatan	20.316	22.715	23.122
Rejang Lebong	20.619	20.001	20.123
Bengkulu Utara	17.710	18.777	19.396
Kaur	17.088	18.943	20.235
Seluma	13.965	16.284	16.436
Mukomuko	20.566	19.608	22.977
Lebong	16.840	17.412	19.479
Kepahiang	18.346	18.118	17.229
Bengkulu Tengah	25.455	28.171	29.590
Kota Bengkulu	35.506	37.275	39.289

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
LAMPUNG	27.719	30.469	31.637
Lampung Barat	14.388	16.349	13.371
Tanggamus	16.019	18.751	23.184
Lampung Selatan	27.977	32.393	32.377
Lampung Timur	30.940	30.643	30.692
Lampung Tengah	34.316	39.347	42.582
Lampung Utara	25.336	30.567	31.304
Way Kanan	22.051	22.013	23.039
Tulang Bawang	36.786	39.894	40.003
Pesawaran	25.524	27.997	29.166
Pringsewu	19.605	20.503	23.083
Mesuji	40.935	41.651	41.582
Tulang Bawang Barat	28.001	30.382	32.099
Pesisir Barat	22.721	24.244	22.620
Kota Bandar Lampung	32.642	34.886	36.715
Kota Metro	21.398	24.049	26.586

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KEP. BANGKA BELITUNG	34.068	36.180	36.903
Bangka	29.739	31.988	32.022
Belitung	28.457	28.359	31.285
Bangka Barat	51.136	57.466	54.654
Bangka Tengah	29.060	33.249	30.352
Bangka Selatan	27.772	31.620	30.866
Belitung Timur	34.990	34.062	35.848
Kota Pangkal Pinang	40.962	40.568	46.857

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KEPULAUAN RIAU	78.608	75.789	78.597
Karimun	38.943	44.774	46.225
Bintan	90.665	90.243	96.390
Natuna	198.046	193.152	194.101
Lingga	33.849	34.341	37.158
Kepulauan Anambas	266.301	289.913	258.884
Kota Batam	73.810	68.229	71.172
Kota Tanjung Pinang	61.549	63.641	70.366

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
DKI JAKARTA	148.831	153.033	173.277
Kep. Seribu	176.816	163.374	152.969
Kota Jakarta Selatan	157.467	168.241	188.766
Kota Jakarta Timur	98.770	98.438	110.944
Kota Jakarta Pusat	405.802	440.273	503.889
Kota Jakarta Barat	101.924	105.401	119.738
Kota Jakarta Utara	150.826	149.114	167.361

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
JAWA BARAT	29.049	29.485	32.890
Bogor	26.702	27.098	31.971
Sukabumi	18.518	20.544	23.082
Cianjur	14.841	14.977	16.555
Bandung	21.179	20.603	24.547
Garut	17.214	16.424	18.864
Tasikmalaya	14.408	14.172	16.240
Ciamis	16.477	17.760	18.235
Kuningan	14.604	15.530	17.813
Cirebon	14.894	15.129	16.729
Majalengka	14.305	15.970	16.643
Sumedang	18.790	18.745	20.086
Indramayu	33.876	34.668	35.339
Subang	16.017	16.454	18.832
Purwakarta	46.805	49.141	56.270
Karawang	68.336	71.686	75.667
Bekasi	67.494	64.276	70.251
Bandung Barat	18.094	19.345	23.325
Pangandaran	14.163	16.492	17.647
Kota Bogor	25.247	26.939	32.945
Kota Sukabumi	25.851	26.619	32.218
Kota Bandung	66.460	66.806	76.109
Kota Cirebon	42.637	52.336	54.651
Kota Bekasi	20.900	20.427	22.684
Kota Depok	18.498	18.890	20.457
Kota Cimahi	31.763	35.108	41.408
Kota Tasikmalaya	20.579	21.399	24.727
Kota Banjar	15.120	15.604	18.200

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
JAWA TENGAH	24.766	25.874	27.953
Cilacap	60.566	58.252	59.275
Banyumas	20.330	21.731	23.385
Purbalingga	15.811	17.568	19.274
Banjarnegara	14.081	15.892	16.625
Kebumen	16.196	16.453	17.456
Purworejo	17.450	17.915	19.400
Wonosobo	15.144	17.053	17.198
Magelang	14.740	15.351	17.085
Boyolali	19.571	19.617	20.881
Klaten	21.054	21.304	22.634
Sukoharjo	25.015	25.478	28.441
Wonogiri	17.022	17.900	17.565
Karanganyar	24.205	24.715	26.021
Sragen	25.249	27.226	30.253
Grobogan	12.141	13.068	15.312
Blora	17.893	22.007	21.334
Rembang	18.065	20.385	23.385
Pati	21.187	21.359	25.371
Kudus	68.481	67.056	69.514
Jepara	14.366	14.618	15.917
Demak	13.903	14.748	16.382
Semarang	26.669	26.825	29.070
Temanggung	15.869	15.580	22.346
Kendal	28.747	29.277	30.822
Batang	16.047	17.328	18.398
Pekalongan	15.661	16.560	18.210
Pemalang	13.276	12.782	14.499
Tegal	15.857	17.071	17.977
Brebes	17.460	20.336	21.808
Kota Magelang	41.137	47.282	51.866
Kota Surakarta	56.715	56.598	62.661
Kota Salatiga	39.269	43.092	50.349
Kota Semarang	62.991	64.364	69.213
Kota Pekalongan	20.036	20.958	25.780
Kota Tegal	39.193	37.578	44.173

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
D I YOGYAKARTA	21.389	23.027	25.396
Kulon Progo	14.884	17.426	17.260
Bantul	15.162	15.261	16.503
Gunung Kidul	13.663	15.926	20.659
Sleman	23.220	24.817	25.985
Kota Yogyakarta	52.877	55.045	64.992

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
JAWA TIMUR	34.711	36.483	39.287
Pacitan	15.729	15.213	17.438
Ponorogo	14.710	15.212	16.175
Trenggalek	14.523	16.166	16.455
Tulungagung	20.993	22.985	24.428
Blitar	17.893	19.593	21.009
Kediri	15.484	15.750	17.799
Malang	20.613	21.604	22.895
Lumajang	17.521	19.589	20.535
Jember	19.928	19.859	20.402
Banyuwangi	29.242	30.688	32.710
Bondowoso	14.221	13.336	15.130
Situbondo	14.674	15.634	17.026
Probolinggo	18.158	18.360	19.448
Pasuruan	55.547	56.836	64.482
Sidoarjo	51.378	53.608	59.977
Mojokerto	38.816	44.113	46.464
Jombang	19.087	19.068	22.552
Nganjuk	14.317	15.195	16.552
Madiun	15.847	16.359	17.596
Magetan	14.282	16.412	17.686
Ngawi	12.225	13.813	15.384
Bojonegoro	48.219	49.346	52.112
Tuban	28.558	34.091	32.972
Lamongan	19.773	19.744	21.125
Gresik	68.663	74.388	74.302
Bangkalan	19.075	21.452	21.663
Sampang	17.778	18.364	19.609
Pamekasan	14.331	13.919	14.555
Sumenep	20.839	19.179	20.176
Kota Kediri	241.190	262.777	270.066
Kota Blitar	26.711	27.613	30.543
Kota Malang	51.173	51.898	58.356
Kota Probolinggo	28.951	32.198	30.876
Kota Pasuruan	25.849	25.890	26.682
Kota Mojokerto	29.746	32.054	35.552
Kota Madiun	46.212	51.040	53.432
Kota Surabaya	112.219	118.291	128.888
Kota Batu	43.345	44.640	49.934

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
BANTEN	35.228	35.655	38.482
Pandeglang	19.113	20.154	23.592
Lebak	16.217	18.514	18.717
Tangerang	25.331	24.859	27.385
Serang	40.056	40.024	43.584
Kota Tangerang	44.694	44.140	46.291
Kota Cilegon	161.489	170.059	194.456
Kota Serang	33.648	33.740	34.854
Kota Tangerang Selatan	32.280	32.986	36.153

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
BALI	26.634	29.800	31.966
Jembrana	24.053	30.410	28.834
Tabanan	25.110	27.847	29.513
Badung	42.431	41.071	45.877
Gianyar	25.945	28.229	35.250
Klungkung	21.458	25.454	29.288
Bangli	12.899	15.160	14.553
Karangasem	20.087	22.340	24.032
Buleleng	25.719	32.772	30.733
Kota Denpasar	26.248	28.955	33.608

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
NUSA TENGGARA BARAT	20.594	18.989	20.208
Lombok Barat	16.971	15.059	15.888
Lombok Tengah	13.417	13.315	13.101
Lombok Timur	14.361	13.366	13.220
Sumbawa	20.832	23.893	23.343
Dompu	24.097	24.269	25.653
Bima	16.893	16.716	19.355
Sumbawa Barat	82.192	80.580	121.124
Lombok Utara	0	14.653	14.997
Kota Mataram	30.095	27.977	27.449
Kota Bima	15.879	16.780	15.985

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
NUSA TENGGARA TIMUR	13.753	14.263	15.594
Sumba Barat	15.778	15.021	16.531
Sumba Timur	14.113	17.770	21.354
Kupang	13.744	16.478	16.327
Timor Tengah Selatan	11.700	12.058	13.210
Timor Tengah Utara	10.151	12.865	13.276
Belu	14.454	14.596	15.108
Alor	11.931	11.432	12.201
Lembata	9.579	8.547	10.372
Flores Timur	14.037	15.654	17.672
Sikka	9.891	11.350	11.363
Ende	15.598	15.453	17.721
Ngada	14.836	14.908	18.187
Manggarai	8.846	9.566	9.619
Rote Nda	10.925	11.017	12.790
Manggarai Barat	9.613	9.012	10.886
Sumba Barat Daya	47.371	44.163	49.974
Sumba Tengah	2.914	2.863	3.271
Nageko	11.997	11.438	13.173
Manggarai Timur	8.095	7.411	7.852
Sabu Raijua	7.677	9.600	9.323
Malaka	11.259	9.968	12.720
Kota Kupang	38.741	36.311	40.510

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN BARAT	26.458	28.084	28.999
Sambas	24.257	27.051	25.994
Bengkayang	19.447	22.947	22.111
Landak	17.430	19.780	20.526
Pontianak	19.980	20.932	23.995
Sanggau	27.135	32.306	31.759
Ketapang	33.766	37.720	41.581
Sintang	24.065	23.308	23.664
Kapuas Hulu	21.477	22.077	22.161
Sekadau	20.800	23.071	23.598
Melawai	16.248	17.064	17.725
Kayong Utara	23.561	24.712	26.561
Kubu Raya	32.600	32.912	34.466
Kota Pontianak	38.426	37.498	39.189
Kota Singkawang	31.823	28.856	32.735

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN TENGAH	34.168	35.560	38.238
Kotawaringin Barat	34.227	32.611	35.605
Kotawaringin Timur	36.177	40.104	41.143
Kapuas	28.707	31.583	30.771
Barito Selatan	35.315	35.075	37.418
Barito Utara	52.391	62.133	62.342
Sukamara	47.137	42.771	51.429
Lamandau	43.602	43.199	46.952
Seruyan	26.127	27.298	30.361
Katingan	27.560	26.491	33.915
Pulang Pisau	24.300	21.489	26.646
Gunung Mas	25.398	27.963	33.669
Barito Timur	41.843	45.192	51.198
Murung Raya	48.091	53.877	54.860
Kota Palangka Raya	33.216	35.707	36.526

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN SELATAN	30.478	32.571	33.934
Tanah Laut	30.550	30.127	30.928
Kota Baru	50.623	56.073	61.832
Banjar	19.089	20.456	21.295
Barito Kuala	15.410	17.168	16.978
Tapin	33.492	32.941	35.338
Hulu Sungai Selatan	19.668	22.442	22.713
Hulu Sungai Tengah	17.853	19.306	21.875
Hulu Sungai Utara	15.234	16.994	16.923
Tabalong	60.519	64.912	67.888
Tanah Bumbu	41.764	42.665	40.995
Balangan	78.144	99.326	85.470
Kota Banjarmasin	29.438	31.847	36.422
Kota Banjar Baru	21.634	23.772	23.693

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN TIMUR	121.565	124.189	130.978
Pasir	121.788	126.430	129.223
Kutai Barat	146.577	142.364	154.345
Kutai	153.942	155.760	156.452
Kutai Timur	228.266	233.426	227.307
Berau	107.940	112.338	120.805
Penajam Paser Utara	39.812	44.787	42.333
Mahakam Ulu	53.037	59.838	66.300
Kota Balikpapan	118.566	114.479	136.006
Kota Samarinda	46.091	49.084	53.058
Kota Bontang	246.413	227.501	242.575

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN UTARA	84.532	89.026	93.264
Malinau	82.674	97.607	109.280
Bulungan	79.932	91.656	99.509
Tana Tidung	153.326	138.591	139.104
Nunukan	83.665	85.370	86.028
Kota Tarakan	82.240	82.171	86.439

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI UTARA	34.353	34.568	39.773
Bolaang Mongondow	22.228	23.658	26.524
Minahasa	31.419	32.224	41.304
Kep.Sangihe Talaud	23.948	23.595	25.591
Kepulauan Talaud	16.086	16.404	16.329
Minahasa Selatan	28.629	26.656	32.346
Minahasa Utara	44.829	45.800	55.429
Bolaang Mongondow Utara	22.742	23.140	24.652
Kep. Siau Tagulandang Biaro	24.791	24.731	27.120
Minahasa Tenggara	39.638	33.414	40.603
Bolaang Mongondow Selatan	23.709	26.544	28.891
Bolaang Mongondow Timur	25.044	25.017	25.183
Kota Manado	55.694	53.623	63.928
Kota Bitung	47.263	50.211	57.193
Kota Tomohon	27.464	30.017	35.059
Kota Kotamobago	15.256	16.726	17.065

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI TENGAH	39.848	43.607	47.097
Banggai Kepulauan	25.319	25.576	27.697
Banggai	48.081	50.935	49.281
Morowali	254.294	318.595	355.287
Poso	21.895	24.450	24.021
Donggala	33.596	30.378	30.498
Toli-Toli	22.884	24.550	27.712
Buol	25.459	26.777	24.394
Parigi Moutong	25.928	27.676	24.793
Tojo Una-Una	21.175	22.877	22.658
Sigi	29.862	29.838	32.071
Banggai Laut	22.848	24.983	22.767
Morowali Utara	57.080	64.686	70.124
Kota Palu	36.228	38.382	40.286

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI SELATAN	37.469	40.325	44.513
Selayar	23.234	26.677	29.594
Bulukumba	21.066	19.988	22.893
Bantaeng	25.005	30.428	32.606
Jeneponto	17.467	19.738	21.499
Takalar	22.462	22.315	24.427
Gowa	16.045	18.320	19.989
Sinjai	29.158	31.131	31.706
Maros	46.814	46.862	45.179
Pangkajene Kepulauan	49.476	53.753	61.053
Barru	28.334	30.507	36.250
Bone	33.667	33.557	39.958
Soppeng	28.684	33.481	41.260
Wajo	32.584	35.232	32.836
Sidenreng Rappang	32.051	35.731	33.495
Pinrang	39.562	46.791	44.965
Enrekang	23.137	25.120	25.002
Luwu	30.895	32.043	36.313
Tana Toraja	20.487	21.101	26.832
Luwu Utara	30.689	29.792	46.048
Luwu Timur	52.891	57.920	59.033
Toraja Utara	24.054	24.182	28.660
Kota Makasar	73.185	79.939	92.626
Kota Pare Pare	30.744	33.650	34.893
Kota Palopo	29.513	31.575	34.538

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI TENGGARA	34.528	36.862	38.687
Buton	28.014	30.803	30.129
Muna	30.024	31.788	36.271
Konawe/Kab Kendari	27.420	30.499	33.124
Kolaka	71.538	64.648	63.697
Konawe Selatan	24.088	27.657	28.163
Bombana	25.073	27.652	29.633
Wakatobi	26.810	32.966	36.632
Kolaka Utara	41.872	38.130	39.259
Buton Utara	33.158	38.616	40.377
Konawe Utara	44.148	48.975	52.207
Kolaka Timur	20.716	23.466	23.548
Konawe Kepulauan	34.964	34.213	39.136
Muna Barat	23.996	29.959	32.916
Buton Tengah	22.048	23.213	24.097
Buton Selatan	28.290	32.945	31.983
Kota Kendari	40.504	41.341	44.479
Kota Bau-Bau	36.897	40.889	47.457

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
GORONTALO	20.867	22.375	24.369
Boalemo	19.866	19.916	22.423
Gorontalo	20.813	22.982	24.653
Pokuwato	24.634	25.782	27.049
Bone Bolango	17.107	18.203	20.158
Gorontalo Utara	18.241	22.066	23.620
Kota Gorontalo	23.547	24.575	27.364

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
SULAWESI BARAT	26.778	27.775	29.784
Majene	22.270	25.171	27.499
Polewali Mamasa	24.471	24.112	25.364
Mamasa	14.611	16.098	18.675
Mamuju	34.984	32.764	37.227
Mamuju Utara	42.233	49.228	48.392
Mamuju Tengah	18.971	20.573	22.621

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
MALUKU	18.447	19.731	22.228
Maluku Tenggara Barat	15.629	18.677	21.008
Maluku Tenggara	20.024	24.141	23.942
Maluku Tengah	15.380	18.830	21.008
Buru	10.466	12.354	12.393
Kepulauan Aru	25.803	26.220	28.470
Seram Bagian Barat	12.386	10.972	13.260
Seram Bagian Timur	21.874	19.464	23.976
Maluku Barat Daya	17.362	16.768	20.389
Buru Selatan	16.924	17.225	19.824
Kota Ambon	23.707	24.506	29.112
Kota Tual	24.792	25.635	24.393

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
MALUKU UTARA	21.399	22.952	27.590
Halmahera Barat	13.712	14.815	17.274
Halmahera Tengah	29.705	30.036	39.839
Kepulauan Sula	20.001	17.898	22.707
Halmahera Selatan	18.445	23.824	34.776
Halmahera Utara	21.022	22.954	27.943
Halmahera Timur	20.863	24.042	27.752
Pulau Morotai	18.437	18.747	21.779
Pulau Taliabu	18.149	18.941	20.579
Kota Ternate	29.764	30.802	31.139
Kota Tidore Kepulauan	19.834	19.530	22.870

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
PAPUA BARAT	65.591	64.318	73.936
Fak-Fak	51.570	45.534	53.681
Kaimana	29.228	29.968	33.377
Teluk Wondama	37.898	34.992	28.889
Teluk Bintuni	400.254	441.104	520.239
Manokwari	42.136	40.567	43.154
Sorong Selatan	29.601	28.562	48.043
Sorong	97.601	93.266	102.753
Raja Ampat	54.456	53.001	63.105
Tambrauw	12.328	12.847	15.493
Maybrat	10.549	11.170	13.208
Manokwari Selatan	25.685	21.162	23.599
Pegunungan Arfak	4.039	3.951	4.705
Kota Sorong	36.703	38.583	42.848

Lampiran 57. Produktivitas Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020
(Rupiah per Jam per Tenaga Kerja)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
PAPUA	47.906	40.615	46.843
Merauke	41.381	42.490	46.513
Jayawijaya	18.591	20.246	20.375
Jayapura	82.020	94.387	90.912
Nabire	48.388	47.239	50.393
Yapen Waropen	34.065	31.081	43.767
Biak Namfor	27.235	29.564	27.931
Paniai	19.474	19.082	35.485
Puncak Jaya	11.122	9.748	7.453
Mimika	293.144	189.269	256.305
Boven Digoel	44.340	50.530	60.906
Mappi	20.235	28.065	34.484
Asmat	17.740	15.962	15.545
Yahukimo	7.332	8.486	8.154
Pegunungan Bintang	17.838	19.997	20.911
Tolikara	6.240	7.426	9.264
Sarmi	76.573	66.394	56.280
Keerom	34.863	31.801	33.125
Waropen	52.473	61.299	60.334
Supiori	57.417	53.769	58.405
Membramo Raya	116.666	69.945	64.429
Nduga	6.224	6.430	6.513
Lanny Jaya	4.995	4.974	13.276
Mamberamo Tengah	13.638	12.933	15.016
Yalimo	9.825	9.990	10.468
Puncak	7.888	8.611	8.633
Dogiyai	9.276	10.112	10.025
Intan Jaya	16.519	18.328	19.312
Deiyai	12.034	13.380	10.823
Kota Jayapura	66.004	71.764	76.579



CATATAN TEKNIS

Catatan Teknis

Produktivitas merupakan konsep yang universal yang mencerminkan adanya hubungan yang erat antara *output* dan input dalam suatu proses produksi. Biasanya hubungan keduanya dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut:

$$O = P\{f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)\}$$

Dimana:

O = *Output* atau keluaran

X = *Input* atau masukan

P = Produktivitas

f = Fungsi

Secara sederhana produktivitas parsial dirumuskan sebagai berikut:

$$P = \frac{O}{I}$$

Dimana:

O = *Output* atau keluaran

I = *Input* atau masukan

Fungsi tersebut mencerminkan bahwa *output* yang dihasilkan dalam suatu proses produksi sangat tergantung pada tingkat produktivitas masing-masing *input* yang digunakan. Termasuk dalam *input* tersebut adalah tenaga kerja. Jadi, dari persamaan tersebut di atas terlihat adanya hubungan antara *output* dengan produktivitas dari berbagai jenis *input* yang digunakan. Produktivitas dapat dilihat dari kontribusi penggunaan sumber daya manusia dan teknologi dalam suatu proses produksi untuk dapat menghasilkan *output* tertentu yang telah ditargetkan. Secara umum produktivitas diformulasikan sebagai rasio *output* (keluaran) dengan *input* (masukan).

Yang dimaksud dengan *output* dalam produktivitas parsial maupun produktivitas total adalah nilai produksi atau nilai tambah masing-masing kegiatan ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan *input* adalah tenaga kerja, modal, teknologi, manajemen, dan *input* lainnya. Dalam pengukuran produktivitas di sini, hanya menggunakan *input* tenaga kerja.

Kebutuhan data *input* yang digunakan dalam penghitungan produktivitas tenaga kerja, ekuivalen tenaga kerja (ETK), dan jam kerja di tingkat nasional, regional, dan kategori usaha terdiri dari: PDB/PDRB per kategori usaha, data tenaga kerja, data ETK, dan jumlah jam kerja regional per kategori usaha:

Produk Domestik Bruto

Penjumlahan nilai tambah dalam satu periode tertentu di suatu wilayah tertentu dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai tambah yang diciptakan, diklasifikasikan ke dalam tujuh belas kategori usaha:

Kategori A: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Kategori B: Pertambangan dan Penggalian.

Kategori C: Industri Pengolahan.

Kategori D: Pengadaan Listrik dan Gas.

Kategori E: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Kategori F: Konstruksi.

Kategori G: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Kategori H: Transportasi dan Pergudangan.

Kategori I: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Kategori J: Informasi dan Komunikasi.

Kategori K: Jasa Keuangan dan Asuransi.

Kategori L: Real Estate.

Kategori M,N: Jasa Perusahaan.

Kategori O: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Kategori P: Jasa Pendidikan.

Kategori Q: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Kategori R,S,T,U: Jasa lainnya.

Tenaga kerja

Seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Ekuivalen Tenaga Kerja (ETK)

Perhitungan ETK adalah jam kerja karyawan untuk satu minggu dibagi 40. Ketika karyawan memiliki jam kerja selama 40 jam seminggu, maka ETKnya adalah 1. Karyawan yang jam bekerja 20 jam per minggu maka ETKnya adalah 0,5.

Indeks Daya Saing Tenaga Kerja

Selain melakukan pengukuran produktivitas tenaga kerja, juga dilakukan pengukuran indeks daya saing tenaga kerja. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Dengan melakukan pengukuran daya saing tenaga kerja, akan terlihat kesiapan setiap wilayah dalam menghadapi persaingan bebas pasar tenaga kerja.

Untuk menggambarkan daya saing yang bersifat multi dimensi, maka diperlukan dimensi dan indikator yang dapat menggambarkan daya saing tenaga kerja. Dimensi dan Indikator serta sumber data yang digunakan dalam mengukur daya saing tenaga kerja adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Konsep/Definisi	Sumber Data
Dimensi Pemberdayaan Angkatan Kerja (<i>Employability</i>)			
1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja	Sakernas
2.	Persentase setengah menganggur	Adalah persentase orang-orang atau mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 40 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan	Sakernas
3.	Persentase angkatan kerja perempuan	Adalah persentase partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Sakernas
4.	Persentase penganggur dengan pendidikan tinggi	Adalah persentase dari orang-orang yang menganggur dengan pendidikan terakhirnya di atas SMA	Sakernas
5.	Kapasitas BLK dibanding jumlah pencari kerja	Adalah perbandingan antara kapasitas BLK dengan jumlah pencari kerja di suatu wilayah	Kemnaker dan Sakernas
6.	Rata-rata lama menganggur	Adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mendapat pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha	Sakernas

No.	Indikator	Konsep/Definisi	Sumber Data
Dimensi Kualitas Tenaga Kerja			
1.	Persentase pekerja tidak dibayar	Adalah persentase dari seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang	Sakernas
2.	Persentase pengusaha	Adalah persentase seseorang yang bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomi	Sakernas
3.	Persentase pekerja dengan akses internet	Adalah persentase seseorang yang bekerja dan menggunakan/memiliki akses internet	Susenas
4.	Persentase morbiditas tenaga kerja	Adalah persentase penduduk bekerja dengan keluhan kesehatan dan mengganggu aktivitas bekerjanya	Susenas
5.	Rata-rata lama sekolah penduduk bekerja	Adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk bekerja dalam menjalani pendidikan formal	Susenas
6.	Persentase tenaga kerja yang pernah/sedang mengikuti pelatihan	Adalah persentase penduduk bekerja yang pernah/sedang mengikuti pelatihan (bersertifikat)	Sakernas
Dimensi Kompensasi dan Produktivitas			
1.	Rata-rata upah kategori lapangan usaha industri dan jasa disesuaikan PPP	Adalah rata-rata imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan dalam sektor industri dan jasa (d disesuaikan PPP), baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan	Sakernas dan Susenas
2.	Produktivitas upah ETK disesuaikan PPP (Rupiah/ETK/PPP)	Adalah total upah suatu provinsi dibagi dengan jumlah ETK disesuaikan dengan PPP	PDRB dan Sakernas
3.	Ketimpangan upah/ gap upah	Adalah ketimpangan upah di suatu provinsi yaitu perbedaan dari kabupaten dengan rata-rata upah tertinggi dengan kabupaten dengan rata-rata upah terendah	Sakernas
4.	Persentase tenaga kerja dengan upah di atas UMP	Adalah persentase tenaga kerja dengan upah yang diterima di atas upah minimum provinsi (UMP) yang berlaku	Sakernas
5.	Persentase tenaga kerja yang terdaftar dalam asuransi ketenagakerjaan	Adalah persentase tenaga kerja yang terdaftar dalam asuransi jaminan ketenagakerjaan	Kemnaker

Standarisasi

Perlu dilakukan standarisasi, karena satuan data yang berbeda-beda. metode yang digunakan adalah metode Maksimum-Minimum (Max-Min). Seluruh data dinormalisasi sehingga semua data ditransformasi ke dalam sistem skor 0 – 100 sebelum dilakukan agregasi. Skor 0 dan 100 menunjukkan posisi provinsi pada tingkat daya saing terendah dan tertinggi di antara 34 provinsi. Adapun model matematis metode Max-Min sebagai berikut:

$$S_{in} = \frac{X_{in} - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \times 100$$

dimana,

S_{in} = nilai capaian indikator ke i yang terstandarisasi pada provinsi n

X_{in} = nilai capaian indikator ke i pada provinsi n

$X_{\min}$ = target minimum

$X_{\max}$ = target maksimum

Untuk keseragaman data, semua indikator yang memiliki hubungan negatif dengan daya saing, dikonversi ke arah positif. Indikator tersebut diantaranya:

Tingkat pengangguran terbuka (TPT), Persentase setengah menganggur, Persentase penganggur dengan pendidikan tinggi, Rata-rata lama menganggur, Persentase pekerja tidak dibayar, Persentase morbiditas tenaga kerja, dan Ketimpangan upah.

Formulasi untuk konversi data yang bersifat negatif:

$$S_{in} = 100 - \left(\frac{X_{in} - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \times 100 \right)$$

dimana:

S_{in} = nilai capaian indikator ke i yang terstandarisasi pada provinsi n

X_{in} = nilai capaian indikator ke i pada provinsi n

$X_{\min}$ = target minimum

$X_{\max}$ = target maksimum

Keterangan:

Nilai capaian maksimum dan minimum pada setiap indikator yang digunakan diperoleh dari proyeksi capaian lima tahun mendatang, nilai maksimum yang dapat dicapai (misal persentase), serta target yang telah ditentukan sebelumnya.

Bobot masing-masing indikator

Bobot atau penimbang yang digunakan pada indeks komposit adalah *Equal Weighting*, yaitu semua variabel diberikan penimbang yang sama.

Menghitung indeks masing-masing dimensi

Selanjutnya menyusun indeks masing-masing dimensi. Komponen indikator yang digunakan untuk masing-masing dimensi diagregasi dengan menggunakan rata-rata aritmetik, sebagaimana formula berikut:

$$\text{Indeks (Pemberdayaan Angkatan Kerja (Employability))} = \frac{S_{1n} + S_{2n} + S_{3n} + S_{4n} + S_{5n} + S_{6n}}{6}$$

dimana:

S_{1n} = nilai capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sudah terstandarisasi di provinsi n

S_{2n} = nilai capaian persentase setengah menganggur yang sudah terstandarisasi di provinsi n

S_{3n} = nilai capaian persentase angkatan kerja perempuan yang sudah terstandarisasi di provinsi n

S_{4n} = nilai capaian persentase penganggur dengan pendidikan tinggi yang sudah terstandarisasi di provinsi n

S_{5n} = nilai capaian kapasitas BLK dibanding jumlah pencari kerja yang sudah terstandarisasi di provinsi n

S_{6n} = nilai capaian rata-rata lama menganggur yang sudah terstandarisasi di provinsi n

$$\text{Indeks (Kualitas Tenaga Kerja)} = \frac{S_{7n} + S_{8n} + S_{9n} + S_{10n} + S_{11n} + S_{12n}}{6}$$

dimana:

S_{7n} = nilai capaian persentase pekerja tidak dibayar yang sudah terstandarisasi di provinsi n

S_{8n} = nilai capaian persentase pengusaha yang sudah terstandarisasi di provinsi n

S_{9n} = nilai capaian persentase pekerja dengan akses internet yang sudah terstandarisasi di provinsi n

S_{10n} = nilai capaian persentase morbiditas tenaga kerja yang sudah terstandarisasi di provinsi n

S_{11n} = nilai capaian rata-rata lama sekolah penduduk bekerja yang sudah terstandardisasi di provinsi n

S_{12n} = nilai capaian persentase tenaga kerja yang pernah/sedang mengikuti pelatihan yang sudah terstandardisasi di provinsi n

$$Indeks_{(Kompensasi\ dan\ Produktivitas)} = \frac{S_{13n} + S_{14n} + S_{15n} + S_{16n} + S_{17n}}{6}$$

dimana:

S_{13n} = nilai capaian rata-rata upah kategori lapangan usaha industri dan jasa disesuaikan PPP yang sudah terstandardisasi di provinsi n

S_{14n} = nilai capaian produktivitas upah ETK disesuaikan PPP yang sudah terstandardisasi di provinsi n

S_{15n} = nilai capaian ketimpangan upah yang sudah terstandardisasi di provinsi n

S_{16n} = nilai capaian persentase tenaga kerja dengan upah di atas UMP yang sudah terstandardisasi di provinsi n

S_{17n} = nilai capaian persentase tenaga kerja yang terdaftar dalam asuransi ketenagakerjaan yang sudah terstandardisasi di provinsi n

Menghitung indeks daya saing tenaga kerja

Masing-masing dimensi diasumsikan memiliki bobot yang sama (*equal weight*), sama halnya dengan bobot indikator per dimensi. Artinya, dimensi pemberdayaan angkatan kerja (*employability*), kualitas tenaga kerja, serta kompensasi dan produktivitas masing-masing memiliki tingkat kepentingan yang sama. Selanjutnya, indeks daya saing tenaga kerja dapat dihitung dengan merata-ratakan secara aritmetik masing-masing indeks dimensi dengan formula sebagai berikut:

$$Indeks_{Daya\ Saing} = \frac{Indeks_{Employability} + Indeks_{Kualitas\ Tenaga\ Kerja} + Indeks_{Kompensasi\ \&\ Produktivitas}}{3}$$

